



LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 6 Tahun 2014

Seri E Nomor 3

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 6 TAHUN 2014**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA BOGOR TAHUN 2015-2019**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bogor

Nomor 3 Tahun 2014

Seri E

Tanggal 3 November 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
ttd.**

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda**

NIP. 19600910 198003 1 003

WALIKOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA BOGOR TAHUN 2015-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mencapai Visi Misi Kota Bogor dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sesuai Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 yaitu “Kota Jasa yang Nyaman dengan Masyarakat Madani dan Pemerintahan Amanah” perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan bagian integral dari RPJPD dimaksud;

- b. bahwa dengan terpilih dan dilantiknya Walikota dan Wakil Walikota periode 2015-2019 perlu disusun RPJMD Tahun 2015-2019 yang merupakan penjabaran RPJPD dan Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

24. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 160);
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E).
29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);

30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR
dan
WALIKOTA BOGOR**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2015-2019.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
4. Walikota adalah Walikota Bogor.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala OPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Pemerintah Daerah.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
10. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat daerah.
11. Rencana pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah OPD, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, dan Rencana Kerja OPD.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

14. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
21. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
22. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Bappeda.
23. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu program pembangunan secara kualitatif dan kuantitatif.

24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.
25. Efisiensi adalah derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (*output*).
26. Efektivitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan.
27. Kemanfaatan adalah kondisi yang diharapkan akan dicapai apabila keluaran (*output*) dapat diselesaikan tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran, serta berfungsi dengan optimal.
28. Periode pelaporan akhir triwulan pertama adalah tanggal 31 Maret, akhir triwulan kedua adalah tanggal 30 Juni, akhir triwulan ketiga adalah tanggal 30 September, dan akhir triwulan keempat adalah tanggal 31 Desember.
29. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran(*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
30. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJMD merupakan:

- a. penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Walikota, dan arah kebijakan keuangan daerah dengan berpedoman RPJPD;
- b. dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
- c. Dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RPJMD adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam:
 - a. penyusunan Renstra OPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
 - b. penyusunan RKPD;
 - c. penyusunan Renja OPD.
- (2) Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk:
 - a. memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun kedepan;
 - b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
 - c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kota Bogor;
 - d. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;

- e. menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah;
- f. memberikan tolok ukur keberhasilan pembangunan OPD dan Walikota.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RPJMD terdiri dari:

- BAB I : PENDAHULUAN**
Berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, proses penyusunan, serta kedudukan RPJMD terhadap dokumen perencanaan pembangunan lainnya dan sistematika penyusunan.
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**
Memuat gambaran mengenai kondisi geografis, kondisi ekonomi, kondisi sosial budaya, kondisi sarana, prasarana dan penataan ruang, serta kondisi pemerintahan umum.
- BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN**
Memuat gambaran umum APBD 5 (lima tahun) ke belakang, arah kebijakan APBD 5 (lima tahun) ke depan dan perkiraan APBD.
- BAB IV : ANALISIS ISU STRATEGIS**
Memuat isu-isu strategis yang saat ini berkembang maupun isu-isu yang kemungkinan besar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan akan mewarnai perkembangan Kota Bogor.
- BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**
Menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan, dan sasaran dari setiap misi.

- BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat sasaran dan arah kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif.
- BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Memuat kebijakan dan program-program pembangunan daerah beserta sasaran dari masing-masing program pada setiap misi.
- BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Memuat program-program yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran, indikasi program-program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Menjelaskan indikator makro daerah dan indikator kinerja pembangunan daerah tahun 2015-2019 yang ditetapkan berdasarkan uraian program pada masing-masing misi.
- BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
Memuat arahan perencanaan pembangunan tahun 2015 (transisi) setelah periode RPJMD Tahun 2010-2014 berakhir serta prinsip-prinsip dasar dan kaidah pelaksanaan RPJMD tahun 2015-2019.

Pasal 5

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 6

- (1) Visi RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019 adalah “Kota Bogor yang nyaman, beriman dan transparan”.
- (2) Misi RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019 adalah:
 - a. menjadikan Bogor Kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. menjadikan Bogor kota yang sehat dan makmur;
 - c. menjadikan Bogor kota yang berwawasan lingkungan;
 - d. menjadikan Bogor sebagai kota jasa yang berorientasi pada kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
 - e. mewujudkan pemerintah yang bersih dan transparan;
 - f. mengokohkan peran moral agama dan kemanusiaan untuk mewujudkan masyarakat madani.
- (3) Tujuan RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019 adalah :
 - a. Tujuan yang terdapat dalam misi 1
 1. meningkatkan implementasi *E-Government*;
 2. menciptakan lingkungan belajar dengan modal sosial yang kuat;
 3. mendorong proses pengambilan keputusan publik yang cerdas;
 4. mengembangkan kualitas pendidikan dalam upaya mencetak generasi muda yang tangguh dan berkompeten.
 - b. Tujuan yang terdapat dalam misi 2
 1. meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk hidup dan berperilaku sehat;
 2. meningkatkan kualitas permukiman;
 3. merevitaliasi ruang perkotaan yang lebih sehat dan nyaman untuk semua elemen masyarakat (termasuk anak, perempuan, lansia dan difabel);
 4. meningkatkan ketahanan kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

5. meningkatkan produktifitas dan akses masyarakat terhadap kehidupan yang layak.
- c. Tujuan yang terdapat dalam misi 3
1. meningkatkan kualitas penataan ruang;
 2. meningkatkan kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan kota;
 3. mengembangkan transportasi kota yang mengutamakan angkutan umum massal, pejalan kaki dan pesepeda;
 4. mendorong pembangunan kota yang tanggap risiko bencana dan dampak perubahan iklim;
 5. menerapkan pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan.
- d. Tujuan yang terdapat dalam misi 4
1. menjadikan warisan budaya sebagai aset kota;
 2. menguatkan identitas dan citra kota bogor (*city branding*);
 3. mengembangkan pariwisata Kota Bogor yang berkarakter;
 4. mengembangkan iklim ekonomi kreatif.
- e. Tujuan yang terdapat dalam misi 5
1. mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi;
 2. meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar daerah dan internasional;
 3. meningkatkan sinergitas antara pemerintah kota dengan elemen masyarakat;
 4. menguatkan perundangan daerah.
- f. Tujuan yang terdapat dalam misi 6
1. meningkatkan integrasi nilai-nilai agama dan kemanusiaan dalam implementasi kehidupan;
 2. mendorong harmonisasi dan kerukunan antar umat beragama;
 3. mendorong peran lembaga-lembaga agama dan organisasi kemasyarakatan dalam meningkatkan kualitas kehidupan umat.

BAB VI PRIORITAS PEMBANGUNAN

Pasal 7

Prioritas Pembangunan dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 yaitu:

- a. penataan Transportasi dan Angkutan Umum;
- b. penataan Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Kota;
- c. penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL);
- d. penataan Ruang Publik, Taman dan Ruang Terbuka Hijau;
- e. transformasi Karakter Budaya dan Reformasi Birokrasi;
- f. penanggulangan kemiskinan.

BAB VII PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - c. hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 9

Pedoman pengendalian dan evaluasi RPJMD diatur oleh Walikota.

BAB VIII PERUBAHAN RPJMD

Pasal 10

- (1) RPJMD dapat diubah dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. terjadi perubahan yang mendasar meliputi suatu pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan, terjadi bencana alam, atau perubahan kebijakan nasional; atau
 - c. merugikan kepentingan nasional.
- (2) RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan disertai dengan data dan informasi yang akurat kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala OPD.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) perlu disusun Indikator Kinerja Tujuan agar selaras dengan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- (2) Penyusunan Indikator Kinerja Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Walikota yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Walikota berikutnya.
- (3) Dokumen perencanaan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai ditetapkannya dokumen perencanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2010-2014 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 3 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 3 November 2014

**WALIKOTA BOGOR,
ttd.
BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 3 November 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
ttd.
ADE SARIP HIDAYAT**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2014 NOMOR 3 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,**

**N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
Pembina
NIP. 19720918199911001**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT :
(210/2014).**

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR : 6 Tahun 2014
TANGGAL : 3 November 2014
TANGGAL :
AHUN
TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KOTA BOGOR ———TAHUN 2015-2019.

Formatted: Left: 3 cm, Right: 2 cm, Top: 2 cm, Bottom: 2 cm, Width: 21,59 cm, Height: 33 cm, Header distance from edge: 0,2 cm, Footer distance from edge: 0,2 cm

Formatted: Font: English (U.S.)

Formatted Table

Formatted: Font: English (U.S.)

Formatted: Font: English (U.S.)

Formatted Table

Formatted: Font: English (U.S.)

Formatted: Border: Left: (No border)

Formatted: Centered, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single, No bullets or numbering

BAB I. PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

I.1. LATAR BELAKANG

Rencana pembangunan daerah merupakan landasan dalam pelaksanaan pembangunan yang disusun berdasarkan kondisi saat ini beserta dinamika permasalahannya dan mimpi serta cita-cita di masa depan yang disesuaikan dengan kemampuan sumberdaya yang dimiliki. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 (UU 25/2004) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional membagi dokumen perencanaan pembangunan tersebut berdasarkan jangka waktunya, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk periode lima tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun.

Meskipun terbagi berdasarkan jangka waktu, pada prinsipnya perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang harmonis yang mana RPJP menjadi pedoman bagi penyusunan RPJM kemudian RPJM menjadi acuan untuk dokumen lainnya. Kesatuan tersebut tidak hanya antara dokumen perencanaan pembangunan daerah saja, tetapi juga satu kesatuan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan dokumen perencanaan pembangunan nasional. Kesatuan ini akan membuat target pembangunan nasional, target pembangunan provinsi, dan target pembangunan kabupaten/kota dapat dicapai secara sinergis.

UU 25/2004 juga mengamanatkan RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah. RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lintas OPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM Daerah ini selanjutnya menjadi acuan kepala daerah beserta jajarannya dalam melaksanakan pembangunan di Kota Bogor pada periode 2015-2019.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) paling lama enam bulan setelah kepala daerah dilantik. Terpilihnya Kepala Daerah Kota Bogor periode 2015-2019 dan pelantikannya pada bulan April 2014 sekaligus menjadi momentum dimulainya penyusunan RPJM Kota Bogor 2015-2019.

Penyusunan dokumen RPJM Kota Bogor dilakukan dengan berbagai tahapan yang memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, dan *top-down* serta *bottom-up*, dengan melibatkan para pakar/narasumber yang berkompeten di bidangnya, penjaringan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat melalui proses konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan, pembahasan dengan OPD sebagai pelaksana pembangunan, serta konsultasi dengan DPRD Kota Bogor dan Gubernur.

Bogor dengan sejarah panjangnya telah menyanggah berbagai macam predikat di mata nasional maupun mancanegara. Bogor dengan berbagai kelebihannya telah menjadi kota pilihan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, Gubernur Jendral Sir Stamford Raffles, dan Soekarno untuk dijadikan pusat pemerintahan sekaligus tempat peristirahatan. Deretan nama yang disandanginya mulai dari kota terindah di Jawa, tempat peristirahatan, kota dalam taman, kota hujan, menjadi bagian dari karakter Kota Bogor selain posisinya sebagai satelit ibukota negara yang keberadaannya teramat penting.

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Sebagai penyangga ibukota, Bogor berkembang sangat pesat menjawab kebutuhan penduduk dan kawasan di sekitarnya. Pesatnya perkembangan ini disertai dengan berbagai problematika yang muncul. Permasalahan yang selama ini menjadi prioritas dalam 10 tahun terakhir antara lain adalah masalah transportasi, kemiskinan, kebersihan, dan pedagang kaki lima.

Selain memperhatikan keterkaitan dokumen RPJM Kota Bogor ini dengan dokumen perencanaan daerah lainnya, RPJM Kota Bogor juga disusun untuk menjawab isu-isu strategis yang muncul. Keempat isu tersebut, bersama dengan permasalahan daerah lainnya dan perwujudan janji-janji politik Kepala Daerah, menjadi bagian dari pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan oleh pemerintah Kota Bogor selama lima tahun mendatang. Dokumen RPJM merupakan instrumen untuk mengoptimalkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki, dengan pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada secara lebih efektif dan efisien, dalam rangka menjawab berbagai tantangan pembangunan tersebut.

Menjadi harapan bersama bahwa dokumen RPJMD Kota Bogor 2015-2019 ini menjadi instrumen perencanaan sehingga visi “Kota Bogor yang Nyaman, Beriman, dan Transparan” dapat terwujud di akhir tahun perencanaan. Seluruh penjabaran visi Kota Bogor selama lima tahun dalam misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program yang termuat dalam dokumen RPJM ini pada akhirnya menjadi bagian dari upaya mewujudkan Visi RPJP Kota Bogor sebagai “Kota Jasa yang Nyaman dengan Masyarakat Madani dan Pemerintahan Amanah” pada tahun 2025.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan RPJMD Kota Bogor 2015-2019 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Indonesian

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Indent: Left: -0,01 cm, Space Before: 0 pt, After: 6 pt, Line spacing: single

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia— Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 160);
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
- ~~Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);~~
29. ~~1. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E); Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);~~
- ~~2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);~~
- ~~3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);~~
- ~~4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);~~
- ~~5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik~~

Formatted: List Number, Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,75 cm

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,75 cm, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single, Tab stops: Not at 0,63 cm

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: List Number, Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,75 cm

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,75 cm, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single, Tab stops: Not at 0,63 cm

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. ~~Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);~~
 7. ~~Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);~~
 8. ~~Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);~~
 9. ~~Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);~~
 10. ~~Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);~~
 11. ~~Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);~~
 12. ~~Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);~~
 13. ~~Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);~~
 14. ~~Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);~~
 15. ~~Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);~~
 16. ~~Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);~~
 17. ~~Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);~~
 18. ~~Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;~~
 19. ~~Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;~~
 20. ~~Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);~~

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

- ~~24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;~~
- ~~22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;~~
- ~~23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;~~
- ~~24. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);~~
- ~~25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 160);~~
- ~~26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);~~
- ~~27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);~~
- ~~28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);~~
- ~~29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);~~
- ~~30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);~~

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang terencana, pemerintah daerah dalam membuat perencanaan pembangunan mengeluarkan 6 (enam) jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Rencana Kerja OPD (Renja-OPD).

Keenam dokumen tersebut memiliki tiga perbedaan rentang waktu yaitu dokumen perencanaan jangka panjang yang dibuat untuk jangka waktu selama 20 tahun (RPJPD dan RTRW), perencanaan jangka menengah 5 tahun (RPJMD dan Renstra-OPD), serta jangka pendek yang dibuat tahunan (RKPD dan Renja-OPD).

RPJMD Kota Bogor merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Indent: Left: -0,01 cm, Space Before: 0 pt, After: 6 pt, Line spacing: single

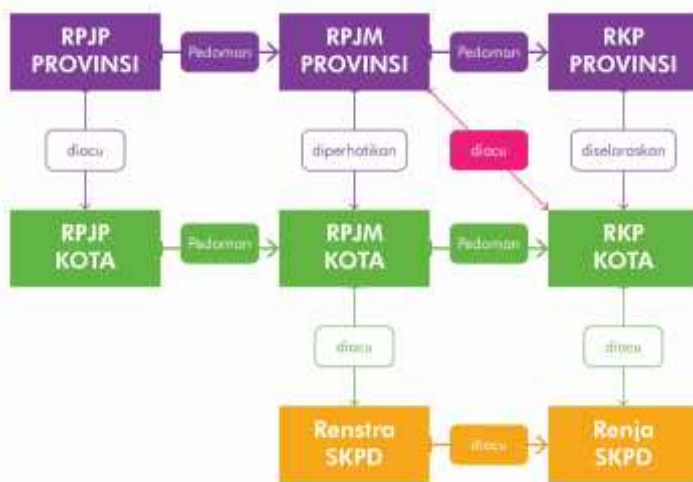
Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Indonesian

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

memperhatikan RPJM Nasional dan Provinsi. RPJM Kota Bogor menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan yakni RKPD sekaligus menjadi acuan bagi OPD dalam menyusun Renstra OPD. Renstra OPD menjadi acuan bagi penyusunan Renja OPD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD. RKPD dan RKA-OPD inilah yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan APBD.

Dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran bersifat hierarkis, artinya dokumen yang jangka waktunya lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen yang jangka waktunya lebih pendek sedangkan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang lebih tinggi menjadi rujukan bagi dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah di bawahnya seperti yang ditunjukkan pada Gambar I. 1



Gambar I. 1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

I.3.1. KONSISTENSI RPJMD KOTA BOGOR DENGAN RPJMD PROVINSI JAWA BARAT

Kota Bogor merupakan satu diantara 27 kota/kabupaten yang menjadi bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat. Bersama Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi, dan Kota Depok, Kota Bogor berada dibawah koordinasi Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP) Wilayah I Jawa Barat. Dalam mewujudkan keterpaduan dan sinergitas pembangunan, maka perencanaan pembangunan setiap daerah diharapkan dapat sinergis dengan perencanaan pembangunan daerah lain dan mengacu juga pada perencanaan pembangunan provinsi yang menaunginya. Dan untuk mengukur sejauh mana perencanaan pembangunan Kota Bogor mengacu pada perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat, maka dapat dilihat dari konsistensi RPJMD Kota Bogor dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya dijelaskan pada uraian berikut.

I.3.1.1. KONSISTENSI ISU STRATEGIS

Salah satu bagian dokumen RPJMD memuat isu strategis yang dijadikan salah satu dasar untuk menentukan program-program yang dijalankan selama lima tahun. Terdapat 17 isu strategis yang termuat di dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018 dan terdapat 12 isu strategis yang termuat di dalam RPJMD Kota Bogor 2015-2019. Dari 12 isu strategis RPJMD Kota Bogor, terdapat sembilan isu strategis yang berkorelasi dengan isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Barat. Artinya, 75% isu strategis Kota Bogor telah berkorelasi dengan isu strategis provinsi. Isu-isu strategis tersebut ditunjukkan pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel I. ~~1111~~ Konsistensi Isu Strategis RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018 terhadap Isu Strategis RPJMD Kota Bogor 2015-2019

ISU STRATEGIS RPJMD PROVINSI JABAR 2013-2018	ISU STRATEGIS RPJMD KOTA BOGOR 2015-2019
Pertumbuhan penduduk dan persebarannya.	Mobilitas Penduduk yang Aman, Efektif, Pertumbuhan Penduduk yang Tinggi.
1.4.4. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan	1.4.2. Pengembangan Sektor Unggulan dan Penataan, Penertiban, dan Pemberdayaan
Kualitas lingkungan hidup untuk mendukung terwujudnya <i>Jabar Green Province</i> .	Pencemaran Lingkungan dan Perubahan Iklim Mikro.
Kecepatan dan ketepatan penanganan bencana serta adaptasi masyarakat terhadap bencana.	Ancaman dan Penanggulangan Bencana.
Pemerintahan daerah yang efektif dan Pelestarian nilai – nilai dan warisan	Pengelolaan Kota Berbasis Smart City, Warisan Budaya yang Mengakar sebagai
Pengembangan Industri Wisata Jawa	Pengembangan Kepariwisata.
Penanggulangan penduduk miskin.	Penurunan Fakir Miskin dan Anak
Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Terlantar.

Selain isu-isu strategis di atas, provinsi memiliki isu-isu strategis lain yaitu:

1. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan;
2. Pengangguran dan ketenagakerjaan;
3. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis;
4. Kualitas demokrasi;
5. Pasar global dan *Asean-China Free Trade Area* (ACFTA);
6. Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dan penertiban okupasi lahan tidur (HGU);
7. Ketahanan pangan; dan
8. Keamanan dan ketertiban daerah.

Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan di Kota Bogor pada dasarnya masih memiliki permasalahan yang terletak pada masalah pemerataan di wilayah-wilayah kelurahan tertentu saja, sama halnya pada isu pengangguran dan ketenagakerjaan serta isu kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis. Pembangunan infrastruktur yang menjadi perhatian adalah pembangunan yang pesat di wilayah pusat kota yang dinilai belum sepenuhnya memperhatikan kondisi daya dukung wilayah dan kesesuaiannya dengan keberadaan Kebun Raya Bogor sebagai salah satu *landmark* dan *benchmark*.

Pada isu kualitas demokrasi, walau tidak tercantum pada isu strategis RPJMD Kota Bogor, namun hal tersebut dilakukan dengan upaya mendorong proses pengambilan keputusan publik yang cerdas sebagaimana tercantum dalam salah satu tujuan dari penjabaran visi dan misi Kota Bogor lima tahun ke depan. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran yang meliputi proses perencanaan dan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat, yang disertai peningkatan sarana pengaduan masyarakat.

Dalam menghadapi isu Pasar global dan *Asean-China Free Trade Area* (ACFTA), Kota Bogor fokus pada pengembangan basis-basis industri kreatif yang selama ini belum dikembangkan secara optimal. Keberadaan produk-produk unggulan dinilai belum cukup beragam dan belum memiliki nilai tambah dibanding dengan kabupaten/kota lain. Hal tersebut disertai upaya dalam pengembangan sumber daya manusia yang didorong pembinaannya di tingkat kelurahan melalui keberadaan saung-saung kreatif, sehingga diharapkan mampu mencetak para tenaga kerja kreatif yang berdaya saing.

- Formatted ... [2]
- Formatted ... [3]
- Formatted ... [1]
- Formatted ... [4]
- Formatted ... [5]
- Formatted Table ... [6]
- Formatted ... [7]
- Formatted ... [8]
- Formatted ... [10]
- Formatted ... [9]
- Formatted ... [11]
- Formatted ... [12]
- Formatted ... [13]
- Formatted ... [14]
- Formatted ... [17]
- Formatted ... [15]
- Formatted ... [18]
- Formatted ... [19]
- Formatted ... [16]
- Formatted ... [20]
- Formatted ... [21]
- Formatted ... [22]
- Formatted ... [24]
- Formatted ... [25]
- Formatted ... [23]
- Formatted ... [26]
- Formatted ... [27]
- Formatted ... [29]
- Formatted ... [30]
- Formatted ... [28]
- Formatted ... [31]
- Formatted ... [32]
- Formatted ... [34]
- Formatted ... [35]
- Formatted ... [33]
- Formatted ... [36]
- Formatted ... [37]
- Formatted ... [39]
- Formatted ... [38]
- Formatted ... [40]
- Formatted ... [41]
- Formatted ... [42]
- Formatted ... [44]
- Formatted ... [45]
- Formatted ... [43]
- Formatted ... [46]
- Formatted ... [47]
- Formatted ... [48]
- Formatted ... [49]
- Formatted ... [50]
- Formatted ... [51]
- Formatted ... [52]
- Formatted ... [53]
- Formatted ... [54]
- Formatted ... [55]
- Formatted ... [56]
- Formatted ... [57]
- Formatted ... [58]

Perkembangan wilayah perkotaan, mendorong Kota Bogor secara pesat mengalami laju alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian. Walaupun basis pertanian tidak menjadi sektor unggulan, namun RPJMD Kota Bogor mendorong berkembangnya agribisnis perkotaan sebagaimana tercantum pada salah satu sasaran yang dirumuskan. Begitu halnya dengan isu ketahanan pangan yang mana RPJMD Kota Bogor lebih menitikberatkan pada pendistribusian dan pengamanan harga, yang kemudian dirumuskan ke dalam salah satu sasaran yaitu “Terjaminnya kualitas dan kebutuhan pangan masyarakat”.

Secara umum isu keamanan dan ketertiban daerah di Kota Bogor dinilai relatif kondusif. Namun demikian, antisipasi dan perhatian terhadap isu tersebut dirumuskan ke dalam tujuan “Meningkatkan integrasi nilai-nilai agama dan kemanusiaan dalam implementasi kehidupan” dan tujuan “Mendorong harmonisasi dan kerukunan antar umat beragama”.

Secara khusus, terdapat dua isu strategis yang menjadi perhatian RPJMD Kota Bogor yang tidak berkorelasi langsung dengan isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Barat meliputi:

1. Ketidaksihinggaan antara pemanfaatan ruang dengan rencana,
2. Penguatan citra Kota Bogor (*city branding*).

Sebagai salah satu kota besar baik di wilayah Provinsi Jawa Barat maupun Indonesia, Kota Bogor mengalami pembangunan yang sangat pesat. Arus pembangunan cenderung mengimbangi kebutuhan pusat sebagaimana letak geografis Kota Bogor yang menjadi salah satu kota satelit DKI Jakarta. Hal yang dikhawatirkan adalah terdapatnya pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan sebagaimana sering dikeluhkan oleh masyarakat saat ini. Perkembangan tersebut di sisi lain dapat menghilangkan karakter kota yang seharusnya dapat menjadi aset dan menjadi ciri khas Kota Bogor dibandingkan kota lain. Hal tersebut yang kemudian menjadi rumusan dan penekanan isu strategis RPJMD Kota Bogor sehingga menjadi isu strategis yang unik dibanding isu strategis provinsi.

1.3.1.2. KONSISTENSI JANJI GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP JANJI WALIKOTA BOGOR

RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih, sehingga dalam penyusunannya juga mengakomodir janji kepala daerah saat melakukan kampanye. Terdapat konsistensi janji politik antara Walikota dan Kota Bogor dan Gubernur Provinsi Jawa Barat sehingga pemenuhan akan janji-janji tersebut dapat terintegrasi.

Tabel II. 2222 Konsistensi Janji Gubernur Jawa Barat terhadap Janji Walikota Bogor

JANJI GUBERNUR JAWA BARAT	JANJI WALIKOTA BOGOR
Pendidikan Gratis SD, SLTP dan SLTA di Seluruh Jawa Barat Serta Pembangunan 20.000 Ruang Kelas Baru.	Sekolah gratis 12 tahun.
Beasiswa pendidikan untuk Pemuda, Tenaga Medis, Serta Keluarga Atlit Berprestasi dan Guru.	Pemerataan ketersediaan SD, SMP, SMA Menyediakan buku paket pelajaran.
Revitalisasi Posyandu dan Dana Operasional Kader Posyandu.	Beasiswa bagi guru dan pelajar pada jenjang dasar dan menengah sebanyak 100 orang per tahun.
Membuka 2 Juta Serapan Tenaga Kerja Barudan Mencetak 100.000 Wirausahawan Baru Jawa Barat.	Peningkatan pelayanan Posyandu, Peningkatan BOP bagi Kader Posyadu.
Alokasi 4 Triliyun Untuk Infrastruktur Rehabilitasi 100.000 Rumah Rakyat Pembangunan Pusat Seni dan Budaya Pembangunan Gelanggang Olahraga di	Menyediakan ruang-ruang yang dapat memfasilitasi tumbuh berkembangnya kreatifitas dan jejaring ekonomi kreatif di setiap kelurahan.
	Pengurangan kemiskinan dan Meningkatkan kreatifitas melalui Meningkatkan sarana prasarana

- Formatted ... [59]
- Formatted ... [60]
- Formatted ... [61]
- Formatted ... [62]
- Formatted ... [63]
- Formatted ... [64]
- Formatted ... [65]
- Formatted ... [66]
- Formatted ... [67]
- Formatted ... [68]
- Formatted ... [69]
- Formatted ... [70]
- Formatted ... [71]
- Formatted ... [72]
- Formatted ... [73]
- Formatted ... [74]
- Formatted ... [76]
- Formatted ... [77]
- Formatted ... [78]
- Formatted ... [75]
- Formatted ... [79]
- Formatted ... [80]
- Formatted ... [81]
- Formatted ... [82]
- Formatted ... [83]
- Formatted ... [85]
- Formatted ... [84]
- Formatted ... [86]
- Formatted ... [87]
- Formatted ... [90]
- Formatted ... [91]
- Formatted ... [88]
- Formatted ... [89]
- Formatted ... [92]
- Formatted ... [93]
- Formatted ... [94]
- Formatted ... [95]
- Formatted ... [97]
- Formatted ... [96]
- Formatted ... [98]
- Formatted ... [99]
- Formatted ... [100]
- Formatted ... [102]
- Formatted ... [103]
- Formatted ... [101]
- Formatted ... [104]
- Formatted ... [105]
- Formatted ... [107]
- Formatted ... [106]
- Formatted ... [108]
- Formatted ... [109]
- Formatted ... [110]
- Formatted ... [112]
- Formatted ... [111]
- Formatted ... [113]
- Formatted ... [114]
- Formatted ... [115]
- Formatted ... [117]
- Formatted ... [116]
- Formatted ... [118]

Salah satu pembagian peran yang ditunjukkan pada tabel di atas adalah pada janji gubernur yang mendorong Pembangunan Pusat Seni dan Budaya Jawa Barat di Kabupaten/Kota, diimbangi janji walikota dalam upaya meningkatkan kreatifitas melalui penyelenggaraan event-event kreatif. Sedangkan satu-satunya janji gubernur yang tidak berkorelasi langsung dengan janji walikota terdapat pada Alokasi 4 Triliyun Untuk Infrastruktur Desa dan Perdesaan. Walaupun tidak berkorelasi langsung, namun pada penerapan di wilayah perkotaan seperti Kota Bogor, janji walikota mencoba mengimbangnya dengan melakukan peningkatan dan peran serta kecamatan serta kesiapan kelurahan melalui butir-butir janji walikota yang antara lain meliputi:

1. Pengembangan Puskesmas Induk Rawat Inap di setiap kecamatan;
2. Percepatan infrastruktur daerah;
3. Peningkatan pelayanan publik hingga tingkat kelurahan; dan
4. Transparansi APBD melalui penyediaan akses informasinya di setiap kelurahan.

4. 1.3.1.3. KONSISTENSI TERHADAP COMMON GOALS RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013-2018

Salah satu rumusan RPJMD Provinsi adalah memuat *common goals* yang akan dicapai dalam jangka pembangunan lima tahun ke depan, yang mana hal tersebut menjadi tujuan pembangunan yang harus dipenuhi oleh program-program pembangunan daerah di berbagai sektor. Penentuan tujuan tersebut didasari oleh rumusan visi-misi kepala daerah dengan mempertimbangkan isu strategis yang dimiliki daerah tersebut. Konsistensi dalam pemenuhan tujuan pembangunan daerah antara RPJMD Kota Bogor terhadap RPJMD Provinsi Jawa Barat ditunjukkan pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel I. 3333. Konsistensi *Common Goals* RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018 terhadap Tujuan RPJMD Kota Bogor 2015-2019.

COMMON GOALS RPJMD PROVINSI JAWA BARAT 2013-2018	TUJUAN RPJMD KOTA BOGOR 2015-2019
Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan.	Mengembangkan kualitas pendidikan dalam upaya mencetak generasi muda yang tangguh dan berkompoten.
Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan.	Meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk hidup dan berperilaku sehat.
Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku.	4.3. Meningkatkan kualitas permukiman. Merevitalisasi ruang perkotaan yang lebih sehat dan nyaman untuk semua elemen masyarakat (termasuk anak, perempuan, lansia, dan difabel).
Ekonomi Pertanian.	-
Ekonomi Non Pertanian.	Mengembangkan iklim ekonomi kreatif.
Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Kebencanaan.	Meningkatkan kualitas daya dukung lingkungan kota. Menerapkan pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan. Mendorong pembangunan kota yang tanggap risiko bencana dan dampak perubahan iklim.
Pengelolaan Seni, Budaya, Wisata, serta Kepemudaan dan Olahraga.	Mengembangkan kualitas pendidikan dalam upaya mencetak generasi muda yang tangguh dan berkompoten.
Ketahanan Keluarga dan Kependudukan.	Meningkatkan produktifitas dan akses masyarakat terhadap penghidupan yang layak.

- Formatted: Font: 6 pt
- Formatted: ISI, Indent: First line: 1 cm
- Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Indonesian
- Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt
- Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,5 cm, Space After: 0 pt, Tab stops: Not at 1,27 cm
- Formatted: English (U.S.)
- Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt
- Formatted: Indent: Left: 0,5 cm, Space After: 0 pt, No bullets or numbering
- Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto
- Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 1,75 cm, Space Before: 0 pt, After: 6 pt, Line spacing: single
- Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt
- Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Indonesian
- Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt
- Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt
- Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Check spelling and grammar
- Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt
- Formatted: Font: Bookman Old Style, 11 pt
- Formatted: Font: Bookman Old Style, 11 pt
- Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt
- Formatted: Font: Bookman Old Style, 11 pt
- Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt
- Formatted: None, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, No bullets or numbering, Tab stops: Not at 1,25 cm
- Formatted: Font: Bookman Old Style, 11 pt
- Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt
- Formatted: Font: Bookman Old Style, 11 pt
- Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt
- Formatted: Font: Bookman Old Style, 11 pt
- Formatted: ... [119]
- Formatted: ... [120]
- Formatted: ... [121]
- Formatted: ... [122]
- Formatted: ... [123]

COMMON GOALS RPJMD PROVINSI JAWA BARAT 2013-2018	TUJUAN RPJMD KOTA BOGOR 2015-2019
Kemiskinan, PMKS, dan Keamanan.	Meningkatkan ketahanan kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Modernisasi Pemerintahan dan Pembangunan Pedesaan.	1.4.4. Meningkatkan implementasi e-government. Menciptakan lingkungan belajar dengan modal sosial yang kuat.

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat konsistensi antara *common goals* dari Provinsi Jawa Barat dengan tujuan-tujuan yang terdapat dalam RPJMD Kota Bogor. Meskipun demikian, tetap terdapat penyesuaian-penyesuaian berdasarkan atas karakteristik Kota Bogor. Sebagai contoh, satu *common goal* dari provinsi adalah soal ekonomi pertanian, dan mengingat karakteristik Kota Bogor, maka yang hendak disasar dalam RPJMD Kota Bogor adalah “Berkembangnya agribisnis perkotaan”. Konsistensi ini akan mendorong keterpaduan pembangunan antara Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat.

I.3.1.4. TARGET RPJMD PROVINSI JAWA BARAT UNTUK KOTA BOGOR

Dalam merealisasikan target-target Provinsi Jawa Barat pada jangka waktu pembangunan menengah hingga tahun 2018, terdapat target-target yang diharapkan dapat dipenuhi oleh setiap wilayah kabupaten/kota termasuk Kota Bogor. Konsistensi target tersebut diperbandingkan dengan indikator makro Kota Bogor, dimana indikator makro kota ini disesuaikan dengan pola data pada tahun-tahun sebelumnya. Perbandingan target-target tersebut sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel I. 4444 Target RPJMD Provinsi Jawa Barat Untuk Kota Bogor.

NO	KABUPATEN/ KOTA	REALISASI 2012 PUBLIKA SI BPS	TARGET		PROYEKSI KOTA BOGOR	
			2016	2018	2016	2018
1	Realisasi dan Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,47	77,89	78	77,57	78,16
1.1.40	1.1.41. Realisasi dan Target Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	9,81	11,04	11,5	10,02	10,11
1.1.47	1.1.48. Realisasi dan Target Angka Melek Huruf (AMH)	98,97	99,3	99,8	99,15	99,26
1.1.24	1.1.25. Realisasi dan Target Angka Harapan Hidup (AHH)	69,07	70,64	71,6	69,51	69,73
1.1.31	1.1.32. Realisasi dan Target Daya Beli Masyarakat (Purchasing Power Parity/PPP)	65,5	65,7,2	65,58	663,45	668,46
1.1.38	1.1.39. Realisasi dan Target Kemiskinan	8,47	5,97	5,5	6,83 - 7,83	6,40 - 7,40

- Formatted ... [124]
- Formatted ... [125]
- Formatted ... [126]
- Formatted ... [127]
- Formatted ... [128]
- Formatted ... [129]
- Formatted ... [130]
- Formatted ... [131]
- Formatted ... [132]
- Formatted ... [133]
- Formatted ... [134]
- Formatted ... [135]
- Formatted ... [136]
- Formatted ... [139]
- Formatted ... [140]
- Formatted ... [141]
- Formatted ... [138]
- Formatted ... [137]
- Formatted ... [142]
- Formatted ... [143]
- Formatted ... [145]
- Formatted ... [146]
- Formatted ... [147]
- Formatted ... [148]
- Formatted ... [144]
- Formatted ... [149]
- Formatted ... [150]
- Formatted ... [151]
- Formatted ... [152]
- Formatted ... [153]
- Formatted ... [156]
- Formatted ... [157]
- Formatted ... [158]
- Formatted ... [159]
- Formatted ... [154]
- Formatted ... [155]
- Formatted ... [160]
- Formatted ... [161]
- Formatted ... [162]
- Formatted ... [163]
- Formatted ... [164]
- Formatted ... [165]
- Formatted ... [166]
- Formatted ... [167]
- Formatted ... [168]
- Formatted ... [169]
- Formatted ... [170]
- Formatted ... [171]
- Formatted ... [172]
- Formatted ... [173]
- Formatted ... [174]
- Formatted ... [175]
- Formatted ... [176]
- Formatted ... [177]
- Formatted ... [178]
- Formatted ... [179]
- Formatted ... [180]
- Formatted ... [181]
- Formatted ... [182]
- Formatted ... [183]
- Formatted ... [184]
- Formatted ... [185]
- Formatted ... [186]
- Formatted ... [187]
- Formatted ... [188]
- Formatted ... [189]
- Formatted ... [190]
- Formatted ... [191]

NO	KABUPATEN/ KOTA	REALISASI 2012 PUBLIKASI SI BPS	TARGET		PROYEKSI KOTA BOGOR	
			2016	2018	2016	2018
I.4.45.	I.4.46. Realisasi dan Target Laju Pertumbuhan Ekonomi tanpa Minyak dan Gas	I.4.47. 6,2	I.4.48. 6,05	I.4.49. 6,05	I.4.50. 5,3 - 6,3	I.4.51. 5,1 - 6,1

Memperhatikan tabel di atas, terdapat sedikit perbedaan antara target-target provinsi dengan proyeksi indikator makro Kota Bogor. Target provinsi yang lebih rendah dibanding proyeksi Kota Bogor terdapat pada indikator IPM dan PPP, sedangkan target provinsi yang lebih tinggi dibanding proyeksi Kota Bogor terdapat pada indikator RLS, AMH, AHH, dan kemiskinan. Untuk laju pertumbuhan ekonomi, target provinsi tidak dapat dikatakan lebih tinggi atau lebih rendah karena Kota Bogor menetapkan proyeksinya dalam rentang.

Perbedaan tersebut dikarenakan proyeksi ini dibangun berdasarkan pola data sebelumnya dan keterkaitan antar indikator makro lainnya. Meskipun terdapat perbedaan, angkanya tidak terlalu signifikan sehingga pemenuhan proyeksi indikator makro Kota Bogor diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian target-target Provinsi Jawa Barat.

I.3.2. KONSISTENSI RPJM KOTA BOGOR DENGAN RPJP KOTA BOGOR

Dalam penyusunan RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019 diperlukan adanya konsistensi antara RPJM Kota Bogor dengan RPJPD Kota Bogor. Konsistensi antara RPJPD Kota Bogor dan RPJMD Kota Bogor dapat dilakukan dengan memperbandingkan antara sasaran pokok dalam dokumen RPJPD Kota Bogor dengan Visi dan Misi Kepala Daerah serta Program dalam RPJMD Kota Bogor. Sasaran Pokok RPJPD Kota Bogor merupakan penjabaran dari Misi yang terdapat dalam RPJPD Kota Bogor. Terdapat 21 sasaran pokok dalam dokumen RPJPD Kota Bogor yang dapat dilihat pada [Tabel I. 5](#)[Tabel I. 5](#)[Tabel I. 5](#).

Tabel I. 5 Sasaran Pokok RPJP Kota Bogor

MISI RPJPD KOTA BOGOR	SASARAN POKOK RPJPD KOTA BOGOR
MISI 1. BERKEMBANGNYA PEREKONOMIAN MASYARAKAT DENGAN TITIK BERAT PADA JASA YANG MENOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA YANG ADA	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pada seluruh sektor ekonomi terutama sektor jasa yang menjadi basis aktifitas ekonomi Meningkatnya kompetensi, produktifitas, penempatan, perlindungan dan pengawasan tenaga kerja Meningkatnya keterkaitan antar sektor dalam suatu sistem yang produktif Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, investasi di daerah, nilai ekspor produk serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor Tersedianya penunjang perkembangan ekonomi dalam bentuk regulasi yang

- Formatted ... [209]
- Formatted ... [211]
- Formatted ... [212]
- Formatted ... [213]
- Formatted ... [214]
- Formatted ... [210]
- Formatted ... [207]
- Formatted ... [206]
- Formatted ... [208]
- Formatted ... [215]
- Formatted ... [216]
- Formatted ... [218]
- Formatted ... [219]
- Formatted ... [220]
- Formatted ... [221]
- Formatted ... [222]
- Formatted ... [223]
- Formatted ... [224]
- Formatted ... [225]
- Formatted ... [217]
- Formatted ... [226]
- Formatted ... [237]
- Formatted ... [239]
- Formatted ... [227]
- Formatted ... [228]
- Formatted ... [229]
- Formatted ... [231]
- Formatted ... [233]
- Formatted ... [235]
- Formatted ... [232]
- Formatted ... [234]
- Formatted ... [236]
- Formatted ... [238]
- Formatted ... [240]
- Formatted ... [230]
- Formatted ... [241]
- Formatted ... [242]
- Formatted ... [243]
- Formatted ... [244]
- Formatted ... [245]
- Formatted ... [246]
- Formatted ... [247]
- Formatted ... [248]
- Formatted ... [249]
- Formatted ... [250]
- Formatted ... [251]
- Formatted ... [252]
- Formatted ... [253]
- Formatted ... [254]
- Formatted ... [255]
- Formatted ... [256]
- Formatted Table ... [257]
- Formatted ... [258]
- Formatted ... [259]
- Formatted ... [260]
- Formatted ... [261]
- Formatted ... [262]
- Formatted ... [263]
- Formatted ... [264]
- Formatted ... [265]

MISI RPJPD KOTA BOGOR

SASARAN POKOK RPJPD KOTA BOGOR

efektif, pembiayaan yang berkelanjutan, sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi tinggi dan tepat guna, jaringan distribusi yang efektif dan efisien serta sistem informasi yang handal
Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga mencapai tingkat kesejahteraan pada tahun 2025.

MISI 2.
TERWUJUDNYA KOTA YANG BERSIH, INDAH, TERTIB DAN AMAN (BERIMAN) DENGAN SARANA DAN PRASARANA PERKOTAAN YANG MEMADAI DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat
Terbangunnya konsep pembangunan yang nyaman dan berwawasan lingkungan
Meningkatnya penataan ruang dan pertanahan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan termasuk perlindungan masyarakat dari bencana
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kota
Meningkatnya keseimbangan antara jumlah penduduk terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan
Terkendalinya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang efektif, efisien dan bernilai tambah

MISI 3.
MENINGKATNYA KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERIMAN, BERKETERAMPILAN, SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA

Terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki watak dan perilaku yang berbudi pekerti luhur, cerdas, toleran, gotong royong, dinamis dan berorientasi iptek
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, antara lain ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM)
Meningkatnya peran serta pemuda dalam semua sektor pembangunan dan IPTEK
Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender

MISI 4.
TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN KOTA YANG EFEKTIF DAN EFFISIEN SERTA MENJUNJUNG TINGGI SUPREMASI HUKUM

Terwujudnya kehidupan politik yang demokratis serta meningkatnya kinerja perangkat daerah dengan meningkatkan profesionalisme aparatur dan transparansi secara partisipatif, akuntabel di dalam pelaksanaan pemerintahan
Terciptanya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur berdasarkan pemerintahan yang berlandaskan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat sipil dan masyarakat politik
Terciptanya supremasi hukum serta tertatanya sistem hukum daerah yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Formatted Table

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Indonesian

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Left, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Left, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Indonesian

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Left, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt

MISI RPJPD KOTA BOGOR

SASARAN POKOK RPJPD KOTA BOGOR

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan yang didukung kondisi politik yang demokratis berbasis etika



Gambar I. 2. Persentase Ketermuatan Sasaran Pokok RPJPD Kota Bogor Dalam RPJMD Kota Bogor

Seperti yang tertera pada Gambar I. 2, dari 21 sasaran pokok sebanyak 19 sasaran pokok RPJPD (90%) telah termuat dalam RPJMD. Sasaran pokok RPJPD yang tidak termuat dalam RPJMD yaitu:

1. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender;
2. Tersedianya penunjang perkembangan ekonomi dalam bentuk regulasi yang efektif, pembiayaan yang berkelanjutan, sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi tinggi dan tepat guna, jaringan distribusi yang efektif dan efisien serta sistem informasi yang handal.

Berdasarkan keterkaitan ini, dapat dinyatakan bahwa RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019 sudah konsisten dengan RPJPD Kota Bogor dengan persentase kesesuaiannya sebesar 90 persen. Hal ini sangat mendukung ketercapaian tahapan pembangunan jangka panjang khususnya tahapan ke-3.

Tahapan pembangunan jangka panjang terbagi menjadi lima tahapan dan RPJMD tahun 2015-2019 merupakan RPJMD Daerah tahapan ke-3. Dalam tahapan ini ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh baik dalam bidang ekonomi, bidang fisik dan prasarana, bidang sosial budaya dan bidang hukum, pemerintahan dan politik. Berikut arah pembangunan dari empat misi yang terdapat di RPJPD.

MISI 1: MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DENGAN TITIK BERAT PADA JASA YANG MENOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA YANG ADA.

NO	ARAH PEMBANGUNAN	2015 - 2019
1	Perekonomian dikembangkan dengan memperkuat perekonomian lokal agar berdaya saing tinggi untuk menghadapi tantangan global.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Mengembangkan sektor tersier sebagai sektor unggulan. ▶ PDRB Rp. 6.590.212,83 (juta) ▶ Indeks Daya Beli 69,06
2	Interaksi antar daerah didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar daerah yang kokoh. Upaya tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar mengelola peningkatan produktivitas melalui	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Terbangunnya kemitraan dengan wilayah-wilayah dan/atau organisasi lain, pengembangan ekonomi dalam skala regional, nasional

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Formatted Table

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Check spelling and grammar

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Indonesian

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Indonesian

Formatted: Indent: First line: 1 cm, Space Before: 0 pt, After: 6 pt, Line spacing: single

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Indonesian

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Indonesian

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Indonesian

Formatted: Justified, Indent: Left: 0 cm, Hanging: 1,65 cm, Right: 0,09 cm, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single

Formatted: Font: Bookman Old Style, Indonesian

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Formatted Table

Formatted: Centered, Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted ... [266]

Formatted ... [267]

Formatted ... [269]

Formatted ... [270]

Formatted ... [268]

Formatted ... [271]

Formatted ... [272]

Formatted ... [273]

Formatted ... [274]

NO	ARAH PEMBANGUNAN	2015 – 2019
	inovasi, penguasaan, penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK menuju ekonomi berbasis pengetahuan serta kemandirian secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.	
3	Kelembagaan ekonomi dikembangkan sesuai dengan kemajuan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di dalam menyusun kerangka regulasi dan perizinan yang efisien, efektif dan non diskriminatif, menjaga, mengembangkan dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat serta melindungi konsumen, meningkatkan daya saing, merumuskan strategi dan kebijakan pengembangan teknologi, meningkatkan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi untuk memperkuat basis ekonomi daerah.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Peningkatan bantuan teknis dan keuangan kepada KUMKM dalam upaya membangun Pusat Bisnis Berwawasan Lingkungan
4	Menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui regulasi perizinan yang lebih efektif dan efisien, serta peningkatan infrastruktur sebagai penunjang investasi.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pemantapan regulasi bagi peningkatan investasi ▶ Mempertahankan iklim investasi yang kondusif ▶ Terciptanya dan tersedianya paket-paket insentif bersaing bagi investasi ▶ Peningkatan promosi investasi, untuk menarik investor
5	Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya lapangan kerja formal dan meningkatkan kesejahteraan pekerja informal.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Penjaminan keselamatan dan keamanan kerja
6	Pekerja diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi dengan pelatihan peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai investasi sumber daya manusia.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pelatihan ketrampilan, kewirausahaan dan peningkatan produktivitas ▶ Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang mendukung produktivitas dan nilai tambah tenaga kerja ▶ Peningkatan daya saing tenaga kerja melalui standarisasi dan sertifikasi. ▶ Meningkatkan Pembinaan lembaga pelatihan swasta dan pemerintah
7	Di sektor primer diarahkan kepada peningkatan nilai tambah dan daya saing produk-produk pertanian	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Menjaga tingkat ketahanan pangan serta pemantapan agribisnis yang

- Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt
- Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt
- Formatted: Centered, Space Before: 0 pt, After: 0 pt
- Formatted Table
- Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt
- Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)
- Formatted: Justified, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)
- Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Not Bold, Font color: Auto
- Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt
- Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)
- Formatted: Justified, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)
- Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt
- Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt
- Formatted: Justified, Space Before: 0 pt, After: 0 pt
- Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt
- Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)
- Formatted: Justified, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)
- Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt
- Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)
- Formatted: Justified, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

NO	ARAH PEMBANGUNAN	2015 – 2019
	melalui pelaksanaan pertanian yang baik berkenaan dengan penguatan ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan.	berdaya saing, berkerakyatan dan berkelanjutan
8	Di sektor sekunder diarahkan kepada peningkatan daya saing industri pengolahan dengan cara peningkatan kualitas.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pemberdayaan produk lokal dan pengembangan pasar dalam negeri ▶ Pembangunan wilayah industri yang berwawasan lingkungan
9	Di sektor tersier diprioritaskan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di Kota Bogor terutama Jasa Perdagangan, Hotel dan Restoran, Jasa Angkutan dan Komunikasi, Jasa Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan serta jasa lainnya.	▶ Pengelolaan kawasan bisnis dan perdagangan
10	Kepariwisata dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan perluasan lapangan kerja dengan mengembangkan potensi wisata yang ada.	▶ Pengayaan obyek wisata yang ada dengan peningkatan aksesibilitas fasilitas sosial dan fasilitas umum serta membangun sistem dan jejaring pemasaran wisata yang kokoh
11	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diarahkan agar menjadi pelaku ekonomi yang berbasis IPTEK dan berdaya saing, khususnya dalam menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi yang nyata untuk memperkuat perekonomian lokal. Pengembangan UMKM dilakukan melalui peningkatan kompetensi dan penguatan kewirausahaan serta peningkatan produktivitas yang berorientasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil serta inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Meningkatkan keterlibatan swasta melalui CSR untuk mendukung pengembangan ekonomi UMKM ▶ Pemberdayaan UMKM melalui peningkatan akses pasar

MISI 2: MEWUJUDKAN KOTA YANG BERSIH, INDAH, TERTIB DAN AMAN (BERIMAN) DENGAN SARANA PRASARANA PERKOTAAN YANG MEMADAI DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN.

NO	ARAH PEMBANGUNAN	2015 – 2019
1	Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan melalui penataan ruang dan pertanahan yang terintegrasi secara nasional, regional, maupun lokal menuju kota metropolitan yang nyaman	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pemantapan penyelenggaraan tata ruang ▶ Pemantapan sistem informasi data spasial daerah
2	Mewujudkan penataan kota secara menyeluruh untuk membentuk wajah dan lingkungan kota yang	▶ Revitalisasi kawasan pusat kota dan kawasan wisata

- Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt
- Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt
- Formatted: Centered, Space Before: 0 pt, After: 0 pt
- Formatted Table
- Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt
- Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)
- Formatted: Justified, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)
- Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt
- Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)
- Formatted: Justified, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)
- Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Not Bold, Font color: Auto
- Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt
- Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)
- Formatted ... [275]
- Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt
- Formatted ... [276]
- Formatted ... [277]
- Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt
- Formatted ... [278]
- Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Indonesian
- Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single
- Formatted: Font: Bookman Old Style, Font color: Auto
- Formatted ... [279]
- Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt
- Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt
- Formatted Table
- Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt
- Formatted ... [280]
- Formatted ... [281]
- Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt
- Formatted ... [282]
- Formatted ... [283]

NO	ARAH PEMBANGUNAN	2015 – 2019	
	beridentitas dan berbudaya yang mendukung kenyamanan dan daya tarik wisata		Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt Formatted Table
3	1.1.52. Mewujudkan sistem transportasi yang mendukung aksesibilitas kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya melalui penyelenggaraan transportasi yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta bersinergi dengan tata ruang	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Peningkatan dan kemantapan infrastruktur transportasi ▶ Pengembangan transportasi massal ▶ Penataan angkutan umum ▶ Pengembangan transportasi ramah lingkungan ▶ Pengembangan prasarana transportasi ▶ Penataan lalu lintas 	Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt Formatted: Space After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border) Formatted [284] Formatted [286] Formatted [287] Formatted [288] Formatted [289]
4	Mewujudkan kelestarian sistem ekologi kota yang memperhatikan ruang terbuka hijau dan kawasan resapan serta pengamanan kota dari bencana melalui perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam yang terintegrasi secara regional.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pengembangan dan pengendalian ruang terbuka hijau ▶ Pengembangan situ untuk pengendalian banjir ▶ Penataan bantaran sungai 	Formatted [290] Formatted [291] Formatted [292] Formatted [293] Formatted [285] Formatted [294] Formatted [295] Formatted [296] Formatted [297]
5	Mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh melalui pembangunan perumahan permukiman yang sehat dengan mengutamakan pembangunan secara vertikal dan memperhatikan daya dukung lahan, konservasi sumber daya air serta penyediaan sarana prasarana pendukung yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) lingkungan permukiman kumuh ▶ Perluasan akses keterlibatan masyarakat dalam penanganan pembangunan lingkungan perumahan kumuh ▶ Pengelolaan dan pengembangan rusun 	Formatted [298] Formatted [299] Formatted [300] Formatted [301] Formatted [304] Formatted [305] Formatted [306] Formatted [307] Formatted [302] Formatted [303]
6	Mewujudkan pembangunan sistem penyediaan air minum dan sanitasi, listrik, gas serta sarana informasi telekomunikasi modern untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta kegiatan perkotaan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas layanan. Integrasi jaringan utilitas kota dilakukan secara terpadu	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Peningkatan kualitas air minum dan pengembangan sumber-sumber air baku ▶ Keberlanjutan keterpaduan jaringan utilitas Kota 	Formatted [308] Formatted [310] Formatted [312] Formatted [309] Formatted [313] Formatted [314] Formatted [315] Formatted [311] Formatted [316]
7	Meningkatkan sistem layanan persampahan melalui modernisasi pengolahan dan peningkatan partisipasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pengembangan kinerja layanan persampahan ▶ Pemantapan pengembangan pengelolaan persampahan skala kawasan dengan 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>) ▶ Perluasan jaringan pengelolaan persampahan berbasis masyarakat ▶ Pengelolaan TPA 	Formatted [317] Formatted [318] Formatted [319] Formatted [320] Formatted [321] Formatted [322] Formatted [323] Formatted [324] Formatted [325] Formatted [326]
8	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan penegakan hukum	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pengembangan model partisipasi swasta dalam investasi dibidang 	Formatted [327] Formatted [328]

NO	ARAH PEMBANGUNAN	2015 – 2019
	dalam mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman.	infrastruktur dan sarana kota ▶ Pemanthapan sistem dan prosedur penegakan hukum

MISI 3: MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERIMAN, BERKETERAMPILAN, SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA.

NO	ARAH PEMBANGUNAN	2015 – 2019
1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG)	▶ IPM Kota Bogor 83,70
2	Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu, dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas.	▶ Jumlah Penduduk 1.311.834 jiwa ▶ LPP 2 %
3	Terciptanya sistem administrasi kependudukan yang tertib guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kota Bogor, serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial.	▶ Peningkatan sistem administrasi kependudukan
4	Pembangunan pendidikan diarahkan kepada peningkatan kualitas sumber daya pendidikan untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang berkualitas berketerampilan dan berdaya saing dengan biaya pendidikan yang murah dan terjangkau.	▶ Bebas Buta ▶ RLS 13,00 ▶ Peningkatan kualitas lulusan pendidikan non formal
5	Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Bogor melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat yang diselenggarakan berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan, kemandirian, adil dan merata dengan perhatian khusus terhadap ibu, bayi, anak, usia lanjut dan keluarga miskin	▶ AHH 77
6	Peningkatan sarana prasarana kesehatan, pembiayaan, sumber daya manusia, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penilaian disertai peningkatan kemandirian masyarakat melalui upaya promotif dan preventif dalam peningkatan kualitas	▶ Terwujudnya peningkatan pembiayaan, pembinaan, pengawasan pengendalian dan Penilaian dalam pelayanan kesehatan serta pematapan kemandirian masyarakat

- Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt
- Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt
- Formatted Table
- Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Not Bold, Font color: Auto
- Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Not Bold, Font color: Auto
- Formatted: Justified, None, Indent: Left: 0,37 cm, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Don't keep with next, Don't keep lines together
- Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single
- Formatted: English (U.S.)
- Formatted: Font: Bookman Old Style
- Formatted: Justified, Indent: Left: 0 cm, Hanging: 1,6 cm, Right: -0,16 cm, Space Before: 0 pt, Line spacing: single
- Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt
- Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single
- Formatted Table
- Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt
- Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)
- Formatted: Justified, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)
- Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt
- Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)
- Formatted ... [329]
- Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt
- Formatted ... [330]
- Formatted ... [331]
- Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt
- Formatted ... [332]
- Formatted ... [333]
- Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt
- Formatted ... [334]
- Formatted ... [335]
- Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt
- Formatted ... [336]
- Formatted ... [337]

NO	ARAH PEMBANGUNAN	2015 – 2019
	lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat	
7	Pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan diarahkan kepada pemahaman dan implementasi terhadap nilai-nilai agama yang terwujud dalam perilaku yang bermoral.	Terwujudnya nilai-nilai kesalehan sosial dalam perilaku aparat dan masyarakat
8	Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan kepada peningkatan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial.	Pelayanan Sosial (32,98%)
9	Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan hak anak-anak yang dilaksanakan secara integral lintas sektor dan lintas wilayah.	Menurunnya Jumlah Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan (22%)
10	Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan masyarakat.	Penguatan Kelembagaan Perlindungan Anak (35%)
11	Pembangunan daerah harus memperhatikan pengarusutamaan gender yaitu setiap kebijakan publik haruslah memperhatikan dampak, akses dan manfaat bagi kaum perempuan dan laki-laki.	Peningkatan kebijakan publik yang memperhatikan dampak, akses dan manfaat bagi kaum perempuan dan laki-laki
12	Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan karakter kebangsaan dan partisipasi pemuda di dalam berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, IPTEK dan politik serta memiliki wawasan kebangsaan.	Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan (80%) Pengembangan nilai-nilai budaya lokal.
13	Pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan prestasi olahraga dan budaya olahraga di kalangan masyarakat.	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
MISI 4: MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN KOTA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN SERTA MENJUNJUNG TINGGI SUPREMASI HUKUM.		
NO	ARAH PEMBANGUNAN	2015 – 2019
1	Memantapkan dan mendukung proses demokrasi secara berkelanjutan pada berbagai aspek, yang berlandaskan hukum untuk mewujudkan pembangunan Kota	Pemantapan proses demokrasi melalui peningkatan pemahaman politik dan terbangunnya proses politik yang demokratis

- Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt
- Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single
- Formatted Table
- Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt
- Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)
- Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt
- Formatted: Justified, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)
- Formatted: Justified, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single
- Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto
- Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt
- Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)
- Formatted ... [338]
- Formatted ... [339]
- Formatted ... [340]
- Formatted ... [341]
- Formatted ... [342]
- Formatted ... [343]
- Formatted ... [345]
- Formatted ... [346]
- Formatted ... [348]
- Formatted ... [344]
- Formatted ... [349]
- Formatted ... [347]
- Formatted ... [350]
- Formatted ... [351]
- Formatted ... [352]
- Formatted ... [353]
- Formatted ... [354]
- Formatted ... [355]
- Formatted ... [356]
- Formatted ... [357]
- Formatted ... [358]
- Formatted ... [359]
- Formatted ... [360]
- Formatted ... [361]
- Formatted ... [362]
- Formatted ... [363]
- Formatted Table
- Formatted ... [364]
- Formatted ... [365]
- Formatted ... [366]
- Formatted ... [367]

NO	ARAH PEMBANGUNAN	2015 – 2019
	Bogor	
2	Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang amanah pada semua tingkat pemerintahan serta mendekatkan pola pelayanan masyarakat yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas prima	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat
3	Terwujudnya kualitas masyarakat dan aparatur yang mempunyai kesadaran hukum dan menjunjung tinggi hukum serta memperkuat penegakan hukum tanpa diskriminatif dengan sanksi hukum yang tegas	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pemantapan ketaatan hukum dan tersedianya produk hukum yang responsif ▶ Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penegakan hukum ▶ Peningkatan kompetensi aparatur
4	Memperkuat peran serta masyarakat melalui bentuk kelembagaan yang lebih efisien dan efektif	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Peningkatan partisipasi masyarakat melalui kelembagaan
5	Terwujudnya sistem koordinasi yang sinergis dalam penyelenggaraan pemerintahan.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pemantapan sistem koordinasi yang sinergis dalam penyelenggaraan pemerintahan
6	Memantapkan peran media massa yang profesional melalui peningkatan akses masyarakat terhadap informasi yang bebas dan bertanggungjawab dengan menjadikan media massa sebagai alat kontrol atas pemenuhan kepentingan publik	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pemantapan peran Media yang profesional dan bertanggungjawab sebagai alat kontrol
7	Terciptanya kesetaraan gender dalam segala aspek tatanan kehidupan	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Peningkatan program, anggaran, kerjasama yang berbasis gender

I.3.3. RPJMD KOTA BOGOR DENGAN RTRW KOTA BOGOR

I.3.3.1. STRUKTUR RUANG KOTA

I.3.3.4.

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Kota Bogor tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan pemanfaatan ruang kota yang dibagi menjadi empat tahap waktu pelaksanaan dengan masing-masing tahap memiliki waktu lima tahun.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam lima tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi:

1. ~~1~~ Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional;
2. ~~2~~ Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan
3. ~~3~~ Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Formatted: Centered, Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Formatted Table

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Formatted: Justified, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Formatted: Justified, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Formatted: Justified, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Formatted: Justified, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Formatted: ... [368]

Formatted: ... [369]

Formatted: ... [370]

Formatted: ... [371]

Formatted: ... [372]

Formatted: ... [373]

Formatted: ... [374]

Formatted: ... [375]

Formatted: English (U.S.)

Formatted: ... [376]

Formatted: ... [377]

Formatted: ... [378]

Formatted: English (U.S.)

Formatted: ... [379]

Formatted: ... [380]

Formatted: English (U.S.)

Formatted: ... [381]

Formatted: English (U.S.)

Formatted: ... [382]

sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Indikasi program perwujudan struktur ruang Kota Bogor tahun 2011 – 2031 terbagi menjadi pusat pelayanan, transportasi, dan utilitas. Rencana pusat pelayanan dibagi berdasarkan proyeksi jumlah penduduk yang akan ditampung hingga tahun akhir rencana sebesar 1,6 juta jiwa serta arahan untuk menyebarkan pusat-pusat pelayanan yang saat ini memusat, sehingga struktur ruang Kota Bogor diarahkan pada banyak pusat (polisentris).

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk dan perhitungan kebutuhan pusat pelayanan maka direncanakan Kota Bogor memiliki satu pusat kota, empat subpusat (pusat Wilayah Pelayanan/ WP) dan 14 subpusat WP (pusat lingkungan).

Wilayah Pelayanan (WP) A, meliputi Kecamatan Bogor Tengah, sebagian Kecamatan Bogor Selatan (Batu Tulis, Bondongan, Empang), sebagian Kecamatan Bogor Timur (Baranangsiang, Sukasari), dan sebagian Kecamatan Bogor Barat (Menteng) dengan proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2028 sebesar 296.180 jiwa. Indikasi program utama pada pusat pelayanan untuk WP A, yaitu penataan kawasan yang menjadi icon Kota Bogor yang berlokasi di kawasan Kebun Raya Bogor dan sekitarnya, penataan kawasan perdagangan yang berlokasi kawasan pasar Bogor dan sekitar jalan Suryakencana, dan kawasan pasar Anyar dan sekitarnya, penataan kawasan sekitar stasiun yang berlokasi di Kelurahan Pabaton, Kelurahan Cibogor dan Kelurahan Paledang, pemeliharaan kawasan yang mempunyai ciri khas bangunan tempo dulu dengan nilai arsitektur tinggi yang berlokasi di kawasan Sempur Taman Kencana, dan penataan kawasan hunian kepadatan tinggi yang diarahkan pada pengembangan hunian vertikal dan perbaikan kampung yang berlokasi di sekitar sungai Cisadane dan Ciliwung (kelurahan Panaragan, Kelurahan Kebon Kalap, Kelurahan Bondongan dan Kelurahan Babakan Pasar). Seluruh program dilaksanakan pada tahapan lima tahun ke-I, kecuali penataan kawasan hunian kepadatan tinggi yang dilaksanakan pada tahapan lima tahun ke-I dan lima tahun ke-II.

Indikasi program utama pada pusat pelayanan untuk WP B, terdiri dari pengembangan kawasan sekitar terminal sebagai pusat WP dengan kegiatan berupa perdagangan dan jasa skala WP berlokasi di Terminal Bubulak, sekitar Sindangbarang, menjaga dan memelihara RTH Kota yang berlokasi di Kawasan hutan kota CIFOR dan Situ Gede, menjaga dan memelihara lahan pertanian kota sebagai RTH yang berlokasi di Kelurahan Balumbang Jaya, Kelurahan Situ Gede, pengembangan dan pengendalian perumahan kepadatan rencana yang dilayani oleh kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal yang berlokasi di Kelurahan Loji, Kelurahan Pasirmulya, Kelurahan Pasirkuda, Kelurahan Pasirjaya, dan penataan kawasan perumahan kepadatan tinggi yang diarahkan pada perbaikan kampung dan perumahan vertikal yang berlokasi di Kelurahan Gunung Batu. Wilayah cakupan WP B, meliputi sebagian besar Bogor Barat dengan proyeksi penduduk tahun 2028 sebesar 216.065 jiwa. Seluruh program dilaksanakan pada tahapan lima tahun ke-I dan lima tahun ke-II, kecuali program “Menjaga dan memelihara RTH Kota” dan “Menjaga dan memelihara lahan pertanian kota sebagai RTH” dilaksanakan hingga tahapan lima tahun ke-IV.

Rencana jaringan jalan memiliki indikasi program utama jaringan jalan yang meliputi, pembangunan Inner Ring Road dengan panjang dua kilometer, lebar 40 meter yang berlokasi di Muarasari hingga Wangun, pembangunan lanjutan jalan R3 dengan panjang 5,5 kilometer yang berlokasi di Vila Duta hingga Tajur, pembangunan jalan tembus yang berlokasi di jalan Ahmad Sobana hingga jalan Tanah Baru dengan panjang satu kilometer dan lebar 30

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Indent: First line: 1 cm, Space Before: 0 pt, After: 6 pt, Line spacing: single

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Indent: First line: 1 cm, Space Before: 0 pt, After: 6 pt, Line spacing: single

meter, pembangunan jalan tembus yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani (Air Mancur) hingga jalan Ceremai Ujung dengan panjang 500 meter, dan pembangunan yang berlokasi di jalan Tanah Baru (Jalan P. Asogiri) dengan panjang 3 kilometer dan lebar jalan 30 meter yang melewati tanah Inti Inovaco. Seluruh program dilaksanakan pada tahapan lima tahun ke-I.

Rencana persampahan adalah mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu. Indikasi program utama untuk persampahan, meliputi penambahan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TPA Galuga yang dilaksanakan pada tahapan lima tahun ke-I dan persiapan dukungan pada TPA Nambo yang dilakukan di tahapan lima tahun ke-1. Selanjutnya, terdapat indikasi program pengelolaan sampah dengan program 3 R yang meliputi seluruh wilayah Kota Bogor dan pembuatan tempat pengelolaan sampah terpadu skala lingkungan di setiap kawasan perumahan baru, kedua program tersebut dilaksanakan pada tahapan lima tahun ke-1 hingga lima tahun ke-IV. Terakhir adalah pembangunan IPLT di setiap WP yang dilaksanakan di tahapan lima tahun ke-I dan lima tahun ke-II. Keseluruhan rencana struktur ruang serta indikasi program utama Kota Bogor dapat dilihat pada [Tabel I.6](#)

Tabel I. 6666 Rencana struktur Ruang Kota Bogor

NO.	RENCANA STRUKTUR RUANG	ARAH PEMANFAATAN RUANG/IN DIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN			
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV
I.	Rencana Pusat Pelayanan						
I.1	Wilayah Pelayanan B	Pengembangan kawasan sekitar terminal sebagai pusat WP dengan kegiatan berdagangan dan jasa skala WP	Terminal Bubulak, sekitar Sindang Barang				
		Menjaga dan memelihara RTH Kota	Kawasan hutan kota CIFOR dan Situ Gede				
II	Rencana Utilitas						
II.1	Persampahan	Pengelolaan sampah dengan program 3 R	Kota Bogor				
		Pembuatan tempat pengelolaan sampah terpadu skala	Di setiap kawasan perumahan baru				

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted ... [383]

Formatted ... [384]

Formatted ... [385]

Formatted ... [386]

Formatted ... [387]

Formatted ... [388]

Formatted ... [389]

Formatted Table

Formatted ... [390]

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted ... [391]

Formatted ... [392]

Formatted ... [393]

Formatted ... [395]

Formatted ... [396]

Formatted ... [394]

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted ... [397]

Formatted ... [398]

Formatted Table

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted ... [399]

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted ... [400]

Formatted ... [401]

Formatted ... [402]

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted ... [403]

Formatted ... [404]

Formatted ... [405]

Formatted ... [406]

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted ... [407]

Formatted ... [408]

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted ... [409]

Formatted ... [410]

Formatted ... [411]

Formatted ... [412]

Formatted Table

Formatted ... [413]

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted ... [414]

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted ... [415]

Formatted ... [416]

Formatted ... [417]

Formatted ... [418]

Formatted: Font: Bookman Old Style

NO.	RENCANA STRUKTUR RUANG	ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN			
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV
		lingkungan					

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031

1.3.3.2. POLA RUANG KOTA

1.3.3.2.

Arahan rencana pola Kota Bogor ruang terbagi menjadi dua, yaitu arahan pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Arahan pengembangan kawasan lindung, meliputi pendataan pemanfaatan ruang sempadan sungai dan identifikasi permasalahan serta penataan sempadan sungai yang berlokasi di Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane dilaksanakan dari tahapan lima tahun ke-I hingga lima tahun ke-II.

Arahan pengembangan kawasan budidaya terdiri dari sektor perumahan, perdagangan dan jasa, industri, Ruang Terbuka Hijau (RTH), Rencana Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH), dan rencana sektor informal. Rencana sektor perumahan diarahkan pada penataan, pengendalian dan pengembangan berdasarkan karakteristik wilayah. Dimana indikasi program utama untuk sektor perumahan, meliputi pembangunan rusunawa/rusunami di Kota Bogor yang dilaksanakan pada lima tahun ke-I dan lima tahun ke-II, dan perumahan padat dan kumuh dengan sasaran utama pada perumahan padat dan kumuh yang dilaksanakan lima tahun ke-I hingga lima tahun ke-III.

Indikasi program utama RTH terdiri dari pembangunan taman lingkungan di pemukiman padat yang berlokasi di Lebak Kantin, Babakan Pasar, Sukamulya dan Sindangsari Kelurahan Kebon, pembangunan Taman Topi City Park yang berlokasi di Kecamatan Bogor Tengah dimana kedua program tersebut dilaksanakan di lima tahun ke-I, pembangunan Sport Center – lapangan olahraga berlokasi di WP E yang dilaksanakan pada lima tahun ke-I dan lima tahun ke-II, dan pengadaan lahan untuk RTH yang diarahkan di seluruh wilayah kota yang dilaksanakan pada lima tahun ke-I hingga lima tahun ke-IV. Selengkapnya tersaji pada [Tabel I. 7](#)[Tabel I. 7](#)[Tabel I. 7](#)[Tabel I. 7](#)[Tabel I. 7](#).

Tabel I. 7 Rencana Pola Ruang Kota Bogor

NO.	RENCANA POLA RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN POLA RUANG SESUAI RTRW					
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN			
				LIMA TAHUN NKE-I	LIMA TAHUN NKE-II	LIMA TAHUN NKE-III	LIMA TAHUN NKE-IV
I	Kawasan Budidaya						
I.1	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pengadaan lahan untuk RTH	Seluruh wilayah kota				
I.2	Perumahan	Perumahan padat dan kumuh	Perumahan padat dan kumuh				

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031

- Formatted: Font: Bookman Old Style, 11 pt
- Formatted Table
- Formatted: Font: Bookman Old Style
- Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt
- Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt
- Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Indonesian
- Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto
- Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 1,75 cm, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single
- Formatted: English (U.S.)
- Formatted: Font: Bookman Old Style, 6 pt, Font color: Auto
- Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt
- Formatted: Indent: First line: 1 cm, Space Before: 0 pt, After: 3 pt, Line spacing: single
- Formatted: Indent: First line: 1 cm, Space Before: 0 pt, After: 6 pt, Line spacing: single
- Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt
- Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt
- Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Indonesian
- Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt
- Formatted ... [419]
- Formatted ... [420]
- Formatted ... [421]
- Formatted ... [423]
- Formatted ... [424]
- Formatted ... [422]
- Formatted ... [425]
- Formatted ... [426]
- Formatted ... [427]
- Formatted ... [428]
- Formatted: Font: Bookman Old Style
- Formatted ... [429]
- Formatted ... [430]
- Formatted ... [432]
- Formatted ... [433]
- Formatted ... [431]
- Formatted: Font: Bookman Old Style
- Formatted: Font: Bookman Old Style
- Formatted ... [434]
- Formatted ... [435]
- Formatted ... [436]
- Formatted ... [437]
- Formatted: Font: Bookman Old Style
- Formatted: Font: Bookman Old Style
- Formatted ... [438]
- Formatted ... [439]

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka dokumen RPJM Kota Bogor 2015-2019 ini disajikan dalam sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Dasar Hukum Penyusunan
- I.3 Hubungan Antar Dokumen
- I.4 Sistematika Penulisan
- I.5 Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- II.1 Aspek Geografi dan Demografi
- II.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- II.3 Aspek Pelayanan Umum
- II.4 Aspek Daya Saing Daerah

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

- Kinerja Keuangan Masa Lalu
- III.1 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- III.2 Kerangka Pendanaan
- III.3

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

- IV.1 Permasalahan Pembangunan
- IV.2 Isu-Isu Strategis

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

- V.1 Visi
- V.2 Misi
- V.3 Tujuan
- V.4 Sasaran

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- VI.1 Strategi
- VI.2 Arah Kebijakan

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN

I.5. MAKSUD DAN TUJUAN

I.5.

Formatted	... [440]
Formatted	... [441]
Formatted	... [443]
Formatted	... [442]
Formatted	... [444]
Formatted	... [445]
Formatted Table	... [446]
Formatted	... [447]
Formatted	... [448]
Formatted	... [449]
Formatted	... [450]
Formatted	... [451]
Formatted	... [452]
Formatted	... [453]
Formatted	... [454]
Formatted	... [455]
Formatted	... [456]
Formatted	... [457]
Formatted	... [458]
Formatted	... [459]
Formatted	... [460]
Formatted	... [461]
Formatted	... [462]
Formatted	... [463]
Formatted	... [464]
Formatted	... [465]
Formatted	... [466]
Formatted	... [467]
Formatted	... [468]
Formatted	... [469]
Formatted	... [470]
Formatted	... [471]
Formatted	... [472]
Formatted	... [473]
Formatted	... [474]
Formatted	... [475]
Formatted	... [476]
Formatted	... [477]
Formatted	... [478]
Formatted	... [479]
Formatted	... [480]
Formatted	... [481]
Formatted	... [482]
Formatted	... [483]
Formatted	... [484]
Formatted	... [485]
Formatted	... [486]
Formatted	... [487]
Formatted	... [488]
Formatted	... [489]
Formatted	... [490]
Formatted	... [491]
Formatted	... [492]
Formatted	... [493]
Formatted	... [494]

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015-2019 adalah:

1. mMemberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun ke depan;
2. mMenjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
3. mMenjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kota Bogor;
4. mMenjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. mMenciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah; dan
6. mMemberikan tolok ukur keberhasilan pembangunan OPD dan Kepala Daerah.

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, English (U.S.)

Formatted: Indent: First line: 1 cm, Space Before: 0 pt, After: 6 pt, Line spacing: single

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Justified, Space Before: 0 pt, After: 6 pt, Line spacing: single

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: List 1, Justified, Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,75 cm, Space After: 0 pt, Line spacing: single

6.

Page 21: [1] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Page 21: [2] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt, Check spelling and grammar

Page 21: [3] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt

Page 21: [4] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:43:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt, Indonesian

Page 21: [5] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:43:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 21: [6] Formatted Table Bendahara 04/11/2014 13:43:00

Formatted Table

Page 21: [7] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:43:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 21: [8] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 21: [9] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:43:00

Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Indonesian

Page 21: [10] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:43:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 21: [11] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:43:00

Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Indonesian

Page 21: [12] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:43:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 21: [13] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:43:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt, Indonesian

Page 21: [14] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:43:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 21: [15] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

None, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, No bullets or numbering, Tab stops: Not at 1,25 cm

Page 21: [16] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:43:00

Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Not Bold, Indonesian

Page 21: [17] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:43:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 21: [18] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:43:00

Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Not Bold, Indonesian

Page 21: [19] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:43:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 21: [20] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:43:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt, Indonesian

Page 21: [21] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:43:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 21: [22] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 21: [23] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:43:00

Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Indonesian

Page 21: [24] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:43:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 21: [25] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:43:00

Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Indonesian

Page 21: [26] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:43:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 21: [27] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 21: [28] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:43:00

Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Indonesian

Page 21: [29] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:43:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 21: [30] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:43:00

Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Indonesian

Page 21: [31] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:43:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 21: [32] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border),
Left: (No border), Right: (No border)

Page 21: [33] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:43:00

Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Indonesian

Page 21: [34] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:43:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 21: [35] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:43:00

Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Indonesian

Page 21: [36] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:43:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 21: [37] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border),
Left: (No border), Right: (No border)

Page 21: [38] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:43:00

Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Indonesian

Page 21: [39] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:43:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 21: [40] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:43:00

Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Indonesian

Page 21: [41] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:43:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 21: [42] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border),
Left: (No border), Right: (No border)

Page 21: [43] Formatted	Bendahara	04/11/2014 13:43:00
Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Indonesian		
Page 21: [44] Formatted	Bendahara	04/11/2014 13:43:00
Font: Bookman Old Style, 11 pt		
Page 21: [45] Formatted	Bendahara	04/11/2014 13:43:00
Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Indonesian		
Page 21: [46] Formatted	Bendahara	04/11/2014 13:43:00
Font: Bookman Old Style, 11 pt		
Page 21: [47] Formatted	Bendahara	04/11/2014 13:35:00
Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)		
Page 21: [48] Formatted	Bendahara	04/11/2014 13:43:00
Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Indonesian		
Page 21: [49] Formatted	Bendahara	04/11/2014 13:43:00
Font: Bookman Old Style, 11 pt		
Page 21: [50] Formatted	Bendahara	04/11/2014 13:43:00
Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Indonesian		
Page 21: [51] Formatted	Bendahara	04/11/2014 13:43:00
Font: Bookman Old Style, 11 pt		
Page 21: [52] Formatted	Bendahara	04/11/2014 13:35:00
Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)		
Page 21: [53] Formatted	Bendahara	04/11/2014 13:43:00
Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Indonesian		
Page 21: [54] Formatted	Bendahara	04/11/2014 13:35:00
Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single		
Page 21: [55] Formatted	Bendahara	04/11/2014 13:35:00
Font: Bookman Old Style, 12 pt		
Page 21: [56] Formatted	Bendahara	04/11/2014 13:35:00
Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,5 cm, Space After: 0 pt, Tab stops: Not at 1,27 cm		

Page 21: [57] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:43:00

ISI, Indent: First line: 1 cm, Space After: 6 pt

Page 21: [58] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt

Page 22: [59] Formatted Cemon 09/11/2014 21:25:00

ISI, Indent: First line: 1 cm, Space After: 3 pt

Page 22: [60] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,75 cm, Space After: 0 pt, Tab stops: Not at 1,27 cm

Page 22: [61] Formatted Cemon 09/11/2014 21:26:00

Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,75 cm, Space After: 3 pt, Tab stops: Not at 1,27 cm

Page 22: [62] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:44:00

Indent: First line: 1 cm, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single

Page 22: [63] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:45:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt, Indonesian

Page 22: [64] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:45:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto

Page 22: [65] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt

Page 22: [66] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Page 22: [67] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt, Check spelling and grammar

Page 22: [68] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt

Page 22: [69] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:45:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 22: [70] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:45:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt, Font color: Background 1

Page 22: [71] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:45:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 22: [72] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:45:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt, Font color: Background 1

Page 22: [73] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:45:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 22: [74] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Page 22: [75] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:45:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt, Indonesian

Page 22: [76] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:45:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 22: [77] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:45:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt, Indonesian

Page 22: [78] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:45:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 22: [79] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:45:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt, Indonesian

Page 22: [80] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:45:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 22: [81] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:45:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt, Indonesian

Page 22: [82] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:45:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 22: [83] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Page 22: [84] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:45:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt, Indonesian

Page 22: [85] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:45:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 22: [86] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:45:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt, Indonesian

Page 22: [87] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:45:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 22: [88] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Page 22: [89] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:45:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt, Indonesian

Page 22: [90] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:45:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 22: [91] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:45:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt, Indonesian

Page 22: [92] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:45:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 22: [93] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:45:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt, Indonesian

Page 22: [94] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:45:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 22: [95] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Page 22: [96] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:45:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt, Indonesian

Page 22: [97] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:45:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 22: [98] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:45:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt, Indonesian

Page 22: [99] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:45:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 22: [100] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Page 22: [101] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:45:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt, Indonesian

Page 22: [102] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:45:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 22: [103] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:45:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt, Indonesian

Page 22: [104] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:45:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 22: [105] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Page 22: [106] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:45:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt, Indonesian

Page 22: [107] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:45:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 22: [108] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:45:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt, Indonesian

Page 22: [109] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:45:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 22: [110] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Page 22: [111] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:45:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt, Indonesian

Page 22: [112] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:45:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 22: [113] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:45:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt, Indonesian

Page 22: [114] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:45:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 22: [115] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Page 22: [116] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:45:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt, Indonesian

Page 22: [117] Formatted	Bendahara	04/11/2014 13:45:00
Font: Bookman Old Style, 11 pt		
Page 22: [118] Formatted	Bendahara	04/11/2014 13:45:00
Font: Bookman Old Style, 11 pt, Indonesian		
Page 23: [119] Formatted	Bendahara	04/11/2014 13:35:00
Space Before: 0 pt, After: 0 pt		
Page 23: [120] Formatted	Bendahara	04/11/2014 13:46:00
Font: Bookman Old Style, 11 pt		
Page 23: [121] Formatted	Bendahara	04/11/2014 13:35:00
Space Before: 0 pt, After: 0 pt		
Page 23: [122] Formatted	Bendahara	04/11/2014 13:46:00
Font: Bookman Old Style, 11 pt		
Page 23: [123] Formatted	Bendahara	04/11/2014 13:35:00
Space Before: 0 pt, After: 0 pt		
Page 23: [124] Formatted	Bendahara	04/11/2014 13:46:00
Font: Bookman Old Style, 11 pt		
Page 24: [125] Formatted	Bendahara	04/11/2014 13:46:00
Font: Bookman Old Style, 11 pt		
Page 24: [126] Formatted	Bendahara	04/11/2014 13:35:00
Space Before: 0 pt, After: 0 pt		
Page 24: [127] Formatted	Bendahara	04/11/2014 13:46:00
Font: Bookman Old Style, 11 pt		
Page 24: [128] Formatted	Bendahara	04/11/2014 13:35:00
Space Before: 0 pt, After: 0 pt		
Page 24: [129] Formatted	Bendahara	04/11/2014 13:35:00
None, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, No bullets or numbering, Tab stops: Not at 1,25 cm		
Page 24: [130] Formatted	Bendahara	04/11/2014 13:35:00
Font: Bookman Old Style, 12 pt		
Page 24: [131] Formatted	Bendahara	04/11/2014 13:47:00
Indent: First line: 1 cm, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single		

Page 24: [132] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:47:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt, Indonesian

Page 24: [133] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:47:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto

Page 24: [134] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt

Page 24: [135] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Page 24: [136] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt, Check spelling and grammar

Page 24: [136] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt, Check spelling and grammar

Page 24: [137] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [137] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [138] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [138] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [139] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [139] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [140] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [140] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [141] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [141] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [142] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [143] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Page 24: [144] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt, Font color: Background 1

Page 24: [145] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [145] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [146] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [146] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [147] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [147] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [148] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [148] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [149] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [150] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Page 24: [151] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt, Indonesian

Page 24: [152] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [152] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [153] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [154] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

None, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, No bullets or numbering, Tab stops: Not at 1,25 cm

Page 24: [155] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Not Bold, Indonesian

Page 24: [156] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [156] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [157] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [157] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [158] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [158] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [159] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [159] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [160] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [161] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

None, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, No bullets or numbering, Tab stops: Not at 1,25 cm

Page 24: [162] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00
Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Not Bold, Indonesian

Page 24: [163] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00
Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [163] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00
Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [164] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00
Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [164] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00
Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [165] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00
Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [165] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00
Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [166] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00
Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [166] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00
Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [167] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00
Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [167] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00
Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [168] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00
Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [168] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00
Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [169] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00
Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [170] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00
None, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, No bullets or numbering, Tab stops: Not at 1,25 cm

Page 24: [171] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Not Bold, Indonesian

Page 24: [172] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [172] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [173] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [173] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [174] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [174] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [175] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [175] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [176] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [176] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [177] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [177] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [178] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [179] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

None, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, No bullets or numbering, Tab stops: Not at 1,25 cm

Page 24: [180] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Not Bold, Indonesian

Page 24: [181] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [181] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [182] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [182] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [183] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [183] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [184] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [184] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [185] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [185] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [186] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [186] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [187] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [188] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

None, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, No bullets or numbering, Tab stops: Not at 1,25 cm

Page 24: [189] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Not Bold, Indonesian

Page 24: [190] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [190] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [191] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [191] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [192] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [192] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [193] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [193] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [194] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [194] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [195] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [195] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [196] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [197] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

None, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, No bullets or numbering, Tab stops: Not at 1,25 cm

Page 24: [198] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Not Bold, Indonesian

Page 24: [199] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [199] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [200] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [200] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [201] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [201] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [202] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [202] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [203] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [203] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [204] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [204] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [205] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [206] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt, Font color: Background 1

Page 24: [207] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [208] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt, Font color: Background 1

Page 24: [209] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [210] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt, Font color: Background 1

Page 24: [211] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [212] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt, Font color: Background 1

Page 24: [213] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [214] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt, Font color: Background 1

Page 24: [215] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [216] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Page 24: [217] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt, Font color: Background 1

Page 24: [218] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [219] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt, Font color: Background 1

Page 24: [220] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [221] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt, Font color: Background 1

Page 24: [222] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00
Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [223] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00
Font: Bookman Old Style, 11 pt, Font color: Background 1

Page 24: [224] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00
Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 24: [225] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00
Font: Bookman Old Style, 11 pt, Font color: Background 1

Page 25: [226] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00
Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 25: [227] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00
None, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, No bullets or numbering, Tab stops: Not at 1,25 cm

Page 25: [228] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00
Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Not Bold, Indonesian

Page 25: [229] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00
Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 25: [230] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00
Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Not Bold, Indonesian

Page 25: [231] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00
Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 25: [232] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00
Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Not Bold, Indonesian

Page 25: [233] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00
Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 25: [234] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00
Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Not Bold, Indonesian

Page 25: [235] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00
Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 25: [236] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00
Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Not Bold, Indonesian

Page 25: [237] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 25: [238] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Not Bold

Page 25: [239] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 25: [240] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:48:00

Font: (Default) Bookman Old Style, 11 pt, Not Bold

Page 25: [241] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:49:00

ISI, Indent: First line: 1 cm

Page 25: [242] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt

Page 25: [243] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:49:00

ISI, Indent: First line: 1 cm, Space After: 6 pt

Page 25: [244] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt

Page 25: [245] Formatted Cemon 09/11/2014 21:26:00

ISI, Indent: First line: 1 cm, Space After: 12 pt

Page 25: [246] Formatted Cemon 09/11/2014 21:26:00

ISI, Space After: 12 pt

Page 25: [247] Formatted Cemon 09/11/2014 21:26:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt

Page 25: [248] Formatted Cemon 09/11/2014 21:26:00

ISI, Indent: First line: 1 cm, Space After: 12 pt

Page 25: [249] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:49:00

Font: Bookman Old Style, Font color: Auto

Page 25: [250] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:49:00

Indent: Left: 0 cm, Hanging: 1,25 cm, Space Before: 0 pt, After: 6 pt, Line spacing: single

Page 25: [251] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt

Page 25: [252] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:49:00

ISI, Indent: First line: 1 cm, Space After: 6 pt

Page 25: [253] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Page 25: [254] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt, Check spelling and grammar

Page 25: [255] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt

Page 25: [256] Formatted Cemon 22/11/2014 23:23:00

Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Page 25: [257] Formatted Table Bendahara 04/11/2014 13:49:00

Formatted Table

Page 25: [258] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Page 25: [259] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt

Page 25: [260] Formatted Cemon 22/11/2014 23:23:00

Left, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 25: [261] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 25: [262] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Page 25: [263] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Page 25: [264] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Page 25: [265] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Page 27: [266] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00
Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border),
Left: (No border), Right: (No border)

Page 27: [267] Formatted Cemon 22/11/2014 23:24:00
Justified, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom:
(No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 27: [268] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:51:00
Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Not Bold, Font color: Auto, Indonesian

Page 27: [269] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00
Font: Bookman Old Style, 12 pt

Page 27: [270] Formatted Cemon 22/11/2014 23:24:00
Justified, Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Page 27: [271] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00
Font: Bookman Old Style, 12 pt

Page 27: [272] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00
Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border),
Left: (No border), Right: (No border)

Page 27: [273] Formatted Cemon 22/11/2014 23:24:00
Justified, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom:
(No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 27: [274] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00
Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Not Bold, Font color: Auto

Page 29: [275] Formatted Cemon 22/11/2014 23:24:00
Justified, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom:
(No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 29: [276] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00
Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border),
Left: (No border), Right: (No border)

Page 29: [277] Formatted Cemon 22/11/2014 23:24:00
Justified, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom:
(No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 29: [278] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Not Bold, Font color: Auto

Page 29: [279] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:52:00
Justified, Indent: Left: 0 cm, Hanging: 1,75 cm, Right: 0,09 cm, Space Before: 0 pt, Line spacing: single

Page 29: [280] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00
Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 29: [281] Formatted Cemon 22/11/2014 23:24:00
Justified, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 29: [282] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00
Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 29: [283] Formatted Cemon 22/11/2014 23:24:00
Justified, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 30: [284] Formatted Cemon 22/11/2014 23:24:00
Justified, None, Space After: 0 pt, No bullets or numbering, Tab stops: Not at 1,25 cm

Page 30: [285] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00
Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Not Bold

Page 30: [286] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00
Font: Bookman Old Style, 12 pt

Page 30: [287] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00
Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Not Bold

Page 30: [288] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00
Font: Bookman Old Style, 12 pt

Page 30: [289] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00
Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Not Bold

Page 30: [290] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00
Font: Bookman Old Style, 12 pt

Page 30: [291] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Not Bold

Page 30: [292] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt

Page 30: [293] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Not Bold

Page 30: [294] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt

Page 30: [295] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Not Bold

Page 30: [296] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt

Page 30: [297] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Not Bold

Page 30: [298] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:52:00

Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Not Bold, Font color: Auto, Indonesian

Page 30: [299] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt

Page 30: [300] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 30: [301] Formatted Cemon 22/11/2014 23:24:00

Justified, Space After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 30: [302] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Not Bold, Font color: Auto

Page 30: [303] Formatted Cemon 22/11/2014 23:24:00

Justified, None, Space After: 0 pt, Don't keep with next, Don't keep lines together

Page 30: [304] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt

Page 30: [305] Formatted Cemon 22/11/2014 23:24:00

Justified, Space After: 0 pt

Page 30: [306] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto

Page 30: [307] Formatted Cemon 22/11/2014 23:24:00

Justified, None, Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,37 cm, Space After: 0 pt, Don't keep with next, Don't keep lines together

Page 30: [308] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt

Page 30: [309] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 30: [310] Formatted Cemon 22/11/2014 23:24:00

Justified, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 30: [311] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Not Bold, Font color: Auto

Page 30: [312] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt

Page 30: [313] Formatted Cemon 22/11/2014 23:24:00

Justified, Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Page 30: [314] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Not Bold, Font color: Auto

Page 30: [315] Formatted Cemon 22/11/2014 23:24:00

Justified, None, Indent: Left: 0,37 cm, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Don't keep with next, Don't keep lines together

Page 30: [316] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt

Page 30: [317] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 30: [318] Formatted Cemon 22/11/2014 23:24:00

Justified, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 30: [319] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Not Bold, Font color: Auto

Page 30: [320] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt

Page 30: [321] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 30: [322] Formatted Cemon 22/11/2014 23:24:00

Justified, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 30: [323] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:52:00

Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Not Bold, Font color: Auto, Indonesian

Page 30: [324] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt

Page 30: [325] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 30: [326] Formatted Cemon 22/11/2014 23:24:00

Justified, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 30: [327] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt

Page 30: [328] Formatted Cemon 22/11/2014 23:24:00

Justified, Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Page 31: [329] Formatted Cemon 22/11/2014 23:24:00

Justified, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 31: [330] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 31: [331] Formatted Cemon 22/11/2014 23:24:00
Justified, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 31: [332] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00
Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 31: [333] Formatted Cemon 22/11/2014 23:24:00
Justified, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 31: [334] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00
Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 31: [335] Formatted Cemon 22/11/2014 23:24:00
Justified, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 31: [336] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00
Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 31: [337] Formatted Cemon 22/11/2014 23:24:00
Justified, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 32: [338] Formatted Cemon 22/11/2014 23:24:00
Justified, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 32: [339] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00
Font: Bookman Old Style, 12 pt

Page 32: [340] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00
Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 32: [341] Formatted Cemon 22/11/2014 23:24:00
Justified, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 32: [342] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt

Page 32: [343] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

None, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single, No bullets or numbering, Don't keep with next, Don't keep lines together, Tab stops: Not at 1,25 cm

Page 32: [344] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto

Page 32: [345] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt

Page 32: [346] Formatted Cemon 22/11/2014 23:24:00

Justified, None, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single, No bullets or numbering, Don't keep with next, Don't keep lines together, Tab stops: Not at 1,25 cm

Page 32: [347] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto

Page 32: [348] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt

Page 32: [349] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto

Page 32: [350] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt

Page 32: [351] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 32: [352] Formatted Cemon 22/11/2014 23:24:00

Justified, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 32: [353] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt

Page 32: [354] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 32: [355] Formatted Cemon 22/11/2014 23:24:00
Justified, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 32: [356] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00
Font: Bookman Old Style, 12 pt

Page 32: [357] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00
Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 32: [358] Formatted Cemon 22/11/2014 23:24:00
Justified, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 32: [359] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00
Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single

Page 32: [360] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:53:00
Font: Bookman Old Style, Font color: Auto

Page 32: [361] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:53:00
Justified, Indent: Left: 0 cm, Hanging: 1,75 cm, Right: -0,16 cm, Space Before: 0 pt, Line spacing: single

Page 32: [362] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00
Font: Bookman Old Style, 12 pt

Page 32: [363] Formatted Cemon 22/11/2014 23:25:00
Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Page 32: [364] Formatted Cemon 22/11/2014 23:25:00
Centered, Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Page 32: [365] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00
Font: Bookman Old Style, 12 pt

Page 32: [366] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00
Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 32: [367] Formatted Cemon 22/11/2014 23:25:00
Justified, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 33: [368] Formatted Cemon 22/11/2014 23:25:00
Justified, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 33: [369] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00
Font: Bookman Old Style, 12 pt

Page 33: [370] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00
Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 33: [371] Formatted Cemon 22/11/2014 23:25:00
Justified, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 33: [372] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00
Font: Bookman Old Style, 12 pt

Page 33: [373] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00
Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 33: [374] Formatted Cemon 22/11/2014 23:25:00
Justified, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 33: [375] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00
Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Not Bold

Page 33: [376] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:54:00
Indent: Left: 1 cm, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single, No bullets or numbering

Page 33: [377] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:54:00
Font: Bookman Old Style, Font color: Auto

Page 33: [378] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:54:00
Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto

Page 33: [379] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00
Font: Bookman Old Style, 12 pt

Page 33: [380] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00
Font: Bookman Old Style, 12 pt

Page 33: [381] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt

Page 33: [382] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt

Page 35: [383] Formatted Cemon 09/11/2014 21:26:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt

Page 35: [384] Formatted Cemon 09/11/2014 21:26:00

Indent: First line: 1 cm, Space Before: 0 pt, After: 6 pt, Line spacing: single

Page 35: [385] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt

Page 35: [386] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Page 35: [387] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt, Check spelling and grammar

Page 35: [388] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt

Page 35: [389] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:59:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 35: [390] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:59:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 35: [391] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 35: [392] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:59:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 35: [393] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:59:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 35: [394] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:59:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 35: [395] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:59:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 35: [396] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Page 35: [397] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:59:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 35: [398] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Page 35: [399] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:59:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 35: [400] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:59:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 35: [401] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:59:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 35: [402] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:59:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 35: [403] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:59:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 35: [404] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Page 35: [405] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:59:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 35: [406] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:59:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 35: [407] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:59:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 35: [408] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border),
Left: (No border), Right: (No border)

Page 35: [409] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:59:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 35: [410] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Page 35: [411] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:59:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 35: [412] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Page 35: [413] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:59:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 35: [414] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:59:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 35: [415] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:59:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 35: [416] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Page 35: [417] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:59:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 35: [418] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:59:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 36: [419] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Page 36: [420] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt, Check spelling and grammar

Page 36: [421] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt

Page 36: [422] Formatted Bendahara 04/11/2014 14:00:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 36: [423] Formatted Bendahara 04/11/2014 14:00:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 36: [424] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Page 36: [425] Formatted Bendahara 04/11/2014 14:00:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 36: [426] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Page 36: [427] Formatted Bendahara 04/11/2014 14:00:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 36: [428] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Page 36: [429] Formatted Bendahara 04/11/2014 14:00:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 36: [430] Formatted Bendahara 04/11/2014 14:00:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 36: [431] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Page 36: [432] Formatted Bendahara 04/11/2014 14:00:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 36: [433] Formatted Bendahara 04/11/2014 14:00:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 36: [434] Formatted Bendahara 04/11/2014 14:00:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 36: [435] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Page 36: [436] Formatted Bendahara 04/11/2014 14:00:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 36: [437] Formatted Bendahara 04/11/2014 14:00:00

Font: Bookman Old Style, 11 pt

Page 36: [438] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt

Page 36: [439] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Page 37: [440] Formatted Bendahara 04/11/2014 14:00:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt, Indonesian

Page 37: [441] Formatted Bendahara 04/11/2014 14:08:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto

Page 37: [442] Formatted Bendahara 04/11/2014 14:09:00

Indent: Left: -0,01 cm, Space Before: 0 pt, After: 6 pt, Line spacing: single

Page 37: [443] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt

Page 37: [444] Formatted Bendahara 04/11/2014 14:09:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto

Page 37: [445] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt

Page 37: [446] Formatted Table Bendahara 04/11/2014 14:09:00

Formatted Table

Page 37: [447] Formatted Bendahara 04/11/2014 14:09:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto

Page 37: [448] Formatted Bendahara 04/11/2014 14:09:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto

Page 37: [449] Formatted Bendahara 04/11/2014 14:09:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto

Page 37: [450] Formatted Bendahara 04/11/2014 14:09:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto

Page 37: [451] Formatted Bendahara 04/11/2014 14:09:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto

Page 37: [452] Formatted Bendahara 04/11/2014 14:09:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto

Page 37: [453] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 37: [454] Formatted Bendahara 04/11/2014 14:09:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto

Page 37: [455] Formatted Bendahara 04/11/2014 14:09:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto

Page 37: [456] Formatted Bendahara 04/11/2014 14:09:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto

Page 37: [457] Formatted Bendahara 04/11/2014 14:09:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto

Page 37: [458] Formatted Bendahara 04/11/2014 14:09:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto

Page 37: [459] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 37: [460] Formatted Bendahara 04/11/2014 14:09:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto

Page 37: [461] Formatted Bendahara 04/11/2014 14:09:00

Justified

Page 37: [462] Formatted Bendahara 04/11/2014 14:09:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto

Page 37: [463] Formatted Bendahara 04/11/2014 14:09:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto

Page 37: [464] Formatted Bendahara 04/11/2014 14:09:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto

Page 37: [465] Formatted Bendahara 04/11/2014 14:09:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto

Page 37: [466] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 37: [467] Formatted Bendahara 04/11/2014 14:09:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto

Page 37: [468] Formatted Bendahara 04/11/2014 14:09:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto

Page 37: [469] Formatted Bendahara 04/11/2014 14:09:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto

Page 37: [470] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 37: [471] Formatted Bendahara 04/11/2014 14:09:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto

Page 37: [472] Formatted Bendahara 04/11/2014 14:09:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto

Page 37: [473] Formatted Bendahara 04/11/2014 14:09:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto

Page 37: [474] Formatted Bendahara 04/11/2014 14:09:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto

Page 37: [475] Formatted Bendahara 04/11/2014 14:09:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto

Page 37: [476] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 37: [477] Formatted Bendahara 04/11/2014 14:09:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto

Page 37: [478] Formatted Bendahara 04/11/2014 14:09:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto

Page 37: [479] Formatted Bendahara 04/11/2014 14:09:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto

Page 37: [480] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 37: [481] Formatted Bendahara 04/11/2014 14:09:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto

Page 37: [482] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 37: [483] Formatted Bendahara 04/11/2014 14:09:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto

Page 37: [484] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 37: [485] Formatted Bendahara 04/11/2014 14:09:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto

Page 37: [486] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt, Font Alignment: Auto, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Page 37: [487] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Space Before: 0 pt

Page 37: [488] Formatted Cemon 22/11/2014 23:26:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto, English (U.S.)

Page 37: [489] Formatted Bendahara 04/11/2014 14:10:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt

Page 37: [490] Formatted Bendahara 04/11/2014 14:10:00

Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,75 cm, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single

Page 37: [491] Formatted Bendahara 04/11/2014 14:10:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt, Indonesian

Page 37: [492] Formatted Bendahara 04/11/2014 14:10:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Auto

Page 37: [493] Formatted Bendahara 04/11/2014 14:10:00

English (U.S.)

Page 37: [494] Formatted Bendahara 04/11/2014 13:35:00

Font: Bookman Old Style, 12 pt

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pembahasan mengenai Aspek Geografi dan Demografi berisikan tentang kondisi umum geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Dalam bagian ini, dijelaskan pula mengenai kondisi demografi seperti ukuran, struktur dan distribusi penduduk.

II.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

II.1.1. KARAKTERISTIK LOKASI DAN WILAYAH

II.1.1.1. SEJARAH KOTA BOGOR

...“Tah di dinya, ku andika adegkeun eta dayeuh laju ngaranan Bogor sabab Bogor teh hartina tunggul kawung”...

Sebait pantun Pacilong tersebut menceritakan sebuah Kota bernama Bogor, dimana Bogor berarti *tunggul kawung*, atau pohon enau. Kehebatan pohon enau ini menyiratkan juga kehebatan sebuah Kota yang pernah menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Hindu terbesar di Nusantara.

Kota Bogor lahir dari sebuah Kerajaan besar bernama Pajajaran yang memindahkan ibukotanya ke tanah Pakuan pada tahun 1482 (dari tempat semula, yaitu Galoeh) seiring dinobatkannya Sri Baduga Maharaja atau yang dikenal dengan sebutan Prabu Siliwangi menjadi raja Kerajaan Pajajaran. Perpindahan ibukota ini adalah untuk yang terakhir kalinya karena pada tanggal 11 bagian terang bulan Wesaka tahun 1501 yang kira-kira jatuh pada tanggal 8 Mei 1579 Masehi kerajaan besar ini pada akhirnya lenyap. Berakhirlah jaman pajajaran (1482-1579). Hancur dan hilanglah sebuah ibu kota kerajaan yang tersohor namanya. Kota itu dikalahkan tapi tidak untuk dikuasai. Lama kelamaan wilayah ini berganti rupa menjadi hutan belantara.

Tidak ada catatan yang tertinggal mengenai Pakuan, ibukota Kerajaan Pajajaran setelah keruntuhannya pada tahun 1579. Seolah hilang dan baru ditemukan kembali setelah serangkaian ekspedisi yang dilakukan oleh Scipio pada tahun 1687, Adolf Winkler tahun 1690 dan Abraham van Riebeeck tahun 1704 dan 1709. Penemuan Prasasti Batutulis dan situs-situs lainnya menjadi bukti yang meyakinkan bahwa di Bogorlah terletak pusat pemerintahan Pakuan Pajajaran.

Atas perintah dari Camphuijs, untuk mencari jejak Kerajaan Pajajaran, ekspedisi pada tahun 1687 yang dipimpin Sersan Scipio dibantu oleh Letnan Patinggi dan Letnan Tanuwijaya seorang sunda Sumedang berhasil menemukan pemukiman di beberapa tempat, seperti Cikeas, Citeureup, Kedung Halang dan Parung Angsana. Pada tahun 1687, pembukaan Hutan Pajajaran mengawali babak baru kehidupan tanah ini yang ditandai dengan didirikannya sebuah perkampungan yang kemudian diberi nama Kampung Baru. Kampung Barulah yang selanjutnya menjadi cikal bakal tempat kelahiran Kabupaten Bogor yang didirikan kemudian sekaligus sebagai pusat pemerintahan bagi kampung-kampung lainnya seperti Parakan Panjang, Parung Kujang, Panaragan, Bantarjati, Sempur, Baranang Siang, Parung Banteng dan Cimahpar.

Pada tahun 1745 Gubernur Jenderal Baron Van Inhoff jatuh cinta pada tanah indah ini dan lalu membangun sebuah istana yang mirip dengan Bleheim Palace di Inggris. Istana yang saat ini tersohor dengan nama Istana Bogor dibangun seiring dengan pembangunan jalan Raya Daendles yang menghubungkan Batavia dengan Bogor, sehingga keadaan Bogor mulai berkembang.

Pada masa pendudukan Inggris, dalam kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Raffles, kota ini berkembang pesat dimana Istana Bogor mengalami renovasi dengan perkembangan taman disekelilingnya yang merupakan cikal bakal Kebun Raya. Beliau juga memperkejakan seorang *Planner*(perencana) yang bernama Carsens yang menata Bogor sebagai tempat peristirahatan yang dikenal dengan *Buitenzorg*. *Buitenzorg* yang berarti "without a care" kemudian tersohor menjadi destinasi wisata pelancong dunia, hingga menjadi *pilgrimage* para ilmuwan dunia setelah lahirnya *S'Lands Plantetuin Te Buitenzorg* (Kebun Raya Bogor).

Setelah pemerintahan kembali kepada Hindia Belanda pada tahun 1903, terbit Undang-undang Desentralisasi yang bertujuan menghapus sistem pemerintahan tradisional diganti dengan sistem administrasi pemerintahan modern. Sebagai realisasinya dibentuk *Staadsgemeente* diantaranya adalah:

1. *Gemeente* Batavia (S. 1903 No.204)
 2. *Gemeente* Meester Cornelis (S. 1905 No.206)
 3. *Gemeente Buitenzoorg* (S. 1905 No.208)
 4. *Gemeente* Bandoeng (S. 1906 No.121)
 5. *Gemeente* Cirebon (S. 1905 No.122)
 6. *Gemeente* Soekabumi (S. 1914 No.310)
- (*Regeringsalmanak Voor Nederlandsh Indie 1928 : 746-748*)

Pembentukan *Gemeente* tersebut bukan untuk kepentingan penduduk pribumi tetapi untuk kepentingan orang-orang Belanda dan masyarakat golongan Eropa dan yang dipersamakan (yang menjadi *Burgermeester*(Walikota)dari *Staadsgemeente Buitenzorg* selalu orang-orang Belanda dan baru tahun 1940 diduduki oleh orang Bumiputra yaitu Mr. Soebroto).

Pada tahun 1922 sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap peran desentralisasi yang ada maka terbentuklah *Bestuursher Voorings Ordonantie* atau Undang-undang Perubahan Tata Pemerintahan Negeri Hindia Belanda (*Staatsblad* 1922 No. 216), sehingga pada tahun 1922 terbentuklah *Regentschaps Ordonantie* (*Ordonantie* Kabupaten) yang membuat ketentuan-ketentuan daerah Otonomi Kabupaten (*Staatsblad* 1925 No. 79).

Provinsi Jawa Barat dibentuk pada tahun 1925 (*Staatsblad* 1924 No. 378 *bij Propince* West Java) yang terdiri dari 5 karesidenan, 18 Kabupaten (*Regentscape*) dan Kotapraja (*Staadsgemeente*), dimana *Buitenzorg* (Bogor) salah satu *Staadsgemeente* di Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan *Staatsblad* 1905 No. 208 jo. *Staatsblad* 1926 No. 368, dengan prinsip desentralisasi modern, dimana kedudukan *Burgermeester* menjadi jelas.

Pada masa pendudukan Jepang kedudukan pemerintahan di Kota Bogor menjadi lemah karena pemerintahan dipusatkan pada tingkat karesidenan yang berkedudukan di Kota Bogor, pada masa ini nama-nama lembaga pemerintahan berubah menjadi: Karesidenan menjadi *Syoeoe*, Kabupaten/*Regentschaps* menjadi Ken, Kota/*Staadsgemeente* menjadi Si, Kawedanaan/*Distrik* menjadi Gun, Kecamatan/*Under Districk* menjadi Soe dan desa menjadi Koe.

Pada masa setelah kemerdekaan, yaitu setelah pengakuan kedaulatan RI, pemerintahan di Kota Bogor namanya menjadi Kota Besar Bogor yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950.

Selanjutnya pada tahun 1957 nama pemerintahan berubah menjadi Kota Praja Bogor, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, kemudian dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 berubah kembali menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor diubah menjadi Kota Bogor. Nama Bogor sendiri dapat ditemui pada sebuah dokumen tertanggal 7 April 1752. Dalam dokumen tersebut tercantum nama Ngabei Raksacandra sebagai "*hoofd van de negorij Bogor*" (kepala kampung Bogor). Dalam tahun tersebut ibukota Kabupaten Bogor masih berkedudukan di Tanah Baru. Dua tahun kemudian, Bupati Demang Wiranata mengajukan permohonan kepada Gubernur Jacob Mossel agar diizinkan mendirikan rumah tempat tinggal di Sukahati di dekat *Buitenzorg*.

Terakhir berdasarkan PP No.44/1992, perwakilan kecamatan Tanah Sareal ditingkatkan statusnya menjadi kecamatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008, wilayah Kota Bogor terdapat enam kecamatan dan 68 kelurahan (diolah dari berbagai sumber).

II.1.1.2. LUAS DAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI

Luas wilayah Kota Bogor sebesar 11.850 hektar yang terdiri dari enam kecamatan dan 68 kelurahan. Keenam kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Barat dan Kecamatan Tanah Sareal. Kecamatan Bogor Barat mempunyai luas wilayah terbesar yaitu 3.285 hektar dan terdiri dari 16 kelurahan sedangkan Kecamatan Bogor Tengah mempunyai luas wilayah terkecil yaitu 813 hektar dan terdiri dari 11 kelurahan. Untuk luas wilayah menurut kecamatan tersaji pada Tabel II. 1.

Secara administratif Kota Bogor dikelilingi oleh Wilayah Kabupaten Bogor dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Bojong Gede, dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Darmaga dan Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor.

Tabel II. 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Bogor

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (HA)
1	Bogor Selatan	3.081
2	Bogor Timur	1.015
3	Bogor Utara	1.772
4	Bogor Tengah	813
5	Bogor Barat	3.285
6	Tanah Sareal	1.884
	Jumlah	11.850

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2013

II.1.2. LETAK DAN KONDISI GEOGRAFI

Secara geografis Kota Bogor terletak di antara 106°43'30"BT – 106°51'00"BT dan 6°30'30"LS – 6°41'00"LS. Kedudukan geografi Kota Bogor berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya sangat dekat dengan DKI Jakarta. Jarak Kota Bogor dengan Kota Jakarta kurang lebih 60 kilometer dan dengan Kota Bandung sekitar 120 kilometer. Hal ini menjadi potensi yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata. Berdasarkan hasil foto udara diketahui sebagian dari total wilayah Kota Bogor merupakan kawasan yang sudah terbangun,

kecuali di wilayah Kecamatan Bogor Selatan. Area terbangun paling luas berada di wilayah Kecamatan Bogor Tengah.

II.1.3. TOPOGRAFI

Kota Bogor mempunyai wilayah dengan kontur berbukit dan bergelombang dengan ketinggian bervariasi, ketinggian minimum 190 meter dan ketinggian maksimum 330 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kota Bogor memiliki lahan datar dengan kemiringan berkisar 0-2 persen, untuk luasan lahan datar seluas 1.763,94 hektar dan tersebar di enam kecamatan. Seluas 8.091,19 hektar merupakan lahan landai dengan kemiringan berkisar 2-15 persen, seluas 1.109,92 hektar merupakan lahan agak curam dengan kemiringan 15-25 persen, seluas 765,21 hektar merupakan lahan curam dengan kemiringan 25-40 persen dan lahan sangat curam seluas 119,74 hektar dengan kemiringan lebih dari 40 persen.

Kecamatan Bogor Selatan merupakan daerah di Kota Bogor yang tergolong sangat peka terhadap erosi, karena mempunyai kemiringan lebih dari 40 persen atau sangat curam sehingga daerah tersebut sangat peka terhadap erosi. Untuk lebih jelasnya, tingkat kemiringan daerah menurut kecamatan telah tersaji dalam Tabel II. 2.

Tabel II. 2 Tingkat Kemiringan Daerah Menurut Kecamatan di Kota Bogor

NO	KECAMATAN	TINGKAT KEMIRINGAN (HA)					JUMLAH
		DATAR <2%	LANDAI 2-15%	AGAK CURAM 15-25%	CURAM 25-40%	SANGAT CURAM >40%	
1	Bogor Selatan	169,10	1.418,40	1.053,89	350,37	89,24	3.081
2	Bogor Timur	182,30	722,62	56,03	44,25	9,80	1.015
3	Bogor Utara	137,85	1.565,65	0	68	0,50	1.772
4	Bogor Tengah	125,44	560,47	0	117,54	9,55	813
5	Bogor Barat	618,40	2.502,14	0	153,81	10,65	3.285
6	Tanah Sareal	530,85	1.321,91	0	31,24	0	1.884
	Jumlah	1.763,94	8.091,19	1.109,92	765,21	119,74	11.850

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2013

II.1.3.1. GEOLOGI

Jenis tanah hampir diseluruh wilayah Kota Bogor adalah latosol coklat kemerahan dengan luasan 8.496,35 hektar, kedalaman efektif tanah lebih dari 90 centimeter dengan tekstur tanah yang halus serta bersifat agak peka terhadap erosi. Kemudian jenis tanah lain yang juga menyebar di enam Kecamatan yaitu aluvial kelabu dengan luasan 1.157,9 hektar. Kondisi fisik dan lingkungan menurut jenis tanah per kecamatan di Kota Bogor tersaji pada Tabel II. 3.

Tabel II. 3 Kondisi Fisik dan Lingkungan Menurut Jenis Tanah Per Kecamatan di Kota Bogor

NO	KECAMATAN	JENIS TANAH (HA)							JUMLAH (HA)
		ALUVIAL KELABU	LATOSOL COKLAT	LATOSOL COKLAT KEMERAHAN	LATOSOL MERAH KEKUNINGAN	PODZOLIK MERAH KUNING	REGOSOL	ANDROSOL COKLAT	
1	Bogor Selatan	175,41	271,88	1.860,67	0	0	732,19	40,85	3.081
2	Bogor Timur	218,51	0	796,49	0	0	0	0	1.015
3	Bogor Utara	141,30	0	1.576,95	53,75	0	0		1.772
4	Bogor Tengah	162,82	0	650,18	0	0	0		813
5	Bogor Barat	397,63	0	1.928,61	0	26,35	85,27	847,14	3.285

NO	KECAMATAN	JENIS TANAH (HA)							JUMLAH (HA)
		ALUVIAL KELABU	LATOSOL COKLAT	LATOSOL COKLAT KEMERAHAN	LATOSOL MERAH KEKUNINGAN	PODZOLIK MERAH KUNING	REGOSOL	ANDROSOL COKLAT	
6	Tanah Sareal	62,26	0	1.683,45	138,29	0	0	0	1.884
	Jumlah	1.157,9	271,88	8.496,35	192,04	26,5	732,19	85,27	11.850

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2013

Kondisi geologi di Kota Bogor yaitu tufa dengan luasan 3.395,17 hektar yang tersebar di enam kecamatan dengan Kecamatan Bogor Selatan menjadi kecamatan dengan penyebaran kondisi geologi tufa terbesar. Sedangkan kipas aluvial dengan luasan 3.249,98 hektar dan Kecamatan Bogor Utara menjadi kecamatan dengan penyebaran kondisi geologi kipas aluvial. Untuk lebih jelasnya mengenai penyebaran kondisi geologi menurut kelurahan dapat dilihat pada Tabel II. 4.

Tabel II. 4 Kondisi Geologi Menurut Kecamatan di Kota Bogor

NO	KECAMATAN	KONDISI GEOLOGI (HA)					LANAU BREKSI TUFAN DAN CAPILI	JUMLAH
		ALIRAN ANDESIT	KIPAS ALUVIAL	ENDAPAN	TUFA			
1	Bogor Selatan	445,01	0	0	1.838,81	797,18	3.081	
2	Bogor Timur	0	304,21	0	710,79	0	1.015	
3	Bogor Utara	0	1.766,64	0	5,36	0	1.772	
4	Bogor Tengah	0	226,98	0,17	582,81	3,04	81	
5	Bogor Barat	1.012,45	348,89	1.372,51	238,81	312,34	3.285	
6	Tanah Sareal	1.262,15	603,26	0	18,59	0	1.884	
	Jumlah	2.719,61	3.249,98	1.372,68	3.395,17	1.112,56	11.850	

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2013

II.1.3.2. HIDROLOGI

Di wilayah Kota Bogor terdapat enam lokasi mata air, empat lokasi air tanah dalam dan dua lokasi air tanah dangkal yang biasa digunakan untuk air minum non perpipaan. Kapasitas sumber mata air dan air tanah dalam mengalami penurunan dibanding tahun 2011. Demikian pula kapasitas air tanah dalam, dari tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami penurunan.

Hal ini menunjukkan semakin berkurangnya resapan air karena semakin bertambahnya daerah pemukiman di wilayah Kota Bogor. Lahan di Kota Bogor hingga tahun 2012 masih banyak lahan tidak kritisnya yaitu sekitar 81,45 persen (9.651,98 ha). Sementara lahan kritisnya mencapai 1,82 persen (215,47 ha). Sisanya agak kritis 2,49 persen (295,07 ha) dan potensial kritis 14,24 persen (1.687,48 ha). Lahan kritis banyak terdapat di wilayah Kecamatan Bogor Selatan. Semua Kelurahan di daerah tersebut mengandung lahan kritis kecuali Kelurahan Cikaret. Lahan potensial kritis selain di Kecamatan Bogor Selatan juga banyak terdapat di Kecamatan Bogor Barat.

Beberapa danau, situ dan kolam di Kota Bogor ada yang berfungsi untuk irigasi, retensi dan rekreasi. Situ Gede, Situ Panjang dan Situ Curug difungsikan sebagai irigasi dan retensi. Danau Bogor Raya, Kolam Retensi Cimanggu dan Kolam Retensi Taman Sari Persada selain difungsikan sebagai retensi juga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Danau atau situ terluas di Kota Bogor adalah Situ Panjang (4,5 ha) dan Situ Gede (4 ha).

Di wilayah Kota Bogor dilalui oleh dua buah sungai, yaitu Sungai Cisadane dan Sungai Ciliwung. Sungai Cisadane mempunyai luas pengaliran 185 kilometer persegi dan Sungai Ciliwung mempunyai luas pengaliran 211 kilometer

persegi. Menurut hasil pengukuran debit tahun 2004, setiap satu kilometer persegi Sungai Cisadane memiliki debit 75,8 liter per detik dan setiap satu kilometer persegi Sungai Ciliwung memiliki debit 74,1 liter per detik.

Untuk kualitas air, pada umumnya kualitas air sungai di wilayah Kota Bogor kurang memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Hal itu disebabkan beberapa unsur seperti sulfat, fosfat, nitrat dan jumlah total coliform dalam air sungai, melebihi kriteria baku. Kondisi yang mirip juga terdapat pada air situ yang umumnya berkualitas di bawah persyaratan baku mutu. Sedangkan air sumur penduduk, nilai pH-nya cenderung fluktuatif, dan di beberapa lokasi kandungan detergen dan bakteri *e-coli* sedikit diatas kriteria yang disyaratkan.

Tabel II. 5 Hasil Pengukuran Debit Tahun 2004

NO.	SUNGAI	LUAS DAERAH PENGALIRAN	RATA-RATA	ALIRAN/KM ²	TINGGI ALIRAN	VOLUME X 10 ⁶
1	Cisadane	185,0 Km ²	14 m ³ /det	75,8 Lt/det	2388,3 mm	441 m ³
2	Ciliwung	211,0 Km ²	15,6 m ³ /det	74,1 Lt/det	2335,4 mm	492 m ³

Sumber : Masterplan SPAM Kota Bogor, 2008

Ketersediaan air di Kota Bogor pada tahun 2012 dari berbagai penggunaan lahan dan rata-rata hujan per tahun yaitu 209.106.398,04 m³/tahun. Ketersediaan air paling banyak terdapat pada penggunaan lahan dengan persentase dari total luas lahan yang paling besar, yaitu di sektor permukiman, RTH dan perumahan.

Tabel II. 6 Perhitungan Ketersediaan Air (Supply Water/SW)

NO	GUNA LAHAN	KOEFSIEN LIMPASAN	RATA-RATA HUJAN	LUAS WILAYAH	PERSENTASE DARI TOTAL	SW (M ³ /TAHUN)
			(mm/tahun)	(Ha)	Luas Lahan (%)	
1	Perdagangan	0,70	4.008	81,2	0,68	2.278.147,20
2	Permukiman	0,70	4.008	3.135,79	24,46	87.977.724,2
3	Perumahan	0,60	4.008	1.020,08	8,61	24.530.883,8
4	Komplek	0,60	4.008	73,96	0,62	1.778.590,08
5	Istana	0,60	4.008	1,17	0,01	28.136,16
6	Industri	0,90	4.008	92,59	0,78	3.339.906,48
7	Terminal	0,60	4.008	5,41	0,05	130.099,68
8	RTH	0,30	4.008	6.088,58	51,38	73.209.085,9
9	Tanah	0,35	4.008	984,38	8,31	13.808.882,6
1	Lain2 (tidak	0,35	4.008	144,35	1,22	2.024.941,80
TOTAL KETERSEDIAAN AIR (SW)						209.106.398,

Sumber : BPS, Materi Teknis RTRW 2011 dan Hasil Analisis Konsultan KLHS 2012

Tabel II. 7 Perhitungan Kebutuhan Air Kota Bogor (Demand Water/DW)

NO	URAIAN	SATUAN	PENDUDUK 2010	TAHUN PROYEKSI			
				2016	2021	2026	2031
1	Jumlah Penduduk	jiwa	950.334	1.171.194	1.356.507	1.575.159	1.833.586
2	KHLW	m ³ /jiwa/tahun	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
TOTAL KEBUTUHAN AIR (DW) m ³ /tahun			950.334.000	1.171.194.000	1.356.507.000	1.575.159.000	1.833.586.000

Sumber : BPS dan Hasil Analisis Konsultan KLHS 2012

Tabel II. 8 Perbandingan Ketersediaan Air (SW) terhadap Kebutuhan Air (DW)

FAKTOR	RUMUS	NILAI	SATUAN	$\pi = SL/DL$
Ketersediaan Air	SW	209.106.398	m ³ /Tahun	
Kebutuhan Air	DW	950.334.000	m ³ /Tahun	0,220035
Status Daya Dukung Air				$\pi < 1$ daya dukung terlampaui/overshoot

Sumber : BPS dan Hasil Analisis Konsultan KLHS 2012

Berdasarkan Perbandingan Ketersediaan Air (SW) terhadap Kebutuhan Air (DW) di Tabel II. 8 diketahui Daya Dukung Air terlampaui/tidak aman (*overshoot*). Ketersediaan air tersebut berasal dari berbagai penggunaan lahan dan rata-rata hujan per tahun. Hal ini berarti ketersediaan air menjadi hal penting yang harus diperhatikan dalam menganalisis Kegiatan, Rencana dan Program (KRP) Kota Bogor karena ketersediaan air tidak bisa memenuhi kebutuhan air warga Kota Bogor.

Di lain hal, untuk daya dukung air tanah di Kota Bogor, pemakaian air tanah pada tahun 2011 secara keseluruhan hanya sekitar 37,75 persen dari potensi (Laporan Akhir Penyusunan Rencana Induk Terpadu Pengelolaan Air Tanah Kota Bogor 2011), tetapi mengingat tingkat pengambilan air tanah tidak merata, maka hal tersebut mengakibatkan di tempat tertentu sudah terlihat adanya penurunan muka air tanah yang signifikan, sehingga terindikasi sudah masuk ke dalam zona rawan, kritis bahkan rusak.

Berdasarkan hasil analisis geologi dan hidrogeologi, zona konservasi air tanah di kota Bogor diperuntukkan bagi kedalaman 45–120 m bmt (zonasi vertikal). Secara umum Kota Bogor (80,4%) berada pada zona konservasi air tanah aman dengan luas 95,8 km². Adapun zona rawan air tanah telah terjadi seluas 13,3 km² (11,2%) terletak pada sebagian Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Bogor Selatan. Penyebaran zona kritis air tanah seluas 6,2 km² (5,2%) dan zona rusak air tanah seluas 3,2 km² (3,2%) terletak pada sebagian Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Bogor Selatan. Adapun rincian konservasi air tanah per kecamatan dapat dilihat pada Tabel II. 9 sampai dengan Tabel II. 14.

Tabel II. 9 Konservasi Air Tanah Kecamatan Bogor Barat

NO	KELURAHAN	LUAS (KM ²)	KONSERVASI AIR TANAH (%)			
			AMAN	RAWAN	KRITIS	RUSAK
1	Pasir Mulya	1,00	100%	-	-	-
2	Pasir Kuda	2,25	100%	-	-	-
3	Pasir Jaya	2,90	98,8%	1,2%	-	-
4	Gunung batu	2,20	100%	-	-	-
5	Loji	2,53	100%	-	-	-
6	Menteng	2,09	100%	-	-	-
7	Cilendek Timur	1,05	100%	-	-	-
8	Cilendek Barat	1,74	100%	-	-	-
9	Sindang Barang	3,70	100%	-	-	-
10	Margajaya	2,55	100%	-	-	-
11	Balumbang Jaya	1,54	100%	-	-	-
12	Situgede	2,73	100%	-	-	-
13	Bubulak	3,14	100%	-	-	-
14	Semplak	0,44	100%	-	-	-
15	Curug mekar	1,04	100%	-	-	-
16	Curug	1,95	100%	-	-	-

Sumber :Laporan Akhir Penyusunan Rencana Induk Terpadu Pengelolaan Air Tanah Kota Bogor 2011

Tabel II. 10 Konservasi Air Tanah Kecamatan Tanah Sareal

NO	KELURAHAN	LUAS (KM ²)	KONSERVASI AIR TANAH (%)			
			AMAN	RAWAN	KRITIS	RUSAK
1	Kedung Waringin	1,42	100%	-	-	-
2	Kedung Jaya	0,72	100%	-	-	-
3	Kebon Pedes	1,04	100%	-	-	-
4	Tanah Sareal	1,05	100%	-	-	-
5	Kedung Badak	1,95	100%	-	-	-
6	Sukaesmi	0,98	100%	-	-	-
7	Sukadamai	1,12	100%	-	-	-
8	Cibadak	4,64	100%	-	-	-
9	Kayumanis	2,43	100%	-	-	-
10	Mekarwangi	1,35	100%	-	-	-
11	Kencana	2,14	100%	-	-	-

Sumber :Laporan Akhir Penyusunan Rencana Induk Terpadu Pengelolaan Air Tanah Kota Bogor 2011

Tabel II. 11 Konservasi Air Tanah Kecamatan Bogor Utara

NO	KELURAHAN	LUAS (KM ²)	KONSERVASI AIR TANAH (%)			
			AMAN	RAWAN	KRITIS	RUSAK
1	Bantarjati	1,70	99,3%	0,7%	-	-
2	Tegal Gundil	1,98	89,4%	10,6%	-	-
3	Tanah Baru	2,33	97,8%	2,2%	-	-
4	Cimahpar	4,44	100%	-	-	-
5	Ciluar	2,20	100%	-	-	-
6	Cibuluh	1,54	100%	-	-	-
7	Kedung Halang	1,92	100%	-	-	-
8	Ciparigi	1,61	100%	-	-	-

Sumber :Laporan Akhir Penyusunan Rencana Induk Terpadu Pengelolaan Air Tanah Kota Bogor 2011

Tabel II. 12 Konservasi Air Tanah Kecamatan Bogor Tengah

NO	KELURAHAN	LUAS (KM ²)	KONSERVASI AIR TANAH (%)			
			AMAN	RAWAN	KRITIS	RUSAK
1	Paledang	1,78	-	100%	-	-
2	Gudang	0,32	-	100%	-	-
3	Babakan Pasar	0,42	-	100%	-	-
4	Tegallega	1,23	0,8%	99,2%	-	-
5	Babakan	1,22	18,8%	81,2%	-	-
6	Sempur	0,63	74%	26%	-	-
7	Pabaton	0,63	10,3%	89,7%	-	-
8	Cibogor	0,44	100%	-	-	-
9	Panaragan	0,27	74,2%	25,8%	-	-
10	Kebon Kelapa	0,45	100%	-	-	-
11	Ciwaringin	0,74	100%	-	-	-

Sumber :Laporan Akhir Penyusunan Rencana Induk Terpadu Pengelolaan Air Tanah Kota Bogor 2011

Tabel II. 13 Konservasi Air Tanah Kecamatan Bogor Timur

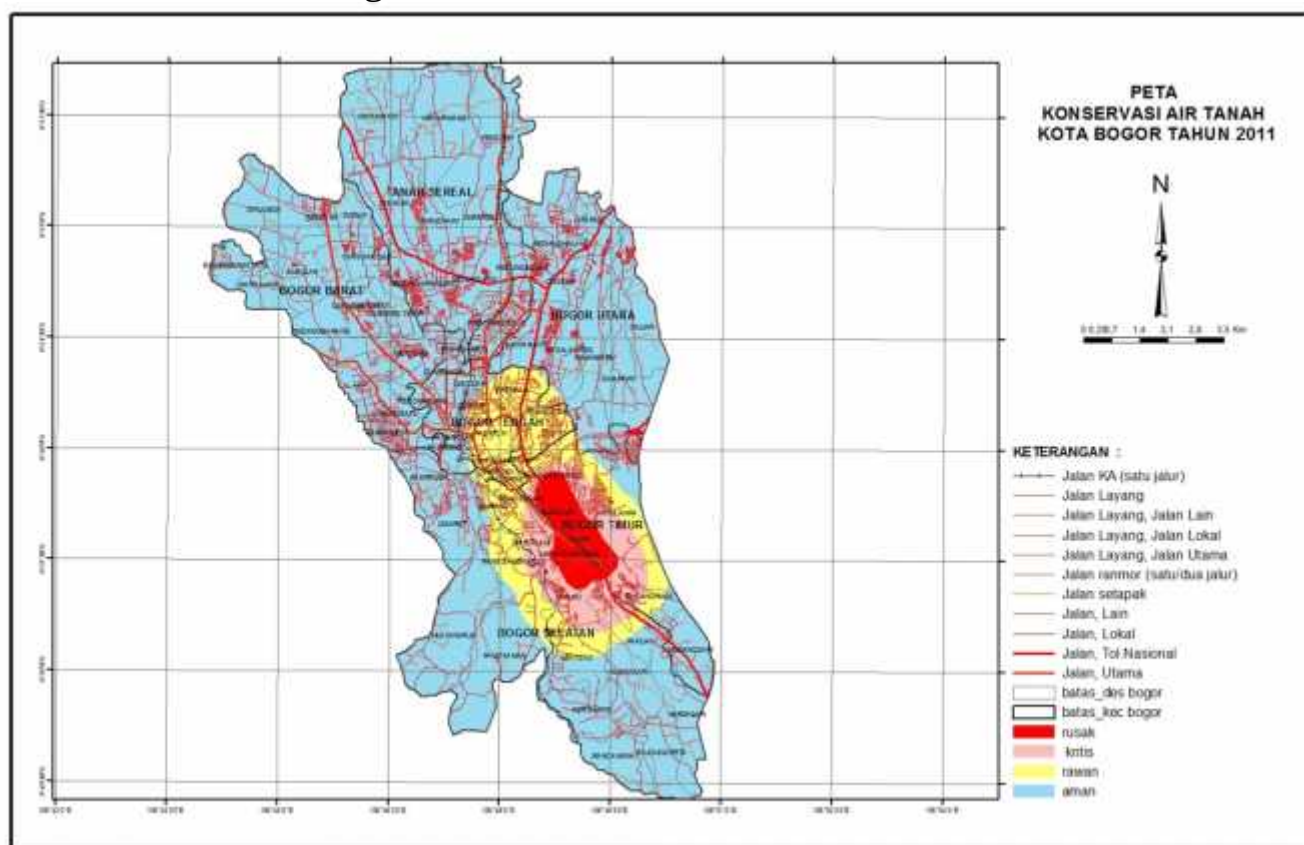
NO	KELURAHAN	LUAS (KM ²)	KONSERVASI AIR TANAH (%)			
			AMAN	RAWAN	KRITIS	RUSAK
1	Sindangsari	0,9	100%	-	-	-
2	Sindangrasa	1,06	38,2%	31,2%	30,2%	0,4%
3	Tajur	0,45	-	-	-	100%
4	Katulampa	4,91	10,3	37,4%	39,7%	12,6%
5	Baranangsiang	2,35	-	48,4%	14,3%	37,3%
6	Sukasari	0,48	-	13,7%	20,7%	65,6%

Sumber :Laporan Akhir Penyusunan Rencana Induk Terpadu Pengelolaan Air Tanah Kota Bogor 2011

Tabel II. 14 Konservasi Air Tanah Kecamatan Bogor Selatan

NO	KELURAHAN	LUAS (KM ²)	KONSERVASI AIR TANAH (%)			
			AMAN	RAWAN	KRITIS	RUSAK
1	Mulya Harja	4,79	100%	-	-	-
2	Pamoyanan	2,45	71,6%	26,5%	1,9%	-
3	Ranggamekar	1,48	12,3%	80,5%	7,2%	-
4	Genteng	1,73	33,4%	56,7%	9,9%	-
5	Kertamaya	3,60	100%	-	-	-
6	Rancamaya	2,00	100%	-	-	-
7	Bojongkerta	2,76	100%	-	-	-
8	Harjasari	1,49	100%	-	-	-
9	Muarasari	1,54	94,9%	5,1%	-	-
10	Pakuan	1,04	27,4%	31,8%	40,8%	-
11	Cipaku	1,74	-	19,6%	59,3%	21,1%
12	Lawang Gintung	0,61	-	2,8%	50%	47,2%
13	Batu Tulis	0,66	-	17,7%	82,3%	-
14	Bondongan	0,68	-	52,2%	41,0%	6,8%
15	Empang	0,79	14,5%	81,7%	3,8%	-
16	Cikaret	3,45	100%	-	-	-

Sumber :Laporan Akhir Penyusunan Rencana Induk Terpadu Pengelolaan Air Tanah Kota Bogor 2011



Gambar 1 Peta Konservasi Air Tanah Kota Bogor Tahun 2011

Sumber : Laporan Akhir Penyusunan Rencana Induk Terpadu Pengelolaan Air Tanah Kota Bogor 2011

II.1.3.3. KLIMATOLOGI

Kota Bogor mempunyai suhu rata-rata tiap bulan 32,1°C dengan suhu terendah 22,4°C dan suhu tertinggi 33,7°C. Suhu seperti itu antara lain dipengaruhi kelembaban udara sebesar 92,0 persen serta jumlah curah hujan setiap bulannya. Jumlah curah hujan di Kota Bogor pada tahun 2012, memperlihatkan bahwa Pos Hujan Atang Sanjaya menjadi Pos Hujan Empang dengan jumlah curah hujan terbesar yaitu 535,3. Menurut Stasiun Klimatologi, bulan November menjadi bulan dengan curah hujan terbesar pada tahun 2012 di Kota Bogor dengan Pos Hujan Empang terbesar yaitu 652,0. Sedangkan

untuk curah hujan rata-rata dalam rentang tiga tahun terakhir, dari tahun 2010 sampai dengan 2012 mengalami naik turun yang berkisar antara 236,3 sampai 535,3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di Tabel II. 15 dan Tabel II. 16.

Kualitas udara Kota Bogor secara keseluruhan dapat dikatakan baik atau sehat. Beberapa parameter kualitas udara Kota Bogor relatif tidak membahayakan lingkungan, karena gas-gas dan partikulat tersuspensi yang dihasilkan, pada umumnya masih di bawah ambang batas baku mutu udara ambien. Namun kadar debu dan tingkat kebisingan pada beberapa lokasi masih berada di atas persyaratan ambang batas yang ditentukan.

Tabel II. 15 Jumlah Curah Hujan di Kota Bogor Tahun 2012

N O.	BULAN	POS HUJAN EMPANG			STASIUN KLIMATO LOGI
		EMPANG	KATULAM PA	ATANG SANJAYA	
1	Januari	278,0	424,0	537,0	272,0
2	Februari	645,0	450,0	1152,0	549,0
3	Maret	143,0	164,0	31,0	136,0
4	April	432,0	257,0	735,0	390,0
5	Mei	235,0	266,0	256,0	195,0
6	Juni	164,0	160,0	206,0	94,0
7	Juli	64,0	37,0	210,0	117,0
8	Agustus	183,0	101,0	74,0	79,0
9	September	200,0	370,0	384,0	271,0
10	Oktober	656,0	374,0	920,0	540,0
11	November	653,0	636,0	1264,0	652,0
12	Desember	298,0	429,0	655,0	359,0
Rata-rata 2012		329,3	305,7	535,3	304,5
2011		236,3	245,6	387,7	237,6
2010		437,8	427,0	437,9	337,6

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2012

Tabel II. 16 Jumlah Curah Hujan Rata-rata Tahun 2010-2012

RATA-RATA/ TAHUN	POS HUJAN EMPANG			STASIUN KLIMATOLOGI
	EMPANG	KATULAMPA	ATANG SANJAYA	
2012	329,3	305,7	535,3	304,5
2011	236,3	245,6	387,7	237,6
2010	437,8	427,0	437,9	337,6

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2012

II.1.3.4. PENGGUNAAN LAHAN

Luas lahan sawah di enam kecamatan pada tahun 2012 yaitu 750 hektar dan luas bukan sawah yaitu 2.374 hektar. Kecamatan Bogor Selatan mempunyai luasan lahan sawah dan lahan bukan sawah terbesar masing-masing yaitu 283 hektar dan 580 hektar. Untuk lebih jelasnya mengenai luasan lahan pertanian menurut kecamatan, dapat dilihat pada Tabel II. 17.

Jenis penggunaan lahan bukan sawah dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi, yaitu: Tegal, Ditanami Pohon, Kolam, Tidak Diusahakan dan Lainnya. Lahan tegal mempunyai luasan yang paling besar yaitu 964 hektar dan Kecamatan Bogor Selatan mempunyai luas lahan bukan sawah terbesar di Kota Bogor.

Tabel II. 17. Luas Lahan Pertanian Menurut Kecamatan

NO	KECAMATAN	LAHAN SAWAH (HA)	LAHAN BUKAN SAWAH (HA)
1.	Bogor Selatan	283	580
2.	Bogor Timur	178	383
3.	Bogor Utara	2	496

NO	KECAMATAN	LAHAN SAWAH (HA)	LAHAN BUKAN SAWAH (HA)
4.	Bogor Tengah	1	16
5.	Bogor Barat	272	475
6.	Tanah Sareal	14	424
Jumlah			
2012		750	2.374
2011		750	2.374

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2013

Tabel II. 18. Luas Lahan Bukan Sawah Menurut Kecamatan

NO	KECAMATAN	LUAS LAHAN BUKAN SAWAH (HA)					JUMLAH
		TEGAL	DITANAMI POHON	KOLAM	TIDAK DIUSAHAKAN	LAINNYA	
1.	Bogor Selatan	282	73	19	11	195	580
2.	Bogor Timur	137	54	18	7	167	383
3.	Bogor Utara	195	93	13	3	192	496
4.	Bogor Tengah	3	3	5	0	5	16
5.	Bogor Barat	128	72	8	2	265	475
6.	Tanah Sareal	219	71	12	4	118	424
Jumlah							
2012		964	366	75	27	942	2.374
2011		964	366	75	27	942	2.374

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2013

Kemampuan lahan di Kota Bogor terbagi menjadi tiga kategori yaitu:

1. Lahan yang tidak dapat dikembangkan (*restricted area*)

Lahan yang tidak dapat dikembangkan adalah lahan yang sudah ditetapkan mempunyai fungsi perlindungan dan lahan yang ditetapkan tidak dapat dialihfungsikan ke penggunaan lain yang tidak sesuai. Secara umum lahan ini adalah lahan perlindungan setempat, kawasan perlindungan plasma nutfah dan hutan kota. Lahan ini terbagi menjadi dua kawasan yaitu kawasan perlindungan plasma nutfah dan hutan kota, serta kawasan perlindungan setempat. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung pada Pasal 60, bahwa kawasan perlindungan plasma nutfah adalah Kebun Raya Bogor. Wilayah Hutan Kota yang dapat dijadikan potensi RTH Kota Bogor kedepan adalah hutan-hutan penelitian yang notabene adalah milik departemen/kantor pusat yang sewaktu-waktu bisa dialihkan fungsinya menjadi fungsi komersial diantaranya: Hutan Penelitian Biotrop dan Kebun Penelitian IPB.

2. Lahan yang dapat dikembangkan dengan persyaratan (*limited area*)

Lahan yang dapat dikembangkan dengan persyaratan adalah lahan belum terbangun yang dapat dialihfungsikan untuk kegiatan perkotaan dengan persyaratan tertentu seperti pengaturan bangunan atau penggunaan teknologi tertentu. Di Kota Bogor lahan ini terdiri dari lahan resapan air dimana pembangunannya memerlukan pengaturan KDH dan/atau pemberlakukan aturan penyediaan sumur resapan.

3. Lahan yang dapat dikembangkan (*developed area*)

Lahan yang dapat dikembangkan adalah lahan terbangun atau lahan tidak terbangun yang dapat dialihfungsikan penggunaannya untuk keperluan aktivitas budidaya perkotaan, seperti perumahan dan prasarananya, industri, perdagangan dan jasa. Dalam kecenderungannya lahan tidak terbangun cenderung beralih fungsi menjadi lahan perumahan dan prasarananya atau industri. Sedangkan kegiatan komersial perkotaan berupa perdagangan dan jasa cenderung berubah dari penggunaan lahan perumahan atau lahan terbangun lainnya.

Tabel II. 19. Kemampuan Lahan Kota Bogor

NO	KECAMATAN	LAHAN TIDAK DAPAT DIKEMBANGKAN		LAHAN YANG DAPAT DIKEMBANGKAN		LAHAN DAPAT DIKEMBANGKAN TERBATAS	JUMLAH
		KAWASAN PERLINDUNGAN PLASMA NUTFAH DAN HUTAN KOTA	KAWASAN PERLINDUNGAN SETEMPAT	LAHAN POTENSIAL UNTUK PENGEMBANGAN	KAWASAN YANG SUDAH TERBANGUN	DAERAH RESAPAN/KONSERVASI AIR TANAH	
1	Bogor Barat	51,16	114,30	1.166,41	1.011,42	-	2.343,29
2	Bogor Selatan	-	139,22	1.927,60	944,12	282,30	3.293,24
3	Bogor Tengah	108,84	63,76	47,18	561,34	-	781,12
4	Bogor Timur	-	107,61	390,88	536,73	19,84	1.055,06
5	Bogor Utara	-	106,55	898,95	886,57	-	1.892,07
6	Tanah Sareal	-	103,78	1.162,96	1.053,97	-	2.320,70
	Jumlah	160,00	635,23	5.593,97	4.994,13	302,14	11.685,49

Sumber: Laporan akhir KLHS RTRW Kota Bogor, 2011-2031

II.1.3.5. POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor Tahun 2011 - 2031, wilayah Kota Bogor terbagi ke dalam lima Wilayah Pengembangan (WP) yaitu:

1. Wilayah Pengembangan (WP) A, dengan pusat WP di Kebun Raya dan sekitarnya;
2. Wilayah Pengembangan (WP) B, dengan pusat WP di kawasan di Bubulak dan sekitarnya;
3. Wilayah Pengembangan (WP) C, dengan pusat WP di kawasan di Yasmin dan Pasar TU Kemang;
4. Wilayah Pengembangan (WP) D, dengan pusat WP di kawasan di BORR Kedunghalang, Sentul, dan Warung Jambu;
5. Wilayah Pengembangan (WP) E, dengan pusat WP dikawasan Tajur R3, *Inner Ring Road*.

II.1.3.6. WILAYAH RAWAN BENCANA.

Berdasarkan hasil pemetaan daerah Tim Taruna Tanggap Bencana (Tagana) tahun 2011, di wilayah Kota Bogor sedikitnya terdapat 32 titik rawan bencana alam. Daerah rawan bencana tersebut merupakan daerah rawan longsor dan banjir tersebar di enam wilayah Kecamatan se-Kota Bogor. Daerah rawan longsor berada di Bogor Tengah, Bogor Selatan dan Bogor Barat. Sementara daerah rawan banjir biasanya berada di sisi Sungai Cisadane dan Sungai Ciliwung maupun aliran sungai kecil dari keduanya seperti di daerah Tanah Sareal, Bogor Barat, Bogor Timur dan Bogor Utara.

Titik rawan longsor di wilayah Bogor Tengah diantaranya Kelurahan Kebon Kelapa, Kelurahan Paledang dan Kelurahan Panaragan. Di Tanah Sareal yaitu di Kelurahan Kencana, Kelurahan Cibadak, dan Kelurahan Mekarwangi. Di wilayah Bogor Barat di Kelurahan Pasir Jaya, Cilendek Barat dan Kelurahan Cilendek Timur. Di wilayah Bogor Selatan yaitu di Kelurahan Cipaku, Kelurahan Mulyaharja, Kelurahan Harjasari dan Kelurahan Rangka Mekar. Di wilayah Bogor Timur yaitu di Kelurahan Katulampa, Baranangsiang dan Kelurahan Sukasari. Di wilayah Bogor Utara diantaranya di Kelurahan Cibuluh dan Kelurahan Ciparigi

Titik rawan banjir di Bogor Barat di antaranya di Kelurahan Pasir Jaya, Cilendek Barat dan Cilendek Timur. Kemudian di Bogor Selatan ada di Kelurahan Cipaku, Mulyaharja, Harjasari dan Ranca Mekar yang juga rawan longsor selain rawan banjir bandang. Di wilayah Bogor Timur terdapat di daerah Katulampa, Baranangsiang dan Sukasari. Sedangkan di Bogor Utara di Kelurahan Cibuluh dan Ciparigi.

II.1.4. ASPEK DEMOGRAFI

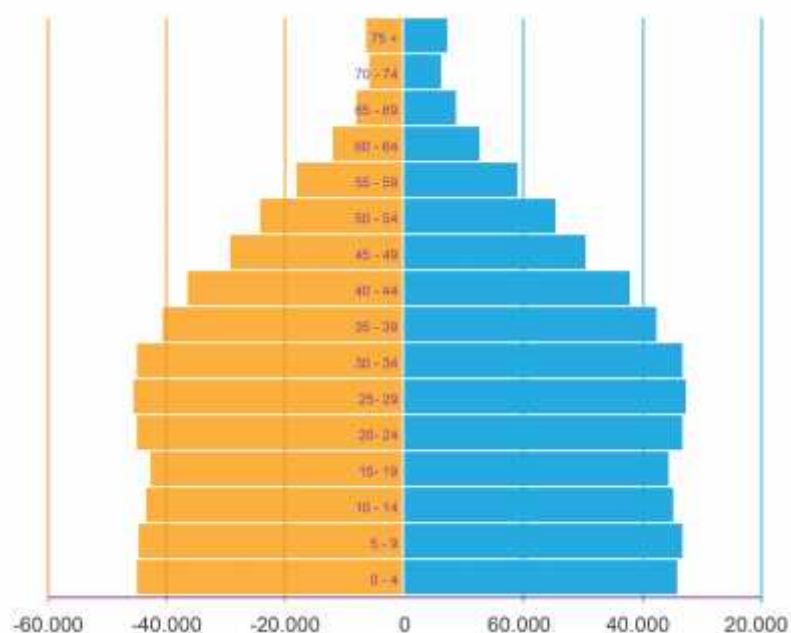
Penduduk Kota Bogor pada tahun 2012 terdapat sebanyak 1.004.831 jiwa yang terdiri atas 510.884 orang laki-laki dan sebanyak 493.947 orang perempuan. Dibandingkan dengan tahun 2011 jumlah penduduk Kota Bogor pada tahun 2012 bertambah sebanyak 37.433 orang atau meningkat sebanyak 3,87 persen. Dengan luas wilayah 118,50 kilometer persegi, kepadatan penduduk di Kota Bogor pada tahun 2012 mencapai 8.480 jiwa per kilometer persegi. Jumlah Rumah Tangga di Kota Bogor sebanyak 243.665 Rumah Tangga dengan rata-rata anggota rumah tangga sebanyak empat orang. Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Bogor Barat dengan jumlah penduduk 223.168 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk tertinggi sesuai golongan umur di Kota Bogor pada tahun 2012 berada dikisaran 25-29 tahun. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk sesuai golongan umur telah tersaji dalam Tabel II. 20.

Pada tahun 2013 jumlah penduduk Kota Bogor sebanyak 1.023.923 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 8.606 jiwa per kilometer persegi. Untuk rincian luas wilayah, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, jumlah rumah tangga dan kepadatan penduduk telah tersaji pada Tabel II. 20.

Tabel II. 20. Luas Wilayah, Jumlah RT/RW, Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kota Bogor

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (KM ²)	BANYAKNYA		JUMLAH PENDUDUK			RUMAH TANGGA	LAJU PERTUMBUHAN	KEPADATAN (PER KM ²)
			RT	RW	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH			
1	Bogor Selatan	30,81	769	190	97.698	92.837	190.535	45.714	2,5	6.184
2	Bogor Timur	10,15	318	59	50.553	49.430	99.983	24.052	2,5	9.851
3	Bogor Utara	17,72	527	108	91.874	88.973	180.847	44.218	3,0	10.206
4	Bogor Tengah	8,13	431	98	52.720	51.550	104.270	26.404	1,4	12.825
5	Bogor Barat	32,85	800	197	113.373	109.795	223.168	53.656	2,8	6.794
6	Tanah Sareal	18,84	634	128	104.666	101.362	206.028	49.621	3,9	10.936
Jumlah										
	2012	118,50	3.479	780	510.884	493.947	1.004.831	243.665	3,87	8.480
	2011	118,50	3.479	780	493.761	473.637	967.398	238.227	4,06	8.164

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota Bogor, 2013



Gambar II. 2 Piramida Penduduk Kota Bogor, 2012

Di tahun 2012 jumlah kelahiran lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kematian. Jumlah kelahiran yaitu 9.763 jiwa dengan laki-laki sebanyak 5.229 jiwa dan perempuan sebanyak 4.534 jiwa. Sedangkan untuk jumlah kematian, 4.496 jiwa meninggal dengan jumlah laki-laki sebanyak 2.578 jiwa dan perempuan sebanyak 1.918 jiwa. Kecamatan Bogor Barat menjadi kecamatan dengan jumlah kelahiran dan kematian tertinggi di Kota Bogor. Untuk jumlah kelahiran dan kematian menurut kecamatan telah tersaji pada Tabel II. 21.

Tabel II. 21. Jumlah Kelahiran dan Kematian di Kota Bogor

KECAMATAN	LAHIR			MENINGGAL		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L + P	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L + P
Bogor Selatan	1.082	980	2.062	616	452	1.068
Bogor Timur	624	495	1.119	230	161	391
Bogor Utara	378	314	692	184	150	334
Bogor Tengah	594	540	1.134	377	311	688
Bogor Barat	1.641	1.384	3.025	769	570	1.339
Tanah Sareal	910	821	1.731	402	274	676
Jumlah						
2012	5.229	4.534	9.763	2.578	1.918	4.496
2011	5.131	4.704	9.835	2.264	1.748	4.012

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2013

Berdasarkan hasil survei angkatan kerja nasional, jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) pada tahun 2012 terdapat sebanyak 710.307 orang. Dari seluruh penduduk usia kerja sebanyak 422.528 orang termasuk kedalam kelompok angkatan kerja. Sebanyak 383.111 orang diantaranya adalah penduduk yang bekerja dan sisanya sebanyak 39.417 orang adalah pengangguran yang sedang mencari pekerjaan.

Penduduk yang bekerja di Kota Bogor menurut pendidikan terdapat sebanyak 62.377 berpendidikan SLTP, sebanyak 141.240 orang berpendidikan SLTA dan sebanyak 75.892 orang berpendidikan Akademi dan Universitas. Lebih jelasnya mengenai distribusi pekerja menurut tingkat pendidikan terdapat pada Tabel II. 22.

Tabel II. 22. Jumlah Perkiraan Distribusi Pekerja Menurut Tingkat Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Tidak/Belum Tamat Sekolah	16.046	13.342	29.388
Skolah Dasar (SD)	52.606	21.608	74.214
SLTP	40.025	22.352	62.377
SLTA	106.753	34.487	141.240
Diploma /Akademi/ Universitas	46.100	29.792	75.892
Jumlah	261.530	121.581	383.111

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2013

Indikator-indikator ketenagakerjaan di Kota Bogor pada tahun 2012 memiliki lima perincian yang terdiri dari Penduduk Usia Kerja (PUK) sebesar 710.307 jiwa, angkatan kerja yang bekerja sebanyak 422.528 jiwa, angkatan kerja yang mencari pekerjaan sebanyak 39.417 jiwa, tingkat pengangguran di Kota Bogor sebanyak 9,33 persen, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 59,49 persen. Perubahan besarnya indikator-indikator utama ketenagakerjaan setiap tahunnya telah tersaji pada Tabel II. 23.

Penduduk Kota Bogor sebanyak 877.498 jiwa menganut agama Islam. Sebanyak 38.433 jiwa menganut agama Protestan dan 23.350 jiwa menganut agama Katolik. Jumlah penduduk di Kota Bogor menurut agama yang dianut telah disajikan pada Tabel II. 24.

Tabel II. 23. Indikator-indikator Utama Ketenagakerjaan

PERINCIAN	2009	2010	2011	2012
Penduduk Usia Kerja (PUK)	772.433	916.106	704.431	710.307
Angkatan Kerja	431.255	511.470	436.206	422.528
Bekerja	415.549	492.842	391.221	383.111
Mencari Pekerjaan	15.706	18.628	44.985	39.417
Bukan Angkatan Kerja (BAK)	341.178	404.637	268.225	287.779
Tingkat Pengangguran (%)	3,64	3,64	10,31	9,33
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	55,83	55,83	61,92	59,49

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2013

Tabel II. 24. Jumlah Pemeluk Agama di Kota Bogor

KECAMATAN	ISLAM	KATOLIK	PROTESTAN	HINDU	BUDHA	LAINNYA	JUMLAH
Bogor Selatan	168.889	4.123	6.321	451	1.163	-	180.947
Bogor Timur	81.787	6.782	7.798	470	1.050	-	97.887
Bogor Utara	158.212	3.653	5.920	1.430	1.000	-	171.204
Bogor Tengah	84.608	5.030	8.371	745	4.061	-	102.815
Bogor Barat	202.861	1.897	3.812	1.010	949	-	210.529
Tanah Sareal	181.141	1.855	6.211	850	721	-	190.788
Jumlah							
2012	877.498	23.350	38.433	4.956	9.933	-	954.170

Sumber: Kota Bogor Dalam angka, 2013

II.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dari aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari capaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga.

II.2.1. FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator:

II.2.1.1. PERTUMBUHAN PDRB

Kondisi perekonomian Kota Bogor dapat dikatakan membaik, hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB konstan dalam empat tahun terakhir yang mengalami pertumbuhan positif. PDRB atas dasar harga berlaku (Hb) mengalami peningkatan yang signifikan dari 11.904,60 miliar rupiah pada tahun 2009 menjadi 13.908,90 miliar rupiah pada tahun 2010. Selama tahun

2009-2010, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku dengan perkembangan nilai dari 4.526,58 miliar rupiah pada tahun 2009 meningkat menjadi 6.276,21 miliar rupiah pada tahun 2012, kemudian diikuti oleh sektor Industri Pengolahan dengan nilai 3.044,08 miliar rupiah pada tahun 2009 menjadi 4.765,77 miliar rupiah pada tahun 2012. Pada sektor Pengangkutan dan Komunikasi tumbuh dari nilai 1.719,77 miliar rupiah pada tahun 2009 menjadi 2.607,34 miliar rupiah pada tahun 2012. Sektor Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan pada tahun 2009 memiliki nilai 1.216,46 miliar rupiah kemudian meningkat menjadi 1.789,16 miliar rupiah pada tahun 2012. Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan dan kontribusi sektor dalam PDRB Kota Bogor selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel II.25 berikut.

Tabel II.25 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009 s.d 2012

NO	SEKTOR	2009		2010		2011		2012	
		(RP)	%	(RP)	%	(RP)	%	(RP)	%
1	Pertanian	24.008,43	0,20	25,916.73	0,19	28,118.04	0,18	30,275.03	0,17
2	Pertambangan dan Penggalian	207,34	0,001	223.97	0,001	219.49	0,0014	213.85	0,0012
3	Industri Pengolahan	3,044,078.40	25,57	3,644,311.09	26,20	4,158,989.50	26,85	4,765,773.70	27,51
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	245,221.37	2,06	281,368.13	2,02	310,200.08	2,00	348,135.59	2,01
5	Konstruksi	653,511.28	5,49	744,153.29	5,35	799,592.71	5,16	872,995.32	5,04
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	4,528,576.95	38,04	5,147,429.56	37,01	5,675,587.90	36,65	6,276,208.33	36,23
7	Pengangkutan dan Komunikasi	1,719,767.35	14,45	2,159,576.94	15,53	2,368,197.56	15,29	2,607,342.60	15,05
8	Keuangan, sewa, dan Jasa. Perusahaan	1,216,482.77	10,22	1,381,808.71	9,93	1,570,307.14	10,14	1,789,161.87	10,33
9	Jasa-jasa	472,745.77	3,97	524,111.15	3,77	576,014.54	3,72	633,229.69	3,66
	PDRB Atas Dasar Harga Konstan	11,904,599.66	100	13,908,899.57	100	15,487,253.9	100	17,323,335.99	100

Sumber: Diolah dari PDRB Kota Bogor, 2013

Pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 16,84 persen. Sektor-sektor yang berkontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan PDRB ini antara lain sektor Industri Pengolahan yang berkontribusi sebesar 14,59 persen. Sektor lainnya adalah sektor Keuangan, sewa dan jasa perusahaan berkontribusi sebesar 13,94 persen, sedangkan sektor Listrik, Gas dan Air bersih serta Pengangkutan dan Komunikasi berkontribusi sebesar 10,58 persen terhadap pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku.

Pada Tabel II.26 berikut juga dapat dilihat ada sektor yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian pada PDRB atas dasar harga berlaku, nilai pertumbuhannya minus 2,57 persen per tahun sedangkan atas dasar harga konstan tahun 2000 nilai pertumbuhannya mencapai minus 9,20 persen per tahun. Hal ini disebabkan oleh penurunan kuantitas sektor yang bergerak di sektor ini pada tahun 2012.

Dengan melihat perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan tahun 2000 dapat menjelaskan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan ini

bukan hanya terjadi karena kenaikan harga atau inflasi tetapi juga terjadi karena adanya peningkatan kapasitas produksi sektoral.

Tabel II.26 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009 s.d 2012 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan harga Konstan (Hk) Kota Bogor

NO	SEKTOR	2010		2011		2012	
		HB	HK	HB	HK	HB	HK
		%	%	%	%	%	%
1	Pertanian	7,95	3,22	8,49	2,84	7,67	2,22
2	Pertambangan dan Penggalian	8,02	1,53	-2	-9,47	-2,57	-9,2
3	Industri Pengolahan	19,72	6,38	14,12	6,2	14,59	6,14
4	Listrik,Gas dan Air bersih	14,74	6,95	10,25	6,99	12,23	7,02
5	Konstruksi	13,87	4,12	7,45	4,15	9,18	4,02
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	13,67	4,98	10,26	5,28	10,58	5,31
7	Pengangkutan dan Komunikasi	25,57	6,55	9,66	8,09	10,1	7,03
8	Keuangan, sewa, dan Js. Perusahaan	13,59	8,36	13,64	8,47	13,94	8,48
9	Jasa-jasa	10,87	5,36	9,9	5,42	9,93	5,22
	PDRB	16,84	6,14	11,35	6,19	11,86	6,15

Sumber: Diolah dari PDRB Kota Bogor, 2013

II.2.1.2. LAJU INFLASI KOTA BOGOR

Laju inflasi merupakan ukuran untuk menggambarkan kenaikan atau penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Laju inflasi tahun kalender di Kota Bogor pada tahun 2013 berada pada angka 8,55 persen. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat hanya 4,06 persen. Rata-rata pertumbuhan inflasi di Kota Bogor hanya sebesar 0,41 persen. Laju inflasi Kota Bogor ini jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan laju inflasi Provinsi Jawa Barat yang pada tahun 2012, laju inflasi Provinsi Jawa Barat hanya sebesar 3,53 persen dengan rata-rata pertumbuhannya mencapai 0,14 persen per tahun.

Selama empat tahun terakhir penyumbang terbesar bagi inflasi adalah kelompok bahan makanan dan makanan jadi. Pada tahun 2010 saja besarnya mencapai 17,10 persen yang dipicu oleh kenaikan beberapa harga komoditi bumbu-bumbuan naik tajam pada saat itu. Penyumbang inflasi selanjutnya diikuti oleh kelompok pengeluaran makanan jadi, rokok dan tembakau sebesar 2,49 persen, sedangkan penyumbang inflasi yang terkecil masih pada kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,42 persen.

Berdasarkan pengalaman tingginya inflasi pada tahun 2010, pemerintah kemudian melakukan upaya penekanan laju inflasi menjadi 2,85 persen pada tahun 2011. Laju inflasi kemudian meningkat kembali pada tahun 2012 yang lajunya mencapai 4,06 persen. Kelompok pengeluaran yang paling banyak masih di kelompok bahan makanan dan kelompok makanan jadi masih memberikan andil yang cukup besar terhadap besaran angka inflasi Kota Bogor, masing-masing sebesar 9,96 persen dan 4,13 persen.

Tabel II.27. Nilai Inflasi Rata-rata Tahun 2009 s.d 2013 Kota Bogor

INFLASI	2009	2010	2011	2012	2013	RATA-RATA PERTUMBUHAN
Kota Bogor	2,16	6,57	2,85	4,06	8,55	0,41

Sumber: BPS Kota Bogor, 2013

II.2.1.3. PDRB PER KAPITA DAN INDEKS GINI

PDRB per Kapita merupakan salah satu indikator produktivitas penduduk dihitung dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. PDRB per Kapita dapat dihitung atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB per

Kapita Kota Bogor selama empat tahun terakhir menunjukkan peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar konstan.

Pada tahun 2008 jumlah PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku hingga tahun 2012 Kota Bogor mengalami pertumbuhan yang cukup baik yaitu dari 11,08 juta rupiah pada tahun 2008 kemudian meningkat menjadi 17,34 juta rupiah pada tahun 2012. PDRB per Kapita atas dasar harga konstan mengalami peningkatan yang cukup pesat selama periode 2008-2012 yaitu sebesar 4,67 juta rupiah pada tahun 2008 menjadi 5,37 juta rupiah pada tahun 2012. Rata-rata pertumbuhan PDRB per Kapita 3,38 persen per tahun.

Tabel II.28 PDRB Perkapita Atas Dasar harga konstan Tahun 2000 Tahun 2008 s.d 2012 Kota Bogor

URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012
PDRB Per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp.juta/jiwa)	11,08	12,58	14,64	16,01	17,24
PDRB per kapita Atas dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Rp.juta /jiwa)	4,67	4,77	5,04	5,25	5,37

Sumber: Diolah dari PDRB Kota Bogor, 2013

PDRB per kapita Kota Bogor mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejalan dengan pertumbuhan PDRB, hanya saja pertumbuhan tersebut tidak diikuti dengan pemerataan. Hal tersebut ditunjukkan dari nilai Indeks Gini Kota Bogor.

Indeks Gini merupakan gambaran tingkat pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Indeks Gini Kota Bogor sebesar 0,3403 ini artinya pemerataan pendapatan di Kota Bogor mencapai level rendah. Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan ekonomi dalam distribusi pendapatan yang ditentukan dengan Koefisien Gini Rasio antara 0-1 (>0 dan <1), semakin rendah Koefisien Gini maka pendapatan suatu wilayah/ daerah semakin merata. Kategori ketimpangan tinggi apabila Indeks Gini lebih besar dari 0,5 dan kategori rendah dengan Indeks Gini dibawah 0,5 (tinggi $> 0,5$ dan rendah $<0,5$).

II.2.1.4. PERSENTASE PENDUDUK DIATAS GARIS KEMISKINAN

Berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) rumah tangga miskin dikelompokkan menjadi tiga, antara lain:

1. Kelompok 1 adalah rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10 persen terendah di Indonesia/paling Miskin.
2. Kelompok 2 adalah rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan antara 11 persen-20 persen terendah di Indonesia/hampir miskin.
3. Kelompok 3 adalah rumah tangga/ individu dengan kondisi kesejahteraan antara 21 persen-30 persen terendah di Indonesia/rentas miskin.

Di Kota Bogor jumlah rumah tangga miskin mencapai 49.522 rumah tangga yang tersebar di seluruh kecamatan. Jumlah rumah tangga miskin pada kelompok 1/paling miskin di Kota Bogor mencapai 17.188 rumah tangga. Pada kelompok 2/hampir miskin, jumlah rumah tangga miskin mencapai 16.167 rumah tangga, sedangkan penduduk yang masuk kelompok 3/rentan miskin sebanyak 16.167 rumah tangga.

Kecamatan dengan jumlah rumah tangga miskin terbanyak adalah Kecamatan Bogor Selatan dengan jumlah mencapai 12.922 rumah tangga dengan 4.958 adalah rumah tangga miskin kelompok 1, 4.266 rumah tangga miskin kelompok 2 dan 3.679 kelompok 3.

Tabel II. 29 Jumlah Rumah Tangga Miskin Kota Bogor

NAMA KECAMATAN	JUMLAH RUMAH TANGGA			TOTAL
	KEL 1 *)	KEL 2 *)	KEL 3 *)	
Bogor Selatan	4.958	4.285	3.679	12.922
Bogor Timur	1.537	1.395	1.446	4.378
Bogor Utara	2.638	2.595	2.743	7.976
Bogor Tengah	1.924	1.644	1.678	5.246
Bogor Barat	3.256	3.373	3.862	10.491
Tanah Sereal	2.875	2.875	2.759	8.509
Kota Bogor	17.188	16.167	16.167	49.522

Sumber: Data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2011.

Jumlah kepala keluarga miskin berdasarkan jenis kelamin 86,76 persen dari total rumah tangga miskin di Kota Bogor atau 42.967 KK didominasi oleh kepala keluarga laki-laki, sedangkan kepala keluarga perempuan dengan status miskin hanya sebanyak 6.555 KK atau sebesar 13,43 persen dari jumlah rumah tangga miskin di Kota Bogor. Bila dilihat dari latar belakang pendidikan kepala keluarga penyandang kemiskinan, kepala keluarga dengan latar belakang pendidikan Sekolah dasar (SD) memiliki jumlah terbanyak yang mencapai 21.494 KK atau sebesar 43,40 persen dari jumlah rumah tangga miskin, sedangkan kepala keluarga yang tidak memiliki ijazah ada sebanyak 11.091 KK penyandang kemiskinan.

Tabel II. 30 Kepala Keluarga Miskin berdasarkan Jenis Kelamin

JENIS KELAMIN KK	KK	%
Laki-laki	42.967	86,76%
Perempuan	6.555	13,24%
Total KK	49.522	100,00%
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN KK	KK	%
Tidak punya ijazah	11.091	22,40%
SD	21.494	43,40%
SMP	8.603	17,37%
SMA	5.535	11,18%
Perguruan Tinggi	130	0,26%
Tidak sekolah	2.669	5,39%
Total	49.522	100,00%

Sumber: Data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2011.

Persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kota Bogor mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Di banding tahun 2008 yaitu dari 9,72 persen atau dari 97.710 jiwa penduduk miskin menjadi 9,16 persen atau 88.900 jiwa penduduk miskin pada tahun 2011.

Pada tahun 2010 persentase penduduk miskin Kota Bogor mencapai 9,24 persen ini artinya ada sebanyak 90.200 jiwa penduduk miskin yang ada di Kota Bogor. Persentase ini jauh lebih rendah daripada persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat yang mencapai 10,31 persen.

Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Garis Kemiskinan di Kota Bogor pada tahun 2011 tercatat 305.870 rupiah per bulan. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2010 yang hanya mencapai 278.530 rupiah per bulan. Garis kemiskinan Kota Bogor ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Barat yang hanya sebesar 230.445 rupiah per bulan.

Tabel II. 31 Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kota Bogor

NO	TAHUN	JUMLAH PENDUDUK MISKIN	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN	GARIS KEMISKIN
1	2008	97,710	9,72	223.218
2	2009	91,710	8,82	256.414
3	2010	90,200	9,24	278.530
4	2011	88,900	9,16	305.870

Sumber: Bogor Dalam Angka, 2013

II.2.1.5. ANGKA KRIMINALITAS YANG TERTANGANI

Dinamika perkembangan Kota Bogor yang pesat dengan kemajemukan masyarakat akan berdampak pada perubahan sosial di masyarakat. Disisi lain peningkatan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan fasilitas akan berdampak negatif seperti semakin bertambahnya tingkat pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan dan akan memicu meningkatnya angka kriminalitas. Sampai dengan tahun 2012 rasio kriminalitas di Kota Bogor tercatat sebesar 4,66 persen. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2011 yang tercatat sebesar 4,20 persen.

Jika angka kriminalitas pada suatu daerah semakin rendah ini menggambarkan tingginya rasa aman masyarakat. Begitu juga sebaliknya jika angka kriminalitas tinggi maka rasa aman masyarakat semakin rendah. Tingkat kriminalitas di Kota Bogor selama empat tahun terakhir termasuk dalam kategori rendah, hal tersebut ditunjukkan oleh kondisi di kalangan masyarakat yang aman, nyaman dan tentram dan tidak adanya gejolak di masyarakat.

Tabel II. 32 Angka Kriminalitas Yang Tertangani di Kota Bogor

NO	TAHUN	ANGKA KRIMINALITAS YANG TERTANGANI
1	2009	4,96
2	2010	4,71
3	2011	4,20
4	2012	4,66

Sumber: Bogor Dalam Angka, 2013

II.2.2. FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL

Analisis pada fokus kesejahteraan sosial meliputi indikator Angka Melek Huruf, Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, Angka Pendidikan yang Ditamatkan, Angka Partisipasi Murni, Angka Kelangsungan Hidup Bayi, Angka Usia Harapan Hidup, Persentase Penduduk yang Memiliki Lahan, dan Rasio Penduduk yang Bekerja. Analisis beberapa indikator pada fokus kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

II.2.2.1. PENDIDIKAN

Pembangunan pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator pendidikan antara lain Angka Melek Huruf, Angka Rata-Rata Lama Sekolah, Partisipasi Murni, Angka Putus Sekolah dan Angka Pendidikan yang Ditamatkan.

II.2.2.1.1. ANGKA MELEK HURUF (AMH)

Kondisi makro Kota Bogor dari sisi pendidikan semakin membaik namun belum ada peningkatan yang cukup signifikan dari tahun lalu. Angka Melek Huruf (AMH) pada tahun 2012 naik menjadi 98,97 persen dibandingkan dengan tahun 2011 yang tercatat hanya 98,79 persen. Bila diterjemahkan maka setiap 100 orang penduduk di Kota Bogor pada tahun 2012 masih ada satu orang yang tidak bisa membaca.

Di Kota Bogor pada tahun 2012 tercatat memiliki 706.618 jiwa penduduk pada kelompok usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis. Angka ini meningkat 9.740 jiwa daripada tahun sebelumnya yang hanya mencapai 696.878 jiwa. Berikut adalah data Perkembangan AMH pada tiga titik tahun.

Tabel II. 33 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2009 s.d 2012 Kota Bogor

NO	URAIAN	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	619.035	687.390	696.878	706.618
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	611.297	695.950	705.413	713.972
3	Angka Melek Huruf (%)	98,75	98,77	98,79	98,97

Sumber: Diolah dari Bogor Dalam Angka, 2013

II.2.2.1.2. ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Angka Rata-Rata Lama Sekolah untuk pendidikan wajib belajar sembilan tahun cenderung tetap dengan angka berkisar 9,9 tahun. Artinya penduduk di Kota Bogor umumnya bersekolah hanya sampai dengan kelas satu tingkat Sekolah Menengah Atas (Kelas X).

Tabel II. 34 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Bogor

URAIAN	2009	2010	2011	2012
Rata-rata lama sekolah	9,77	9,79	9,8	9,9

Sumber: Diolah Dari IPM Kota Bogor, 2012

Bila dilihat dari data kecamatan pada tahun 2011 tercatat penduduk Kecamatan Bogor Utara memiliki rata-rata lama sekolah yang lebih lama dibandingkan dengan kecamatan lainnya yaitu 10,41 tahun. Ini artinya penduduk di Kecamatan Bogor Utara umumnya bersekolah sampai dengan kelas dua Sekolah Menengah Atas.

Angka Rata-Rata Lama Sekolah paling rendah di Kota Bogor adalah penduduk di Kecamatan Bogor Selatan, dengan rata-rata lama sekolah 8,66 tahun yang artinya hanya sampai dengan kelas tiga Sekolah Menengah Pertama. Angka ini nyaris memenuhi target pendidikan nasional Pemerintah Pusat.

Tabel II. 35 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Berdasarkan Kecamatan Kota Bogor

NO	KECAMATAN	RATA-RATA LAMA SEKOLAH
1	Bogor Selatan	8,66
2	Bogor Timur	8,71
3	Bogor Utara	10,41
4	Bogor Tengah	9,85
5	Bogor Barat	9,95
6	Tanah Sareal	9,49
	Kota Bogor	9,8

Sumber: IPM Kota Bogor, 2012

II.2.2.1.3. ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK)

Angka Partisipasi Kasar sekolah di Kota Bogor untuk tingkat pendidikan SD/MI mengalami penurunan dari 119,27 persen pada tahun 2012 menjadi 114,4 persen pada tahun 2013. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya jumlah siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI di Kota Bogor dari 125.454 jiwa pada 2012 kemudian turun menjadi 124.339 jiwa.

Angka Partisipasi Kasar untuk tingkat pendidikan SMP/MTs pun mengalami penurunan yang signifikan. Pada 2012 tercatat Angka Partisipasi Sekolah-nya mencapai 117,51 persen kemudian turun signifikan menjadi 104,66 persen. Hal ini disebabkan oleh menurunnya jumlah siswa yang

bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs dari 60.494 jiwa pada tahun 2012 kemudian tercatat hanya 55.086 jiwa pada tahun 2013.

Peningkatan yang cukup signifikan pada angka partisipasi kasar ternyata justru terjadi pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK. Pada 2013 tercatat APK SMA/MA/SMK mencapai 129 persen. Angka ini melonjak signifikan dari tahun 2012 yang tercatat 116,46 persen. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah siswa yang berpartisipasi bersekolah pada jenjang tersebut yang tercatat mencapai 66.453 jiwa pada tahun 2013 padahal di tahun 2012 tercatat hanya 60.057 jiwa.

Tabel II. 36 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2009 s.d 2013 Kota Bogor

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2009	2010	2011	2012	2013
1	SD/MI					
	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang	110.62	115.17	122.14	125.45	124.33
	jumlah penduduk kelompok usia 7-12	98.096	105.28	106.09	105.18	108.68
	APK SD/MI	112,77	109,39	115,13	119,27	114,4
2	SMP/MTs					
2.1	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang	52.760	50.415	48.785	60.494	55.086
2.2	jumlah penduduk kelompok usia 13-15	47.639	51.053	51.359	51.480	52.631
2.3	APK SMP/MTs	110,75	98,75	94,99	117,51	104,66
3	SMA/MA/SMK					
3.1	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang	55.469	57.635	62.185	60.057	66.453
3.2	jumlah penduduk kelompok usia 16-18	51.246	54.906	50.689	51.560	51.512
3.3	APK SMA/MA/SMK	104,97	104,97	122,68	116,48	129

Sumber: Data Dinas Pendidikan Kota Bogor, 2013

Angka Partisipasi Kasar tingkat SD/MI pada Kecamatan Bogor Tengah merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kota Bogor. APK Kecamatan Bogor Tengah pada tahun 2013 tercatat mencapai 196,72 persen. APK SD/MI terendah di Kota Bogor dapat terlihat di Bogor Utara yang hanya mencapai 87,81 persen. Hal ini disebabkan oleh jumlah partisipasi pada kelompok ini hanya 17.097 jiwa sedangkan penduduk dengan usia sekolah tersebut tercatat ada sebanyak 19.470 jiwa.

APK untuk tingkat SMP/MTs di Kota Bogor paling tinggi terjadi di Kecamatan Bogor Tengah dengan Angka Partisipasi Kasar mencapai 270.49 persen. Hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs yang tercatat mencapai 13.968 jiwa. APK terendah tercatat di Kecamatan Bogor Timur dengan angka hanya 55,12 persen. Hal ini disebabkan oleh rendahnya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Pada tahun 2013 di Bogor Timur hanya tercatat ada sebanyak 2.930 jiwa siswa yang bersekolah pada tingkat pendidikan SMP/MTs padahal jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang harusnya bersekolah pada jenjang tersebut tercatat ada 5.316 jiwa.

Di Kecamatan Bogor Tengah lagi-lagi menjadi kecamatan dengan angka partisipasi sekolah tertinggi di Kota Bogor. APK Kecamatan Bogor Tengah pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK yang mencapai 226,9 persen dengan jumlah siswa yang berpartisipasi sekolah pada tingkat SMA/MA/SMK sebesar 11.810 jiwa. Sedangkan Kecamatan Bogor Selatan tercatat memiliki nilai APK SMA/MA/SMK terendah di Kota Bogor dengan nilai hanya 58,23 persen. Hal ini disebabkan rendahnya jumlah siswa yang bersekolah pada jenjang tersebut yang tercatat hanya 6.151 jiwa. Padahal penduduk usia 16-18 tahun yang harusnya bersekolah pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK ada sebanyak 10.564 jiwa.

Tabel II. 37 Angka Partisipasi Kasar Menurut Kecamatan Tahun 2013 Kota Bogor

NO	KECAMATAN	JUMLAH								
		SISWA YANG BERSEKOLAH SD/MI	PENDUDUK USIA 7-12 TH	APK	SISWA BERSEKOLAH SMP/MTS	PENDUDUK USIA 13-15 TH	APK	SISWA BERSEKOLAH SMA/MA/SMK	PENDUDUK USIA 16-18TH	APK
1	Bogor Barat	25.425	23.125	109,95	10.108	10.900	92,73	12.675	10.732	118,1
2	Bogor Timur	13.586	10.902	124,62	2.930	5.316	55,12	10.513	5.201	202,13
3	Bogor Utara	17.097	19.470	87,81	6.580	9.517	69,14	13.050	9.205	141,77
4	Bogor Selatan	23.274	22.612	102,93	11.001	11.044	99,61	6.151	10.564	58,23
5	Bogor Tengah	20.835	10.591	196,72	13.968	5.164	270,49	11.810	5.205	226,9
6	Tanah Sareal	24.122	21.984	109,73	10.499	10.690	98,21	12.254	10.605	115,55
	Jumlah	124.339	108.684	114,4	55.086	52.631	104,66	66.453	51.512	129

Sumber: Data Dinas Pendidikan Kota Bogor, 2013

II.2.2.1.4. ANGKA PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN

Perkembangan angka pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2013 pada penduduk usia 15 tahun keatas tidak mengalami perubahan yang signifikan bahkan cenderung tetap dibandingkan tahun 2012 untuk jenjang SMA/SMK dan SMP/MTs. Untuk jenjang pendidikan SMA/SMK pada tahun 2013 mengalami perkembangan 1,72 persen dibandingkan tahun 2012 yang mengalami pertumbuhan 1,7 persen, sedangkan untuk jenjang SMP/MTs mengalami perkembangan sebesar 1,67 persen pada tahun 2013 dari 1,6 persen pada tahun 2012.

Perkembangan angka pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2012 untuk jenjang pendidikan perguruan tinggi mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2011. Pada tahun 2012 tercatat 11,32 persen sedangkan pada tahun 2011 hanya tercatat 10,92 persen. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk usia produktif (usia 15 tahun ke atas) yang tersedia di Kota Bogor umumnya memiliki tingkat pendidikan tertinggi sampai dengan Perguruan Tinggi.

Tabel II. 38 Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) Penduduk Usia 15 Tahun keatas Tahun 2009 s.d 2013 Kota Bogor

NO	APT	2009	2010	2011	2012	2013
1	SD	1,07	1,03	1,78	1,8	2,02
2	SMP	0,9	0,95	1,41	1,6	1,67
3	SMA	0,93	0,98	1,73	1,7	1,72
4	Perguruan Tinggi	10,33	7,76	10,93	11,32	n/a

Sumber: Data Dinas Pendidikan Kota Bogor, 2013

II.2.2.1.5. ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)

Angka Partisipasi Murni merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. Keberhasilan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni. APM menunjukkan perbandingan antara jumlah siswa yang berasal dari Kota Bogor dengan jumlah penduduk Kota Bogor pada usia sekolah.

Tabel II. 39 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2009 s.d 2013 Kota Bogor

NO	JENJANG PENDIDIKAN	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	(2013)
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	100.685	97.807	106.064	108.407	106.616
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	98.096	105.289	105.185	105.185	109.714
1.3.	APM SD/MI	102,64	92,89	100,84	103,06	97,18
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	36.111	97.807	39.272	51.480	47.159
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	47.639	105.289	51.480	40.094	52.631
2.3.	APM SMP/MTs	75,80	92,89	76,29	128,40	89,60
3	SMA/MA/SMK					
3.1.	Jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	38.318	38.244	38.028	40.506	47.159
3.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	51.246	54.906	51.560	51.560	52.631
3.3.	APM SMA/MA/SMK	74,77	69,65	73,75	78,56	89,60

Sumber: Data Dinas Pendidikan Kota Bogor, 2013

Realisasi APM SD/Mi di kota Bogor pada tahun 2013 tercatat sebesar 97,18. Jika membandingkan dengan tahun lalu jumlah ini mengalami penurunan sebesar 5,88 poin, pada tahun 2012 nilai APM mencapai 103,06. Penurunan angka ini disebabkan oleh penurunan jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI yaitu penurunan sebanyak 1.791 siswa dimana pada tahun 2012 sebanyak 108.407 siswa pada tahun 2013 turun menjadi 106.616 siswa.

Realisasi APM SMP/MTs di Kota Bogor pada tahun 2013 mencapai angka 89,60, jika dibandingkan dengan tahun lalu penurunan ini cukup signifikan karena pada tahun 2012 nilai APM SMP/MTs mencapai 128,40. Penurunan ini disebabkan berkurangnya jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs yang tahun 2012 berjumlah 51.480 siswa, pada tahun 2013 hanya 47.159 siswa. Capaian APM SMA/MA/SMK di Kota Bogor pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2012 hanya mencapai nilai 78,56 pada tahun 2013 APM SMA/MA/SMK Kota Bogor mencapai angka 89,60.

Tabel II. 40 Angka Partisipasi Murni Tahun 2013 menurut Kecamatan Kota Bogor

NO	KECAMATAN	SD/MI			SMP/MTS			SMA/MA/SMK		
		JUMLAH SISWA USIA 7-12 TH BERSEKOLAH DI SD/MI	JUMLAH PENDUDUK USIA 7-12 TH	APM	JUMLAH SISWA USIA 13-15 TH BERSEKOLAH DI SMP/MTS	JUMLAH PENDUDUK USIA 13-15 TH	APM	JUMLAH SISWA USIA 16-18 TH BERSEKOLAH DI SMA/MA/SMK	JUMLAH PENDUDUK USIA 16-18 TH	APM
1	Bogor Barat	21.394	23.524	91	6.632	10.900	61	8.634	10.732	80
2	Bogor Timur	11.718	10.925	107	1.931	5.316	36	5.599	5.201	108
3	Bogor Utara	14.966	19.635	76	4.436	9.517	47	9.212	9.205	100

NO	KECAMATAN	SD/MI			SMP/MTS			SMA/MA/SMK		
		JUMLAH SISWA USIA 7-12 TH BERSEKOLAH DI SD/MI	JUMLAH PENDUK USIA 7-12 TH	APM	JUMLAH SISWA USIA 13-15 TH BERSEKOLAH DI SMP/MTS	JUMLAH PENDUK USIA 13-15 TH	APM	JUMLAH SISWA USIA 16-18 TH BERSEKOLAH DI SMA/MA/SMK	JUMLAH PENDUK USIA 16-18 TH	APM
4	Bogor Selatan	19.791	22.802	87	7.396	11.044	67	3.986	10.564	38
5	Bogor Tengah	17.932	10.721	167	19.303	5.164	374	6.644	5.205	128
6	Tanah Sareal	20.815	22.107	94	7.461	10.690	70	6.962	10.605	66
Jumlah		106.616	109.714	97,18	47.159	52.631	89,60	41.037	51.512	79,66

Sumber: Data Dinas Pendidikan Kota Bogor, 2013

Jika membandingkan nilai APM berdasarkan kecamatan, maka realisasi APM SD/MI di Kecamatan Bogor Tengah merupakan yang paling tinggi yakni mencapai angka 167, sementara APM SD/MI yang paling rendah di tingkat kecamatan adalah kecamatan Bogor Utara yaitu hanya mencapai 76. Senada dengan APM di tingkat SD/MI, realisasi APM SMP/MTs di Kecamatan Bogor Tengah merupakan yang paling tinggi nilai partisipasinya yakni mencapai 374. Sementara yang paling rendah nilai partisipasinya adalah Kecamatan Bogor Timur dengan angka 36. Nilai ini sangat rendah jika dibandingkan dengan standar nilai tertinggi APM Nasional dengan angka 100. Untuk capaian APM tingkat SMA/MA/SMK nilai APM yang paling tinggi berasal dari Kecamatan Bogor Tengah dengan nilai APM sebesar 128, sementara paling rendah berasal dari Kecamatan Bogor Selatan yang hanya mencapai nilai 38.

II.2.2.2. KESEHATAN

II.2.2.2.1. ANGKA KELANGSUNGAN HIDUP BAYI

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap kualitas sumberdaya manusia. Tujuan dari pembangunan kesehatan adalah terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum. Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran mencapai 19,52. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan standar nasional yaitu 40 per kelahiran hidup. Nilai AKB 19,52 per kelahiran hidup termasuk kategori angka kematian *hardrock* yang sangat sulit untuk diturunkan ke depannya dalam hal jumlah. Tahap *hardrock* merupakan tahap ketiga dari *Infrant Mortality Rate* (IMR) dengan besar IMR dibawah 30 per 1000 kelahiran. Sementara Angka Kematian Ibu (AKI) mencapai 13.

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) pada tahun 2013 di Kota Bogor sebesar 996,75 menggambarkan peluang bayi yang hidup usia di bawah satu tahun diantara 1.000 bayi yang lahir adalah sebanyak 996,75 bayi. Jika melihat dari cakupan kecamatan di Kota Bogor, maka kecamatan dengan AKHB paling tinggi ditunjukkan pada Kecamatan Bogor Timur yakni sebesar 998,02 bayi setiap 1.000 bayi yang lahir. Pada umumnya setiap kecamatan di Kota Bogor harapan seorang bayi hidup cukup tinggi dengan AKHB berkisar antara 994,75 hingga 998,02 bayi.

Tabel II. 41 Jumlah Kematian Bayi, Kelahiran Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Bogor Tahun 2013

KECAMATAN	JUMLAH KEMATIAN BAYI USIA <1 TAHUN TAHUN 2013	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP TAHUN 2013	ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB)	ANGKA KEMATIAN IBU (AKI)	ANGKA KELANGSUNGAN HIDUP BAYI (AKHB)
Bogor Barat	11	4.421	2,49	1	997,51

KECAMATAN	JUMLAH KEMATIAN BAYI USIA <1 TAHUN TAHUN 2013	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP TAHUN 2013	ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB)	ANGKA KEMATIAN IBU (AKI)	ANGKA KELANGSUNGAN HIDUP BAYI (AKHB)
Bogor Timur	4	2.023	1,98	2	998,02
Bogor Utara	11	3.434	3,20	4	996,80
Bogor Selatan	14	3.777	3,71	4	996,29
Bogor Tengah	11	2.095	5,25	1	994,75
Tanah Sareal	11	3.804	2,89	1	997,11
Jumlah	62	19.554	19,52	13	996,75

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kota Bogor, 2013

II.2.2.2.2. ANGKA HARAPAN HIDUP

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidupnya. Indikator ini sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk khususnya di bidang kesehatan. Berdasarkan sumber IPM Kota Bogor Tahun 2012, AHH di Kota Bogor dalam kurun waktu 2007-2011 menunjukkan peningkatan, dimana pada tahun 2010 AHH penduduk Kota Bogor mencapai 68,87 tahun dan pada tahun 2011 meningkat sebesar 0,09 menjadi 68,96 tahun.

Peningkatan AHH di Kota Bogor cukup baik walaupun peningkatan dari tahun ke tahun tidak begitu signifikan, untuk itu beberapa variabel yang memiliki hubungan terhadap angka harapan hidup perlu lebih diperhatikan lagi, seperti persentase penolong persalinan medis, jumlah dokter, persentase angka kesakitan, keadaan lingkungan perumahan dan penyediaan air bersih sehingga peningkatan AHH di Kota Bogor lebih signifikan di tahun yang akan datang.

II.2.2.2.3. PERSENTASE BALITA GIZI BURUK

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi tidak hanya diketahui dengan mengukur berat badan (BB) atau tinggi badan (TB) sesuai dengan umur (U) secara masing-masing, tetapi juga dalam bentuk indikator yang dapat merupakan kombinasi antara ketiganya. Masing-masing indikator mempunyai makna tersendiri. Seperti kombinasi antara BB dan U membentuk indikator BB menurut U yang disimpulkan dengan "BB/U" kombinasi antara TB dan U atau "TB/U" dan kombinasi antara BB dan TB membentuk indikator BB menurut TB atau "BB/TB".

Tabel II. 42 Jumlah Balita Gizi Buruk di Kecamatan Kota Bogor Tahun 2009-2013

NO	KECAMATAN	JUMLAH BALITA GIZI BURUK				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Bogor Barat	47	47	127	138	43
2	Bogor Timur	14	9	65	11	8
3	Bogor Utara	47	36	41	60	94
4	Bogor Selatan	59	138	130	94	81
5	Bogor Tengah	32	22	97	62	63
6	Tanah Sareal	30	44	95	96	89
	Jumlah	229	296	555	461	378

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kota Bogor, 2013

Jumlah balita yang menderita gizi buruk di Kota Bogor pada tahun 2013 tercatat sebanyak 378 kasus, dimana angka balita gizi buruk paling banyak berasal dari Kecamatan Bogor Utara yakni sebanyak 94 kasus, angka ini mengalami peningkatan dibanding tahun tahun sebelumnya, terlihat pada tabel di atas, pada tahun 2011 kasus balita gizi buruk terdapat 41 kasus,

kemudian pada tahun 2012 meningkat lagi sebesar 19 kasus menjadi 60 kasus, dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 34 kasus. Jumlah kasus balita gizi buruk di Kecamatan Bogor Utara ini cukup memprihatinkan karena jika merujuk pada tabel di atas, maka terlihat kecamatan lainnya di Kota Bogor justru mengalami penurunan kasus balita gizi buruk seperti di Kecamatan Bogor Barat yang penurunan angka gizi buruknya cukup signifikan yakni sebesar 95 kasus.

Untuk kasus balita gizi buruk paling sedikit terjadi di Kecamatan Bogor Timur yang hanya ditemukan delapan kasus, angkanya menurun dari tahun lalu dengan jumlah sebanyak satu kasus. Penurunan jumlah balita gizi buruk di sebagian besar kecamatan di Kota Bogor menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan peran posyandu yang semakin membaik.

Tabel II. 43 Jumlah Balita di Kecamatan Kota Bogor Tahun 2009-2013

NO	KECAMATAN	JUMLAH BALITA				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Bogor Barat	13.814	24.210	13.953	17.941	18.305
2	Bogor Timur	6.764	6.756	7.195	7.722	7.922
3	Bogor Utara	12.347	11.894	12.355	12.622	13.832
4	Bogor Selatan	13.803	14.819	14.051	14.625	16.509
5	Bogor Tengah	7.732	6.682	7.337	7.289	7.769
6	Tanah Sareal	16.241	17.348	14.569	16.308	15.470
	Jumlah	70.701	81.709	69.460	76.507	79.807

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kota Bogor, 2013

Jumlah balita di Kota Bogor pada tahun 2013 berjumlah 79.807 jiwa jumlah ini meningkat dibanding dua tahun sebelumnya yakni sebanyak 69.460 jiwa di tahun 2011 dan 76.507 jiwa di tahun 2012. Jumlah balita paling banyak tercatat berasal dari kecamatan Bogor Barat yakni sebanyak 18.305 jiwa dan kecamatan dengan jumlah balita paling sedikit adalah Kecamatan Bogor Tengah yakni sebanyak 7.769 jiwa.

Tabel II. 44 Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Bogor Menurut Kecamatan Tahun 2009-2013

NO.	KECAMATAN	PERSENTASE BALITA GIZI BURUK				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Bogor Barat	0,34	0,19	0,91	0,76	0,23
2	Bogor Timur	0,2	1,33	0,9	0,14	0,1
3	Bogor Utara	0,38	0,3	0,33	0,47	0,68
4	Bogor Selatan	0,42	0,93	0,92	0,64	0,49
5	Bogor Tengah	0,41	0,32	1,3	0,85	0,81
6	Tanah Sareal	0,18	0,25	0,65	0,58	0,57
	Jumlah	0,32	0,36	0,79	0,6	0,47

Sumber: Data Dinas Pendidikan Kota Bogor, 2013

Persentase jumlah balita yang menderita gizi buruk di Kota Bogor pada tahun 2013 adalah sebesar 0,47 persen, besarnya persentase ini menunjukkan adanya penurunan balita gizi buruk dari tahun 2011 hingga tahun 2013. Penurunan persentase balita gizi buruk juga mengindikasikan adanya peningkatan kesehatan balita itu sendiri dan kesadaran ibu-ibu untuk memberikan makanan yang bergizi untuk anaknya.

II.2.2.2.4. KESEMPATAN KERJA (RASIO PENDUDUK YANG BEKERJA)

Penduduk Kota Bogor pada tahun 2012 terdapat sebanyak 1.004.831 orang yang terdiri atas 510.884 orang laki-laki dan sebanyak 493.947 perempuan. Dibandingkan dengan tahun 2011 jumlah penduduk Kota Bogor pada tahun 2012 bertambah sebanyak 37.433 orang atau meningkat sebanyak

3,87 persen. Berdasarkan hasil survei angkatan kerja nasional, jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) pada tahun 2012 terdapat sebanyak 422.528 orang.

Dari seluruh penduduk usia kerja sebanyak 422.528 orang termasuk kedalam kelompok angkatan kerja. Sebanyak 383.111 orang diantaranya adalah penduduk yang bekerja dan sisanya sebanyak 39.417 orang adalah pengangguran yang sedang mencari pekerjaan.

Tabel II. 45 Rasio Penduduk yang Bekerja dengan Angkatan Kerja

GOLONGAN UMUR	ANGKATAN KERJA		JUMLAH PENDUDUK USIA 15 TAHUN KEATAS(BEKERJA+MENCARI PEKERJAAN)
	BEKERJA	MENCARI PEKERJAAN (MENGANGGUR)	
15-19	17.290	9.989	27.279
20-24	37.385	12.018	49.403
25-29	46.012	3.355	49.367
30-34	68.054	3.903	71.957
35-39	58.728	1.488	60.216
40-44	46.312	1.488	47.800
45-49	37.630	2.480	40.110
50-54	34.632	3.630	38.262
55-59	16.706	533	17.239
60-64	11.821	533	12.354
65+	8.541	0	8.541
Jumlah	383.111	39.417	422.528

Sumber: Bogor Dalam Angka, 2013

Tabel II. 46 Rasio Angkatan Kerja

GOLONGAN UMUR	JUMLAH PENDUDUK BEKERJA	JUMLAH ANGKATAN BEKERJA	RASIO PENDUDUK YANG BEKERJA
15-19	17.290	27.279	0,63
20-24	37.385	49.403	0,76
25-29	46.012	49.367	0,93
30-34	68.054	71.957	0,95
35-39	58.728	60.216	0,98
40-44	46.312	47.800	0,97
44-49	37.630	40.110	0,94
50-54	34.632	38.262	0,91
55-59	16.706	17.239	0,97
60-64	11.821	12.354	0,96
65+	8.541	8.541	1,00
Jumlah	383.111	422.528	0,91

Sumber: Bogor Dalam Angka 2013

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja sehingga diharapkan dapat menyerap pertambahan angkatan kerja, sedangkan rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Rasio penduduk yang bekerja Kota Bogor pada Tahun 2012 mencapai 0,91 (Tabel II. 46), berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa 91 persen dari angkatan kerja yang ada di Kota Bogor memperoleh kesempatan kerja sedangkan sembilan persen masih mencari kerja atau pengangguran.

Pada umumnya penduduk yang bekerja di Kota Bogor terserap pada lapangan pekerjaan sektor Perdagangan dan Jasa. Dengan rincian sebanyak 115.406 orang bekerja pada lapangan pekerjaan sektor Perdagangan, Rumah Makan dan Hotel, sedangkan yang bekerja pada lapangan pekerjaan sektor Jasa terdapat sebanyak 113.108 orang.

Tabel II. 47 Jumlah Pekerja Menurut Lapangan Kerja

LAPANGAN KERJA	TAHUN				
	2008	2009	2010	2011	2012
Pertanian	11.598	12.137	6.920	4.703	6.198
Industri Pengolahan	47.792	68.605	63.597	60.857	67.674
Perdagangan, Hotel dan Resort	66.572	111.737	108.820	112.774	115.406
Jasa	133.074	96.022	99.031	113.697	113.108
Lain-lain	91.344	96.987	68.359	99.190	80.725
Jumlah	350.380	385.488	346.727	391.221	383.111

Sumber: Bogor Dalam Angka, 2013

II.2.3. FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA

Fokus seni budaya mencakup jumlah kelompok seni budaya dan jumlah gedung olahraga. Pencapaian pembangunan seni, budaya dan olahraga dapat dilihat berdasarkan indikator jumlah grup kesenian, jumlah gedung kesenian, jumlah klub olahraga, dan jumlah gedung olahraga. Capaian pembangunan seni, budaya, dan olahraga Kota Bogor Tahun 2013 disajikan dalam Tabel II. 48 berikut:

Tabel II. 48 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2013 Kota Bogor

NO	KECAMATAN	RASIO GRUP KESENIAN PER 10.000 PENDUDUK	RASIO GEDUNG KESENIAN PER 10.000 PENDUDUK	RASIO KLUB OLAHRAGA PER 10.000 PENDUDUK	RASIO GEDUNG OLAHRAGA PER 10.000 PENDUDUK
1	Bogor Barat	0,58	0	0	0,09
2	Bogor Timur	0,90	0	0,1	0,20
3	Bogor Utara	0,28	0	0,16	0,44
4	Bogor Selatan	0,31	0	0,05	0,21
5	Bogor Tengah	0,48	0,09	0,09	0,09
6	Tanah Sareal	0,09	0	0,04	0,44
	Rasio	0,49	0,01	0,07	0,35

Sumber: Bogor Dalam Angka, 2013

Berdasarkan tabel di atas ditunjukkan bahwa jumlah grup kesenian di Kota Bogor pada tahun 2013 sebanyak 49 grup. Rasio jumlah grup kesenian adalah 0,49 grup kesenian per 10.000 penduduk. Angka rasio ini cukup kecil dan dapat dikatakan jika minat terhadap kesenian di Kota Bogor masih sangat kecil. Jumlah gedung kesenian di Kota Bogor tercatat hanya satu, yakni yang bertempat di Kecamatan Bogor Tengah, yaitu Gedung Kemuning Gading, sehingga jika dilihat dari jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk nilai rasionya adalah 0,01.

Jumlah gedung olahraga yang ada di Kota Bogor tercatat sebanyak 35 gedung yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Bogor, tercatat dua gedung di Kecamatan Bogor Barat, dua gedung di Kecamatan Bogor Timur, delapan gedung di Kecamatan Bogor Utara, empat gedung di Kecamatan Bogor Selatan, satu gedung di Kecamatan Bogor Tengah dan sembilan gedung di Kecamatan Tanah Sareal.

Jika melihat dari rasio jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk maka di dapat nilai 0,35. Angka yang cukup rendah ini bukan berarti mengindikasikan bahwa minat penduduk Kota Bogor kecil terhadap bidang olahraga, bisa saja banyak penduduk yang melakukan aktivitas olahraganya di luar (*outdoor*). Sama halnya dengan minimnya jumlah gedung olahraga di Kota Bogor, jumlah klub olahraga di Kota Bogor pun terbilang sangat sedikit yakni hanya tujuh klub olahraga, jika dihitung rasio jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk maka hanya di dapati nilai 0,07.

II.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

II.3.1. FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB

Aspek pelayanan umum terdiri dari fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan. Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib Kota Bogor yaitu pendidikan, kesehatan, sarana dan prasana umum, serta perhubungan; sedangkan analisis kinerja atas layanan urusan pilihan yaitu jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA), jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA), rasio daya serap tenaga kerja, pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian dan perdagangan, energi, sumber daya air dan pariwisata.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan Kota Bogor sebagai berikut:

II.3.1.1. PENDIDIKAN

II.3.1.1.1. RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH PER PENDUDUK USIA SEKOLAH

Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu sekolah untuk menampung penduduk usia sekolah. Rasio ini membandingkan jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan.

Rasio ketersediaan sekolah di Kota Bogor pada selang waktu tahun 2009 hingga tahun 2013 pada jenjang pendidikan SD/MI maupun untuk jenjang SMP/MTs mengalami fluktuasi. Seperti tersaji pada Tabel II. 49 rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang SD/MI pada tahun 2009 sebesar 287,67; kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2010 menjadi 311,51; akan tetapi terjadi penurunan di tahun 2011 dan tahun 2012 menjadi 309,37 untuk tahun 2011 dan 307,55 di tahun 2012; dan mengalami kenaikan di tahun 2013 menjadi 316,86; yang artinya bahwa satu sekolah SD/MI menampung 252 siswa. Fluktuasi yang terjadi pada rasio ketersediaan sekolah untuk tingkat SD yaitu karena peningkatan jumlah penduduk sekolah dasar (usia 7-12 tahun) yang tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah gedung sekolah.

Rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang SMP/MTs juga mengalami fluktuasi, yaitu pada tahun 2009 sebesar 326,29; kemudian terjadi peningkatan di tahun 2010 menjadi 354,53; akan tetapi terjadi penurunan di tahun 2011 dan 2012 menjadi 350,20 di tahun 2011 dan 345,50 di tahun 2012; kemudian terjadi kenaikan yang cukup besar di tahun 2013 menjadi 411,59; angka ini artinya bahwa satu sekolah SMP/MTs dapat menampung 411 siswa. Peningkatan jumlah penduduk sekolah (usia 13-15 tahun) tidak disertai dengan peningkatan jumlah sekolah SMP/MI sehingga menyebabkan rasio ketersediaan sekolah terutama di tahun 2013 begitu tinggi.

Pada jenjang pendidikan SMA/MA rasio ketersediaan sekolah terus mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2009 sebesar 631,49; pada tahun 2010 menjadi 611,76; terjadi penurunan di tahun 2011 menjadi 593,22; di

tahun 2012 menjadi 593,22; dan terus mengalami penurunan di tahun 2013 hingga menjadi 493,71; angka ini berarti bahwa satu sekolah SMA/MA dapat menampung 494 siswa. Penurunan yang terjadi pada rasio ketersediaan sekolah di Kota Bogor pada selang waktu tahun 2009 hingga tahun 2013 dikarenakan adanya peningkatan jumlah sekolah SMA/MA setiap tahunnya.

Tabel II. 49 Rasio Ketersediaan Sekolah Kota Bogor Tahun 2009-2013

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2009	2010	2011	2012	2013
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	341	338	340	342	343
1.2.	jumlah penduduk kelompok	98.096	105.289	105.185	105.185	108.684
1.3.	Rasio	287,67	311,51	309,37	307,55	316,86
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	146	144	147	149	149
2.2.	Jumlah penduduk kelompok	47.639	51.053	51.480	51.480	61.327
2.3.	Rasio	326,29	354,53	350,20	345,50	411,59
3	SMA/MA					
3.1	Jumlah gedung sekolah	124	128	132	132	138
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-19 tahun	78.305	78.305	78.305	78.305	68.132
3.3	Rasio	631,49	611,76	593,22	593,22	493,71

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor, 2013

Seperti tersaji pada Tabel II. 49 kecamatan yang memiliki rasio ketersediaan sekolah tertinggi untuk jenjang pendidikan SD/MI, yaitu Kecamatan Tanah Sareal dengan rasio 354,58; yang artinya satu sekolah SD/MI menampung 354 siswa. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs rasio ketersediaan sekolah tertinggi terdapat di Kecamatan Bogor Utara dengan rasio sebesar 528,72; angka ini berarti satu sekolah SMP/MTs menampung 529 siswa. Untuk jenjang pendidikan SMA/MA rasio ketersediaan sekolah tertinggi terdapat di Kecamatan Tanah Sareal dengan rasio sebesar 638,05 yang artinya satu sekolah SMA/MA menampung 638 siswa. Salah satu penyebab utama yang menjadikan Kecamatan Tanah Sareal dan Kecamatan Bogor Utara memiliki rasio ketersediaan sekolah tertinggi untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA adalah jumlah penduduk yang tinggi dengan tidak diimbangi oleh jumlah gedung sekolah yang memadai.

Tabel II. 50 Rasio Ketersediaan Sekolah per kecamatan Kota Bogor Tahun 2013

NO	KECAMATAN	SD/MI			SMP/MTS			SMA/MA		
		JUMLAH GEDUNG SEKOLAH	JUMLAH PENDUDUK USIA 7-12 TH	RASIO	JUMLAH GEDUNG SEKOLAH	JUMLAH PENDUDUK USIA 13-15 TH	RASIO	JUMLAH GEDUNG SEKOLAH	JUMLAH PENDUDUK USIA 16-19 TH	RASIO
1	BOGOR BARAT	72	23.125	321,18	28	10.900	389,28	28	14.260	509,29
2	BOGOR TIMUR	39	10.902	279,54	12	5.316	443,00	19	6.926	364,53
3	BOGOR UTARA	51	19.470	38,18	18	9.517	528,72	24	12.115	504,79
4	BOGOR SELATAN	65	22.612	347,88	32	11.044	345,13	23	13.843	601,87
5	BOGOR TENGAH	54	10.591	196,13	28	5.164	184,43	22	6.951	315,95
6	TANAH SAREAL	62	21.984	354,58	31	10.690	34,48	22	14.037	638,05
	Jumlah	343	108.684	316.86	149	52.631	353,23	138	68.132	493,71

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bogor, 2013

II.3.1.1.2. RASIO GURU : MURID

Rasio guru dan murid merupakan perbandingan antara jumlah guru dan murid pada suatu jenjang tertentu. Rasio guru murid ini dapat menggambarkan beban tanggungan yang harus dijalani oleh seorang guru pada suatu daerah. Rasio ini juga dapat mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Semakin kecil nilai rasionya, maka akan semakin kecil juga beban tanggungan seorang guru. Sebaliknya semakin besar nilai rasionya, maka akan semakin besar juga beban tanggungan seorang guru diduga akan semakin berkurang pengawasan/perhatian guru terhadap murid sehingga kualitas pengajaran akan cenderung semakin rendah.

Selama kurun waktu tahun 2009 hingga tahun 2013 rasio guru terhadap murid untuk jenjang pendidikan SD/MI mengalami turun naik. Dari rasio sebesar 23,38 pada tahun 2009; terjadi kenaikan di tahun 2010 menjadi 23,97; kemudian terjadi penurunan di tahun 2011 menjadi 22,02; kemudian terjadi kenaikan di tahun 2012 menjadi 23,70; hingga turun kembali di tahun 2013 menjadi 23,08. Angka ini mengartikan bahwa satu guru mengajar 23 siswa SD. Tidak stabilnya jumlah guru maupun jumlah murid SD/MI menyebabkan tidak stabilnya pula rasio guru terhadap murid untuk jenjang pendidikan SD/MI di Kota Bogor pada selang waktu tahun 2009 hingga tahun 2013.

Rasio guru terhadap murid untuk jenjang pendidikan SMP/MTs pada selang waktu tahun 2009 hingga tahun 2012 terus mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2009 rasio guru terhadap murid sebesar 13,75; mengalami kenaikan di tahun 2010 menjadi 14,57; kemudian kembali naik di tahun 2011 menjadi 15,46; naik kembali di tahun 2012 menjadi 15,99; hingga tahun 2013 kembali mengalami kenaikan menjadi 17,11. Angka ini menunjukkan bahwa satu guru mengajar 17 siswa SMP/MTs. Salah satu penyebab rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan SMP/MTs terus mengalami kenaikan di Kota Bogor pada selang waktu tahun 2009 hingga tahun 2013, yaitu jumlah murid yang terus meningkat setiap tahunnya yang tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah guru.

Untuk jenjang pendidikan SMA/MA rasio guru terhadap murid terus mengalami perubahan pada tahun 2009 hingga tahun 2013. Dimana rasio guru terhadap murid sebesar 13 pada tahun 2009 dan 2011, sedangkan rasio guru dan murid sebesar 14 terjadi di tahun 2010, 2012, dan 2013. Pada tahun 2013 rasio guru terhadap murid sebesar 14, artinya bahwa satu guru mengajar 14 siswa SMA/MA. Perubahan yang terjadi pada rasio guru terhadap murid untuk jenjang pendidikan SMA/MA dikarenakan selain oleh terjadinya perubahan jumlah murid setiap tahunnya juga oleh perubahan jumlah guru setiap tahunnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, bahwa setiap SD/MI tersedia satu orang guru untuk setiap 32 peserta dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang, maka rasio guru terhadap murid di Kota Bogor masih dapat dikatakan ideal.

Tabel II. 51 Rasio Guru terhadap Murid Kota Bogor Tahun 2009-2013

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2009	2010	2011	2012	2013
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	5.060	4.804	5.176	5.292	5.386
1.2.	Jumlah Murid	118.305	115.176	113.955	125.452	124.339
1.3.	Rasio	1 : 23,38	1 : 23,97	1 : 22,02	1 : 23,70	1 : 23,08
2	SMP/MTs					

2.1.	Jumlah Guru	3.642	3.458	3496	3.431	3.218
2.2.	Jumlah Murid	50.086	50.415	54.063	54.876	55.086
2.3.	Rasio	1 : 13,75	1 : 14,57	1 : 15,46	1 : 15,99	1 : 17.11
3	SMA/MA					
3.1	Jumlah Guru	4.183	4.057	4.350	4.347	4.448
3.2	Jumlah Murid	57.653	57.668	58.576	60.047	61.787
3.3	Rasio	1:13	1:14	1:13	1:14	1:14

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bogor, 2013

Seperti tersaji pada Tabel II. 52, kecamatan yang memiliki rasio guru terhadap murid tertinggi untuk jenjang pendidikan SD/MI yaitu Kecamatan Bogor Selatan dengan rasio 25.29; yang artinya satu guru mengajar 25 siswa. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs rasio ketersediaan sekolah tertinggi terdapat di Kecamatan Bogor Tengah dengan rasio sebesar 23.35; angka ini mengartikan bahwa satu guru mengajar 23 siswa. Salah satu penyebab utama yang menjadikan Kecamatan Bogor Selatan dan Kecamatan Bogor Tengah memiliki rasio guru terhadap murid tertinggi untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs adalah jumlah penduduk yang tinggi dengan tidak diimbangi oleh jumlah guru yang ada.

Tabel II. 52 Rasio Guru Terhadap Murid Berdasarkan Kecamatan Tahun 2013

NO	KECAMATAN	SD/MI			SMP/MTS		
		JUMLAH GURU	JUMLAH MURID	RASIO	JUMLAH GURU	JUMLAH MURID	RASIO
1	Bogor Barat	1.193	25.425	21,31	629	10.108	16,06
2	Bogor Timur	601	13.586	22,60	222	2.930	13,19
3	Bogor Utara	733	17.097	23,32	433	6.580	15,19
4	Bogor	920	23.274	25,29	666	11.001	16,51
5	Bogor	856	20.835	24,33	598	13.968	23,35
6	Tanah Sareal	1.083	24.122	22,27	670	10.499	15,67
	Jumlah	5.386	124.339	23,08	3.218	55.086	17,11

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor , 2013

II.3.1.2. KESEHATAN

II.3.1.2.1. RASIO POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) PER SATUAN BALITA

Rasio Posyandu per satuan balita adalah jumlah posyandu per 1.000 balita. Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Rasio posyandu per satuan balita di Kota Bogor pada selang waktu tahun 2009 hingga tahun 2013 menunjukkan data yang tidak stabil. Dimana pada tahun 2009 rasio posyandu per satuan balita sebesar 13,31; terjadi penurunan di tahun 2010 menjadi 11,56; akan tetapi terjadi kenaikan di tahun 2011 sehingga menjadi 13,76; rasio kembali mengalami penurunan hingga tahun 2013 sebesar 12,49 di tahun 2012 dan 12,02 di tahun 2013. Angka ini berarti bahwa pada tahun 2013 dari 1.000 balita yang ada di Kota Bogor, dapat dilayani Posyandu sebanyak 12 Posyandu (1 posyandu melayani 83 balita). Jumlah posyandu di Kota Bogor dari tahun 2009 hingga tahun 2013 terus mengalami peningkatan jumlah yang diharapkan dapat mengimbangi peningkatan jumlah balita setiap tahunnya agar tercapai posyandu ideal yang melayani 50 balita.

Tabel II. 53 Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2009-2013 Kota Bogor

NO	URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah posyandu	941	945	956	956	959
2.	Jumlah balita	70.701	81.709	69.460	76.507	79.807
3.	Rasio	13,31	11,56	13,76	12,49	12,02

Sumber: LKPJ Kota Bogor, 2013

Kecamatan dengan rasio Posyandu per satuan balita tertinggi pada tahun 2013 terdapat pada Kecamatan Bogor Tengah dengan rasio sebesar 16,47 yang artinya 1.000 balita dapat dilayani Posyandu sebanyak 16 Posyandu. Kecamatan ini memiliki rasio posyandu per satuan balita tertinggi dikarenakan jumlah balita yang terdapat di Kecamatan Bogor Tengah merupakan jumlah balita paling sedikit dibandingkan kecamatan lainnya yang juga didukung oleh jumlah Posyandu yang memadai.

Tabel II. 54 Jumlah Posyandu dan Balita menurut kecamatan tahun 2013 Kota Bogor

NO	KECAMATAN	JUMLAH POSYANDU	JUMLAH BALITA	RASIO
1	Bogor Barat	210	18.305	11,47
2	Bogor Timur	96	7.922	12,12
3	Bogor Utara	142	13.832	10,27
4	Bogor Selatan	217	16.509	13,14
5	Bogor Tengah	128	7.769	16,47
6	Tanah Sareal	166	15.470	10,73
	Jumlah	959	79.807	12,02

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bogor, 2013

II.3.1.2.2. RASIO PUSKESMAS, KLINIK DAN PUSKESMAS PEMBANTU (PUSTU)

Puskesmas, Klinik dan Pustu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Seperti tersaji pada Tabel II. 55, rasio Puskesmas per satuan penduduk pada selang waktu tahun 2009 hingga tahun 2013 terus mengalami perubahan. Pada tahun 2013, yang merupakan rasio Puskesmas per satuan penduduk tertinggi, memiliki rasio sebesar 42.663 artinya satu Puskemas melayani sebanyak 42.663 jiwa. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan wilayah kerja Puskesmas dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah Puskesmas rata-rata 30.000 penduduk, maka dapat dikatakan jumlah Puskesmas yang ada di Kota Bogor belum memenuhi standar yang ada.

Rasio Klinik di Kota Bogor terus mengalami penurunan dari tahun 2009 hingga tahun 2013. Pada tahun 2009 rasio Klinik persatuan penduduk mencapai 11.264 akan tetapi terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2013, yang memiliki rasio terendah mencapai 7.816 yang artinya satu Klinik melayani 7.670 jiwa.

Untuk rasio Pustu persatuan penduduk juga mengalami perubahan setiap tahunnya pada tahun 2009 hingga tahun 2013. Dimana rasio yang terjadi mengalami fluktuasi, hal ini terlihat pada tahun 2009 rasio Pustu per satuan penduduk mencapai 35.045 akan tetapi mengalami penurunan di tahun 2010 hingga mencapai 33.914, kemudian terjadi kenaikan di tahun 2011 menjadi 34.550 naik kembali menjadi 34.649 di tahun 2012, hingga mengalami kenaikan di tahun 2013 menjadi 35.308 Angka ini berarti pada tahun 2013 satu Pustu melayani 35.308 jiwa.

Kenaikan rasio Puskesmas per satuan penduduk terus mengalami kenaikan setiap tahunnya pada tahun 2009 hingga tahun 2013 dikarenakan terjadinya peningkatan jumlah penduduk setiap tahun tanpa diimbangi oleh

jumlah Puskesmas. Berbeda dengan rasio Klinik dan rasio Pustu per satuan penduduk, dimana jumlah Klinik terus mengalami peningkatan guna mengimbangi peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya.

Tabel II. 55 Rasio Puskesmas, Klinik dan Pustu Kota Bogor Tahun 2009-2013

NO	URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah Puskesmas	24	24	24	24	24
2.	Jumlah Klinik	84	114	114	117	141
3.	Jumlah Pustu	27	28	28	29	29
4.	Jumlah Penduduk	946.204	950.334	967.398	1.004.831	1.023.923
5.	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	39.425	39.597	40.308	41.868	42.663
6.	Rasio Klinik per satuan penduduk	11.264	8.336	8.486	8.588	7.816
7.	Rasio Pustu per satuan penduduk	35.045	33.941	34.550	34.649	35.308

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bogor, 2013

II.3.1.2.3. RASIO RUMAH SAKIT PER SATUAN PENDUDUK

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk adalah jumlah Rumah Sakit per 10.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas Rumah Sakit berdasarkan jumlah penduduk. Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pada tahun 2013 Kota Bogor memiliki satu Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya dan dua Rumah Sakit TNI/POLRI. Rasio Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk Kota Bogor tahun 2013 mencapai 78.763. Hal ini berarti satu rumah sakit melayani sejumlah 78.763. penduduk Kota Bogor pada tahun 2013. Rasio Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk mengalami penurunan dari kurun waktu tahun 2009 hingga tahun 2013. Peningkatan jumlah rumah sakit setiap tahunnya diharapkan mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk yang ada, sehingga kualitas pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk semakin meningkat.

Tabel II. 56 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit per Jumlah Penduduk Tahun 2009-2013 Kota Bogor

NO	URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	-	-	-	-	-
2.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	1	1	1	1	1
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI	1	2	2	2	2
4.	Jumlah Rumah Sakit Daerah	-	-	-	-	-
5.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	9	10	11	12	13
6.	Jumlah Penduduk	946.204	950.334	967.398	1.004.831	1.023.923
7.	Rasio	105.134	95.033	87.945	83.736	78.763

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bogor, 2013

Seperti tersaji pada Tabel II. 57, kecamatan dengan jumlah Rumah Sakit terbanyak terdapat di Kecamatan Bogor Tengah dengan total rumah sakit sebanyak empat unit yang terdiri dari dua unit Rumah Sakit TNI/POLRI dan dua unit Rumah Sakit Swasta.

Tabel II. 57 Jumlah Rumah Sakit menurut Kecamatan tahun 2013 Kota Bogor

NO	KECAMATAN	RUMAH SAKIT UMUM (PEMERINTAH)	RS JIWA/PARU DAN PENYAKIT KHUSUS LAINNYA MILIK PEMERINTAH	RUMAH SAKIT AD/AU/AL/POLRI	RUMAH SAKIT DAERAH	RUMAH SAKIT SWASTA	TOTAL
1	Bogor Barat	Na	1	Na	Na	1	2
2	Bogor Timur	Na	Na	Na	Na	1	1
3	Bogor Utara	Na	Na	Na	Na	1	1
4	Bogor Selatan	Na	Na	Na	Na	3	3
5	Bogor Tengah	Na	Na	2	Na	2	4
6	Tanah Sareal	Na	Na	Na	Na	2	2
	Jumlah	Na	1	2	Na	10	13

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bogor, 2013

II.3.1.2.4. RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK

Rasio dokter per jumlah penduduk adalah jumlah dokter per 1.000 penduduk. Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Rasio ini juga mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga dokter. Idealnya adalah satu berbanding 2.500 artinya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk, ini sesuai dengan standar sistem pelayanan terpadu.

Pada Tabel II. 58, Rasio Dokter per satuan penduduk di Kota Bogor pada selang waktu tahun 2009 hingga tahun 2013 mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2009 rasio dokter per satuan penduduk mencapai 10.632, kemudian mengalami fluktuasi hingga pada tahun 2013 mengalami kenaikan hingga mencapai 4.511. Angka ini memiliki arti bahwa pada tahun 2013, satu dokter melayani 4.511 jiwa. Dengan standar sistem pelayanan terpadu bahwa idealnya rasio dokter per satuan penduduk adalah 1: 2.500 artinya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk, maka dapat dikatakan rasio dokter per satuan penduduk di Kota Bogor belum mencapai kata ideal. Terbatasnya jumlah dokter serta kurang meratanya distribusi dokter yang ada merupakan salah satu penyebab belum idealnya rasio dokter per satuan penduduk di Kota Bogor, sehingga diperlukan pemerataan distribusi jumlah dokter ke masing-masing wilayah.

Jumlah dokter spesialis tahun 2013 di Kota Bogor sebanyak 505 dokter, sehingga diperoleh rasio sebesar 2.028. Berbeda dengan rasio dokter, dokter spesialis memiliki arti bahwa satu dokter melayani 2.028 jiwa. Dengan standar sistem pelayanan terpadu yang sama dengan dokter bahwa idealnya rasio dokter per satuan penduduk adalah 1:2500 artinya, idealnya satu dokter spesialis melayani 2.500 jiwa. Maka dapat dikatakan bahwa rasio dokter spesialis di Kota Bogor sudah ideal. Dari total 13 Rumah Sakit yang terdapat di Kota Bogor kebutuhan akan dokter spesialis dapat dikatakan sudah terpenuhi akan tetapi, masih terkendala oleh pemerataan dokter spesialis. Oleh karena itu, diperlukan pemerataan dokter spesialis di Kota Bogor terutama dokter spesialis onkologi, perinatologi, imunologi dan jantung.

Tabel II. 58 Rasio Dokter per Satuan Penduduk Tahun 2009-2013 Kota Bogor

NO	URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013
	Dokter					
1	Jumlah Dokter	89	98	108	109	227
2	Jumlah Penduduk	946.204	950.334	967.398	1.004.831	1.023.923
	Rasio	10.632	9.697	8.957	9.219	4.511
	Dokter Spesialis					
1	Jumlah Dokter	Na	Na	Na	Na	505
2	Jumlah Penduduk	946.204	950.334	967.398	1.004.831	1.023.923
	Rasio	Na	Na	Na	Na	2.028

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bogor, 2013

Seperti tersaji pada Tabel 59, kecamatan dengan jumlah dokter terbanyak terdapat di Kecamatan Bogor Barat dengan jumlah dokter 74 dokter dan dokter spesialis 248 dokter.

Tabel 59 Jumlah Dokter menurut Kecamatan Tahun 2013 Kota Bogor

NO	KECAMATAN	JUMLAH DOKTER	JUMLAH DOKTER SPESIALIS
1	Bogor Barat	74	248
2	Bogor Timur	25	60
3	Bogor Utara	28	56
4	Bogor Selatan	23	30
5	Bogor Tengah	42	83
6	Tanah Sareal	35	28
	Jumlah	227	505

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bogor, 2013

II.3.1.3. PERHUBUNGAN

II.3.1.3.1. SARANA DAN PRASARANA UMUM

Rasio Rumah Layak Huni

Rasio Rumah Layak Huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Permukiman dan rumah layak huni merupakan harapan dan idaman seluruh masyarakat. Sebuah rumah disebut layak bila memenuhi aspek sehat, aman, terjangkau, dapat dicapai dan mampu dibayar, termasuk kebutuhan dasar, bebas diskriminasi dan kepastian kepemilikannya. Pada tahun 2011 jumlah rumah layak huni terhadap jumlah penduduk di Kota Bogor mencapai 152.940 rumah (15,81%) dan jumlahnya bertambah di tahun 2012 menjadi 153.942 akan tetapi bila dibandingkan dengan jumlah penduduk di tahun 2012 yang juga meningkat, maka rasionya mengalami penurunan menjadi 15,32. Bila diasumsikan satu rumah tangga tinggal di satu unit rumah, maka 15,32 persen rumah di Kota Bogor dinyatakan telah layak huni. Pada tahun 2013 Keluarga Rumah Tak Layak Huni di Kota Bogor berjumlah 2.625 keluarga, sehingga diberikan bantuan teknis Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 2.207 unit dengan nilai bantuan untuk RTLH masing masing rumah mendapat 6.000.000 rupiah per unit yang pelaksanaannya diserahkan langsung kepada masyarakat melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang terdapat di masing-masing kelurahan. Kegiatan ini dalam rangka penyelenggaraan program lingkungan sehat perumahan yang diharapkan mampu meningkatkan rasio rumah layak huni.

Tabel II. 60 Rasio Jumlah Rumah Layak Huni terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2009-2012 Kota Bogor

NO	URAIAN	2011	2012
1.	Jumlah Rumah Layak Huni	152.940	153.942
2.	Jumlah penduduk	967.398	1.004.831
	Rasio	15,81	15,32

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi, 2013

II.3.1.3.2. JUMLAH ARUS PENUMPANG ANGKUTAN UMUM

Seperti tersaji pada Tabel II. 61, jumlah arus penumpang angkutan umum pada selang waktu tahun 2009 hingga tahun 2013 mengalami penurunan. Pada tahun 2010 jumlah penumpang bus di Kota Bogor mencapai 4.190.962 jiwa dan terus mengalami penurunan hingga di tahun 2013 menjadi 3.722.731 jiwa. Begitu pula dengan jumlah penumpang kereta api, pada tahun 2009 jumlah penumpang kereta api mencapai angka 13.115.539 penumpang dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2012 mencapai 12.544.774 penumpang. Penurunan yang terjadi setiap tahun pada jumlah arus penumpang angkutan umum, dalam hal ini jumlah penumpang bus dan jumlah penumpang kereta api di Kota Bogor disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah banyaknya penumpang yang beralih menggunakan kendaraan pribadi. Kondisi ini tentunya menimbulkan rentetan masalah berikutnya, misalnya adalah kontribusi terhadap kemacetan kota.

Tabel II. 61 Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2010-2013 Kota Bogor

NO	URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah penumpang Bus	Na	4.190.962	4.127.072	3.969.831	3.722.731
2.	Jumlah penumpang Kereta api	13.115.539	12.793.225	12.716.108	12.544.774	Na
	Total Jumlah Penumpang	13.115.539	16.984.187	16.843.180	16.514.605	Na

Sumber: Diolah dari berbagai sumber (Bogor Dalam Angka Tahun 2013 dan Dinas LLAJ Kota Bogor)

Seperti tersaji pada Tabel II. 62, kecamatan dengan jumlah penumpang bus tertinggi terdapat di Kecamatan Bogor Barat dan Kecamatan Bogor Tengah dengan jumlah penumpang angkutan umum mencapai 79.440 jiwa. Hal ini berarti penduduk yang bertempat tinggal di Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Tengah merupakan penduduk dengan pengguna angkutan umum bus terbanyak di Kota Bogor.

Tabel II. 62 Jumlah Penumpang Angkutan Umum menurut kecamatan Tahun 2013 Kota Bogor

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENUMPANG
		BUS
1	Bogor Barat	79.440
2	Bogor Timur	78.287
3	Bogor Utara	68.837
4	Bogor Selatan	71.747
5	Bogor Tengah	79.440
6	Tanah Sareal	13.285
	Jumlah	391.036

Sumber: Dinas LLAJ Kota Bogor, 2013

II.3.1.3.3. RASIO IZIN TRAYEK

Izin trayek adalah pemberian izin trayek kepada orang atau pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah. Rasio izin trayek adalah perbandingan jumlah izin trayek yang dikeluarkan selama satu tahun terhadap jumlah penduduk. Seluruh angkutan umum yang ada di Kota Bogor umum wajib memiliki izin trayek. Hal ini dimaksudkan untuk penataan, pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum, sehingga ini dapat meminimalisir trayek ilegal yang dilakukan para pengendara angkutan umum. Rasio izin trayek di Kota Bogor terus mengalami penurunan setiap tahunnya dari tahun 2009 hingga tahun 2013. Hal ini terlihat pada Tabel II. 63, dimana pada tahun 2009 rasio izin trayek mencapai 0,85; kemudian di tahun 2010 menjadi 0,85 dan turun menjadi 0,83 di tahun 2011, kemudian turun kembali di tahun

2012 menjadi 0,8; hingga terus turun menjadi 0,79 di tahun 2013. Jumlah izin trayek di Kota Bogor selama lima tahun terakhir (tahun 2009 s.d tahun 2013) tidak mengalami perubahan, baik izin trayek perkotaan maupun izin trayek per kelurahan, yaitu sebesar 3.412 untuk izin trayek perkotaan dan 4.644 untuk izin trayek per kelurahan.

Tabel II. 63 Rasio Izin Trayek Tahun 2009-2013 Kota Bogor

NO	URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Izin Trayek angkutan kota	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412
2.	Izin Trayek angkutan perkotaan (AKDP)	4.644	4.644	4.644	4.644	4.644
3.	Jumlah Izin Trayek	8.056	8.056	8.056	8.056	8.056
4.	Jumlah penduduk	946.204	950.334	967.398	1.004.831	1.023.923
5.	Rasio Izin Trayek	0,85	0,85	0,83	0,80	0,79

Sumber : Diolah dari berbagai sumber (LKPJ Kota Bogor Tahun 2013, dan Dinas LLAJ Kota Bogor)

Seperti tersaji pada Tabel II. 64 kecamatan dengan jumlah izin trayek tertinggi terdapat di Kecamatan Bogor Timur dengan jumlah izin trayek mencapai 2.042. Hal ini dikarenakan Kecamatan Bogor Timur memiliki jumlah izin trayek terbanyak 2.042 izin trayek.

Tabel II. 64 Ijin Trayek Menurut Kecamatan Tahun 2013 Kota Bogor

NO	KECAMATAN	JUMLAH IZIN TRAYEK		TOTAL JUMLAH IZIN TRAYEK
		PERKOTAAN	PERKELURAHAN	
1	Bogor Barat	624	1.046	1.670
2	Bogor Timur	612	1.430	2.042
3	Bogor Utara	437	1.187	1.624
4	Bogor Selatan	624	711	1.335
5	Bogor Tengah	456	0	456
6	Tanah Sareal	659	210	869
	Jumlah	3.412	4.644	8.056

Sumber : Dinas LLAJ Kota Bogor, 2013

II.3.1.3.4. JUMLAH UJI KIR ANGKUTAN UMUM

Uji Kir adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan. Uji Kir ini diharapkan dapat menjaga keselamatan dan kenyamanan penumpang angkutan umum. Selain itu, juga untuk menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan yang diakibatkan asap kendaraan.

Jumlah angkutan umum yang telah melakukan Uji Kir pada tahun 2013 sebanyak 21.407 unit kendaraan dari 28.721 unit kendaraan (74,53%). Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai 86,86 persen dan pada tahun 2011 jumlah kendaraan yang telah melakukan Uji Kir mencapai 100,94 persen. Jumlah angkutan umum yang melakukan Uji Kir semakin menurun setiap tahunnya mengindikasikan semakin menurunnya kesadaran para pemilik kendaraan umum terhadap kendaraannya yang berimbas terhadap ketidaknyamanan penumpang angkutan umum dan rawan kecelakaan.

Tabel II. 65 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2009-2013 Kota Bogor

NO	ANGKUTAN UMUM	2009			2010			2011			2012			2013		
		JML H	JML H KIR	%	JML H	JML H KIR	%	JML H	JML H KIR	%	JML H	JML H KIR	%	JML H	JML H KIR	%
1.	Mobil penumpang umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Mobil bus	9.758	10.126	103,77	10.126	9.886	97,63	9.888	9.682	97,92	11.458	9.474	82,68	11.402	9.030	79,20
3.	Mobil barang	9.841	12.132	123,28	12.132	11.997	98,89	11.998	12.402	103,37	14.338	12.936	90,22	17.302	12.368	71,48
4.	Kereta gandengan	4	1	25,00	1	-	-	2	8400,00	8	5	62,50	9	3	33,33	
5.	Kereta tempelan	2	3	150,00	3	3	100,00	4	5	125,00	4	3	75,00	8	6	75,00
	Jumlah	19.605	22.262	113,55	22.262	21.886	98,31	21.892	22.097	100,94	25.808	22.418	86,86	28.721	21.407	74,53

Sumber : Dinas LLAJ Kota Bogor, 2013

II.3.1.3.5. JUMLAH TERMINAL BUS

Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi. Keberadaan terminal merupakan salah satu prasarana utama dalam pelayanan angkutan umum. Keberadaan terminal berperan dalam menentukan tingkat kinerja dari pelayanan angkutan umum dalam suatu wilayah. Jumlah terminal bus yang terdapat di Kota Bogor tidak mengalami perubahan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (tahun 2009 s.d tahun 2013), yaitu sebanyak tiga terminal bus.

Tabel II. 66 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus Tahun 2009-2013 Kota Bogor

NO	URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah terminal bus	3	3	3	3	3
	- Terminal Baranangsiang					
	- Terminal Merdeka					
	- Terminal Bubulak					
	Jumlah	3	3	3	3	3

Sumber : Dinas LLAJ Kota Bogor, 2013

II.3.2. FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN

II.3.2.1. JUMLAH INVESTOR BERSKALA NASIONAL (PMDN/PMA)

Kota Bogor mempunyai jumlah investor berskala nasional baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/Penanaman Modal Asing (PMA) yang selalu mengalami kenaikan jumlah dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Banyaknya jumlah PMDN jauh lebih besar dibandingkan PMA. Banyaknya jumlah investor PMDN maupun PMA berpengaruh baik terhadap jumlah investasi di Kota Bogor. Tahun 2013 jumlah investor sebanyak 843 PMDN dan 61 PMA. Hasil analisis jumlah investor PMDN/PMA Kota Bogor dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II. 67 Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2009 s.d 2013 Kota Bogor

TAHUN	URAIAN	PMDN	PMA	TOTAL
2009	Jumlah Investor	-	-	-
2010	Jumlah Investor	58	38	96
2011	Jumlah Investor	93	45	138
2012	Jumlah Investor	192	50	242
2013	Jumlah Investor	843	61	904

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2013, BPPTPM Kota Bogor

II.3.2.2. JUMLAH NILAI INVESTASI BERSKALA NASIONAL PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/ PENANAMAN MODAL ASING (PMDN/PMA)

Pada tahun 2012, realisasi nilai investasi yang ditanamkan di Kota Bogor mencapai Rp. 2.608.646.492.592 (dua triliun enam ratus delapan miliar enam ratus empat puluh enam juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian PMA sebesar Rp 49.550.000.000 dan PMDN Sebesar Rp 2.559.146.492.592 jumlah perusahaan PMA sebanyak 50 dan PMDN sebanyak 192. Sedangkan untuk tahun 2013 nilai realisasi investasi mencapai Rp. 3.583.359.898.446 (tiga triliun lima ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah). Dengan nilai PMA sebesar Rp 216.824.000.000 dan nilai PMDN Sebesar Rp 3.366.535.898.446. Sehingga untuk Realisasi Nilai Investasi di Kota Bogor Tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 37,36 persen dari Realisasi Investasi pada tahun 2012.

Tabel II. 68 Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2009 s.d 2013 Kota Bogor

TAHUN	PERSETUJUAN		REALISASI	
	JUMLAH PROYEK	NILAI INVESTASI	JUMLAH PROYEK	NILAI INVESTASI(RP 000)
2009	Na	Na		869.500.000
2010	Na	Na	96	1.002.665.000.000
2011	Na	Na	138	7.615.667.957.900
2012	192	Na	142	2.608.646.492.592
2013	843	Na	904	3.583.359.898.446

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2013, BPPTPM Kota Bogor

II.3.2.3. RASIO DAYA SERAP TENAGA KERJA

Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Bogor pada Tahun 2012 sebanyak 1.997 orang. Sedangkan untuk tahun 2013, dengan jumlah perusahaan PMA sebanyak 61 dan PMDN sebanyak 1.414. Adapun penyerapan tenaga kerja di Kota Bogor pada Tahun 2013 sebanyak 2.696 orang.

Penyerapan tenaga kerja menurut jumlah seluruh PMA/PMDN menunjukkan kenaikan dari tahun 2012 sampai tahun 2013. Peningkatan jumlah seluruh PMA/PMDN dan jumlah tenaga kerja yang sangat signifikan di rentang tahun tersebut menyebabkan rasio daya serap tenaga kerja meningkat hingga mencapai 2,98. Hasil analisis rasio daya serap tenaga kerja di Kota Bogor, dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II. 69 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2009 s.d 2013 Kota Bogor

NO	URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	-	-	-	1.997	2.696
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	-	96	138	242	904
3	Rasio daya serap tenaga kerja	-	-	-	8,25	2,98

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2013, BPPTPM Kota Bogor

II.3.2.4. PERTANIAN

Laju alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian di Kota Bogor semakin tinggi. Alih fungsi lahan ini tentu berimplikasi kepada produksi pangan, lingkungan fisik serta kesejahteraan masyarakat pertanian yang kehidupannya tergantung pada lahannya. Lahan pertanian (sawah) di Kota Bogor hingga saat ini tercatat 750 hektar dengan jumlah penduduk yang

bergantung pada sektor pertanian sekitar 72.388 jiwa (Kota Bogor Dalam Angka 2012) hampir sepuluh persen dari jumlah penduduk Kota Bogor.

Dalam rangka mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian pangan ini, pada tahun 2009 Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang didalamnya menjelaskan mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. LP2B dapat berupa lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak) dan/atau lahan tidak beririgasi (lahan kering).

Pada UU Nomor 41/2009 pasal 23 dengan tegas disebutkan bahwa penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan untuk di Tingkat Provinsi diatur dalam Perda mengenai tata ruang wilayah provinsi serta di kabupaten/kota diatur dalam Perda tata ruang wilayah kabupaten/kota. Demikian juga halnya apabila suatu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan tertentu memerlukan perlindungan khusus, kawasan tersebut dapat ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN)

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengendalian LP2B langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah antara lain: pemberian insentif, disinsentif, mekanisme perizinan, proteksi dan penyuluhan.

Pemberian insentif diberikan dengan mempertimbangkan: jenis lahan, kesuburan tanah, luas kondisi irigasi, produktivitas usaha tani, lokasi dan lain-lain. Pemberian insentif dapat dilakukan dengan cara:

1. Keringanan PBB
2. Pengembangan infrastruktur pertanian
3. Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul
4. Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi
5. Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian
6. Jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian tanaman pangan
7. Penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

Realisasi panen tanaman padi di lahan seluas 689 hektar, dengan jumlah produksi padi sebesar 4271,8 ton Gabah Kering Panen (GKP) diperoleh produktivitas padi per tahun rata-rata mencapai 6,2 ton per hektar. Apabila dikonversi ke komoditi pangan beras, maka beras yang dihasilkan Kota Bogor selama tahun 2013 adalah 2392,21 ton beras (konversi dari Padi GKP ke beras = 56%).

Kebutuhan beras per kapita per tahun sebanyak 120 kg per jiwa per tahun, maka dengan jumlah penduduk sebanyak 967.398 jiwa, Kota Bogor membutuhkan beras sebanyak 116.087,760 ton per tahun. Berdasarkan data hasil produksi beras lokal Kota Bogor yang berjumlah 2392,21 ton beras, maka kontribusi produksi beras lokal Kota Bogor pada tahun 2013 sebesar 2,10 persen.

Palawija di Kota Bogor yang memiliki jumlah produksi terbesar yaitu talas dan ubi kayu, tahun 2012 produksi tanaman talas mencapai 3.232,65 ton dan ubi kayu sebanyak 3.140,28 ton. Untuk lebih jelasnya mengenai target dan realisasi produksi tanaman palawija telah tersaji pada Tabel II. 70.

Kangkung menjadi komoditas sayuran di Kota Bogor yang mempunyai produksi terbesar di tahun 2012 yaitu sebesar 979 ton. Tanaman tomat juga termasuk tanaman sayuran yang jumlah produksinya besar yaitu 702 ton. Untuk target, realisasi dan produksi tanaman sayuran telah tersaji pada Tabel II. 71.

Tabel II. 70 Target dan Realisasi Produksi Palawija

TANAMAN	2011			2012		
	TARGET (HA)	REALISASI (HA)	PRODUKSI (TON)	TARGET (HA)	REALISASI (HA)	PRODUKSI (TON)
Kedelai	0	0	0	0	0	0
Kacang	0	0	0	0	0	0
Ubi Kayu	322	105	4.883	312	244	3.140,28
Ubi Jalar	106	111	1.454	96	110	1.441
Sorgum	0	0	0	0	0	0
Talas	169	89	2.697,60	169	115	3.232,65

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2013

Tabel II. 71 Target, Realisasi dan Produksi Tanaman Sayuran Menurut Jenis Tanaman di kota Bogor

JENIS TANAMAN	2011			2012		
	TARGET (HA)	REALISASI (HA)	PRODUKSI (TON)	TARGET (HA)	REALISASI (HA)	PRODUKSI (TON)
Kangkung	98	80	935,00	98	89	979,00
Ketimun	68	54	619,50	68	56	588,00
Tomat	44	32	594,00	44	39	702,00
Daun	19	15	162,00	19	11	99,00
Cabe	19	18	102,00	19	13	78,00
Kacang	18	14	126,00	18	15	90,00

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2013

Buah jambu biji pada tahun 2012 menghasilkan 1.128 ton sementara buah-buahan lainnya hanya memproduksi tidak lebih dari 400 ton. Pada 2012, produksi tanaman obat-obatan juga meningkat, temulawak menghasilkan 174,61 ton, diikuti mengkudu/pace sebesar 143,50 ton dan laos sebesar 114,55 ton.

Tabel II. 72 Banyaknya Pohon Ditanam, Dipanen dan Produksi Tanaman Buah-buahan di Kota Bogor

JENIS TANAMAN	2011			2012		
	POHON DITANAM	POHON DIPANEN	PRODUKSI (TON)	POHON DITANAM	POHON DIPANEN	PRODUKSI (TON)
Jengkol	8.908	771	1.542	0	1.028	1,3
Jambu Biji	190.688	104.016	312.048	3.140	110.052	1.128,0
Mangga	54.584	3.319	19.914	0	4.152	249,1
Pisang	173.802	22.120	33.180	200	23.044	345,7
Salak	7.104	0	0	0	0	0
Sawo	8.228	750	3.375	0	1000	3,8

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2013

Tabel II. 73 Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Tanaman Obat-obatan menurut Jenis Tanaman

JENIS TANAMAN	2011			2012		
	LUAS TANAM (HA)	LUAS PANEN (HA)	PRODUKSI (TON)	LUAS TANAM (HA)	LUAS PANEN (HA)	PRODUKSI (TON)
Laos	1,13	1,86	172,80	1.200	32.800	114,55
Temulawak	0,91	1,01	20,60	0	7.937	174,61
Temuireng	0,32	0,15	5,28	0	701	1,68
Mengkudu	0,14	0	126,02	0	8.231	143,50
Temukunci	0,23	0,25	6,32	0	2.375	5,23
Sambiloto	0,38	0,36	9,46	1.500	1.800	3,60

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2013

II.3.2.5. PETERNAKAN

Di bidang peternakan, tercatat populasi hewan ternak besar terdiri dari 874 ekor sapi perah, 212 ekor sapi potong dan 181 ekor kerbau. Ternak kecil terdiri dari 12.094 ekor domba dan 1.298 ekor kambing, sedangkan untuk ternak unggas terdiri dari 205.610 ekor ayam ras pedaging, 131.850 ekor ayam bukan ras dan 5.224 ekor itik. Untuk produksi daging tahun 2013, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 74 Data Produksi Daging Kota Bogor Tahun 2013

NO.	KOMODITI DAGING	PRODUKSI (KG)		JUMLAH
		LOKAL	RPH/TPH/TPA	
1	Sapi	0,00	3.263.048	3.263.048
2	Kerbau	0,00	0,00	0,00
3	Kambing/Domba	99.244	0,00	99.244
5	Ayam:	0,00	0,00	0,00
	- Buras	113.870	0,00	113.870
	- Broiler	0	8.417.923	8.417.923
6	Itik	3.050	0,00	3.050
	Jumlah	216.164	11.680.971	11.897.135

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Bogor Tahun 2013

Dari Tabel II. 74 diperoleh total produksi daging Kota Bogor tahun 2013 mencapai 11.897.135 kg. Komoditi daging Ayam Broiler mempunyai total produksi terbesar yaitu sebesar 8.417.923 kg dengan seluruh produksinya berasal dari RPH/TPH/TPA. Komoditi daging Itik mempunyai total produksi terkecil yaitu 3.050 kg dengan seluruh produksinya berasal dari lokal.

Total produksi daging Kota Bogor tahun 2013 mencapai 11.897.135 kg. Kebutuhan konsumsi daging masyarakat Kota Bogor (target daerah) adalah sebesar $10,1 \times 967.398 = 9.770.719,8$ kg/kapita/thn. Sehingga tingkat capaian kinerja produksi daging mencapai 121,8 persen.

Jumlah produksi telur (ayam buras, itik dan ayam petelur/layer) sebanyak 53.959 kg dengan norma gizi (Nasional) 6,10 dan jumlah penduduk 967.398 jiwa, maka diperoleh kebutuhan telur di Kota Bogor sebesar 5.901.127,8 kg, sehingga kemampuan produksi Kota Bogor sebesar 0,9 persen. Untuk memenuhi kebutuhan telur di Kota Bogor maka didatangkan telur dari luar Kota Bogor.

Produksi susu berupa susu sapi murni sebanyak 1.850.188 liter, merupakan susu produksi sapi perah yang dipelihara masyarakat dengan populasi sebanyak 874 ekor. Dengan norma gizi (nasional) 4,70 dan jumlah penduduk 967.398 jiwa, maka diperoleh kebutuhan susu di Kota Bogor sebesar 4.546.770,6 liter, sehingga kemampuan produksi susu Kota Bogor tahun 2013 sebesar 40,68 persen. Untuk memenuhi kebutuhan susu di kota Bogor dipenuhi dari produk susu pabrikan yang banyak beredar di pasar.

II.3.2.6. PERIKANAN

Produksi ikan di Kota Bogor tahun 2012 menurut tempat penangkapan/pemeliharaan sebagian besar berasal dari budi daya ikan kolam dengan total produksi sebesar 3.295,1 ton dan luasan kolam sebesar 264.000 hektar. Kecamatan Tanah Sareal merupakan kecamatan penyumbang terbesar terhadap produksi ikan di Kota Bogor. Jumlah produksi ikan dari tahun 2011 sampai 2012 terus meningkat untuk budi daya kolam, sawah dan keramba. Untuk lebih jelasnya mengenai luas areal dan jumlah produksi ikan menurut tempat penangkapan/pemeliharaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 75 Luas Areal dan Jumlah Produksi Ikan Menurut Tempat Penangkapan/Pemeliharaan per Kecamatan

KECAMATAN N	PERAIRAN UMUM		KOLAM		SAWAH		KERAMBA		KOLAM AIR DERAS	
	LUAS (HA)	PROD (TON)	LUAS (HA)	PROD (TON)	LUAS (HA)	PROD (TON)	LUAS (HA)	PROD (TON)	LUAS (HA)	PROD (TON)
Bogor Selatan	*	1,2474	29.040	362,5	360	2	2,7	2,7	0	64,1
Bogor Timur	*	0,2152	36.960	461,3	420	2,6	3,4	3,4	66.420	81,6
Bogor Utara	*	0,0572	44.880	593,1	0	3,3	4,4	4,4	0	104,9
Bogor Tengah	*	0,1344	5.280	66,9	0	0,4	0,5	0,5	0	11,7
Bogor Barat	*	0,6546	26.400	329,5	156,0	1,9	2,4	2,4	0	58,3
Tanah Sareal	*	0,2770	121.440	1.482,8	264,0	8,4	0	10,9	0	262,4
Jumlah										
2012	NA	2,5858	264.000	3.295,1	1.200	18,6	1.200	24,2	66.420	583,0
2011	NA		264.000	3.012,8	1.200	17,4	1.200	22,7	66.420	586,6

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2013

II.3.2.7. PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

A. INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Indikator hasil penanganan urusan industri dapat dilihat dari indikator kinerja berupa jumlah industri kecil dan menengah serta jumlah industri yang sudah memanfaatkan teknologi tepat guna. Capaian untuk tahun 2013 dibandingkan dengan target terlihat dalam tabel berikut:

Tabel II. 76 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2013

NO	INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET 2013	REALISASI 2013
1	Jumlah Industri Kecil dan Menengah (kumulatif)	Unit	3.408	3.757
2	Jumlah Industri yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna	Unit	700	750

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Bogor Tahun 2013

Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah berdasarkan jumlah unit usaha mengalami peningkatan 5,47 persen yaitu bertambah sebanyak 195 unit usaha dari 3.562 unit usaha pada tahun 2012 menjadi 3.757 unit usaha pada tahun 2013.

Penambahan unit usaha industri tersebut diantaranya pada bidang industri makanan sebanyak 170 unit usaha, bidang industri minuman sebanyak enam unit usaha, bidang industri kayu olahan dan rotan sebanyak tiga unit usaha, bidang industri kertas sebanyak empat unit usaha, bidang industri bahan galian non logam sebanyak satu unit usaha, bidang industri kimia sebanyak lima unit usaha, bidang industri logam sebanyak empat unit usaha, bidang industri kulit sebanyak dua unit usaha.

Selain dari segi jumlah unit usaha, pertumbuhan industri di Kota Bogor juga dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja yang terserap serta besar investasi pada sektor industri seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel II. 77 Tenaga Kerja dan Investasi Industri Tahun 2012 – 2013

NO	URAIAN	SATUAN	2012	2013	PENINGKATAN (%)
1	Tenaga Kerja	Orang	57.790	58.166	0,66
2	Investasi	Rp.	746.591.054.659,-	753.468.545.912,-	1,00

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Bogor Tahun 2013

Pada tahun 2013 terdapat penambahan jumlah tenaga kerja pada sektor industri yaitu sebanyak 376 orang, yang terdiri dari 105 orang pada industri Menengah/besar, 149 orang pada industri kecil formal dan 122 orang pada industri kecil non formal.

Selain itu terdapat peningkatan investasi industri sebesar 6.877.491.253 rupiah yang terdiri dari 5.853.409.630 rupiah pada industri menengah/besar, 896.081.623 rupiah pada industri kecil formal dan 128.000.000 rupiah pada industri kecil non formal.

Perusahaan perdagangan di Kota Bogor dari tahun ke tahun semakin bertambah. Dari segi kuantitas, Usaha Perdagangan Kecil sampai dengan tahun 2012 masih mendominasi sektor perdagangan Kota Bogor. Pada tahun 2012, banyaknya perusahaan perdagangan kecil mencapai 8.216 pengusaha (83,02 %).

Pada 2011 perusahaan yang terdaftar sebanyak 1.366 perusahaan dan pada 2012 hanya 1.288 perusahaan. Perusahaan terbanyak yang mendaftar adalah perusahaan perorangan yaitu sebanyak 605 (46,97 %) dan perusahaan komanditer (CV) sebanyak 458 (35,56 %).

Tabel II. 78 Jumlah Perusahaan Perdagangan dan Nilai Investasi

JENIS PERUSAHAAN PERDAGANGAN	NILAI INVESTASI (JUTA)	JUMLAH PERUSAHAAN	
		2011	2012
Perusahaan Perdagangan Formal			
Perusahaan Besar	>Rp. 5.000,-	15	7
Perusahaan Menengah	Rp. 500,- s/d Rp.	23	49
Perusahaan Kecil	Rp. 50 s/d Rp. 500,-	150	192
Perusahaan Mikro	<Rp. 50,-	213	94
Perusahaan Perdagangan Non	-	NA	NA

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka,2013

Tabel II. 79 Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan 2009-2012

PERINCIAN	2009	2010	2011	2012
Perusahaan Terbatas	255	299	346	213
Perusahaan Komanditer (CV)	288	370	432	458
Perusahaan Perorangan	364	496	580	605
Koperasi	23	12	6	11
Badan Usaha Lain	7	1	2	1
Jumlah	937	1.178	1.366	1.288

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2013

Layanan AMDAL diberikan kepada masyarakat dunia usaha yang membutuhkan rekomendasi dokumen lingkungan bagi kegiatan usaha yang akan dibangun. Data layanan Amdal, UKL-UPL dan SPPL dari tahun 2010 s.d. 2013 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II. 80 Layanan Amdal Tahun 2010 s.d. 2013 di Kota Bogor

NO	JENIS KEGIATAN	JUMLAH			
		2010	2011	2012	2013
1	Toko/Perkantoran	2	-	-	-
2	Industri	-	1	-	-
3	Sarana Pendidikan	-	-	-	1
4	Pembangunan Jalan	-	2	1	-
5	TPPAS				1
6	Pusat Perbelanjaan			1	2
7	Terminal		-	-	1
	Jumlah	2	3	2	5

Sumber: RENSTRA BPLH Kota Bogor 2015-2019

Tabel II. 81 Layanan UKL-UPL Tahun 2010 s.d. 2013 di Kota Bogor

NO	JENIS KEGIATAN	JUMLAH			
		2010	2011	2012	2013
1	Toko/Perkantoran	-	2	5	3
3	SPBU	1	4	1	1
2	Rumah Makan	3	6	11	5
4	Bengkel	-	2	4	9
3	Industri	5	3	1	1
5	Tower	5	-	-	-
4	Sarana Kesehatan/RS	1	4	4	4
6	Kantor/Perkantoran	2	5		
5	Perumahan/Hotel/Apart	2	1	7	3
7	Laboratorium	1	-	1	2
6	IPAL	1	2	-	1
8	Sarana Pendidikan	-	-	1	2
9	Pasar	-	-	3	-
10	Swalayan	-	1	1	1
	Jumlah	21	30	39	32

Sumber: RENSTRA BPLH Kota Bogor 2015-2019

B. INDUSTRI KREATIF

Departemen Perdagangan RI tahun 2009 telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan memberdayakan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Dalam ekonomi kreatif terdapat 14 sub-sektoral ekonomi kreatif yang telah ditetapkan pemerintah sebagai fokus pengembangan ekonomi kreatif hingga tahun 2025, antara lain:

1. Periklanan;
2. Arsitektur;
3. Pasar seni dan barang antik;
4. Kerajinan;
5. Desain;
6. Fesyen;
7. Film, video, dan fotografi;
8. Permainan interaktif;
9. Musik;
10. Seni pertunjukan;
11. Penerbitan dan percetakan;
12. Layanan komputer dan piranti lunak;
13. Radio dan televisi;
14. Riset dan pengembangan.

Berdasarkan data “Kajian Ekonomi Tematik Potensi Ekonomi Kreatif di Kota Bogor”, untuk Kota Bogor jumlah ekonomi kreatif bertambah satu yaitu kuliner. Pembahasan kuliner yang diharapkan masuk dalam sub-sektoral ekonomi kreatif berdasarkan kesepakatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang akan mengusulkan kuliner sebagai sub-sektoral ekonomi kreatif kepada Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hal ini didasari oleh besarnya potensi kuliner sebagai keunggulan lokal di Jawa Barat.

Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif adalah 98 pelaku. Jika berdasarkan kecamatan, jumlah terbanyak berada di kecamatan Bogor Selatan sebanyak 27 pelaku atau 27,55 persen. Selanjutnya terbanyak kedua berada di Kecamatan Bogor Barat sebanyak 18 pelaku usaha atau 18,37 persen, disusul Kecamatan Bogor Utara sebanyak 15 pelaku atau 15,31 persen, Kecamatan Bogor Tengah

dan Tanah Sareal masing-masing 13 pelaku usaha atau 13,27 persen dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Bogor Timur sebanyak 12,24 persen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara jumlah pelaku usaha paling banyak berada di Kecamatan Bogor Selatan yang merupakan salah satu daerah sentra UKM. Secara lengkap jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 82 Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Kota Bogor Tahun 2012

NO	KECAMATAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Bogor Barat	18	18.37
2	Bogor Selatan	27	27.55
3	Bogor Tengah	13	13.27
4	Bogor Timur	12	12.24
5	Bogor Utara	15	15.31
6	Tanah Sareal	13	13.27
Total		98	100.00

Sumber: BPS Kota Bogor, 2012

Berdasarkan data dari “Kajian Ekonomi Tematik Potensi Ekonomi Kreatif di Kota Bogor”, dari 15 sub-sektoral ekonomi kreatif di Kota Bogor, ternyata yang teridentifikasi lima sub-sektoral yaitu: fesyen, kerajinan, kuliner, musik dan percetakan. Sub sektoral ekonomi kreatif yang paling banyak adalah kerajinan yaitu sebanyak 43 pelaku usaha atau 43,88 persen. Banyaknya pelaku usaha kerajinan memang sudah tidak diragukan lagi, Kota Bogor merupakan salah satu wilayah penghasil beragam jenis kerajinan, antara lain kerajinan dari kayu dan bambu, kerajinan yang berbasis kaca dan keramik, kerajinan berbasis daur ulang, kerajinan berbasis seni dan *handycraft* dan kerajinan logam dan kerajinan berbasis kain dan bordir.

Selanjutnya terbanyak kedua adalah kuliner yang berjumlah 26 atau 26,53 persen. Sebagaimana diketahui juga bahwa Kota Bogor terkenal sebagai salah satu kota wisata kuliner, sehingga sangat relevan ketika pelaku usaha kuliner merupakan salah satu yang terbanyak di Kota Bogor. Terbanyak berikutnya adalah sub-sektoral fesyen dengan jumlah 20 pelaku usaha atau 20,41 persen. Terbanyak selanjutnya adalah sub-sektoral penerbitan dan percetakan yang berjumlah lima pelaku usaha atau 5,10 persen, dan yang paling sedikit adalah sub-sektoral musik yang berjumlah empat pelaku usaha atau 4,08 persen. Dengan gambaran yang disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara jumlah pelaku ekonomi kreatif terbanyak adalah sub-sektoral kerajinan. Secara jelas jumlah pelaku usaha berdasarkan sub-sektoral ekonomi kreatif Kota Bogor dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 83 Jumlah Pelaku Usaha Berdasarkan Sub-sektoral Ekonomi Kreatif

NO	SUB-SEKTORAL	JUMLAH	PERSENTASE
1	Fesyen	20	20.41
2	Kerajinan	43	43.88
3	Kuliner	26	26.53
4	Musik	4	4.08
5	Penerbitan dan Percetakan	5	5.10
Total		98	100.00

Sumber: BPS Kota Bogor, 2012

Kota Bogor memiliki objek dan sarana wisata yang memadai sehingga mengundang banyak wisatawan datang ke Kota Bogor. Hal ini menjadikan wilayah Kota Bogor lebih ramai lagi dan berpotensi bagi berbagai usaha untuk meningkatkan perekonomian. Selain kunjungan ke obyek-obyek wisata, aktivitas kunjungan wisata ke Kota Bogor juga tercermin dari keramaian di pusat-pusat perdagangan makanan jajanan dan buah-buahan serta *factory outlet* pakaian dan tas seperti di Jalan Suryakencana, Siliwangi, Pajajaran, dan Tajur terutama pada Hari Sabtu, Minggu dan hari-hari libur.

Sektor industri kreatif yang selama ini telah berjalan di Kota Bogor dan memberikan kontribusi baik dalam aspek materi maupun citra terhadap Kota Bogor seperti Industri Kreatif Wayang Golek di Kelurahan Loji yang menjadi target kunjungan wisatawan mancanegara; Industri Kreatif Gong di Pancasan Kelurahan Pasir Jaya yang sudah mendunia dan menjadi target kunjungan rutin para wisatawan mancanegara; Industri Kreatif Pembuatan Kujang di Kelurahan Katulampa; Industri Kreatif Sepatu/sandal di Kelurahan Cikaret; Industri Kreatif Batik Bogor dan sebagainya.

Adanya iklim usaha yang kondusif dan banyaknya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang jasa akan mendorong Kota Bogor menjadi wilayah yang berkembang dengan mobilitas penduduk yang tinggi. Kondisi ini akan mengakibatkan roda perekonomian di Kota Bogor terus berkembang, sehingga berbagai jenis usahapun tumbuh subur dari usaha jasa sampai kuliner banyak berdiri di wilayah-wilayah strategis.

II.3.2.8. ENERGI

Sumber energi gas semakin diminati masyarakat Kota Bogor. Peningkatan pelanggan gas di tahun 2012 mencapai 16.826 pelanggan dan sebesar 97 persen merupakan pelanggan rumah tangga. Pemanfaatan gas di kalangan pelanggan industri dan komersil juga semakin meningkat. Penggunaan gas di kalangan industri meningkat 2,46 persen dari 435,7 juta kubik tahun 2011 menjadi 446,4 juta kubik tahun 2012. Sedangkan penggunaan di kalangan pelanggan komersil meningkat sekitar 4,11 persen dari 2.139.922 kubik tahun 2011 menjadi 2.227.820 kubik tahun 2012. Hal ini menyebabkan volume gas yang terjual juga meningkat 2,41 persen dibanding tahun 2011 dengan rata-rata volume gas terjual per bulan sekitar 37,7 juta kubik.

Tabel II. 84 Banyaknya Pelanggan Listrik dan Daya Tersambung Menurut Kecamatan

NO	KECAMATAN	JUMLAH PELANGGAN	DAYA TERSAMBUNG
1	Bogor Selatan	34.721	53.865.690
2	Bogor Timur	20.491	57.342.380
3	Bogor Utara	41.321	76.906.410
4	Bogor Tengah	20.380	67.525.210
5	Bogor Barat	41.601	53.89.971
6	Tanah Sareal	43.336	76.140.920

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2013

II.3.2.9. SUMBER DAYA AIR

Berdasarkan Perda No. 16 Tahun 2011, sumber air minum PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor berasal dari dua sumber utama, yaitu :

1. Mata Air
 - a. Mata Air Kota Batu dengan kapasitas terpasang 70 Lt/detik
 - b. Mata Air Bantar Kambing dengan kapasitas terpasang 170 Lt/detik
 - c. Mata Air Tangkil dengan kapasitas terpasang 170 Lt/detik
 - d. Mata Air Palasari dengan kapasitas terpasang 30 Lt/detik.
2. Air Permukaan
 - a. WTP Cipaku dengan kapasitas terpasang 300 Lt/detik
 - b. WTP I Dekeng dengan kapasitas terpasang 1.150 Lt/detik
 - c. WTP II Dekeng dengan kapasitas terpasang 400 Lt/detik
 - d. WTP Palasari dengan kapasitas terpasang 20 Lt/detik

Tabel II. 85 Sumber Air Baku dan Kapasitas Produksi Air Bersih

NO	SUMBER	LOKASI	TAHUN	KAPASITAS (LITER/DETIK)			SISA KAPASITAS (LITER/DETIK)
				TERPANGGUNG	PRODUKSI	TERMANFAATKAN	
1	Mata Air	Kota Batu	1918	70	66	65,66	
2	Mata Air	Bantar	1969	170	135	135,00	
2	Mata Air	Bantar	1969	170	135	135,00	
3	Mata Air	Tangkil	1974	170	130	130,04	
4	IPA	Cipaku 1	1988	120	280	221	59
		Cipaku 3	1995	60			
		Cipaku 4	2003	60			
5	IPA	Dekeng I	1997	600	1.000	762	238
		Dekeng I	2005	Up-			
			2011	2 unit			
		Dekeng II	2013	400	400	335	65
6	Mata Air	Palasari I	2008	30	19	18,85	
7	IPA	Palasari I	2008	20	20	11,03	9
JUMLAH					2,050	1,679	371

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Bogor Tahun 2013

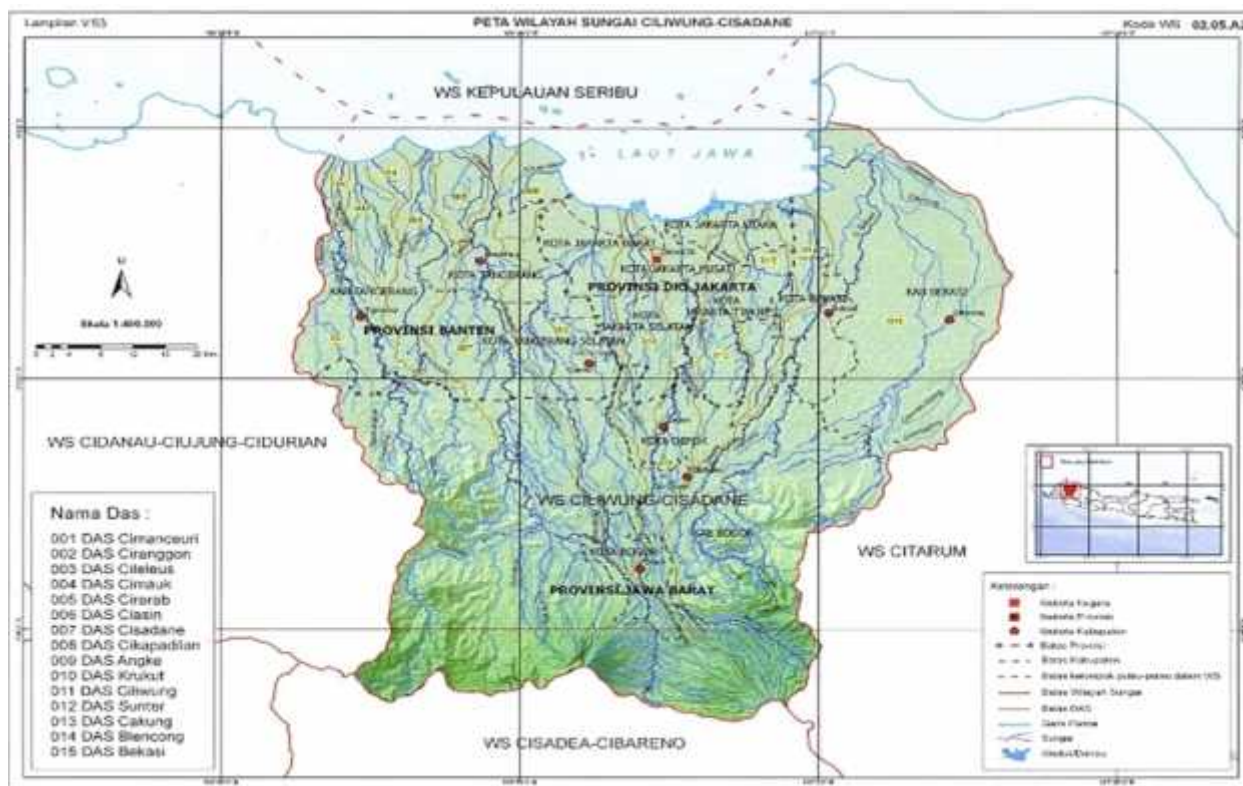
Dari berbagai sumber mata air yang ada PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor mampu mengalirkan zona – zona pelayanan air minumannya seperti :

1. Mata Air Kota Batu melayani Zona 6 (Kelurahan Cikaret, Ciomas, Ciomas Rahayu, Gunung Batu, Kota Batu, Loji, Mekar Jaya, Mulya Harja, Parakan, Pasir Jaya, Pasir Mulya, Pasir Kuda dan Sirna Galih, Balumbang Jaya, Sindang Barang, NN Tajur Halang)
2. Mata Air Tangkil melayani pelanggan di zona 1 (Kelurahan Tajur, Katulampa, Lawang Gintung, Pakuan, Muara Sari, Sindang Rasa, Sindang Sari, Harjasari, Rancamaya dan Kertamaya)
3. Mata Air Bantar Kambing melayani zona 2 (Kelurahan Cipaku dan Genteng) dan membantu untuk melayani zona 3 dan Zona 1
4. WTP Dekeng I dan WTP Dekeng II melayani zona 4 (Mekar Wangi, Cibadak, Kencana, Cimahpar, Cibuluh, Tegal Gundil, Kebon Pedes, Tegal Lega, Panaragan, Sempur, Bantarjati, Kebon Kalapa, Babakan, Cibogor, Ciluar, Tanah Baru, Sukaraja, Ciwaringin, Pabaton, Tanah Sareal, Menteng, Kedung Waringin, Kedung Jaya, Curug Semplak, Kedung Halang, Kedung Badak, Cilendek Timur, Cilendek Barat, Sukaresmi, Ciparigi, Sukadamai, Kayumanis dan Margajaya)
5. WTP Cipaku melayani pelanggan zona 3 (Kelurahan Baranangsiang, Sukasari, Batutulis, Babakan Pasar, Gudang, Paledang, Bondongan, Empang, Pasir Jaya dan Bojongkerta, Tanah Baru)
6. Mata Air dan WTP Palasari melayani wilayah zona 5 (Kelurahan Pamoyanan, Ranggamekar dan Palasari)

Sumber air baku yang masih bisa diandalkan untuk penambahan kapasitas produksi adalah sungai Cisadane. Ketersediaan air sungai sangat berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas air yang dihasilkan PDAM Tirta Pakuan. Di Kota Bogor sendiri, terdapat sungai seluas 124,59 hektar dan sempadan sungai seluas 181,79 hektar.

Daerah pelayanan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor adalah wilayah Kota Bogor yang telah mengalami perluasan wilayah pada tahun 1995 sehingga tanggung jawab PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor semakin bertambah, dengan adanya perluasan wilayah Kota Bogor ada wilayah Kota Bogor yang dilayani oleh PDAM Kabupaten Bogor, sampai saat ini mencapai 14.314 SL atau 78.727 jiwa.

PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor telah menjangkau enam wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Tanah Sareal, Kecamatan Bogor Tengah, dan kecamatan Bogor Utara. PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor saat ini telah memiliki Jumlah pelanggan sebanyak 118.424 sambungan yang tersebar pada enam wilayah kecamatan terdiri dari kelompok Sosial, Kelompok Rumah Tangga, Instansi Pemerintah, Perniagaan dan Industri. Untuk peta wilayah sungai Ciliwung-Cisadane telah tersaji pada gambar berikut:



Gambar II. 3 Peta Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane

Keterangan:

1.	Kode Wilayah	:	02.05.A2
2.	Status	:	WS Lintas Propinsi
3.	Status	:	Pemerintah Pusat
4.	Propinsi	:	Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten
5.	Kabupaten	:	Kabupaten Tangerang , Kota Tangerang , Kota Tangerang Selatan , Kabupaten Bekasi , Kabupaten Bogor , Kota Bekasi , Kota Bogor , Kota Depok , Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Selatan
6.	DAS	:	Das Cimanceuri, Das Ciranggon, Das Cileleus, Das Cimauk, Das Cirarab, Das Ciasin, Das Cisadane, Das Cikapadlan, Das Angke, Das Krukut, Das Ciliwung, Das Sunter, Das Cakung, Das Blencong, Das Bekasi
7.	DAS Terbesar	:	DAS Cisadane
8.	Luas DAS	:	-
9.	Luas Wilayah	:	5.293,01 km ²

II.3.2.10. PARIWISATA

Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Bogor pada tahun 2013 sebanyak 3.953.594 orang wisatawan. Kota Bogor yang dalam sejarahnya pernah menjadi kota penting di mata dunia memiliki banyak sekali peninggalan sejarah dan kebudayaan, namun demikian berbagai potensi ini belum dikembangkan secara maksimal sebagai destinasi wisata di Kota Bogor.

Data sekunder yang tersedia, hanya menyebutkan 14 objek wisata di Kota Bogor termasuk Kebun Raya Bogor yang merupakan ikon legendaris.

Sebagai kota yang memiliki identitas serta karakter yang kuat, Kota Bogor seyogyanya dapat memanfaatkan potensi tersebut untuk mengembangkan pariwisata. Pengembangan destinasi wisata baru tidak harus dilakukan dengan membuat wahana wisata baru, melainkan mengembangkan potensi yang telah dimiliki agar memiliki nilai tambah. Hal ini sekaligus dapat disinambungkan dengan upaya pelestarian dan pengembalian ruh dari peninggalan sejarah.

Tabel II. 86 Daftar Obyek Wisata, Alamat dan Daya Tarik Wisata di Kota Bogor

OBYEK WISATA	ALAMAT	JENIS OBYEK	LUAS WILAYAH
Kebun Raya Bogor	Jl. Ir. H. Juanda	Alam, Ilmiah, dan Budaya	87 Ha
Istana Kepresidenan Bogor	Jl. Ir. H. Juanda No. 1	Sejarah dan Budaya	28,8 Ha
Prasasti Batu Tulis	Jl. Batutulis No. 54	Sejarah	21,34 m ²
Plaza Kapten Muslihat	Jl. Kapten Muslihat No. 51	Taman Rekreasi	17.690 m ²
Museum Zoologi Bogor	Jl. Ir. H. Juanda No. 9	Ilmiah dan Budaya	1500 m ²
Museum Etnobotani	Jl. Ir. H. Juanda No, 22-24	Ilmiah	1600 m ²
Museum Perjuangan Bogor	Jl. Merdeka No 56	Sejarah dan Budaya	650 m ²
Rancamaya Country Golf	Jl. Rancamaya Utama Ciawi Bogor	Taman Rekreasi	400 Ha
Museum dan Monumen PETA	Jl. Jend Sudirman No. 35	Sejarah dan Budaya	9.400 m ²
Tanaman Obat	Jl. Tentara Pelajar No. 3	Ilmiah	1 Ha
Museum Tanah	Jl. Ir. H Juanda	Ilmiah	30 m ²
Danau Wisata Situ Gede	Jl. Tambakan No. 1	Taman Rekreasi dan Alam	6 Ha
Country Club Cimanggu	Jl. KH. Sholeh Iskandar No. 1	Rekreasi	3,7 Ha
The Jungle	Bogor Nirwana Residence	Rekreasi	3 Ha

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2013

Potensi yang telah dimiliki dan salah satu warisan budaya yang paling dikenal adalah Kebun Raya Bogor. Sebagai salah satu kebun raya yang mengoleksi tumbuhan tropis terbesar di dunia, Kebun Raya Bogor menjadi semakin disadari pentingnya baik ditinjau dari kepentingan ekologi maupun ekonomi. Namun demikian, lokasi ini tidak luput dari ancaman pencemaran udara dari lingkungan sekitarnya. Sebagai jalur lalu lintas yang semakin padat, ruas-ruas jalan di sekitar Kebun Raya Bogor menjadi tempat emisi pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor baik berupa gas maupun partikel. Kepadatan kendaraan di sekitar Kebun Raya Bogor sangat berpengaruh terhadap kondisi pohon. Menurut Sukarsono (*Sukarsono. 1998. [THESIS] Dampak Pencemaran Udara Terhadap Tumbuhan di Kebun Raya Bogor. Bogor: Institut Pertanian Bogor*) kandungan gas pencemar udara dari kendaraan yaitu gas NO₂ dan partikel Pb (timbal) di hampir semua lokasi sudah melampaui nilai ambang batas dan kandungan tertinggi terdapat di pinggir kebun raya. Persentase kerusakan (rata-rata) struktur anatomi daun yang diduga disebabkan oleh pencemaran udara berkisar antara 0 64,88 persen.

Dari hasil penelitian Endes N Dahlan (*Dahlan, Endes N. 2007. [DISERTASI] Analisis Kebutuhan Luasan Hutan Kota Sebagai Sink Gas CO₂ Antropogenik dari Bahan Bakar Minyak dan Gas di Kota Bogor dengan Pendekatan Sistem Dinamik. Bogor: Ilmu Pengetahuan Kehutanan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor*), penggunaan bahan bakar menghasilkan emisi gas CO₂ antropogenik di kota Bogor pada tahun 2010 sebanyak 600.216 ton dan diprediksi pada tahun 2100 menjadi 848.175 ton. Sedangkan menurut Sri Purwaningsih (sumber:

Purwaningsih, Sri. 2007. [SKRIPSI] *Kemampuan Serapan Karbondioksida pada Tanaman Hutan Kota di Kebun Raya Bogor*. Bogor: Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor¹, daya serap karbondioksida Kebun Raya Bogor menggunakan pendekatan median adalah 0,11 ton/jam sedangkan menggunakan pendekatan taksonomi adalah 0,54 ton/jam. Kondisi ini memantapkan Kebun Raya untuk menjalankan fungsinya sebagai penyerap karbondioksida. Dengan begitu, emisi gas CO₂ di kota Bogor dapat diserap oleh Kebun Raya Bogor selama 277 hari.

Selain kepadatan kendaraan, pemanfaatan ruang di sekitar Kebun Raya Bogor semakin mengalami perubahan seiring dengan meningkatnya lahan terbangun. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya bangunan-bangunan yaitu pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan dan berbagai sentra lainnya. Bahkan untuk Kecamatan Bogor Tengah dimana Kebun Raya Bogor berada, terdapat 11 hotel berbintang dari jumlah total 13 hotel berbintang di Kota Bogor (*sumber: Kota Bogor Dalam Angka Tahun 2013*)².

Menurut Retno Mustikaweni (*sumber: Mustikaweni, Retno. 2008. [SKRIPSI] Pengaruh Perubahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Lingkar Luar Kebun Raya Bogor Terhadap Iklim Mikro*. Bogor: Program Studi Arsitektur Lanskap Fakultas Pertanian IPB³), pola perubahan lahan terbangun serta penurunan jumlah ruang terbuka hijau dan badan air berdampak pada peningkatan suhu udara perkotaan. Suhu udara kota yang tinggi dapat menimbulkan ketidaknyamanan kota itu sendiri. THI (Temperature Humidity Index) Kota Bogor mengalami peningkatan sebesar 0,53 (semakin tinggi THI, semakin tidak nyaman). Suatu tempat termasuk kategori nyaman jika memiliki nilai THI antara 21-27. Penghitungan tingkat kenyamanan di daerah sekitar Kebun Raya Bogor menunjukkan ketidaknyamanan di siang hari (THI berkisar antara 28 sampai 32) dan peningkatan suhu yang tajam. Indeks THI ini dapat meningkat apabila pemanfaatan ruang di sekitar KRB tidak dikendalikan dengan baik.

Meningkatnya lahan terbangun tersebut juga berdampak pada beberapa jenis hewan di dalam Kebun Raya Bogor khususnya burung. Keberadaan burung-burung semakin mengalami tekanan akibat dari perubahan kondisi lingkungan baik di dalam maupun di sekitar Kebun Raya Bogor. Dari hasil penelitian Wawan Hermawan (*sumber: Hermawan, Wawan. 2001. [SKRIPSI] Keragaman Jenis Burung di Kebun Raya Bogor*. Bogor: Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) pada tahun 2001, beberapa jenis burung yang sebelumnya terdapat di Kebun Raya Bogor kini jumlahnya semakin menurun bahkan beberapa jenis diduga sudah hilang. Hal ini disebabkan Kebun Raya Bogor sudah terisolasi dari hutan di sekitarnya. Jumlah jenis burung yang berhasil ditemukan sebanyak 46 jenis setelah sebelumnya ditemukan 56 jenis pada tahun 1986.

Kawasan di sekitar Kebun Raya Bogor memiliki nilai kesejarahan yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan kawasan di sekitarnya merupakan kawasan hasil pembangunan masa kependudukan bangsa kolonial. Elemen-elemen dan area-area bersejarah hasil pembangunan dan perkembangan periode kolonial pun masih ada hingga saat ini dan memberikan karakteristik yang khas pada Kota Bogor, terutama di kawasan sekitar Kebun Raya Bogor. Elemen dan area tersebut memiliki karakteristiknya masing-masing, yaitu kawasan dengan karakter lanskap kolonial di beberapa kelurahan di sekeliling Kebun Raya Bogor, Pecinan di Suryakencana, dan Kampung Arab di Empang.

Menurut Mayang H.W⁴, rencana tata ruang Kota Bogor menetapkan bahwa kawasan Kebun Raya Bogor dan sekitarnya merupakan wilayah pusat kota sebagai kota lama (kawasan bersejarah) yang diarahkan untuk mempertahankan kegiatan perdagangan dan jasa yang ada, pusat perkantoran, dan RTH skala kota. Penetapan ini dapat menjadi tekanan terhadap keberadaan Kebun Raya Bogor.

II.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Aspek daya saing daerah dapat mengukur tingkat kemampuan ekonomi suatu daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan propinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, domestik, atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Indikator variabel aspek daya saing daerah terdiri dari:

II.4.1. FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH

Analisis kinerja atas fokus kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap Indikator-Indikator: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita, Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Rumah Tangga per Kapita, Nilai Tukar Petani dan Produktivitas Total Daerah. Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah, sebagai berikut:

II.4.1.1. PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA PER KAPITA

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan merupakan rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga dalam sebulan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi anggota rumah tangga yang dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dibedakan menjadi dua, yaitu konsumsi makanan dan konsumsi bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja.

Seperti yang tersaji pada Tabel II. 87, persentase pengeluaran perkapita sebulan dalam kurun waktu tahun 2009 sampai tahun 2011 mengalami fluktuasi. Hal ini terlihat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, pengeluaran perkapita perbulan penduduk Kota Bogor berada pada kisaran golongan pengeluaran 300.000 sampai 499.999 rupiah. Pada tahun 2009 sebanyak 47,80 persen penduduk Kota Bogor yang berada kisaran golongan pengeluaran 300.000 sampai 499.999 rupiah pada tahun 2010 sebanyak 33,33 persen penduduk Kota Bogor yang berada kisaran golongan pengeluaran 300.000 sampai 499.999 rupiah dan pada tahun 2011 sebanyak 33,35 penduduk Kota Bogor yang berada kisaran golongan pengeluaran 300.000 sampai 499.999 rupiah. Akan tetapi untuk kisaran golongan pengeluaran lebih dari 1.000.000 rupiah selama kurun waktu tiga tahun terakhir, terus mengalami kenaikan yang diikuti pula dengan peningkatan golongan pengeluaran per kapita per bulan. Peningkatan pengeluaran per kapita per bulan juga mengindikasikan adanya peningkatan pendapatan yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan.

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan penduduk di Kota Bogor terdapat pada golongan 300.000 rupiah hingga 499.999 rupiah. Akan tetapi, golongan pengeluaran lebih dari 1.000.000 rupiah merupakan golongan dengan peningkatan paling signifikan dari tahun 2009 hingga tahun 2011. Peningkatan pengeluaran perkapita perbulan juga mengindikasikan adanya peningkatan pendapatan yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan. Akan tetapi peningkatan yang terjadi menimbulkan ketidakmerataan ekonomi

yang terjadi di Kota Bogor. Dimana rata-rata pengeluaran per kapita penduduk berada di golongan 300.000 rupiah hingga 499.999 rupiah dengan hasil yang fluktuasi setiap tahunnya, sedangkan untuk golongan pengeluaran lebih dari 1.000.000 rupiah merupakan golongan ketiga tertinggi akan tetapi merupakan golongan dengan peningkatan paling signifikan setiap tahunnya.

Tabel II. 87 Persentase Pengeluaran Per Kapita Sebulan Penduduk Kota Bogor (%)

NO	GOLONGAN PENGELUARAN	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)
1	< 100.000	0,16	0,00	0,00	-	-
2	100.000 – 149.999	0,59	0,31	0,00	-	-
3	150.000 – 199.999	4,78	1,57	0,22	-	-
4	200.000 – 299.999	6,86	11,8	10,08	-	-
5	300.000 – 499.999	47,80	33,33	33,35	-	-
6	500.000 – 749.999	20,91	27,32	25,48	-	-
7	750.000 – 999.999	7,69	11,53	12,18	-	-
8	> 1.000.000	11,21	14,13	18,69	-	-

Sumber: IPM Kota Bogor Tahun, 2012

Pengeluaran rata-rata konsumsi per kapita sebulan dapat dijadikan sebagai indikator kesejahteraan rakyat. Dimana hal ini didasarkan pada teori yang pada umumnya semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat, maka proporsi persentase pengeluaran untuk makanan semakin menurun. Angka konsumsi rumah tangga per kapita diperoleh dari perbandingan antara rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk makanan sebulan dengan rata-rata total pengeluaran rumah tangga sebulan.

Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di Kota Bogor pada tahun 2011 adalah Rp 763.236,00. Hal ini berarti setiap penduduk di Kota Bogor mengeluarkan biaya sebesar itu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dalam kurun waktu satu bulan. Seperti tersaji pada Tabel II. 88, rasio pengeluaran rata-rata makanan per kapita tahun 2009 sebesar 697.805 rupiah dan rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan sebesar 296.251 rupiah sehingga diperoleh rasio sebesar 42,45 persen. Pada tahun pada tahun 2011 rata-rata pengeluaran per bulan sebesar 763.236 rupiah dan rata-rata pengeluaran konsumsi makanan per bulan sebesar 340.544 rupiah sehingga diperoleh rasio sebesar 44,62 persen. Melihat dari garis kemiskinan Kota Bogor yang terus menurun, seharusnya berbanding lurus dengan rata-rata pengeluaran makanan per kapita. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya, peningkatan rata-rata pengeluaran makanan per kapita bertentangan dengan menurunnya garis kemiskinan Kota Bogor.

Tabel II. 88 Pengeluaran Rata-Rata (Rp) Makanan per Kapita Kota Bogor Tahun 2009-2013

NO	URAIAN	2009	2010	2011
1.	Rata-rata pengeluaran per bulan	697.805	Na	763.236
2.	Rata-rata pengeluaran konsumsi makanan per bulan	296.251	Na	340.544
3.	Rasio	42,45	Na	44,62

Sumber : Suseda Kota Bogor, 2009, 2012

II.4.1.2. PENGELUARAN KONSUMSI NON-PANGAN PER KAPITA

Pengeluaran konsumsi rumah tangga selanjutnya, yaitu pengeluaran rumah tangga non-pangan. Dimana semakin besar pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan non-pangan menggambarkan semakin sejahtera rumah tangga tersebut, akan tetapi semakin kecil pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan non-pangan menggambarkan bahwa rumah tangga tersebut kurang sejahtera.

Seperti yang tersaji pada Tabel II. 89, rasio pengeluaran untuk non-pangan per kapita perbulan dalam kurun waktu tahun 2009 dan tahun 2011 mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2009 rata-rata pengeluaran per kapita perbulan sebesar 697.805,00 rupiah dan rata-rata pengeluaran non-pangan per kapita perbulan sebesar 401.554,00 rupiah sehingga diperoleh rasio sebesar 57,55 persen; penurunan terjadi pada tahun 2011 dengan rasio sebesar 55,38 persen.

Tabel II. 89 Pengeluaran Rata-Rata (Rp) Konsumsi non-Pangan per Kapita Kota Bogor tahun 2009-2013

NO	URAIAN	2009	2011
1.	Rata-rata pengeluaran per bulan	697.805	763,236
2.	Rata-rata pengeluaran konsumsi non-pangan per bulan	401.554	422,692
3.	Rasio	57,55	55.38

Sumber: Suseda Kota Bogor tahun 2009, dan 2012

Pengeluaran non-pangan didominasi oleh pengeluaran perumahan dan fasilitas rumah tangga, sedangkan pengeluaran makanan didominasi oleh pengeluaran makanan dan minuman jadi. Bila dibandingkan antara pengeluaran makanan dan bukan makanan, rasio pengeluaran untuk makanan lebih kecil bila dibandingkan dengan rasio pengeluaran bukan makanan. Dengan merujuk pada teori bahwa semakin kecil pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan pangan menggambarkan semakin sejahtera rumah tangga tersebut, akan tetapi semakin besar pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan pangan menggambarkan bahwa rumah tangga tersebut kurang sejahtera. Maka penduduk Kota Bogor dapat dikatakan telah sejahtera.

Tabel II. 90 Pengeluaran konsumsi pangan dan non-pangan Kota Bogor Tahun 2009-2013

NO	URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013
1	Rata-rata pengeluaran konsumsi per bulan	296.251	-	340.544	-	-
2	Rata-rata pengeluaran non-pangan per bulan	401.554	-	422,692	-	-

Sumber: Suseda Kota Bogor tahun 2009 dan 2012

II.4.1.3. PRODUKTIVITAS TOTAL DAERAH

Produktivitas Total Daerah dapat menggambarkan seberapa besar tingkat produktivitas tiap sektor dalam rangka mendorong perekonomian suatu daerah. Produktivitas total daerah dihitung dengan membagi nilai PDRB per sektor dengan jumlah angkatan kerja pada sektor tersebut.

Seperti tersaji pada Tabel II. 91, pada tahun 2012 rata-rata produktivitas total daerah mencapai 45,22. Sektor yang memiliki produktivitas tertinggi adalah Industri Pengolahan dengan nilai produktivitas sebesar 70,42; Perdagangan, Hotel dan Restoran menjadi yang tertinggi kedua dengan nilai produktivitas sebesar 54,38. Nilai produktivitas paling rendah, yaitu pada sektor Pertanian dengan nilai sebesar 4,88.

Sektor dengan PDRB atas dasar harga berlaku paling tertinggi, yaitu Perdagangan, Hotel dan Restoran dengan PDRB sebesar 6.276.208,33 rupiah, diikuti oleh sektor Industri Pengolahan dengan PDRB sebesar 4.765.773,7 rupiah, kemudian diikuti oleh sektor Lain-lain dengan PDRB sebesar 3.828.687,36 rupiah.

Tabel II. 91 Produktivitas Total Daerah di Kota Bogor tahun 2012

	LAPANGAN KERJA	PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU RP (JUTAAN)	JUMLAH TENAGA KERJA	PRODUKTIVITAS
1	Pertanian	30.275,03	6.198	4,88
2	Industri Pengolahan	4.765.773,70	67.674	70,42
3	Perdagangan, Hotel dan Restoran	6.276.208,33	115.406	54,38
4	Jasa	2.422.391,56	113.108	21,42
5	Lain-laina	3.828.687,36	90.725	42,20
	Jumlah	17.323.335,98	383.111	45,22

Sumber: PDRB Kota Bogor tahun 2013

II.4.2. FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR

Fasilitas wilayah atau infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan fasilitas untuk mendukung ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, maka semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.

Gambaran umum kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari: aksesibilitas daerah, penataan wilayah, fasilitas bank dan non bank, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik, ketersediaan restoran dan rumah makan serta ketersediaan penginapan. Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, sebagai berikut:

II.4.2.1. AKSESIBILITAS DAERAH

II.4.2.1.1. RASIO PANJANG JALAN PER JUMLAH KENDARAAN

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda.

Jumlah perjalanan yang dilakukan setiap individu saat ini semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pula jumlah penduduk serta perekonomian suatu daerah. Untuk memenuhi kebutuhan akan transportasi yang saat ini semakin tinggi perlu adanya upaya untuk meningkatkan transportasi yang disertai dengan peningkatan sarana dan prasarana transportasi.

Seperti tersaji pada Tabel II. 92, rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan pada tahun 2009 hingga tahun 2013 mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2009 rasio panjang jalan terhadap kendaraan sebesar 31,64; terjadi peningkatan pada tahun 2010 menjadi 37,99; kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2011 menjadi 47,23; dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 dan 2013 menjadi 47,27. Panjang jalan dari tahun 2009 hingga tahun 2013 mengalami penurunan, yaitu dari 711.292 kilometer pada tahun 2009 dan 2010 menjadi 661.450 kilometer pada tahun 2011 hingga tahun 2013. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah kendaraan terus mengalami peningkatan, yaitu dari 225.050 pada tahun 2009 menjadi 312.639 pada tahun 2013. Sehingga untuk ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan di Kota Bogor pada tahun 2013 mencapai 1:47, ini artinya bahwa setiap panjang jalan sepanjang satu kilometer, dapat diakses kendaraan baik kendaraan roda empat maupun roda dua sebanyak 47 kendaraan.

Tabel II. 92 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kota Bogor Tahun 2009-2013

NO.	URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Panjang Jalan	711.292	711.292	661.450	661.450	661.450
2.	Jumlah Kendaraan	225.050	270.224	312.383	312.639	312.639
3.	Rasio	31,64	37,99	47,23	47,27	47,27

Sumber: Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pada Tabel II. 93 telah tersaji data kondisi jalan dengan melihat pada keterlaksanaan indikator pada program yang berkaitan dengan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase serta sarana dan prasarannya. Capaian yang terlihat dari setiap indikator menunjukkan angka yang relatif selalu mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Hal ini menunjukkan fasilitas umum pendukung aksesibilitas masyarakat bisa terbangun dengan baik.

Tabel II. 93 Data Kondisi Jalan 2010-2013

NO.	INDIKATOR	CAPAIAN S/D TAHUN 2010	CAPAIAN S/D TAHUN 2011	CAPAIAN S/D TAHUN 2012	CAPAIAN S/D TAHUN 2013
Program pembangunan jalan, jembatan, dan drainase					
1	Ketersediaan Lahan	0,87 km	1,31 km	1,94 km	2,74 km**
2	Panjang Jalan	0 km	0,0975 km	1,44 km	1,44 km*
3	Pembangunan Drainase Jalan @ Tahun	3,55 km	2 km	1,36 km	2,25 km
	Kumulatif	3,55 km	5,55 km	6,91 km	9,16 km
4	Pembangunan Jembatan @ Tahun	2 unit	0 unit	1 unit	1 unit
5	Pembangunan Trotoar @	1514 m2	480 m2	5720 m2	3450
Program Peningkatan Jalan, Jembatan, dan Drainase					
1	Ketersediaan Lahan @ Tahun	0,487 km	0,306 km	0,439 km	0,24 km
2	Peningkatan Jalan	11,15 km	10,54 km	14,35 km	12,817 km
	Kumulatif	11,15 km	21,69 km	36,04 km	48,857 km
Program Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Drainase					
1	Panjang Jalan Berkondisi Baik	249,77 km	260,4 km	288,715 km	321,095 km
2	Panjang Pedestrian/trotoar Berkualitas Baik	209,169 km	218,4 km	233,313 km	249,402 km
3	Perbaikan/Pemeliharaan Jembatan @ Tahun	5 unit	21 unit	25 unit	26 unit
Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan, Jembatan, dan Drainase					
1	Leger Jalan	28,76%	44,4%	63,31%	63,31%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan					
1	Penyediaan Sarana/Instrument Kebinamargaan	40%	50%	60%	65 %

Sumber: RENSTRA Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bogor 2015-2019

Adapun Kinerja Lalu Lintas dari 11 Lokasi Rawan Kemacetan berdasarkan RPJMD, masih terdapat lima lokasi dengan tingkat pelayanan D (V/C ratio 0,75 – 0,84), yaitu: Simpang Tanjakan Empang, Simpang Lawang Saketeng, Jembatan Merah, Simpang Asem, Sukasari (depan Shangrilla).

Di luar 11 titik rawan kemacetan tersebut, saat ini dan terutama pada hari-hari libur (Sabtu-Minggu dan hari libur nasional) di ruas-ruas jalan tertentu seringkali juga terjadi kepadatan dan tersendatnya (kemacetan) arus lalu lintas.

Tabel II. 94 Identifikasi Kinerja Lalu Lintas Pada 11 Lokasi Rawan Kemacetan Tahun 2013

NO	LOKASI (RUAS JALAN)	TIPE JALAN	KAPASITAS (SMP/JAM)	HARI KERJA		
				VOLUME (SMP/JAM)	V/C RATIO	KECEPATAN (KM/JAM)
1	Simpang Tanjakan Empang					
	- Jl. Pahlawan 3	2/2 UD	3.167,4	2.461,1	0,78	23,72
	- Jl. R. Aria Suryawinata (Pulo Empang)	4/2 UD	5.056,9	3.610,7	0,71	24,44
	- Jl. R. Saleh Syarif Bustaman	2/2 UD	5.325,9	3.970,5	0,75	24,47
2	Simpang Lawang Seketeng					
	- Jl. Lawang Seketeng	2/1	2.642,1	2.080,7	0,79	23,33
	- Jl. R. Saleh Syarief Bustaman	2/2 UD	5.325,9	3.970,5	0,75	24,47
3	Simpang Gunung Batu					
	- Jl. Mayjend Ishak Djuarsa	2/2 UD	3.004,3	1.969,5	0,66	24,48
	- Jl. Veteran	4/2 D	2.797,5	1.997,4	0,71	25,35
	- Jl. RE. Abdullah	2/2 UD	2.852,8	1.258,1	0,44	38,61
4	Jembatan Merah					
	- Jl. Kapten Muslihat	4/2 D	2.390,7	1.876,2	0,78	24,33
	- Jl. Merdeka	4/1	4.404,5	2.451,1	0,56	26,37
	- Jl. Veteran (1/3 Arus dr Jl. Merdeka + Jl. Kapt. Muslihat)	4/1	4.404,5	2.611,5	0,59	25,56
5	Simpang Asem					
	- Jl. Merdeka	4/1	4.404,5	2.451,1	0,56	26,37
	- Jl. MA. Salmun	2/1	2.688,7	2.202,1	0,82	20,08
6	Sukasari (depan Shangrilla)					
	- Jl. Siliwangi 2	4/1	5.157,5	4.007,4	0,78	24,46
7	Simpang Bank Jabar					
	- Jl. Dewi Sartika 4	2/2 UD	2.745,4	2.042,8	0,74	25,26
	- Jl. Kapten Muslihat 1	4/2 D	2.390,7	1.606,5	0,67	26,25
8	Simpang Paledang					
	- Jl. Kapten Muslihat 1	4/2 D	2.390,7	1.481,0	0,62	29,31
	- Jl. Kapten Muslihat 2	4/2 D	2.390,7	1.732,0	0,72	25,91
	- Jl. Mayor Oking	2/2 UD	2.925,1	1.505,0	0,51	35,32
9	Simpang Taman Topi					
	- Jl. Kapten Muslihat 1	4/2 D	2.390,7	1.481,0	0,62	29,31
	- Jl. Nyi Raja Permas					
10	Simpang Suryakencana (Pasar Bogor)					
	- Jl. Ir. H. Djuanda 3	4/1	5.359,5	3.914,0	0,73	28,57
	- Jl. Otto Iskandardinata	4/2 UD	5.677,3	2.861,4	0,50	37,73
	- Jl. Suryakencana	4/1	4.487,1	2.921,1	0,65	27,71
11	Jalan Otto Iskandardinata	4/2 UD	5.677,3	2.861,4	0,50	37,73

sumber: RENSTRA DLLAJ Kota Bogor 2015-2019

II.4.2.1.2. JUMLAH ORANG YANG TERANGKUT ANGKUTAN UMUM

Seperti tersaji pada Tabel II. 95, jumlah orang maupun barang yang terangkut angkutan umum pada selang waktu tahun 2009 hingga tahun 2013 mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2009 sebanyak 4.041.746 orang terangkut kendaraan umum, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2010 menjadi 4.190.962 orang, terjadi penurunan di tahun 2011 menjadi 4.127.072 orang, dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2013 menjadi 3.969.831 orang di tahun 2012 dan 3.722.731 orang terangkut angkutan umum di tahun 2013. Penurunan jumlah orang yang terangkut angkutan umum yang terjadi tiga tahun terakhir ini, salah satunya diakibatkan semakin banyaknya penduduk yang memiliki kendaraan pribadi yang berarti semakin meningkat pula kesejahteraan masyarakat Kota Bogor. Akan tetapi, hal ini

berbanding terbalik apabila terkait masalah semakin banyaknya jumlah kendaraan setiap tahunnya yang mengakibatkan semakin padatnya kendaraan per panjang jalan di Kota Bogor.

Tabel II. 95 Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum Kota Bogor Tahun 2009-2013

NO.	URAIAN	SATUAN	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah	Orang	4.041.746	4.190.962	4.127.072	3.969.831	3.722.731
2.	Jumlah	Ton	Na	Na	Na	Na	Na

Sumber: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor, 2013

II.4.2.1.3. JUMLAH ORANG MELALUI TERMINAL PER TAHUN

Seperti tersaji pada Tabel II. 96, jumlah orang yang melalui terminal pada selang waktu tahun 2009 hingga tahun 2013 mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2009 sebanyak 4.041.746 orang melalui terminal, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2010 menjadi 4.190.962 orang, terjadi penurunan di tahun 2011 menjadi 4.127.072 orang, dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2013 menjadi 3.969.831 orang di tahun 2012 dan 3.722.731 orang melalui terminal di tahun 2013.

Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi. Keberadaan terminal merupakan salah satu prasarana utama dalam pelayanan angkutan umum. Keberadaan terminal berperan dalam menentukan tingkat kinerja dari pelayanan angkutan umum dalam suatu wilayah. Terminal merupakan satu-satunya prasarana transportasi yang terdapat di Kota Bogor, selain stasiun. Di Kota Bogor tidak terdapat dermaga maupun bandara, terkait dengan kondisi geografis yang kurang memadai.

Tabel II. 96 Jumlah orang/barang melalui terminal Kota Bogor Tahun 2009-2013

No.	Uraian	2009 (orang)	2010 (orang)	2011 (orang)	2012 (orang)	2013 (orang)
1.	Terminal	4.041.746	4.190.962	4.127.072	3.969.831	3.722.731
	Jumlah	4.041.746	4.190.962	4.127.072	3.969.831	3.722.731

Sumber: Dinas LLAJ Kota Bogor, 2013

II.4.3. FOKUS IKLIM BERINVESTASI

Fokus iklim berinvestasi sangat dipengaruhi oleh rasa aman yang diciptakan agar investor tertarik untuk berinvestasi. Salah satu hal yang menjadi halangan terbesar dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban yaitu kriminalitas. Ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif menggambarkan bahwa disiplin hukum berjalan dengan baik. Ketentraman dan ketertiban umum sangat berdampak positif dalam meningkatkan kenyamanan berinvestasi. Investasi menjadi faktor yang sangat penting karena berperan terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi akan memberikan banyak manfaat terhadap banyak pihak, baik investor, masyarakat dan pemerintah. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan fokus iklim berinvestasi salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja: Fasilitas Bank dan Non Bank, Angka Kriminalitas, Jumlah Demonstrasi, Kemudahan Perizinan, Pengenaan Pajak Daerah, Peraturan Daerah (Perda) yang Mendukung Iklim Usaha dan Status Kelurahan (Persentase Kelurahan Berstatus Swasembada Terhadap Total Kelurahan). Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah, sebagai berikut:

II.4.3.1. FASILITAS BANK DAN NON BANK

Ketersediaan Fasilitas Bank dan Non Bank sangat penting dalam rangka menunjang aspek daya saing daerah. Dengan adanya fasilitas tersebut segala urusan berkaitan dengan jasa dan lalu lintas keuangan dapat berjalan dengan lancar. Indikator kinerja berkaitan dengan fasilitas bank dan non bank salah satunya dapat dilihat dari jenis dan jumlah bank serta cabang-cabangnya.

Seperti tersaji pada Tabel II. 97, jumlah bank yang ada di Kota Bogor berdasarkan jenis pada selang tahun 2009 hingga tahun 2012 tidak mengalami perubahan apapun. Jenis bank pemerintah di Kota Bogor seluruhnya berjumlah empat unit, bank swasta nasional berjumlah 29 unit, bank pembangunan daerah berjumlah satu unit, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berjumlah sembilan unit.

Tabel II. 97 Jumlah Bank berdasarkan jenis di Kota Bogor Tahun 2009-2012

NO.	JENIS BANK	2009	2010	2011	2012
1	Pemerintah	4	4	4	4
2	Swasta Nasional	29	29	29	29
3	Pembangunan Daerah	1	1	1	1
4	BPR	9	9	9	9
	Jumlah	43	43	43	43

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2011, 2012

II.4.3.2. ANGKA KRIMINALITAS

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Iklim berinvestasi dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat serta menanggulangi kriminalitas.

Seperti tersaji pada Tabel II. 98, angka kriminalitas Kota Bogor pada tahun 2009 hingga tahun 2012 mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2009 angka kriminalitas mencapai 0,147 persen, kemudian mengalami penurunan di tahun 2010 menjadi 0,135 persen, dan terus mengalami peningkatan di tahun 2011 menjadi 0,143 persen, dan 0,142 persen di tahun 2012. Selama kurun waktu empat tahun terakhir, kasus pencurian selalu menjadi kasus kriminalitas yang paling tertinggi diantara kasus kriminalitas lainnya. Semakin rendahnya angka kriminalitas pada suatu daerah menggambarkan tingginya rasa aman masyarakat dan begitu pula sebaliknya. Kondisi keamanan dan ketertiban lingkungan di Kota Bogor relatif stabil dan terkendali, hal ini ditunjukkan dengan angka kriminalitas yang masih relatif kecil.

Tabel II. 98 Angka Kriminalitas Tahun 2009-2012 Kota Bogor

NO	JENIS KRIMINAL	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah kasus narkoba	111	93	94	91
2.	Jumlah kasus pembunuhan	5	2	3	6
4.	Jumlah kasus penganiayaan	95	65	95	99
5.	Jumlah kasus pencurian	579	458	464	474
6.	Jumlah kasus penipuan	272	288	351	377
7	Lain-lain	330	380	378	375
8.	Jumlah tindak kriminal	1392	1286	1385	1422
9.	Jumlah penduduk	946.204	950.334	967.398	1.004.831
10.	Angka kriminalitas	0,147	0,135	0,143	0,142

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2011, 2012

II.4.3.3. JUMLAH DEMONSTRASI

Seperti tersaji pada Tabel II. 99, kejadian unjuk rasa yang terjadi di kota berdasarkan jenisnya mengalami peningkatan pada rentang waktu tahun 2011 hingga tahun 2012. Pada tahun 2011 jumlah unjuk rasa sebanyak 53 kasus, yang terdiri dari 20 kasus unjuk rasa di bidang politik, dan 33 kasus unjuk rasa di bidang ekonomi, sedangkan untuk tahun 2012 terjadi sebanyak 85 kasus unjuk rasa, yang terdiri dari 35 kasus unjuk rasa di bidang politik, 47 kasus unjuk rasa di bidang ekonomi, dan tiga kasus unjuk rasa pada kasus pemogokan kerja. Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa pada dasarnya hanyalah penyampaian aspirasi kepada objek unjuk rasa dalam banyak kasus adalah pemerintah. Meningkatnya kasus unjuk rasa di Kota Bogor, terutama kasus ekonomi, menggambarkan bahwa beberapa pihak masyarakat Kota Bogor tidak sependapat dengan kebijakan yang ada, baik pemerintah maupun swasta.

Tabel II. 99 Banyaknya Kejadian Unjuk Rasa di Kota Bogor Tahun 2011-2012

NO	URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013
1	Bidang politik		-	20	35	
2	Ekonomi		-	33	47	
3	Kasus pemogokan kerja		-	-	3	
4	Jumlah unjuk rasa		-	53	85	

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2011, 2012

II.4.3.4. STATUS KELURAHAN

Pembangunan kelurahan dalam jangka panjang ditujukan untuk memperkuat dasar-dasar sosial ekonomi perkelurahan yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan kota-kota dan wilayah di sekitarnya. Pembangunan kelurahan dan pembangunan sektor yang lain di setiap kelurahan akan mempercepat pertumbuhan Kelurahan menjadi Kelurahan swasembada yang memiliki ketahanan di segala bidang dan dengan demikian dapat mendukung pemantapan ketahanan nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan. Berdasarkan statusnya, kelurahan diklasifikasikan menjadi tiga, yakni kelurahan Swadaya (tradisional); kelurahan Swakarya (transisional); dan kelurahan Swasembada (berkembang).

Kelurahan swadaya adalah kelurahan yang memiliki potensi tertentu tetapi dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan ciri: daerahnya terisolir dengan daerah lainnya, penduduknya jarang, mata pencaharian homogen yang bersifat agraris, bersifat tertutup, masyarakat memegang teguh adat, teknologi masih rendah, sarana dan prasarana sangat kurang, hubungan antarmanusia sangat erat, pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga. Jumlah kelurahan swadaya di Kota Bogor berjumlah 15 kelurahan.

Kelurahan swakarya adalah peralihan atau transisi dari kelurahan swadaya menuju kelurahan swasembada. Ciri-ciri kelurahan swakarya adalah kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh, sudah mulai mempergunakan alat-alat dan teknologi, sudah tidak terisolasi lagi walau letaknya jauh dari pusat perekonomian, telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas dan prasarana lain, jalur lalu lintas antara Kelurahan dan kota sudah agak lancar. Jumlah Kelurahan swakarya di Kota Bogor berjumlah 29 kelurahan.

Jumlah kelurahan swadaya, swakarya, maupun swasembada di Kota Bogor tidak mengalami perubahan dari tahun 2011 hingga tahun 2012. Jumlah Kelurahan swasembada di Kota Bogor pada tahun 2011 dan tahun 2012, yaitu sebanyak 24 kelurahan dan total kelurahan di Kota Bogor sebanyak 68 kelurahan, sehingga diperoleh persentase kelurahan berstatus swasembada terhadap total Kelurahan di Kota Bogor sebesar 35,29 persen.

Ciri-ciri kelurahan swasembada: kebanyakan berlokasi di ibukota kecamatan, penduduknya padat-padat, tidak terikat dengan adat istiadat, telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan lebih maju dari Kelurahan lain, partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif. Kelurahan swasembada di Kota

Bogor memiliki jumlah terbesar kedua setelah kelurahan swakarya. Hal ini berarti kelurahan di Kota Bogor sebagian besar masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam serta potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai jumlah kelurahan swadaya, swakarya, dan swasembada di Kota Bogor tahun 2010-2012

Tabel II. 100 Jumlah Kelurahan Swasembada di Kota Bogor Tahun 2010-2012

NO	URAIAN	2011	2012
1.	Jumlah Kelurahan Swadaya	15	15
2.	Jumlah Kelurahan Swakarya	29	29
3.	Jumlah Kelurahan Swasembada	24	24
4.	Jumlah Kelurahan	68	68
	Rasio Kelurahan Swasembada	35,29	35,29

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2011/2012,

Seperti tersaji pada Tabel 101, Kecamatan Bogor Utara memiliki kelurahan swadaya yang terbanyak diantara kecamatan lainnya, yaitu sebanyak enam kelurahan. Kelurahan swakarya terbanyak terdapat di Kecamatan Bogor Barat dengan jumlah delapan kelurahan swakarya. Kecamatan yang memiliki jumlah kelurahan swasembada terbanyak terdapat di Kecamatan Bogor Tengah dan Kecamatan Bogor Barat dengan jumlah kelurahan swasembada sebanyak tujuh kelurahan.

Tabel 101 Jumlah Kelurahan Menurut Klasifikasi Per Kecamatan Tahun 2011-2012

NO.	KECAMATAN	SWADAYA	SWAKARYA	SWASEMBADA	JUMLAH
1	Bogor Selatan	4	7	5	16
2	Bogor Timur	4	2	0	6
3	Bogor Utara	6	2	0	8
4	Bogor Tengah	0	4	7	11
5	Bogor Barat	1	8	7	16
6	Tanahsareal	0	6	5	11
Jumlah	2011	15	29	24	68
	2012	15	29	24	68

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2011, 2012

II.4.4. FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA

Fokus Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah. Perlu adanya upaya dalam peningkatan terhadap kualitas sumber daya manusia, salah satunya melalui pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pendidikan juga merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia serta kualitas tenaga kerja. Semakin besar jumlah tenaga kerja maka semakin besar kapasitas penduduk usia kerja untuk menopang penduduk usia tidak produktif. Oleh

karenanya pembangunan SDM harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional dan mampu memanfaatkan, mengembangkan serta menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Analisis kinerja atas fokus sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator-indikator: Kualitas Tenaga Kerja dan Tingkat Ketergantungan.

II.4.4.1. KUALITAS TENAGA KERJA (RASIO LULUSAN S1/S2/S3)

Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

Seperti yang tersaji pada Tabel II. 102 kualitas tenaga kerja merupakan salah satu permasalahan yang ada mengingat jumlah lulusan S1/S2/S3 masih terbilang kecil yang berbanding lurus dengan kecilnya rasio S1/S2/S3. Pada tahun 2010 rasio lulusan sebesar 0,064; mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi sebesar 0,056; dan meningkat di tahun 2012 menjadi 0,135. Pada selang waktu tahun 2009 sampai tahun 2012 rasio lulusan S1/S2/S3 terus mengalami peningkatan, kecuali tahun 2011 ke tahun 2012. Secara keseluruhan hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya pendidikan semakin meningkat pula. Selain itu, peluang untuk mendapatkan lapangan pekerjaan atau menciptakan peluang usaha lebih besar bagi mereka yang berpendidikan tinggi dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan rendah.

Tabel II. 102 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2008-2012 Kota Bogor

NO	URAIAN	2010	2011	2012
1	Jumlah Lulusan S1	Na	46.996	55.855
2	Jumlah Lulusan S2/S3	Na	6.766	79.855
4	Jumlah Lulusan S1/S2/S3	60.680	53.762	135.710
5	Jumlah Penduduk	950.334	967.398	1.004.831
6	Rasio lulusan S1/S2/S3	0,064	0,056	0,135

Sumber: LKPJ Kota Bogor Tahun 2013, Kota Bogor Dalam Angka Tahun 2011 dan Tahun 2012

II.4.4.2. TINGKAT KETERGANTUNGAN (RASIO KETERGANTUNGAN)

Rasio Ketergantungan (*Defendency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk belum produktif (umur 0-14 tahun) ditambah dengan jumlah penduduk nonproduktif (umur 65 tahun ke atas) dibandingkan dengan jumlah penduduk produktif (umur 15-64 tahun). Rasio Ketergantungan dapat dilihat berdasarkan usia, yaitu Rasio Ketergantungan Muda dan Rasio Ketergantungan Tua.

Tingkat ketergantungan penduduk digunakan untuk melihat gambaran besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah. Semakin tingginya rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi, sedangkan rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Rasio Ketergantungan Muda merupakan perbandingan jumlah penduduk usia belum produktif (usia 0-14 tahun) dengan jumlah penduduk usia produktif (usia 15 - 64 tahun). Seperti yang tersaji pada Tabel II. 103 Rasio Ketergantungan Muda mengalami penurunan pada selang waktu antara tahun 2009 sampai tahun 2013. Pada tahun 2009 rasio ketergantungan muda sebesar 40,39; mengalami penurunan menjadi 39,32; mengalami penurunan di tahun 2012 menjadi 36,69; pada tahun 2013 mengalami penurunan kembali menjadi 31,58 ini berarti bahwa setiap 100 orang yang berusia produktif harus menanggung kurang lebih 35 orang usia belum produktif (usia 0-14 tahun).

Tabel II. 103 Rasio Ketergantungan Muda Kota Bogor Tahun 2011-2013

NO	URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	262.690	Na	261.985	261.692	236.412
2	Jumlah Penduduk Usia 15 – 64 tahun	650.381	Na	666.252	713.224	748.688
3	Rasio Ketergantungan muda	40,39	Na	39,32	36,69	31,58

Sumber: Diolah dari berbagai sumber (Kota Bogor Dalam Angka 2011, 2012, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil)

Rasio Ketergantungan Tua merupakan perbandingan jumlah penduduk usia tidak produktif (usia 65 tahun keatas) dengan jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun). Rasio ketergantungan tua mengalami kenaikan dalam selang waktu antara tahun 2009 hingga tahun 2013. Seperti tersaji pada Tabel II. 104, pada tahun 2009 rasio ketergantungan tua sebesar 5,09; mengalami kenaikan pada tahun 2011 menjadi 5,88; mengalami penurunan di tahun 2012 menjadi 4,19; akan tetapi naik kembali di tahun 2013 menjadi 5,19 ini berarti setiap 100 orang berusia produktif harus menanggung kurang lebih 5 orang usia tidak produktif. Tidak ditemukannya data tahun 2010 menyebabkan rasio ketergantungan tua di tahun tersebut tidak dapat diketahui angkanya.

Tabel II. 104 Rasio Ketergantungan Tua Kota Bogor Tahun 2011-2013

NO	URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Penduduk Usia > 65 tahun	33.133	Na	39.165	29.915	38.823
2	Jumlah Penduduk Usia 15 – 64 tahun	650.381	Na	666.252	713.224	748.688
3	Rasio Ketergantungan tua	5,09	Na	5,88	4,19	5,19

Sumber : Kota Bogor Dalam Angka Tahun 2010, 2011 dan Tahun 2012, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Rasio Ketergantungan merupakan rasio ketergantungan dengan membandingkan jumlah penduduk usia belum produktif (usia < 15 tahun) dan jumlah penduduk usia tidak produktif (usia > 64 tahun) dengan jumlah penduduk produktif (usia 15-64 tahun). Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel II. 105, rasio ketergantungan Kota Bogor mengalami penurunan pada selang waktu antara tahun 2009 hingga tahun 2013. Dimana pada tahun 2009 rasio ketergantungan mencapai 45,48; mengalami penurunan di tahun 2011 menjadi 45,20; dan mengalami penurunan di tahun 2012 menjadi 26,32; dan

kembali naik di tahun 2013 menjadi 40,93; angka ini berarti setiap 100 orang berusia produktif harus menanggung kurang lebih 41 usia belum produktif dan usia tidak produktif. Salah satu ciri keberhasilan pembangunan dalam bidang kependudukan adalah terjadinya perubahan komposisi penduduk menurut umur, yaitu semakin rendahnya jumlah penduduk tidak produktif, terutama kelompok penduduk usia 0 hingga 14 tahun, yang tercermin pada menurunnya rasio ketergantungan Kota Bogor pada selang waktu tahun 2011 hingga tahun 2013.

Tabel II. 105 Rasio Ketergantungan Kota Bogor Total Tahun 2011-2013

NO	URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Penduduk Usia	262.690	Na	261.985	261.692	236.412
2	Jumlah Penduduk Usia	33.133	Na	39.165	29.915	38.823
3	Jumlah Penduduk Usia	295.823	Na	301.150	291.607	275.235
4	Jumlah Penduduk Usia	650.381	Na	666.252	713.224	748.688
5	Rasio Ketergantungan	45,48	Na	45,20	40,89	36,76

Sumber : Kota Bogor Dalam Angka Tahun 2010, 2011 dan Tahun 2012, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Seperti tersaji pada Tabel 106, rasio ketergantungan tertinggi terdapat di Kecamatan Bogor Selatan dengan rasio ketergantungan sebesar 50,33; ini artinya setiap 100 orang berusia produktif harus menanggung kurang lebih 50 usia belum produktif dan usia tidak produktif. Kecamatan dengan rasio ketergantungan muda tertinggi terdapat pada Kecamatan Bogor Selatan dengan rasio sebesar 44,32, ini artinya angka ini berarti setiap 100 orang berusia produktif harus menanggung kurang lebih 44 usia belum produktif, sedangkan untuk ketergantungan tua tertinggi terdapat di Kecamatan Bogor Tengah dengan rasio sebesar 7,74, ini artinya angka ini berarti setiap 100 orang berusia produktif harus menanggung kurang lebih delapan usia tidak produktif.

Tabel 106 Jumlah Penduduk Menurut Rasio Ketergantungan Tahun 2011

NO	KECAMATAN	RASIO KETERGANTUNGAN	RASIO KETERGANTUNGAN MUDA	RASIO KETERGANTUNGAN TUA
1	Bogor	50,33	44,32	6,00
2	Bogor	45,68	39,93	5,75
3	Bogor Utara	44,91	40,50	4,41
4	Bogor	40,30	32,56	7,74
5	Bogor Barat	45,07	39,34	5,72
6	Tanah	47,15	42,23	4,92
7	Kota Bogor	45,20	39,32	5,88

Sumber : IPM Kota Bogor Tahun 2012

Rasio Ketergantungan Kota Bogor pada selang waktu tahun 2011 hingga tahun 2013 memperlihatkan bahwa beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk usia belum produktif dan tidak produktif lagi relatif rendah, hal ini terlihat dari Rasio Ketergantungan di tahun 2013 yang mencapai angka sebesar 40,93 yang artinya setiap 100 orang berusia produktif harus menanggung kurang lebih 41 usia belum produktif dan usia tidak produktif.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Keuangan daerah merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah Kota Bogor dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.

Struktur APBD Kota Bogor terdiri dari:

1. Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah.
2. Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah serta Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

III.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Kinerja keuangan masa lalu menguraikan tentang kinerja pelaksanaan APBD. Kinerja pelaksanaan APBD diketahui dari kinerja pendapatan daerah dan kinerja belanja daerah.

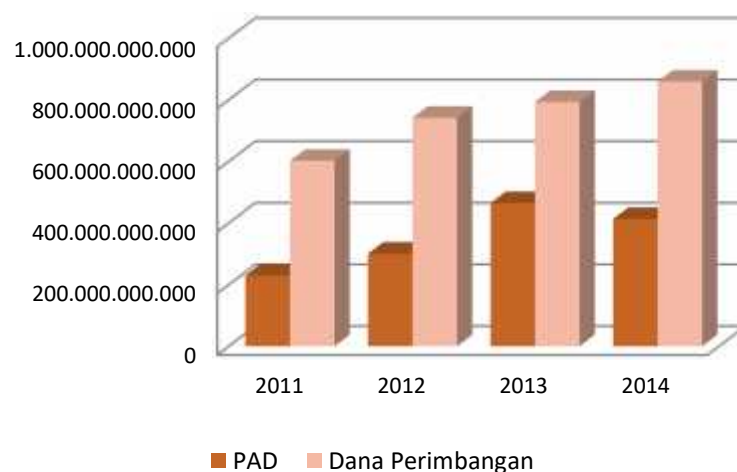
III.1.1. PENDAPATAN DAERAH

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah diperoleh melalui sumber-sumber meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Selama empat tahun terakhir (2011-2014), realisasi Pendapatan Daerah terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata peningkatan per tahun sebesar 12,28 persen yaitu dari Rp 1.141.638.163.971 pada tahun 2011 menjadi Rp 1.604.980.700.547 pada tahun 2014. Kenaikan pendapatan ini seiring dengan peningkatan pendapatan yang diperoleh dari pos Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, sedangkan untuk pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah nilainya mengalami fluktuasi dalam empat tahun terakhir. Kenaikan pendapatan daerah ini memberikan gambaran pertumbuhan yang positif sebagaimana disajikan pada grafik berikut.



Gambar III.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2011-2014



Gambar III.2 Besaran Komponen Pembentuk Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2011-2014

III.1.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan (d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

PAD selama kurun waktu 2011-2014 mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebesar 30,59 persen pada tahun 2012 kemudian meningkat lebih tinggi lagi yaitu sebesar 54,42 persen pada tahun 2013. Peningkatan PAD ini disebabkan oleh peningkatan yang cukup signifikan pada semua pos PAD. Pos yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan adalah pos Pajak Daerah yang rata-rata tumbuh sebesar 26,36 persen setiap tahunnya atau meningkat dari Rp 165.396.746.064 pada tahun 2011 menjadi Rp 311.645.000.000 pada tahun 2014.

Dari Tabel III.1 komponen PAD yang memberikan kontribusi sangat besar adalah pos Pajak Daerah dengan kontribusi kepada PAD berkisar antara 71,77 persen sampai dengan 75,41 persen. Pos-pos lain yang memberikan kontribusi kepada PAD berturut-turut adalah pos Retribusi Daerah dengan kisaran persentase kontribusi 14,37 persen hingga 15,85 persen, pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berkontribusi terhadap PAD dengan kisaran antara 5,02 persen hingga 6,65 persen dan pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan berkontribusi antara 4,21 persen sampai dengan 5,98 persen terhadap PAD.

Tabel III.1 Penerimaan PAD Kota Bogor Tahun 2011-2014

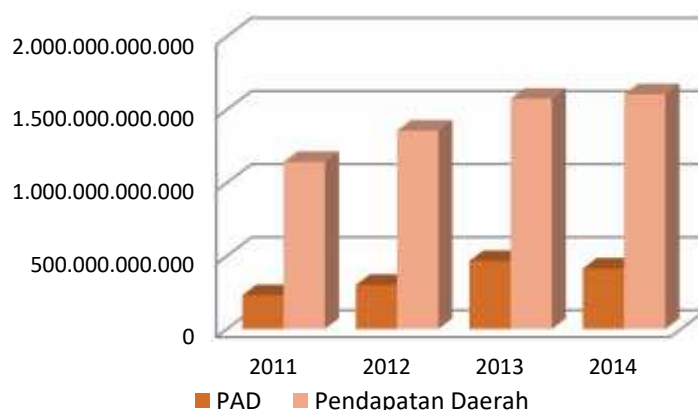
NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014*	RENTANG PERSENT ASE KONTRIB USI	RATA-RATA PERTUMBUHAN
1	Pajak Daerah	165.396.746.064	224.746.197.191	341.419.704.885	311.645.000.000	71,77	75,41
2	Retribusi Daerah	35.950.601.655	44.698.473.424	73.636.737.984	59.376.065.903	14,37	15,85
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.784.056.944	15.180.503.825	19.568.717.822	21.473.572.209	4,21	5,98
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	15.318.039.957	16.307.295.770	30.070.719.794	20.754.574.582	5,02	6,65
	Jumlah PAD	230.449.444.620	300.932.470.210	464.695.880.485	413.249.212.694	100	100
							21,49%

Sumber: Diolah dari APBD Kota Bogor Tahun 2011-2013

* Angka berdasarkan APBD Murni 2014

Selama tahun 2011-2014, PAD memiliki proporsi yang kecil terhadap Pendapatan Daerah bila dibandingkan dengan pos Dana Perimbangan. Rata-rata kontribusi PAD hanya sebesar 24,41 persen per tahun. Hal tersebut dapat diartikan bahwa ketergantungan pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi masih relatif tinggi.

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah



Gambar III.3 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2011-2014

III.1.1.2. DANA PERIMBANGAN

Dana Perimbangan merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat. Berdasarkan data realisasi Dana Perimbangan dalam APBD Kota Bogor pada tahun 2011-2014, terlihat bahwa Dana Perimbangan terus mengalami peningkatan yang signifikan. Penerimaan Dana Perimbangan ini mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 12,80 persen per tahun.

Pada tahun 2011 penerimaan Dana Perimbangan Kota Bogor mencapai Rp 602.216.659.331 kemudian meningkat sebesar 23,15 persen pada tahun 2012 menjadi Rp 741.642.441.988. Nilai ini kemudian meningkat pada tahun 2013 hingga menjadi Rp 792.975.350.762 dan terus meningkat menjadi Rp 859.072.322.269 pada tahun 2014.

Kenaikan di tahun 2013 tidak sebesar kenaikan pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh menurunnya jumlah penerimaan dari Pos Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Rp 113.540.376.988 pada tahun 2012 menjadi Rp

86.768.928.762 atau berkurang 35.01 persen. Pada tahun 2014 Pos Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak meningkat kembali sebesar 8,34 persen menjadi Rp 93.257.764.269.

Pos-pos yang memberikan kontribusi kepada Dana Perimbangan terdiri dari: (1) Pos Dana Alokasi Umum (DAU). (2) Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak. dan (3) Dana Alokasi Khusus (DAK). sebagaimana tabel berikut.

Tabel III.2Komponen Realisasi Dana Perimbangan Kota Bogor Pada Pendapatan Tahun 2011-2014

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	RATA-RATA PROPORSI DANA PERIMBANGAN	RATA-RATA PERTUMBUHAN
1	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	120.803.371.331	133.540.376.988	86.786.928.762	93.257.764.269	16,34	-5,67
2	Dana Alokasi Umum	472.888.338.000	603.531.550.000	686.520.759.000	732.337.058.000	82,16	16,02
3	Dana Alokasi Khusus	8.524.950.000	4.570.515.000	19.667.663.000	33.477.500.000	1,50	118,05
	JUMLAH DANA PERIMBANGAN	602.216.659.331	741.642.441.988	792.975.350.762	859.072.322.269	100,00	12,80

Sumber: Diolah dari APBD Kota Bogor Tahun 2011-2014

Dalam kurun waktu tahun 2011-2014. Dana Perimbangan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah rata-rata sebesar 52,89 persen per tahun. Ini artinya penerimaan Dana Perimbangan merupakan kontribusi terbesar terhadap pembentukan Pendapatan Daerah. Perkembangan kontribusi Dana Perimbangan dapat dilihat pada Gambar III.4.



Gambar III.4 Kontribusi Realisasi Dana Perimbangan terhadap Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bogor 2011-2014

III.1.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas: (a) Pendapatan Hibah, (b) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, (c) Bantuan Keuangan dari Provinsi/ Pemerintah Daerah lainnya, (d) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya dan (e) Dana Darurat.

Dalam rentang 2011-2014, pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penerimaan secara fluktuatif. Pada tahun 2012, jumlah realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 313.944.168.157, yang mana meningkat 1,61 persen dibandingkan dengan tahun 2011

sebesar Rp308.971.864.020. Kenaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya pos Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp16.217.471.822 dan peningkatan pos Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp31.724.957.555. Akan tetapi, pada saat yang sama terjadi penurunan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp32.459.160.240.

Pada tahun 2013, Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah hanya mengalami pertumbuhan sebesar 0,87 persen dari Rp313.955.168.157 pada tahun 2012 menjadi Rp 316.700.777.711. Perlambatan pertumbuhan ini disebabkan oleh adanya penurunan yang tajam pada pos Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya dari Rp 72.203.842.100 menjadi Rp 27.406.344.276.

Pada tahun 2014, Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan sebesar 5,04 persen dengan nilai penerimaan sebesar Rp 332.659.165.584. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan pos Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Tabel III.3 Realisasi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Bogor Tahun 2011-2014

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	RATA-RATA PROPORSI	RATA-RATA PERTUMBUHAN
1	Pendapatan Hibah	10.499.965.000	0	0	6.000.000.000	1,30	n.a
2	Bagi Hasil Pajak Provinsi	99.788.359.235	116.005.831.057	134.389.347.435	124.676.079.584	37,29	8,29
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	158.204.655.240	125.745.495.000	154.905.086.000	154.905.086.000	46,68	0,89
4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	40.478.884.545	72.203.842.100	27.406.344.276	47.078.000.000	14,73	29,37
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah	308.971.864.020	313.955.168.157	316.700.777.711	332.659.165.584	100	2,51

Sumber: Diolah dari APBD Kota Bogor Tahun 2011-2014

Memperhatikan data selama empat tahun kontribusi realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Daerah dapat dilihat melalui grafik berikut.



Gambar III.5 Kontribusi Realisasi Penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Daerah Kota Bogor

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam kurun waktu tahun 2011-2013 memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah rata-rata 25,39 persen per tahun. Kontribusi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan penyumbang terkecil terhadap Pendapatan Daerah Kota Bogor. Persentase kontribusi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terus mengalami penurunan dari 28,91 persen pada tahun 2011 menurun menjadi 26,20 persen pada tahun 2012 dan terus menurun menjadi 21,52 persen pada tahun 2013.

III.1.2. BELANJA DAERAH

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Kewajiban pemerintah daerah tersebut adalah mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Belanja daerah yang direncanakan tersebut dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). Belanja Tidak Langsung merupakan kinerja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Besaran Belanja Daerah Kota Bogor dalam kurun waktu 2011-2014 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 pertumbuhan realisasi Belanja Daerah sebesar 16,90 persen dari Rp 1.074.576.515.295 pada tahun 2011 menjadi Rp 1.256.206.808.990. Nilai ini kemudian meningkat menjadi 13,21 persen pada tahun 2013 menjadi Rp 1.422.132.371.106 dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi Rp 1.746.486.907.247.

Peningkatan Belanja Daerah tersebut disumbang oleh kedua komponen Belanja Daerah yaitu Belanja Tidak Langsung yang rata-rata kenaikannya sebesar 8,25 persen per tahun dan Belanja Langsung sebesar 29,76 persen per tahun dalam kurun waktu 2011-2014.

Tabel III.4 Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2011-2014

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014
1	Belanja Tidak Langsung	651.341.702.518	673.881.506.052	759.629.257.174	824.669.820.965
2	Belanja langsung	423.234.812.777	582.325.302.938	662.503.113.932	913.723.976.142
	TOTAL BELANJA	1.074.576.515.295	1.256.206.808.990	1.422.132.371.106	1.746.488.907.247

Sumber: Diolah dari APBD Kota Bogor Tahun 2014

III.1.2.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Tidak Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja hibah, belanja bagi hasil, belanja bantuan dan belanja tidak terduga. Belanja tidak langsung pada dasarnya tidak berkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Selama periode 2011-2014 perkembangan Belanja Tidak Langsung Kota Bogor menunjukkan kecenderungan kenaikan sebesar 8,25 persen per tahun. Pada tahun 2011 realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 651.341.702.518 kemudian meningkat menjadi Rp 824.669.820.965 pada tahun 2014.

Tabel III.5 Belanja Tidak Langsung Tahun 2011-2014

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014
5.1	Belanja Tidak Langsung	651.341.702.518	673.880.506.052	759.629.257.174	824.669.820.965
5.1.1	Belanja Pegawai (Bel. Tidak Langsung)	541.591.289.786	629.017.584.082	666.001.628.574	746.344.698.204
5.1.2	Belanja Bunga	0	788.319.621	3.536.703.420	5.700.000.000
5.1.3	Belanja Subsidi	0	-	993.071.158	-
5.1.4	Belanja Hibah	30.001.151.750	34.721.274.400	2.392.000.000	38.257.312.000
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	77.973.952.452	3.899.753.000	21.675.545.000	21.680.229.000
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota	854.909.499	-	-	900.000.000
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.775.308.530	4.598.665.450	3.592.797.109	11.787.581.761

Sumber: Diolah dari APBD Kota Bogor Tahun 2012-2013

III.1.2.2. BELANJA LANGSUNG

Belanja Langsung merupakan belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. Untuk mengukur capaian prestasi kerja dari belanja langsung dapat dilihat dari sejauh mana indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan dapat dicapai. Belanja Langsung terdiri atas tiga komponen utama yang menjadi prioritas, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Selama periode 2011-2014, terdapat peningkatan Belanja Langsung Kota Bogor yang cukup signifikan dengan rata-rata peningkatan sebesar 29,76 persen. Pada tahun 2011, realisasi Belanja Langsung sebesar Rp 423.234.812.777 kemudian meningkat pada tahun 2012 sebesar 37,59 persen menjadi Rp 582.325.302.938. Pada tahun 2013 realisasi Belanja Langsung Rp 662.503.113.932 kemudian ditargetkan meningkat 39,14 persen menjadi Rp 872.754.981.682 pada tahun 2014.

Tabel III.6 Belanja Langsung

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014
5.2	BELANJA LANGSUNG	423.234.81 2.777	582.325.30 2.938	662.503.11 3.932	872.754.98 1.682
5.2 .1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	67.535.066. 055	92.119.355. 958	88.649.061. 925	110.122.90 8.298
5.2 .2	Belanja Barang dan Jasa	222.746.78 8.684	267.929.90 9.220	349.545.99 2.987	286.129.73 0.056
5.2 .3	Belanja Modal	132.952.95 8.038	222.276.03 7.760	224.308.05 9.020	476.502.34 3.328

Sumber: Diolah dari APBD Kota Bogor Tahun 2012-2014

III.1.3. NERACA DAERAH

Neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Di sisi Neraca Daerah, total aset pemerintah Kota Bogor yang tercatat pada tahun 2013 sebesar Rp5.438.033.205.130,55. Aset yang paling besar peningkatannya adalah pada aset tanah yang mengalami peningkatan sebesar Rp250.572.365.606 atau mengalami peningkatan sebesar 9,52% disbanding tahun 2012.

Tabel III.7 Neraca Daerah Tahun 2012-2013

NO.	URAIAN	REF	TAHUN	
			2012 (RP)	2013 (RP)
I	ASET			
I.1	ASET LANCAR			
1	Kas di Kas Daerah	3.2.1	166.713.638.494,00	293.517.712.205,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	3.2.2	424.066.889,00	793.162.712,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	323	-	55.575.072,00
4	Piutang pajak daerah	324	771.905.446,00	188.453.383.305,00
5	Piutang Retribusi daerah	3.2.5	1.490.777.483,15	1.629.489.149,15
6	Piutang Pendapatan Bagi Hasil Provinsi	3.2.6		18.721.968.738,00
7	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	327	3.040.095.084,00	2.724.308.866,00
8	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	328	33.762.181,00	33.762.181,00
9	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	3.2.9	195.538.500,00	192.338.500,00
10	Piutang Lainnya	3.2.10	48.474.718.865,34	152.385.530.380,25
11	Persediaan	3211	99.957.775.980,89	15.281.768.743,00
	Jumlah Aset Lancar		231.102.278.923,38	673.738.999.851,40
I.2	INVESTASI JANGKA PANJANG			
I.2.1	Investasi Non Permanen	3211		
1	Dana Bergulir	3211	63.742.100,00	63.742.100,00
	Jumlah Investasi Non-Permanen		63.742.100,00	63.742.100,00
I.2.2	Investasi Permanen	3.2.12		
1	Penyertaan Modal di PD BPR Bank Pasar	3.2.12	18.398.674.866,82	28.559.573.701,42
2	Penyertaan Modal di	3.2.12		11.684.452.323,00

NO.	URAIAN	REF	TAHUN	
			2012 (RP)	2013 (RP)
	Bank Jabar Cabang Bogor		11.684.452.323,00	
3	Penyertaan Modal di PDAM Kota Bogor	3212	134.491.876.103,84	162.331.559.353,51
4	Penyertaan Modal di PD Jasa Transportasi	3212	10.720.874.621,91	96.669.314.655,91
5	Penyertaan Modal di PD Pasar Pakuan Jaya	3.2.12	107.939.876.005,45	114.873.747.559,31
	Jumlah Investasi Permanen	3.2.12	283.235.753.921,02	327.118.647.593,15
	Jumlah Investasi Jangka Panjang		283.299.496.021,02	327.182.389.693,15
I.3	ASET TETAP			
1	Tanah	3213	2.380.146.197.497,00	2.630.718.563.103,00
2	Peralatan dan Mesin	3213	246.667.762.998,00	282.725.477.379,00
3	Gedung dan Bangunan	3.2.13	474.789.036.321,00	555.795.536.617,00
4	Jalan. Irigasi. dan Jaringan	3.2.13	721.405.361.294,00	808.548.272.711,00
5	Aset Tetap Lainnya	3213	10.359.929.882,00	10.971.683.772,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	3213	19.857.578.158,00	44.491.891.156,00
7	Akumulasi Penyusutan	3.2.13	-	-
	Jumlah Aset Tetap		3.853.225.866.150,00	4.293.251.424.738,00
I.4	DANA CADANGAN	3.2.14		
1	Dana Cadangan	3.2.14	25.000.000.000,00	-
	Jumlah Dana Cadangan		25.000.000.000,00	-
I.5	ASET LAINNYA	3215		
1	Tagihan Penjualan Angsuran	3.2.15	-	-
2	Tuntutan Perbendaharaan (TP)	3.2.15	-	-
3	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	3215	5.925.000,00	5.925.000,00
4	Kemitraan dengan Pihak Ketiga (BOT)	3215	70.583.504.310,00	127.940.052.768,00
5	Aset Tak Berwujud	3.2.15	4.366.021.300,00	6.091.310.880,00
6	Aset Rusak Berat	3.2.15	9.557.344.770,00	9.823.102.200,00
	Jumlah Aset Lainnya	3215	845.127.953.80,00	143.860.390.848,00
	JUMLAH ASET		4.477.140.436.474,40	5.438.033.205.130,55
II	KEWAJIBAN			
II.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3.2.16		-
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	3.2.16	77.632.901,00	60.864.840,00
2	Utang Bunga	3216	-	-
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	3216	-	-
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	3.2.16	5.685.839.766,00	252.669.962,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	3.2.16	5.763.472.667,00	313.534.802,00
II.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	3.2.17		

NO.	URAIAN	REF	TAHUN	
			2012 (RP)	2013 (RP)
1	Utang kepada Bank Jabar	3.2.17	-	-
2	Utang kepada Pemerintah Pusat	3217	3.585.182.807.800,00	6.421.300.000.000,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	3217	35.851.828.078,00	64.212.950.948,00
	JUMLAH KEWAJIBAN		41.615.300.745,00	64.526.485.750,00
III	EKUITAS DANA			
III	EKUITAS DANA			-
1	LANCAR	3218		
1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	3218	16.706.000.548.100,00	29.424.600.000.000,00
2	Pendapatan yang ditangguhkan	3.2.18	67.001,00	9.675.195,00
3	Cadangan Piutang	3.2.18	54.006.797.559,49	364.140.781.119,40
4	Cadangan Persediaan	3.2.18	9.957.775.980,89	15.281.768.743,00
5	Dana yg Harus Disediakan utk Pemby. Utang Jk. Pendek	3.2.18	(5.685.839.766,00)	(252.669.962,00)
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar		225.338.806.256,38	673.425.465.049,40
III	EKUITAS DANA			
2	INVESTASI			
1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	3.2.19	283.299.496.021,02	327.182.389.693,15
2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	3.2.19	3.853.225.866.150,00	4.293.251.424.738,00
3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	3219	845.12.795.380,00	143.860.000.000,00
4	Dana yg Harus Disediakan utk Pemby. Utang Jk. Panjang	3.2.19	(35.851.828.078,00)	(64.212.950.948,00)
	Jumlah Ekuitas Dana Investasi		4.185.186.329.473,02	4.700.081.254.331,15
III.	EKUITAS DANA			
3	CADANGAN	3.2.20		
1	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	3220	25.000.000.000,00	-
	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan	3.2.20	25.000.000.000,00	-
	JUMLAH EKUITAS DANA		44.435.525.135.729,40	53.373.506.719.380,55
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		4.477.140.436.474,40	5.438.033.205.130,55

Sumber: Dokumen Realisasi anggaran

III.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Kebijakan pengelolaan pada masa sebelumnya dapat dijadikan evaluasi dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan. Realisasi atas capaian target pendapatan dan penerimaan daerah menggambarkan peta kemampuan daerah untuk memperoleh pendanaan APBD. Kebijakan pengelolaan keuangan dicerminkan dari proporsi penggunaan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total belanja keseluruhan dan proporsi Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah.

III.2.1. PROPORSI PENGGUNAAN ANGGARAN

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari rencana kerja pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumber daya, sementara kebijakan keuangan daerah diarahkan kepada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

Secara umum belanja daerah dapat dikategorikan ke dalam belanja aparatur dan belanja publik. Belanja publik merupakan belanja yang penggunaannya diarahkan dan dinikmati langsung oleh masyarakat.

Dalam empat tahun terakhir (2011-2014) proporsi Belanja Pegawai berada dalam rentang 48,27 persen hingga 55,30 persen terhadap total pengeluaran (belanja ditambah dengan pembiayaan pengeluaran). Tren proporsi Belanja Pegawai terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan 12,04 persen per tahun. Hal ini terjadi karena terjadinya kenaikan Gaji PNS sebesar sepuluh persen serta pemberian gaji ke-13.

Dari Tabel III.8 menunjukkan bahwa APBD Kota Bogor relatif baik dari sisi belanja, karena proporsi penggunaan anggaran untuk belanja aparatur tidak mendominasi terhadap total pengeluaran dalam APBD.

Tabel III.8 Proporsi Penggunaan Anggaran 2011-2014

TAHUN	TOTAL BELANJA PEGAWAI(BELANJA LANGSUNG + BELANJA TIDAK LANGSUNG)(RP)	TOTAL PENGELUARAN (BELANJA+ PEMBIAYAAN PENGELUARAN) (RP)	PERSENTASE BELANJA PEGAWAI
2011	609.126.355.841	1.101.454.216.295	55,30
2012	721.136.940.040	1.328.886.891.990	54,27
2013	754.650.690.499	1.478.064.699.166	51,06
2014	856.776.106.502	1.774.821.638.407	48,27

Sumber: Diolah dari APBD Kota Bogor Tahun 2011-2014

III.2.2. ANALISIS PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah anggaran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Analisis pembiayaan dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan defisit riil yang dihitung berdasarkan data realisasi pendapatan, realisasi belanja serta realisasi pengeluaran pembiayaan pada masa sebelum tahun perencanaan. Selanjutnya analisis pembiayaan juga dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan sumber-sumber penutup defisit riil tersebut berdasarkan komposisinya.

Tabel III.9 Jenis dan Jumlah Pembiayaan Daerah Kota Bogor Tahun 2011-2013

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Pendapatan Daerah	1.141.637.967.971	1.356.530.080.355	1.574.372.008.958	1.604.980.700.547
		Dikurangi			
2	Total Belanja	1.074.576.515.295	1.256.206.808.990	1.422.132.371.106	1.738.393.797.107
3	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	26.877.701.000	72.680.083.000	55.932.328.060	36.427.841.300

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014
	Surplus Riil (+) / Defisit Riil (-)	40.183.751.676	27.643.188.365	96.307.309.792	-169.840.937.860
	Ditambahkan				
4	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	97.655.357.440	139.415.917.116	197.938.800.162	307.172.157.954
	SiLPA	137.839.109.116	167.059.105.481	294.246.109.954	137.331.220.094

Sumber: Diolah dari APBD Kota Bogor Tahun 2011-2013

Tabel III.9 menunjukkan bahwa pada tahun 2011 realisasi belanja daerah masih lebih kecil daripada realisasi pendapatan. Hal ini berarti tidak terjadi defisit anggaran atau surplus sebesar Rp 40.183.751.676. sehingga tidak diperlukan anggaran penutup riil. Oleh karena itu SiLPA tahun sebelumnya tidak dialokasikan untuk menutup defisit melainkan dialokasikan sepenuhnya sebagai penerimaan pembiayaan pada tahun berkenaan dan akan menambah SiLPA tahun berkenaan yang selanjutnya akan menjadi bagian sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) pada tahun berikutnya. Surplus riil anggaran pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 31,21 persen menjadi Rp 27.643.188.365. Surplus riil kemudian meningkat kembali pada tahun 2013 menjadi Rp 96.307.309.792.

Pertambahan nilai surplus riil pada tahun 2013 ini menyebabkan SiLPA mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 76,13 persen menjadi Rp 294.246.109.954 dari awalnya Rp 167.059.105.481 pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 diperkirakan akan terjadi defisit riil hingga minus Rp 169.840.937.860. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya perkiraan anggaran belanja Pemerintah Kota Bogor, namun defisit riil ini mampu ditutupi dengan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 307.172.157.954 sehingga SiLPA tahun berkenaan pada tahun 2014 ditargetkan mencapai Rp 137.331.220.094.

III.2.2.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan (SiLPA) yang terdiri atas pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah dan sisa penghematan belanja atau akibat lainnya.

Tahun 2011 realisasi penerimaan pembiayaan daerah adalah sebesar Rp 97.655.357.440 kemudian meningkat 42,76 persen menjadi Rp 139.415.917.116 pada 2012. Realisasi ini terus mengalami peningkatan 41,98 persen pada tahun 2013 menjadi Rp 197.938.800.162. Sedangkan pada tahun 2014 diperkirakan penerimaan pembiayaan daerah mengalami peningkatan signifikan hingga 55,69 persen menjadi Rp 307.172.157.954.

III.2.2.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pengeluaran pembiayaan daerah dilaksanakan dalam bentuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah pada BUMD dan pemberian pinjaman daerah. Tahun 2011 realisasi pengeluaran pembiayaan daerah adalah sebesar Rp 26.877.701.000 kemudian meningkat berturut-turut menjadi Rp 72.680.083.000 pada tahun 2012 dan Rp 56.932.328.060 pada tahun 2013.

Tabel III.10 Jenis Pembiayaan Daerah Kota Bogor Tahun 2011-2014

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014
A	Penerimaan Pembiayaan Daerah				
1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	97.655.357.440	137.839.305.116	167.060.005.481	294.236.109.954
2	Pencarian Dana Cadangan	0		30.407.146.681	
3	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	12.000.000.000
4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		0	471.648.000	936.048.000
5	Penerimaan Piutang Daerah		1.576.612.000		
6	Pelampauan Penerimaan Dan Penghematan Belanja		0		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	97.655.357.440	139.415.917.116	197.938.800.162	307.172.157.954
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah				
1	Pembentukan Dana Cadangan		25.000.000.000	5.000.000.000	
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	26.377.701.000	47.208.435.000	44.310.640.294	23.874.731.300
3	Pembayaran Pokok Utang	0	0	5.685.639.766	53.110.000
4	Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000	471.648.000	936.048.000	12.500.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	26.877.701.000	72.680.083.000	55.932.328.060	36.427.841.300
	TOTAL PEMBIAYAAN	70.777.656.440	66.735.834.116	142.006.472.102	270.744.316.654

Sumber: Diolah dari APBD Kota Bogor Tahun 2011-2014

III.3. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan disusun untuk memperoleh gambaran kekuatan keuangan Kota Bogor dalam pembangunan daerah, baik yang menyangkut Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun ke depan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

III.3.1. ANALISIS BELANJA DAN PENGELUARAN PERIODIK WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA

Analisis Belanja dan Pengeluaran Periodik Wajib Serta Prioritas Utama berfungsi untuk mengetahui rata-rata pertumbuhan pengeluaran belanja maupun pembiayaan yang bersifat wajib serta prioritas. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, maka disajikan data dan perhitungan rata-rata pertumbuhan sebagaimana Tabel III.11 dibawah ini:

Tabel III.11 Belanja dan Pengeluaran Periodik. Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

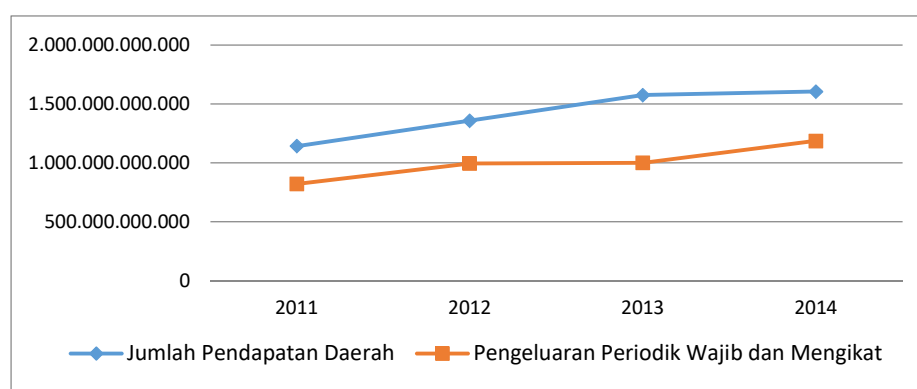
NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	RATA-RATA PERTUMBUHAN
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG					
5.1.1	Belanja Pegawai (Bel.	541.591.289	629.017.584.0	662.464.92	746.344.698	11,28 %
5.1.1.1	Gaji dan	478.518.432	564.896.658.1	586.089.73	638.213.276	10,08
5.1.1.1.02	Tambahan Penghasilan	47.411.464.174	46.079.066.00	57.479.469.212	85.185.978.000	21,57 %
5.1.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DP	2.848.800.00	2.938.800.000	4.278.120.00	4.395.120.00	15,55 %
5.1.1.1.04	Insentif Pajak dan Retribusi	12.812.593.337	13.542.549.126	14.617.597.232		6,81%
5.1.1.1.05	Insentif Pemungutan				15.582.250.000	0
5.1.1.1.06	Insentif Pemungutan		1.560.510.845		2.968.073.296	0
5.1.2	Belanja Bunga	0	788.319.621	993.071.15	5.700.000.0	168,90
5.1.2.2	Bunga Utang	0	788.319.621	993.071.15	5.700.000.0	
5.1.3	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
5.1.4	Belanja Hibah	0	2.377.266.000	47.766.235.	8.670.925.0	53,93
5.1.4.4	Belanja Hibah	0	2.377.266.000	25.704.958.	8.670.925.0	
	Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan	0	0	22.061.276.246		0
5.1.5	Belanja	935.730.341	3.899.753.000	300.000.00	14.592.250.	149,84
5.1.5.02	Belanja Bantuan Partai	935.730.341	3.899.753.000	300.000.00	14.592.250.000	
5.1.8	Belanja Tidak	1.775.308.5	4.598.665.450	3.592.797.1	13.773.686.	97,97
5.1.8.8	Belanja Tidak	1.775.308.5	4.598.665.450	3.592.797.1	13.773.686.	
	Sub Total A	544.302.328	640.681.588.1	715.117.02	789.081.559	13,18
5.2	BELANJA LANGSUNG					
5.2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	67.535.066.055	85.956.561.958	39.160.908.425	110.122.908.298	17,70 %
5.2.1.1	Honorarium	35.324.271.	55.601.938.85	27.836.413.	54.747.574.	15,73
5.2.1.1.1	Honorarium	20.619.149.	24.556.793.54	1.475.480.7	41.482.608.	26,24
5.2.1.1.2	Uang Lembur	1.686.878.5	1.448.853.000	2.394.000.0	1.759.707.5	1,42%
5.2.1.1.04	Honorarium Pengelolaan		2.489.101.199	6.998.513.775	2.394.009.980	-1,93%
5.2.1.1.05	Belanja kursus. pelatihan. sosialisasi dan		22.800.000	415.000.000	27.750.000	10,32 %
5.2.1.1.11	Belanja	9.904.766.2	1.837.075.359	41.500.000	9.711.258.5	-0,66%
5.2.2	Belanja Barang	181.826.723	195.840.786.1	190.877.82	263.082.817	13,10
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.864.337.208	7.229.414.714	65.892.515.915	7.955.051.523	10,70 %
5.2.2.02	Belanja	19.324.118.	21.377.668.43	1.530.719.8	33.798.919.	20,49
5.2.2.03	Belanja Jasa	44.923.736.	62.019.935.70	23.567.362.	64.539.457.	12,84
5.2.2.04	Belanja Premi	997.631.727	1.328.032.550	10.254.303.	1.991.540.0	25,91
5.2.2.05	Belanja Perawatan	21.567.905.930	16.469.106.906	2.205.168.000	29.036.341.307	10,42 %
5.2.2.06	Belanja Cetak dan	7.674.978.993	9.177.907.311	329.620.000	10.492.222.470	10,98 %
5.2.2.11	Belanja Makanan dan	17.083.068.055	21.860.939.918	2.296.521.320	27.695.263.000	17,48 %
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.581.314.563	1.748.515.716	660.366.750	3.082.836.000	6,10%
5.2.2.13	Belanja	611.576.245	875.424.500	31.899.871.	1.354.110.0	30,34

5.2.2.	Belanja	16.488.088.	20.216.149.57	8.500.179.6	46.835.910.	41,62
5.2.2.16	Belanja Beasiswa	32.250.000	131.900.000	27.648.067.027	176.000.000	76,06 %
5.2.2.17	Belanja Kursus. Pelatihan.	6.887.569.125	10.383.183.207	9.099.851.977	5.316.354.000	-8,27%
5.2.2.	Belanja	8.075.849.4	12.956.061.26	58.628.250	21.710.553.	39,05
5.2.2.24	Belanja Barang dan Jasa – BOS	29.714.298.750	10.066.546.394	6.934.645.885	72.109.463	- 86,56
5.2.2.27	Belanja Barang dan Jasa BOS				9.026.147.832	0
5.2.3	Belanja Modal	0	0	0	0	
	Sub Total B	249.361.789	281.797.348.1	230.038.73	373.205.725	14,39
6.2	Pengeluaran Pembiayaan					
6.2.1	Pembentukan Dana		25.000.000.000	5.000.000.000		- 100,00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi)	26.377.701.000	47.208.435.000	44.310.640.294	23.874.731.300	-3,27%
6.2.3	Pembayaran	0	0	5.685.639.7		0
	Sub Total C	26.377.701.	72.208.435.000	54.996.280.	23.874.731.	-3,27%
	TOTAL A+B+C	820.041.819.403	994.687.371.298	1.000.152.039.180	1.186.162.016.242	13,09 %

Sumber: Diolah dari APBD Kota Bogor Tahun 2011-2014 (Update data Mei 2014)

Dari perhitungan tabel diatas diketahui bahwa sepanjang empat tahun terakhir (2011-2014), Belanja dan Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama rata-rata pertumbuhannya adalah sebesar 13,09 persen per tahun. Apabila dihitung berdasarkan masing-masing jenis pengeluaran maka Belanja Bunga memiliki rata-rata pertumbuhan yang sangat signifikan yaitu 168,90 persen per tahun.

Kebijakan Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2015 – 2019 memberi penekanan pada **efisiensi dan realokasi anggaran**. Efisiensi anggaran ialah penghematan anggaran pada pos-pos yang anggarannya masih memungkinkan untuk dikurangi tanpa mengorbankan *output* atau *outcomes* dan dana hasil efisiensi itu kemudian di **realokasikan** untuk pos-pos lain yang dibutuhkan bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk implementasi dari efisiensi dan realokasi anggaran tersebut adalah ditekannya angka pertumbuhan Belanja Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dari awalnya 13,09 persen per tahun menjadi 11,00 persen per tahun. Angka ini kemudian menjadi patokan dalam memproyeksikan Belanja dan Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama selama lima tahun ke depan.



Gambar III.6 Perbandingan antara Pendapatan Daerah dengan Belanja dan Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2011-2014

Pada tahun 2011, proporsi Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama terhadap Pendapatan Daerah adalah sebesar 71,83 persen, kemudian terus mengalami peningkatan menjadi 73,32 persen pada tahun 2012. Pada tahun 2013 proporsi Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama mengalami penurunan menjadi 63,52 persen kemudian meningkat pada tahun 2014 menjadi 73,90 persen. Penurunan proporsi Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama terhadap Pendapatan Daerah sebenarnya dapat menunjukkan meningkatnya penggunaan anggaran bagi kepentingan masyarakat secara langsung.

III.3.2. PROYEKSI DATA MASA LALU

Dalam bagian ini menjelaskan mengenai proyeksi data masa lalu dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksi serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi proyeksi data. Penyusunan proyeksi ini didasarkan pada rata-rata pertumbuhan realisasi lima tahun yang meliputi proyeksi Pendapatan Daerah dan proyeksi Belanja dan Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama.

Tabel III.12 Proyeksi Pendapatan Daerah dan Belanja Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2015-2019

URAIAN	TAHUN DASAR (RP)	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)	PROYEKSI (RP)				
			2015	2016	2017	2018	2019
Pendapatan Daerah Kota Bogor	1.604.980.700.547	12,28	1.801.997.888.924	2.023.199.650.053	2.271.554.727.745	2.550.396.289.861	2.863.466.662.673
Belanja dan Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	1.186.162.016.242	11,00	1.316.639.838.029	1.461.470.220.212	1.622.231.944.435	1.800.677.458.323	1.998.751.978.738
Persentase Belanja dan Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama terhadap Pendapatan Daerah	73,91		73,07	72,24	71,42	70,60	69,80

Sumber: Diolah dari APBD Kota Bogor Tahun 2014

Pada Tabel III.12 diatas, hasil proyeksi hingga tahun 2019 menunjukkan bahwa pendapatan daerah yang teralokasikan untuk Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas utamadiprojeksikan akan terus menurun hingga tahun 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah lebih menitikberatkan pada pos-pos belanja yang manfaatnya dapat diterima secara langsung oleh masyarakat.

III.3.3. PENGHITUNGAN KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan ini bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program jangka menengah lima tahun kedepan. Kapasitas riil inilah yang akan digunakan sebagai sumber pembiayaan bagi program-program prioritas maupun belanja tidak langsung.

Berdasarkan proyeksi Penerimaan Daerah dan Belanja serta Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama lima tahun kedepan (2015-2019) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor sebagaimana dapat dilihat pada Tabel III.13.

Tabel III.13 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pendapatan	1.801.997.888.924	2.023.199.650.053	2.271.554.727.745	2.550.396.289.861	2.863.466.662.673
2	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	0	0	0	0	0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
Total Penerimaan		1.851.997.888.924	2.073.199.650.053	2.321.554.727.745	2.600.396.289.861	2.913.466.662.673
Dikurangi:						
4	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang wajib dan mengikat serta Prioritas Utama	1.316.639.838.029	1.461.470.220.212	1.622.231.944.435	1.800.677.458.323	1.998.751.978.738
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan		535.358.050.896	611.729.429.841	699.322.783.310	799.718.831.538	914.714.683.935
% Kapasitas Riil terhadap Pendapatan Daerah (%)		29,71	30,24	30,79	31,36	31,94
Rencana alokasi Prioritas I						
5	Belanja Langsung	428.286.440.717	489.383.543.873	559.458.226.648	639.775.065.230	731.771.747.148
6	Pembentukan Dana Cadangan					
Rencana Alokasi Prioritas II						
7	Belanja Langsung	80.303.707.634	91.759.414.476	104.898.417.497	119.957.824.731	137.207.202.590
8	Belanja Tidak Langsung	26.767.902.545	30.586.471.492	34.966.139.166	39.985.941.577	45.735.734.197
Surplus Anggaran Riil dan Berimbang		Berimbang	Berimbang	Berimbang	Berimbang	Berimbang

Pada Tabel III.13 tersebut diatas dapat dilihat bahwa prioritas pengeluaran yang harus didahulukan adalah bersifat wajib mengikat dan prioritas utama baik pada belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan maupun yang berada pada belanja tidak langsung. Penghitungan kerangka pendanaan menunjukkan bahwa kapasitas riil keuangan daerah berkisar antara 29,71 persen – 31,94 persen terhadap total penerimaan daerah yang ada.

Kapasitas riil keuangan daerah tersebut merefleksikan besaran pos Belanja Langsung dari APBD Kota Bogor. Dapat diamati bahwa besaran pos Belanja Langsung ini diproyeksikan senantiasa meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini mencerminkan kebijakan Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2015 – 2019 yang memberi penekanan pada efisiensi dan realokasi anggaran.

BAB IV

ANALISIS ISU STRATEGIS

IV.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Proses pembangunan akan sangat bergantung dengan apa yang dimiliki daerah tersebut sebagai modal dalam penyokong keberhasilan pembangunan. Namun pada perjalanannya pembangunan daerah juga kerap kali harus menghadapi berbagai permasalahan yang dapat menghambat keberhasilan dalam mencapai target-target pembangunan. Permasalahan tersebut baik yang telah dan tengah berlangsung, ataupun permasalahan yang dapat terjadi pada masa yang akan datang. Permasalahan umum pembangunan di Kota Bogor tersebar di berbagai bidang pemerintahan. Sebagai salah satu kota besar Indonesia, Kota Bogor tumbuh dengan berbagai kemajuan yang masih diiringi permasalahan perkotaan yang juga kerap muncul. Seringkali secara umum seperti terjadi juga di kota besar lainnya, fenomena pertumbuhan penduduk, pergeseran sektor unggulan, meningkatnya aktivitas perkotaan yang mulai mereduksi kelestarian lingkungan, perubahan budaya perkotaan yang belum diimbangi dengan potensi kota dan kesiapan masyarakat, dan hal lainnya, terjadi pula di Kota Bogor.

Berdasarkan hasil pengumpulan data baik primer maupun sekunder, disertai wawancara, dan FGD (*Focus Group Discussion*), beberapa permasalahan pembangunan daerah di Kota Bogor dijelaskan lebih lanjut pada uraian berikut.

A. BIDANG PENDIDIKAN

Belum Terpenuhinya Wajib Belajar 9 Tahun

Pendidikan mempunyai peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan di Kota Bogor dapat dikatakan kurang merata terbukti dari program wajib belajar 9 tahun yang masih belum diperoleh semua anak usia sekolah yang ada di seluruh Kecamatan Kota Bogor. Pada tahun 2013 program wajib belajar 9 tahun di Kota Bogor tidak terpenuhi dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM). Begitu pula dengan angka APK menurun pada tingkat SD dan SMP. Di sisi lain, lulusan S1, S2 dan S3 jumlahnya mencapai 14 persen dari jumlah penduduk.

B. BIDANG KESEHATAN

Belum Terpenuhinya Layanan Kesehatan Masyarakat secara Optimal

Sarana prasarana kesehatan berupa posyandu, puskesmas, dan dokter memiliki rasio yang masih kurang dibandingkan dengan jumlah penduduk. Kondisi angka balita gizi buruk masih dinilai cukup tinggi yaitu mencapai angka 378 kasus pada tahun 2013, yang mana hal ini dapat disebabkan rasio posyandu per satuan balita masih rendah. Angka balita gizi buruk paling banyak berasal dari Kecamatan Bogor Utara yakni sebanyak 94 kasus, dan angka ini mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Persentase jumlah balita yang menderita gizi buruk di Kota Bogor pada tahun 2013 adalah sebesar 0,47 persen. Rasio puskesmas per satuan penduduk idealnya adalah 1: 30.000, sedangkan di lapangan mencapai 1: 42.663. Masih kurangnya jumlah dokter ditunjukkan pada nilai rasio dokter per satuan penduduk yang juga sudah melebihi kapasitas pelayanannya yaitu 1: 4.511 penduduk, sedangkan kapasitas standar pelayanan yang seharusnya yaitu 1: 2500 penduduk. Permasalahan lain terkait kesehatan yang dihadapi Kota Bogor adalah masih terdapat beberapa penyakit dengan jumlah kasus yang tinggi atau terus meningkat diantaranya TBC, tifus, dan hepatitis. Ditambah kondisi perkembangan kasus HIV/AIDS, dimana dari sisi jumlah

kasus maupun dari segi peningkatannya cukup mencemaskan dan terus mengalami peningkatan. Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kota Bogor tahun 2010, Kota Bogor merupakan 10 besar kota dengan jumlah penderita TBC terbanyak untuk wilayah Jawa Barat. Sebanyak 1.023 dari 7.641 orang suspek di Kota Bogor, dideteksi positif menderita penyakit TBC. Hasil pendataan 10.166 orang suspect TBC dan 1.021 positif TBC, menunjukkan hasil bahwa penyakit TBC saat ini sering kali menyerang usia produktif yakni dari usia 14 hingga 54 tahun. Hasil evaluasi Program TB Paru 2011, Dinas Kesehatan mencatat sudah ada 507 orang positif dari 3.850 suspek yang berhasil didata petugas.

Untuk kasus hepatitis, Kota Bogor pernah mengalami peningkatan kasus Hepatitis A pada bulan September 2011 sebanyak 11 orang di Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat. Kemudian kasus kumulatif HIV/AIDS Kota Bogor yang dicatat oleh AIDS Watch Indonesia pada tahun 2013, menyatakan bahwa sejak tahun 2006 sampai Desember 2012 sudah mencapai 1.693 kasus. Kemudian diketahui dari 2015 penderita, 976 diantaranya positif mengidap AIDS. Setidaknya terdapat 1388 orang penderita yang masih masuk ke dalam usia produktif, yaitu 25 sampai 49 tahun. Terdapat 1418 penderita diantaranya adalah laki-laki, dan sudah ada 79 penderita AIDS yang meninggal dunia sejak tahun 2001.

C. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Tingginya Tingkat Pencemaran Lingkungan

Isu pencemaran lingkungan di Kota Bogor yang dihadapi menjadi permasalahan pembangunan daerah, khususnya dalam hal menciptakan lingkungan yang sehat bagi masyarakatnya. Isu-isu lain terkait pencemaran lingkungan yang terjadi di Kota Bogor adalah sanitasi yang buruk, pengelolaan dua sungai besar (Ciliwung dan Cisadane) yang melintasi Kota Bogor belum cukup baik, serta polusi udara akibat emisi kendaraan bermotor.

Pada tahun 2011 masih banyak rumah yang menggunakan sanitasi dengan *plengsengan* yaitu buangan kakus langsung dibuang ke sungai tanpa masuk ke tangki septik (15,58% KK). Kecenderungan tersebut semakin meningkat dari waktu ke waktu. Pengelolaan sungai besar yang melintasi Kota Bogor pun dinilai belum optimal, yang mana kualitas air Sungai Ciliwung di Kota Bogor telah melampaui ambang baku mutu air yang ditetapkan dalam PP No.82 Tahun 2001 baik dari parameter fisik, kimia dan biologi. Nilai rata-rata BOD hasil penelitian sebesar 9,975, nilai rata-rata DO sebesar 6,479 dan jumlah rata-rata total coliform sebesar 57.000 koloni/ml – 408.000 koloni/ml. Meningkatnya aktivitas manusia, perubahan guna lahan dan semakin beragamnya pola hidup menjadikan tingkat pencemaran di Sungai Ciliwung semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Permasalahan polusi udara karena kendaraan bermotor ditunjukkan dari pengukuran parameter TSP (debu) di beberapa tempat di Kota Bogor pada tahun sampai dengan tahun 2012 umumnya sudah melewati baku mutu 230 µg/Nm³.

2. Pengelolaan Sampah yang Belum Terpadu

Permasalahan lain yang terjadi adalah pengelolaan sampah yang belum terpadu. Sampai saat ini sampah masih menjadi permasalahan yang belum terpecahkan khususnya bagi kota-kota besar di Indonesia. Permasalahan ini timbul terutama karena (i) besarnya volume sampah yang berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, (ii) keterbatasan lahan untuk pembuangan akhir, dan (iii) teknis pengelolaan sampah yang masih konvensional.

Dari segi estetika sampah menjadi hal buruk yang merusak pemandangan serta menimbulkan bau tidak sedap. Sampah yang dihasilkan Kota Bogor berasal dari aktivitas rumah tangga, sampah pasar, sampah pertokoan, sampah fasilitas umum dan sampah industri. Permasalahan sampah dan pengelolaan sampah di Kota Bogor di antaranya adalah masih terdapat 29,80% dari total seluruh rumah tangga masih membuang sampah dengan cara cara menimbun, membakar, membuang ke sungai dan lainnya. Pada tahun 2013 baru terdapat 13 kelurahan dengan total penduduk sebesar 39.540 jiwa yang terlayani program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

D. BIDANG PENATAAN RUANG

1. Pengembangan Kawasan Belum Memperhatikan Kawasan Rawan Bencana

Pengembangan kawasan belum memperhatikan kawasan rawan bencana merupakan permasalahan yang terjadi di Kota Bogor pada bidang penataan ruang. Kondisi kontur tanah yang labil menyebabkan ancaman terhadap bencana alam, menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi Kota Bogor. Selain longsor, potensi bencana lain yaitu berupa banjir, pohon tumbang, angin puting beliung dan kebakaran (akibat petir dan arus pendek). Berdasarkan hasil pemetaan daerah potensi bencana di Kota Bogor, dari enam kecamatan dan 68 kelurahan di Kota Bogor, hampir separuh wilayahnya adalah rawan banjir dan longsor.

Kecamatan Bogor Barat sebagai Wilayah Pelayanan (WP) B dengan potensi pengembangan wilayah sebagai pusat pengembangan di kawasan Bubulak merupakan kawasan paling rawan bencana longsor. Terdapat 32 titik rawan bencana alam yang terdiri atas daerah rawan longsor dan banjir yang tersebar di enam wilayah kecamatan se-Kota Bogor. Untuk wilayah Kecamatan Bogor Tengah terdapat tiga titik rawan longsor, di Kecamatan Tanah Sereal terdapat enam titik rawan banjir, Kecamatan Bogor Barat terdapat enam titik rawan longsor dan banjir, Kecamatan Bogor Selatan terdapat 12 titik rawan longsor, Kecamatan Bogor Timur terdapat tiga titik rawan banjir dan di wilayah Kecamatan Bogor Utara terdapat dua titik rawan banjir. Pada tahun 2013 tercatat lebih dari 40 peristiwa tanah longsor terjadi di berbagai lokasi di Kota Bogor, dalam skala kecil hingga besar. Dampak lain yang perlu diantisipasi adalah peningkatan suhu 10°C akibat perubahan iklim mikro di Kota Bogor pada sepuluh tahun belakangan yang dapat memicu kondisi kekeringan dan banjir.

2. Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Belum Optimal

Permasalahan lain yang dihadapi adalah penyelenggaraan penataan ruang yang belum optimal baik dari sisi pemanfaatan, pengawasan, dan pengendaliannya. Permasalahan yang dihadapi terkait penataan ruang diantaranya adalah daya dukung lahan dan daya dukung air Kota Bogor sudah terlampaui (*overshoot*). Selain itu tingkat konversi lahan pertanian/Ruang Terbuka Hijau dinilai cukup tinggi. Luas lahan pertanian di Kota Bogor semakin berkurang akibat dikonversi ke penggunaan non pertanian. Sebagian besar kasus konversi lahan pertanian terutama pada lahan sawah yang masih produktif. Konversi lahan pertanian tersebut sebagian besar diantaranya menjadi perumahan dan kawasan perdagangan yang ditandai dengan ruko-ruko.

Rencana tata ruang Kota Bogor menetapkan bahwa kawasan Kebun Raya Bogor dan sekitarnya merupakan wilayah pusat kota sebagai kota lama (kawasan bersejarah). Hanya saja, arahan pemanfaatannya adalah untuk mempertahankan kegiatan perdagangan dan jasa yang ada, pusat perkantoran, dan RTH skala kota. Penetapan ini dapat menjadi tekanan terhadap keberadaan Kebun Raya Bogor. Kemudian terdapat sedikitnya 117

Base Transceiver Station (BTS) yang berdiri di Kota Bogor tidak memiliki izin. Umumnya pengelola tower hanya mengantongi Izin Penggunaan Peruntukan Tanah (IPPT). Namun ada juga pengelola tower yang tidak memiliki secarik izin pun.

Total luas inkonsistensi tata ruang yang terjadi di Kota Bogor sebesar 127,21 hektar atau 1,13 persen dari total luas wilayah Kota Bogor. Inkonsistensi terbesar terjadi pada taman/lapangan olah raga/jalur hijau menjadi ruang terbangun yaitu 94,31 hektar (0,84% dari total luas wilayah Kota Bogor), pertanian/kebun campuran menjadi ruang terbangun sebesar 22,57 hektar (0,20% dari total luas wilayah Kota Bogor) dan hutan kota menjadi ruang terbangun sebesar 10,33 hektar (0,09% dari total luas wilayah Kota Bogor). Hal lain yang cukup mendasar adalah belum efektifnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan ruang.

3. Memudarnya Identitas Kota Bogor

Sejarah yang panjang dengan identitas yang kuat sebagai kota yang nyaman, memiliki tata ruang dengan konsep *garden city*, yang melekat pada Kota Bogor dari masa kerajaan sampai masa kolonial semakin memudar. Kenyataannya, keberadaan dari bangunan dan peninggalan bersejarah belum menjadi hal yang penting. Bangunan-bangunan bersejarah di Kota Bogor belum diperhatikan sebagai sebuah aset yang bernilai tinggi. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota untuk mengatur, melindungi dan melestarikan bangunan bersejarah. Kondisi ini dikuatkan dengan banyaknya bangunan cagar budaya yang beralih fungsi menjadi bangunan komersial seperti hotel dan restoran. Pembangunan Kota Bogor cenderung menata kota dari aspek fisik keruangannya saja dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi. Sedangkan nilai budaya, kesejarahan yang melekat dan mewarnai Kota Bogor sebagai identitas Kota Bogor kurang menjadi perhatian utama.

Kedepannya perkembangan Kota Bogor diharapkan tetap dapat mempertahankan identitas Kota Bogor, termasuk konsep *garden city*. Konsep *garden city* yang dimaksud bukan berarti hanya kota yang dipenuhi taman, tetapi menyangkut penataan ruang yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup dan aktifitas masyarakat kota, termasuk penataan *green network* (jaringan ruang terbuka hijau berupa taman-taman, jalur hijau, hutan kota/kawasan lindung, lahan pertanian) yang berkontribusi terhadap sistem ekologis kota, nilai ekonomi, sosial dan kenyamanan lingkungan.

E. BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Belum Optimalnya Kerja Sama Antar Daerah

Permasalahan yang terdapat dalam bidang perencanaan pembangunan salah satunya adalah belum optimalnya kerja sama antar daerah. Hal ini dapat dilihat belum dapat dimanfaatkan dengan optimalnya aset kelembagaan yang terdapat di Kota Bogor, salah satunya sejumlah perguruan tinggi dan kantor pusat beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau NGO (*Non-Government Organization*) yang aktif dalam memperjuangkan isu-isu tertentu di berbagai wilayah di Indonesia. Banyaknya kajian mengenai Kota Bogor yang dilakukan oleh perguruan tinggi belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota dalam upaya untuk mengembangkan kota atau upaya yang telah dilakukan para LSM di luar Kota Bogor pun belum dapat direplikasikan di Kota Bogor.

Selain aset kelembagaan-kelembagaan yang ada di Kota Bogor, sinergi pembangunan dengan kota/kabupaten lain pun masih belum optimal. Perlu kelembagaan khusus yang mengatur kerjasama antar daerah mengingat beberapa kawasan memiliki sumberdaya dan permasalahan yang sama yang harus diselesaikan secara bersama-sama, contoh: Daerah Aliran Sungai (DAS)

dengan melibatkan daerah yang dialiri DAS yang sama, pengelolaan kawasan khusus Jabodetabekjur yang melibatkan tiga provinsi, kerja sama antar daerah dalam hal penyepakatan batas wilayah, dan tentunya kerja sama dalam pengembangan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Isu terkait kerjasama antar daerah, sejalan juga dengan apa yang diamanatkan dalam RPJP Kota Bogor dalam RPJMD periode ketiga ini (2015-2019), yang mana harus mengoptimalkan kerjasama antar wilayah skala nasional/regional maupun luar negeri dalam rangka pengembangan ekonomi.

F. BIDANG PENANAMAN MODAL

Peningkatan Investasi yang Belum Mengacu pada Potensi dan Daya Saing Wilayah

Investasi merupakan salah satu faktor penting untuk menggerakkan perekonomian di Kota Bogor. Iklim investasi yang kondusif merupakan faktor penting untuk meningkatkan nilai investasi Kota Bogor. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu pembenahan kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia kaitannya dengan ketersediaan tenaga kerja, peningkatan pelayanan dan prosedur berinvestasi, stabilitas ketentraman dan ketertiban, infrastruktur pendukung, serta promosi investasi. Dalam rangka peningkatan aspek daya saing terhadap wilayah terhadap kabupaten/kota lain, maka peningkatan investasi perlu terus dilakukan sehingga tidak menjadi wilayah yang tertinggal dengan wilayah kabupaten/kota sekitar. Namun peningkatan investasi yang belum mengacu pada potensi dan daya saing wilayah masih menjadi permasalahan yang terjadi saat ini.

G. BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

UMKM dan Industri Kreatif yang Belum Berkembang

Pengembangan UMKM, Industri Kecil Menengah (IKM), maupun industri kreatif masih menghadapi beberapa kendala diantaranya adalah masih sulitnya akses permodalan bagi pelaku usaha, belum berkembangnya pusat-pusat industri kecil, UMKM dan industri kreatif, masih rendahnya insan kreatif yang memiliki jiwa kewirausahaan, dan masih rendahnya kapasitas sumberdaya pelaku usaha.

Sektor industri pengolahan di Kota Bogor memiliki kontribusi terbesar kedua setelah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor industri memiliki tren yang meningkat berdasarkan kurun waktu lima tahun terakhir, pada tahun 2008 kontribusi sektor industri pengolahan sebesar 25,10% dan pada tahun 2012 berkontribusi sebesar 27,51% terhadap total PDRB. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan industri pengolahan di Kota Bogor mengalami perkembangan yang baik, begitu juga potensinya untuk dikembangkan.

Industri unggulan dan ekonomi kreatif sangat potensial untuk dikembangkan di Kota Bogor, dengan mendorong industri kecil dan atau UMKM, serta industri kreatif. Namun permasalahan klasik yang sering dihadapi dalam pengembangan industri kecil menengah, UMKM maupun industri kreatif diantaranya adalah sulitnya akses permodalan, masih sulitnya pemasaran dikarenakan belum berkembangnya sentra-sentra produksi, sumberdaya pelaku IKM, UMKM, serta masih rendahnya jiwa kewirausahaan insan kreatif.

Kota Bogor memiliki potensi pengembangan industri pengolahan yang cukup besar, diantaranya adalah pabrik sepatu/sandal di Kelurahan Cikaret Kecamatan Bogor Selatan. Industri kreatif yang cukup menonjol di Kota Bogor diantaranya adalah fesyen, kuliner, dan kerajinan/produk olahan dari bambu yang dibuat menjadi untuk souvenir atau oleh-oleh.

Potensi industri pengolahan IKM, UMKM dan industri kreatif sangat strategis untuk dikembangkan, dan tidak dapat dipungkiri merupakan akibat dari berkembangnya pariwisata di Kota Bogor. Begitu pula sebaliknya, perkembangan sektor industri dan industri kreatif mendukung pariwisata Kota Bogor. Pengembangannya memiliki *multipliereffect* terhadap perkembangan sektor lain, artinya memberikan efek positif terhadap sektor lain, dan juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk menjawab tingginya angka pengangguran di Kota Bogor. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan industri unggulan dan ekonomi kreatif ini adalah persaingannya dengan daerah-daerah lain yang dekat secara geografis dan telah dikenal jauh-jauh hari sebelumnya sebagai pusat kreatifitas seperti Kota Bandung.

H. BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Tingginya Jumlah Penduduk

Tingginya jumlah penduduk merupakan permasalahan yang dihadapi oleh Kota Bogor khususnya pada bidang kependudukan dan catatan sipil. Jumlah penduduk di Kota Bogor semakin meningkat dengan perkembangan kepadatan penduduk yang semakin padat. Rasio kepadatan penduduk per km² mencapai 6.000 jiwa yang kemudian di tahun 2012 kepadatan penduduk Kota Bogor mencapai 8.480 orang per km². Dalam dokumen RPJP Kota Bogor 2005-2025 dinyatakan bahwa Kota Bogor sebagai Kota penyangga ibukota diarahkan untuk dapat menampung 1,5 juta jiwa pada tahun 2025. Kontribusi pertumbuhan penduduk ini semakin nyata berhubungan dengan tingginya pula tingkat migrasi wilayah-wilayah yang menjadi satelit DKI Jakarta.

I. BIDANG KETENAGAKERJAAN

Tingginya Angka Pengangguran

Angka pengangguran yang cukup tinggi, masih menjadi permasalahan Kota Bogor. Berdasarkan data dari Kota Bogor Dalam Angka, tingkat pengangguran Kota Bogor mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2008 sebesar 3,64% kemudian menjadi 9,33% pada tahun 2012. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan angka pengangguran Provinsi Jawa Barat yang sebesar 7,47%.

J. BIDANG KETAHANAN PANGAN

Belum Tangguhnya Ketahanan Pangan Daerah

Isu ketahanan pangan merupakan isu global yang hampir terjadi disetiap daerah. Seperti wilayah perkotaan lainnya, Kota Bogor bukan merupakan daerah utama penghasil pertanian sehingga dalam pemenuhan kebutuhan pangan, akan mengandalkan pasokan dari wilayah lain. Permasalahan utama pada aspek ketahanan pangan adalah terletak pada distribusi dan pengamanan harga. Masalah ini kemudian mempengaruhi masalah lainnya yaitu inflasi. Data menunjukkan bahwa selama empat tahun terakhir penyumbang terbesar bagi inflasi adalah kelompok bahan makanan dan makanan jadi.

K. BIDANG PERHUBUNGAN

Penataan Sistem Transportasi yang Belum Maksimal

Permasalahan utama terkait sistem transportasi di Kota Bogor adalah kemacetan yang diakibatkan oleh banyaknya jumlah kendaraan. Pada tahun 2013 rasio jumlah kendaraan dengan panjang jalan di Kota Bogor 1:47, artinya bahwa setiap panjang jalan sepanjang satu kilometer dapat diakses kendaraan baik kendaraan roda empat maupun roda dua sebanyak 47 kendaraan. Nilai rasio tersebut meningkat dikarenakan jumlah pengguna angkutan umum tiga

tahun terakhir semakin menurun. Selain banyaknya jumlah kendaraan, kemacetan yang terjadi di beberapa titik diakibatkan oleh angkutan perkotaan (angkot) yang berhenti sembarangan untuk menurunkan dan menunggu penumpang.

Permasalahan lain terkait sistem transportasi di Kota Bogor diantaranya adalah tingginya angka pengguna *commuter linedi* Kota Bogor yang tidak didukung dengan transportasi AKAP yang memadai (4.000 motor terparkir setiap harinya di sekitar Stasiun Bogor dan pengendaranya menuju Jakarta dan sekitarnya dengan *commuter line*).

Hal lain juga terkait sarana prasarana lalu lintas yang masih tidak ramah pengguna, dicontohkan dengan kondisi trotoar yang tinggi dan naik turun, halte yang kotor, *underpass* yang belum optimal penggunaannya (IPB menuju Kebun Raya Bogor) dan masih banyak jalan-jalan yang berlubang. Hal tersebut tentunya memiliki keterkaitan dengan angka kejadian kecelakaan lalu lintas.

L. BIDANG SOSIAL

Tingginya Tingkat Kemiskinan dan Kelompok Masyarakat Marjinal Perkotaan

Permasalahan utama yang dihadapi Bidang Sosial di Kota Bogor yaitu tingginya tingkat kemiskinan dan kelompok masyarakat marginal perkotaan. Permasalahan tersebut diantaranya adalah tingginya jumlah penduduk miskin, banyaknya kasus penyandang masalah sosial, khususnya anak jalanan dan kecenderungan meningkatnya kawasan kumuh perkotaan. Jumlah penduduk miskin 88.900 jiwa (9,16%) meskipun tiap tahunnya terus menurun rata-rata 0,46 persen per tahunnya, namun memiliki peringkat keempat tertinggi dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Barat. Dari total penduduk Kota Bogor, 3,19 persen memiliki kategori sangat miskin, 6,28 persen miskin dan 8,39 persen hampir miskin. Dari total jumlah penduduk miskin, 29,45 persen tidak tamat SD, 55,18 persen tamat SD/SMP, dan 15,37 persen tamat SMA keatas.

Jumlah gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Kota Bogor meningkat pada saat menjelang lebaran. Diperkirakan ada lebih dari 1000 anak jalanan yang beroperasi di perempatan, pertigaan, angkutan kota, pasar dan terminal. Belum adanya aturan yang tegas dan efektif oleh Pemerintahan Kota Bogor dalam menangani permasalahan ini. Selain itu terdapat 801 anak terlantar, 189 balita terlantar, 470 lanjut usia terlantar, 7 anak nakal, 114 korban penyalahgunaan narkoba dan 1.632 penyandang cacat.

Kemudian masih terdapat 191,82 hektar kawasan kumuh (SPM PU dan Tata Ruang: Berkurangnya luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan, target RPJMD 2010-2014). Masih ada sebanyak 753 KK (0,31%) yang menggunakan air sungai sebagai MCK dan masih terdapat sebanyak 3.415KK (1,38%) tidak memiliki tempat pembuangan akhir (WC).

M. BIDANG KEBUDAYAAN

Menurunnya Nilai dan Budaya Masyarakat

Permasalahan yang dihadapi terkait budaya dan nilai hidup di Kota Bogor diantaranya adalah terkait dengan aktifitas ekonomi perkotaan yang memenuhi kebutuhan ibu kota. Masyarakat Kota Bogor sebagian besar merupakan masyarakat *commuter* yang bekerja di luar Kota Bogor, yang menghabiskan waktunya di Kota Bogor ketika malam dan akhir pekan, sehingga sebagian besar kurang memperdulikan nasib kotanya. Bentuk ketidakpedulian lain masyarakat terhadap lingkungan, contohnya membuang sampah sembarangan, tidak mengelola sampah (baik di pasar, pertokoan

maupun tingkat rumah tangga), dan masih terdapat warga yang membuang sampah di sungai.

Sebagai kota satelit ibukota, kalangan muda di Kota Bogor banyak mengadopsi gaya hidup negatif kota metropolitan. Kegagalan di kalangan anak muda ini terkait dengan belum ditemukannya jati diri. Tekanan dan tuntutan gaya hidup mendorong kalangan muda melakukan berbagai hal, baik yang positif maupun hal negatif dalam rangka memenuhi gaya hidup ideal yang diinginkan. Kurangnya transfer nilai dan norma-norma di kalangan muda juga menandai salah satu faktor yang mendorong dekadensi moral pada generasi muda. Tuntutan orang tua yang bekerja dan sedikit meluangkan waktu untuk anak menjadi alasan lain isu ini muncul.

N. BIDANG PARIWISATA

Menurunnya Kontribusi Sektor Tersier (Perdagangan, Hotel, dan Restoran)

Layaknya kota jasa pada umumnya, sektor yang berkembang adalah sektor tersier. Pada Kota Bogor, sektor tersier yang berkembang adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Hal ini ditandai dengan kontribusi sektor tersebut terhadap total PDRB Kota Bogor. Meskipun secara total keseluruhan PDRB Kota Bogor terus mengalami peningkatan, namun permasalahan yang dihadapi adalah kontribusi sektor perdagangan hotel dan restoran mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan justru terlihat pada sektor sekunder yaitu sektor industri pengolahan. Sektor ini merupakan sektor yang kontribusi terhadap total PDRB terbesar kedua setelah sektor perdagangan hotel dan restoran, yaitu sebesar 27,51% pada tahun 2012 dan menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya.

O. BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

1. Peningkatan Laju Inflasi

Permasalahan lain yang terjadi yaitu peningkatan laju inflasi di Kota Bogor. Laju inflasi Kota Bogor pada tahun 2013 berada pada angka 8,55 persen, angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 4,06 persen. Rata-rata pertumbuhan inflasi di Kota Bogor hanya sebesar 0,41 persen. Selama empat tahun terakhir penyumbang terbesar bagi inflasi adalah kelompok bahan makanan dan makanan jadi.

2. Belum Maksimalnya Revitalisasi Pasar Tradisional

Kondisi pasar tradisional di Kota Bogor secara umum hingga saat ini masih memprihatinkan, pasar tradisional terkesan semrawut dan kumuh. Hal tersebut dicirikan dengan sampah yang berserakan, becek, bau menyengat dan sistem keamanan yang minim. Permasalahan lain yang dihadapi pasar tradisional adalah buruknya manajemen pasar, sarana dan prasarana pasar yang sangat minim. Belum terintegrasinya sistem transportasi dengan pasar-pasar tradisional, sehingga aktivitas pasar tradisional menambah titik kemacetan.

Disisi lain pertumbuhan *mall* dan *mini market* yang belakangan ini marak harus dikendalikan agar dapat menjamin terciptanya iklim usaha yang sehat dengan memberikan kesempatan yang sama antara pelaku usaha, khususnya antara pedagang modern dan pedagang tradisional, sehingga terjadi keseimbangan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah. Revitalisasi pasar tradisional menjadi penting dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan kualitas pasar agar bisa bersaing dengan pasar modern serta menjadi sentra pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Bogor.

IV.2. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu strategis merupakan tantangan dan potensi dalam pembangunan kedepan.

Berdasarkan daftar panjang permasalahan pembangunan Kota Bogor yang dikemukakan di atas, isu-isu strategis pembangunan Kota Bogor berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah kemudian dikelompokkan kedalam tigabidang yang meliputi bidang fisik-lingkungan, sosial-budaya dan ekonomi.

A. PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN PERUBAHAN IKLIM MIKRO KOTA BOGOR

Pencemaran yang banyak terjadi di Kota Bogor adalah yang terkait dengan air (baik air tanah, air permukaan, air sungai, maupun situ) dan udara (polusi udara karena emisi buangan kendaraan bermotor dan debu). Pencemaran air (baik air tanah maupun badan air seperti air sungai) banyak terjadi dikarenakan pengelolaan air limbah, baik limbah cair maupun limbah padat yang belum memadai. Masih terdapat jumlah orang yang buang air besar di sungai ataupun drainase, usaha komersial membuang air hasil kegiatannya tanpa diolah terlebih dahulu ke badan air.

Berdasarkan data hasil analisis kualitas air sungai Ciliwung tahun 2010, dapat diketahui bahwa kualitas air di lokasi bagian hulu, tengah dan hilir Sungai Ciliwung kurang memenuhi persyaratan untuk pemanfaatan air kelas dua pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 karena tingginya total bakteri colie dengan jumlah yang melampaui persyaratan kriteria baku mutu tersebut, baik di bagian hulu, tengah, maupun hilir. Di bagian hilir Sungai Ciliwung selain BOD dan jumlah bakteri total koliform yang tinggi, juga mengandung fosfat total dan amonia total yang melampaui persyaratan.

Hal ini diperparah lagi dengan kebiasaan masyarakat yang masing sering membuang sampah langsung ke sungai. Timbulan sampah juga merupakan permasalahan pelik yang dihadapi Kota Bogor. Pengelolaan sampah belum optimal, timbulan sampah kota yang cukup besar, serta sarana prasarana pengangkutan sampah yang belum memadai.

Pembuangan sampah secara rutin setiap hari ke TPA merupakan bentuk pengisian kembali (*recharge*), baik secara infiltrasi maupun perlokasi, merupakan penyebab pencemaran air tanah yang sangat besar terutama air tanah dangkal maupun air sumur gali, sehingga perlu penanganan serius.

Pencemaran lingkungan karena polusi udara juga sudah dirasakan akibat semakin meningkatnya pemakaian sarana transportasi kendaraan bermotor di Kota Bogor. Tingkat polusi udara di Kota Bogor menempati urutan ketiga di Jawa Barat.

Pencemaran tersebut mengakibatkan menurunnya kenyamanan kota. Salah satu indikator kenyamanan kota adalah kondisi iklim mikro kota itu sendiri. Kota Bogor terkenal sebagai kota hujan yang menjadi tujuan wisata karena berhawa sejuk dan nyaman. Namun, perubahan iklim mikro berupa kenaikan suhu juga mulai terjadi di Kota Bogor. Iklim mikro berpengaruh kuat terhadap kenyamanan termal manusia. Elemen pembentuk iklim mikro yang mempengaruhi kenyamanan kota adalah radiasi matahari, temperatur udara, kelembaban relatif, dan pergerakan udara (angin). Perubahan iklim mikro ini sangat berpengaruh terhadap kenyamanan penduduk kota. Berdasarkan penelitian, wilayah Bogor pada siang hari memiliki suhu permukaan rata-rata sebesar 26,8°C, sedangkan malam hari sebesar 19,4°C. Pada siang hari, suhu permukaan membentuk pola UHI (*Urban Heat Island*) yang memusat di Kota

Bogor dan menyebabkan hawa panas. Salah satu penyebabnya adalah mulai berkurangnya ruang terbuka hijau. Implikasi dari berkurangnya ruang terbuka hijau di perkotaan adalah peningkatan temperatur yang berpotensi menimbulkan fenomena tersebut.

B. KETIDAKSESUAIAN ANTARA PEMANFAATAN RUANG DENGAN RENCANA

Peningkatan jumlah penduduk perkotaan memacu kebutuhan ruang bagi permukiman dan segala utilitas serta infratrukturnya. Kota akan tumbuh dengan segala potensi dan tantangan yang dimilikinya. Keadaan tersebut harus dihadapi melalui penyiapan perencanaan tata ruang kabupaten/kota yang mempertimbangkan kondisi, potensi dan tantangan yang dimiliki oleh kota kabupaten/kota tersebut.

Pembangunan seringkali diiringi dengan inkonsistensi terhadap aturan tata ruang yang telah dibuat. Inkonsistensi yang terjadi menyebabkan kesemrawutan ruang dan pada akhirnya akan menimbulkan berbagai masalah lingkungan. Bila hal ini tidak dikendalikan secara terpadu maka dapat menyebabkan penurunan ketersediaan sumberdaya alam dan mengganggu keberlanjutan kota.

Kota Bogor memiliki luas 11248,85 Ha, dan menunjukkan gejala inkonsistensi tata ruang. Total luas inkonsistensi tata ruang yang terjadi di Kota Bogor sebesar 127, 21 Ha atau 1,13% dari total luas wilayah Kota Bogor. Inkonsistensi terbesar terjadi pada taman/lapangan olah raga/jalur hijau menjadi ruang terbangun yaitu 94,31 Ha (0,84% dari total luas wilayah Kota Bogor), pertanian/kebun campuran menjadi ruang terbangun sebesar 22,57 Ha (0,20% dari total luas wilayah Kota Bogor) dan hutan kota menjadi ruang terbangun sebesar 10,33 Ha (0,09% dari total luas wilayah Kota Bogor).

Dari data ini terlihat bahwa inkonsistensi terjadi pada ruang terbuka hijau yang beralih fungsi menjadi ruang terbangun. Kebutuhan akan ruang untuk permukiman menjadi salah satu pemicu terbesarnya. Berdasarkan data penggunaan lahan, pada tahun 2007 luas lahan permukiman di Kota Bogor adalah seluas 4.161,4 Ha atau 35,12% dari total luas wilayah, dan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mengalami perluasan sekitar 9,98% menjadi seluas 4.577 Ha atau 38,62% dari total luas wilayah Kota Bogor seluas 11.850 Ha. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan ruang bagi permukiman di Kota Bogor menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dengan semakin berkembangnya lahan permukiman dan tuntutan kebutuhan ruang bagi permukiman kedepannya, memunculkan kompleksitas permasalahan yang akan mempengaruhi proses pembangunan dan perkembangan Kota Bogor kedepannya apabila tidak direncanakan strategi penanganannya sejak dini.

Inkonsistensi pemanfaatan ruang terhadap RTRW di Kota Bogor sebagian besar diakibatkan adanya perubahan tutupan lahan pada kawasan konservasi di kelerengan 2-15% menjadi TPLK (kebun campuran/tegal), yang kemudian perlahan-lahan berubah menjadi permukiman. Konsentrasi perubahan tutupan lahan menjadi ruang terbangun adalah di kecamatan Bogor Barat, Bogor Tengah dan Bogor Timur. Ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut menjadi prioritas pengembangan permukiman guna mengimbangi perkembangan perkotaan pada kecamatan lainnya seperti Tanah Sareal dan Bogor Utara. Sedangkan pusat perubahan lahan menjadi kebun campuran/tegal berada di kecamatan Bogor Tengah dan Bogor Selatan. Kecamatan Bogor Tengah selain untuk pengembangan perkotaan juga merupakan daerah konservasi karena adanya KRB. Kecamatan Bogor Selatan lebih diprioritaskan untuk pengembangan agrowisata dan industri pertanian. Perlu adanya aturan yang tegas untuk menindak upaya pengalihan fungsi lahan yang semakin jauh menyimpang dari fungsi semula.

Berdasarkan Perbandingan Ketersediaan Lahan (SL) terhadap kebutuhan lahan (DL), dan Perbandingan Ketersediaan Air (SW) terhadap Kebutuhan Air (DW), diketahui bahwa Daya Dukung Lahan dan Air Kota Bogor sudah terlampaui (*overshoot*). Hal ini sangat terkait dengan penambahan penduduk dan pengalihan fungsi lahan. Pengalihan fungsi lahan di perkotaan cenderung ke arah penutupan tanah dengan bahan-bahan semen yang tidak tembus air, sehingga mengakibatkan terganggunya keseimbangan hidrologi. Hidrologi kota menjadi masalah pelik karena urbanisasi meningkatkan luasan permukaan tertutup semen, paving, aspal, sehingga air hujan tercegah masuk ke dalam tanah dan menjadi limpasan permukaan yang berakhir pada krisis ketersediaan air tanah.

Meskipun pemakaian air tanah pada tahun 2011 secara keseluruhan hanya sekitar 37,75% dari potensi, tetapi mengingat tingkat pengambilan air tanah tidak merata, maka hal tersebut mengakibatkan di tempat tertentu sudah terlihat adanya penurunan muka air tanah yang signifikan, sehingga terindikasi sudah masuk ke dalam zona rawan, kritis bahkan rusak seperti yang terjadi di Kecamatan Bogor Selatan, Bogor Timur dan Bogor Tengah.

C. ANCAMAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Kota Bogor adalah kota rawan bencana karena kontur tanahnya yang labil, cuaca ekstrim dan ketidakpedulian warga terhadap lingkungannya. Berdasarkan hasil pemetaan daerah potensi bencana di Bogor, dari enam kecamatan dan 68 kelurahan di Kota Bogor, hampir separuh wilayahnya adalah rawan banjir dan longsor.

Di wilayah Kota Bogor sedikitnya terdapat 32 titik rawan bencana alam yang terdiri atas daerah rawan longsor dan banjir yang tersebar di 6 wilayah kecamatan se Kota Bogor. Untuk wilayah Bogor Tengah ada 3 titik rawan longsor, di Tanah sareal ada 6 titik rawan banjir, Bogor Barat 6 titik rawan longsor dan banjir, Bogor Selatan 12 titik rawan longsor, Bogor Timur 3 titik rawan banjir dan di wilayah Bogor Utara ada 2 titik rawan banjir.

Pada tahun 2014 tercatat lebih dari 40 peristiwa tanah longsor terjadi di berbagai lokasi di Kota Bogor, dalam skala kecil hingga besar. Di Kecamatan Bogor Selatan, terdapat 39 titik rawan longsor pada 11 kelurahan, meliputi Kelurahan Cikaret, Empang, Bondongan, Batutulis, Pamoyanan, Cipaku, Genteng, Muarasari, Lawanggantung, Harjasari, Rancamaya, Bojongkerta, Mulyaharja, dan Pakuan. Kondisi ini terdapat pula di kecamatan lain seperti halnya pada beberapa wilayah di Kecamatan Bogor Tengah, salah satunya Kelurahan Gudang. Taksiran kerugian akibat bencana banjir dan longsor mencapai Rp 9,8 milyar.

Selain potensi bencana banjir dan longsor, terdapat potensi bencana lain yaitu pohon tumbang, angin ribut dan kebakaran (akibat petir dan arus pendek). Petir di Bogor termasuk yang terdahsyat di wilayah Asia Tenggara.

Iklim mikro kota Bogor dipengaruhi *climate change*. Berdasarkan informasi BMKG, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terjadi kenaikan suhu rata-rata di Kota Bogor sebesar 10 C. Perlu antisipasi terhadap dampak yang akan ditimbulkan yaitu kondisi kekeringan dan banjir. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer, telah menyebabkan pemanasan global dan menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang berdampak pada semua sektor kehidupan termasuk karakteristik hidrologi Daerah Aliran Sungai Ciliwung. Perubahan ini berdampak pada kerawanan terjadinya bencana baik banjir maupun longsor di kawasan DAS Ciliwung.

D. MOBILITAS PENDUDUK YANG AMAN, EFEKTIF, EFISIEN, DAN RAMAH LINGKUNGAN

Transportasi telah menjadi salah satu isu utama di Kota Bogor yang hampir 10 tahun ini terus menjadi perhatian. Masalah transportasi yang menjadi sorotan adalah titik-titik kemacetan yang ada di Kota Bogor, sarana prasarana lalu lintas yang tidak ramah pengguna, dicontohkan dengan kondisi trotoar yang tinggi dan naik turun, halte yang kotor, *underpass* (dari kampus IPB Baranangsiang menuju Kebun Raya Bogor) yang tidak digunakan, masih banyak jalan-jalan yang berlubang, dan tingginya angka *commuter* di Kota Bogor yang tidak didukung dengan transportasi Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang memadai.

Permasalahan-permasalahan tersebut menimbulkan dampak pada meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas. Pengembangan sistem transportasi yang utama dilakukan di Kota Bogor sebaiknya adalah moda transportasi angkutan massal yang ramah lingkungan karena sesuai dengan citra Kota Bogor sebagai kota yang hijau dan kota dalam taman. Fasilitas mobilitas penduduk dibarengi upaya mengurangi titik-titik kemacetan, meningkatkan kedisiplinan pengguna jalan dan menyelesaikan penyebab-penyebab kemacetan seperti penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).

E. KEMISKINAN DAN PENYANDANG MASALAH SOSIAL

Ciri pembeda antara wilayah desa dan kota memang secara faktual dapat dilihat secara kasat mata yang menunjukkan bias pembangunan fisik, sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan. Kota memberikan kesan yang lebih maju daripada desa.

Semua sisi kehidupan kota seolah memberi kesan kemakmuran hidup. Padahal di sisi lainnya, terdapat keterbelakangan yang mencerminkan potret ketidakberdayaan, kemiskinan yang terkonsentrasi pada pemukiman kumuh (*slum area*).

Gambaran kaum miskin kota selain dari sisi rendahnya tingkat ekonomi, ialah kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, pekerjaan tak tetap, lokasi pekerjaan berpindah-pindah dan seringkali menjadi obyek kejaran aparat. Tak jarang, warga miskin di perkotaan terlibat tindakan kriminal yang meresahkan kehidupan sosial.

Kemiskinan juga ditunjukkan dengan masih banyaknya kawasan kumuh perkotaan. Masih terdapat 191,82 hektar kawasan kumuh, selain itu masih ada sebanyak 753 KK (0,31%) yang menggunakan air sungai sebagai MCK (Suseda, 2013) dan masih ada sebanyak 3.415KK (1,38%) tidak memiliki kloset (WC).

Kemiskinan juga dapat dilihat dari banyaknya penyandang masalah sosial, terutama yang menjadi sorotan adalah masih banyaknya jumlah pekerja anak yang bekerja di jalanan. Diperkirakan ada lebih dari seribu anak jalanan yang beroperasi di perempatan, pertigaan, angkutan kota, pasar, dan terminal. Menurut Kepala Pelaksana Rehabilitasi Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2013), jumlah gelandangan, pengemis, dan anak jalanan di Kota Bogor, selalu meningkat setiap menjelang Lebaran, bahkan hingga dua kali lipat.

Jumlah penduduk miskin di Kota Bogor mencapai 88.900 jiwa (9,16%). Meskipun terus menurun dengan rata-rata 0,46 % per tahunnya, namun memiliki peringkat ke-4 tertinggi dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Barat. Dari total penduduk Kota Bogor, 3,19% memiliki kategori sangat miskin, 6,28% miskin, dan 8,39 % hampir miskin. Dari total jumlah penduduk miskin, 29,45% tidak tamat SD, 55,18 % tamat SD/SMP dan 15,37 % tamat SMA keatas.

Dampak yang dimunculkan dari persoalan kemiskinan ini menjadi sangat kompleks sehingga persoalan ini menjadi isu strategis dengan tingkat kemendesakan yang tinggi untuk penyelesaiannya.

F. PERTUMBUHAN PENDUDUK YANG TINGGI

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Bogor pada tahun 2010-2011 mencapai 1,80 %, angka ini sama dengan laju pertumbuhan penduduk pertahun Provinsi Jawa Barat yakni 1,80%. Namun laju pertumbuhan penduduk Kota Bogormeningkat tajam pada tahun 2011 yaitu mencapai 4,06% untuk kemudian turun kembali pada tahun 2012 menjadi 3,87%. Pertumbuhan penduduk di Kota Bogor ini tidak hanya diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk alami (kelahiran), namun juga di sumbangkan oleh migrasi manusia.

Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk tersebut, merupakan tantangan dan pekerjaan rumah bagi pemerintah kota, khususnya untuk SKPD yang menangani urusan kependudukan. Lajupertumbuhan penduduk pada akhirnya tidak hanya mempengaruhi dukung dan daya tampung kawasan semata, melainkan berpengaruh terhadap seluruh variabel pelayanan sosial, karena keseluruhan pelayanan harus didasarkan pada jumlah penduduk yang dilayani.

G. WARISAN BUDAYA YANG BELUM MENGAJAR SEBAGAI BAGIAN DARI KARAKTER KOTA

Bogor memiliki sejarah yang panjang dengan identitas yang luar biasa melekat padanya. Keberadaan Ibukota Pajajaran, pusat pemerintahan pada masa kolonial, pusat penelitian, wisata, kota dalam taman, dan pemukiman paling nyaman, merupakan deretan julukan yang pernah melekat pada Kota Bogor. Berbagai peninggalan sejarah pun masih banyak yang tersisa di Kota Bogor yang harus dilestarikan keberadaannya.

Namun demikian, kenyataannya, keberadaan dari bangunan dan peninggalan bersejarah belum menjadi hal yang penting. Bangunan-bangunan bersejarah di Kota Bogor belum diperhatikan sebagai sebuah aset yang bernilai tinggi. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota untuk mengatur, melindungi dan melestarikan bangunan bersejarah. Kondisi ini dikuatkan dengan banyaknya bangunan cagar budaya yang beralih fungsi menjadi bangunan komersial seperti hotel dan restoran.

Penghargaan terhadap warisan budaya tidak hanya berasal dari pemerintah sebagai pihak yang merencanakan dan membangun kota. Kepedulian juga harus datang dari warga masyarakat. Rendahnya keterkaitan antara warga dan kotanya akan bermuara pada belum dihargainya peninggalan kota.

Masyarakat Kota Bogor sebagian besar merupakan masyarakat *commuter* yang bekerja di luar Kota Bogor sehingga hanya menghabiskan waktunya di Kota Bogor ketika malam dan akhir pekan. Sehingga sebagian besar kurang memperdulikan nasib kotanya. Ketidakpedulian masyarakat juga ditunjukkan dengan kurangnya kepedulian warga terhadap lingkungan, contohnya membuang sampah secara sembarangan, termasuk ke sungai.

H. PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN YANG BERKARAKTER DAN PENGUATAN CITRA KOTA BOGOR (CITY BRANDING)

Pariwisata merupakan salah satu subsektor yang menggerakkan pertumbuhan sektor tersier di Kota Bogor. Perkembangan pariwisata Kota Bogor akan mendorong tumbuhnya sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor tersier lainnya.

Objek wisata yang terdapat di Kota Bogor cukup banyak, mulai dari wisata berbasis alam, berbasis ekonomi kreatif, berbasis sejarah, wisata kuliner, wisata berbasis pendidikan dan atau wisata ilmiah, serta wisata rekreasi. Potensi lain pariwisata Kota Bogor adalah dikembangkannya pariwisata berbasis *botanical garden* dan pengembangan wisata budaya yang selama ini belum berkembang di Kota Bogor.

Pengembangan pariwisata Kota Bogor ke depan perlu perencanaan yang komprehensif, dengan mengidentifikasi potensi, jenis-jenis pariwisata, dan daya dukung terhadap destinasi wisata, serta sesuai dengan karakter Kota Bogor. Pengembangan wisata yang merubah bentang alam (tidak berbasis sumberdaya alam) sebaiknya tidak dikembangkan di Kota Bogor.

Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pariwisata Kota Bogor perlu ditingkatkan seperti pusat informasi pariwisata, pengembangan destinasi wisata, termasuk sistem transportasi menuju lokasi objek wisata. Seperti yang diketahui bahwa masalah kemacetan merupakan permasalahan yang dihadapi Kota Bogor dalam beberapa tahun terakhir.

Karakter Kota Bogor sendiri adalah kota yang memiliki kenyamanan bagi masyarakatnya, memiliki julukan Kota Hujan, udara yang sejuk, memiliki kawasan *heritage* dengan keberadaan gedung peninggalan sejarah, seperti istana presiden sebagai peninggalan zaman kolonial, keberadaan Kebun Raya, bahkan memiliki sejarah pra kolonial sebagai pusat Kerajaan Pajajaran.

Degradasi lingkungan, hilangnya identitas kota yang merupakan dampak negatif yang sering ditimbulkan secara umum akibat perkembangan pariwisata perlu mendapatkan perhatian khusus. Hal tersebut agar berkembangnya pariwisata di Kota Bogor tetap memberikan kenyamanan bagi penduduk asli yang tinggal di Kota Bogor, dan juga nyaman bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kota Bogor.

Penguatan citra Kota Bogor (*city branding*) menjadi penting untuk meminimalisir salah satu dampak tersebut, sehingga karakteristik Kota Bogor tetap terjaga dan menjadi kekhasan tersendiri dibandingkan dengan daerah lain di sekitarnya, khususnya dalam lingkup wilayah Jabodetabek dan kota/kabupaten di Jawa Barat.

I. PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN DAN EKONOMI KREATIF

Sektor industri pengolahan di Kota Bogor memiliki kontribusi terbesar kedua setelah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor industri memiliki tren yang meningkat berdasarkan kurun waktu lima tahun terakhir, pada tahun 2008 kontribusi sektor industri pengolahan sebesar 25,10% dan pada tahun 2012 berkontribusi sebesar 27,51% terhadap total PDRB. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan industri pengolahan di Kota Bogor mengalami perkembangan yang baik, begitu juga potensinya untuk dikembangkan.

Industri unggulan dan ekonomi kreatif sangat potensial untuk dikembangkan di Kota Bogor, dengan mendorong industri kecil dan atau UMKM, serta industri kreatif. Namun permasalahan klasik yang sering dihadapi dalam pengembangan industri kecil menengah, UMKM maupun industri kreatif diantaranya adalah sulitnya akses permodalan, masih sulitnya pemasaran dikarenakan belum berkembangnya sentra-sentra produksi, sumberdaya pelaku IKM, UMKM, serta masih rendahnya jiwa kewirausahaan insan kreatif.

Kota Bogor memiliki potensi pengembangan industri pengolahan yang cukup besar, diantaranya adalah pabrik sepatu/sandal di Kelurahan Cikaret Kecamatan Bogor Selatan. Industri kreatif yang cukup menonjol di Kota Bogor

diantaranya adalah fesyen, kuliner, dan kerajinan/produk olahan dari bambu yang dibuat menjadi untuk souvenir atau oleh-oleh.

Potensi industri pengolahan IKM, UMKM dan industri kreatif sangat strategis untuk dikembangkan, dan tidak dapat dipungkiri merupakan akibat dari berkembangnya pariwisata di Kota Bogor. Begitu pula sebaliknya, perkembangan sektor industri dan industri kreatif mendukung pariwisata Kota Bogor. Pengembangannya memiliki *multiplier effect* terhadap perkembangan sektor lain, artinya memberikan efek positif terhadap sektor lain, dan juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk menjawab tingginya angka pengangguran di Kota Bogor. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan industri unggulan dan ekonomi kreatif ini adalah persaingannya dengan daerah-daerah lain yang dekat secara geografis dan telah dikenal jauh-jauh hari sebelumnya sebagai pusat kreatifitas seperti Kota Bandung.

J. PENATAAN, PENERTIBAN DAN PEMBERDAYAAN PKL

Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi masalah hanya karena satu hal saja: bahwa aktivitas perdagangannya dilakukan di tempat yang bukan seharusnya. Akibatnya dari hal ini menjadi panjang: kemacetan, kekumuhan, premanisme.

Oleh karenanya, menyediakan ruang yang legal dan memang dikhususkan bagi PKL untuk berdagang adalah solusi utama. Ruang-ruang tersebut salah satunya adalah pasar tradisional.

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung. Pasar tradisional biasanya ada proses tawar menawar, bangunan yang terdiri dari kios-kios atau gerai, kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian, jasa dan lain-lain.

Kondisi pasar tradisional di Kota Bogor secara umum hingga saat ini masih memprihatinkan, pasar tradisional terkesan semrawut dan kumuh. Hal tersebut dicirikan dengan sampah yang berserakan, becek, bau menyengat, dan sistem keamanan yang minim.

Kondisi fisik pasar tersebut mengakibatkan menurunnya daya saing pasar tradisional terhadap pasar modern yang sekarang beberapa tahun belakangan ini berkembang pesat. Permasalahan seperti buruknya manajemen pasar, sarana dan prasarana pasar yang sangat minim, dan tidak terlepas dari menjamurnya Pedagang Kaki Lima (PKL), menambah buruknya stigma pasar tradisional. Namun demikian keberadaan pasar tradisional di Kota Bogor memiliki nilai strategis dimana pasar tradisional merupakan pasar yang paling sering dikunjungi pembeli, terdapat banyak pedagang ritel tradisional, kemudahan akses bagi pemasok kecil termasuk petani.

Keberadaan pasar tradisional memberikan manfaat bagi pembeli, penjual, dan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Subsektor perdagangan eceran (termasuk didalamnya pasar tradisional) di Kota Bogor juga memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap total PDRB. Revitalisasi pasar tradisional menjadi hal baik dalam rangka untuk meningkatkan kenyamanan dan kualitas pasar agar bisa bersaing dengan pasar modern serta menjadi sentra pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Bogor.

Menurut Perusahaan Daerah (PD) Pasar, terdapat enam pasar yang akan direvitalisasi adalah Pasar Devris Jalan Raya Veteran, Pasar Gunung Batu, Pasar Cumpok, Pasar Taman Kencana, Pasar Bogor dan Pasar Yasmin. Revitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus dapat meningkatkan kualitas pelayanan pasar tradisional dari segi fasilitas sarana-prasarana, dan manajemen pengelolaan pasar. Pengelolaan pasar yang baik pada akhirnya juga akan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar pasar,

tersalurnya produk-produk lokal, penyerapan sumberdaya setempat, terkelolanya dampak cemaran kegiatan pasar, serta tertatanya akses transportasi. Seperti yang diketahui bahwa aktivitas pasar cenderung mengakibatkan kemacetan.

Revitalisasi pasar tradisional berdampak strategis terhadap penanganan permasalahan yang terjadi, seperti permasalahan PKL, dan kemacetan. Revitalisasi diharapkan mampu mengakomodir PKL yang selama ini belum memiliki kios, serta titik kemacetan yang ditimbulkan oleh aktivitas pasar. Revitalisasi pasar sebaiknya juga diintegrasikan dengan sistem transportasi sehingga dapat mengurai kemacetan yang menjadi permasalahan Kota Bogor berapa tahun belakang ini. Pada akhirnya, revitalisasi pasar menjadi salah satu jawaban akan penyediaan ruang khusus bagi PKL. Selain itu, penyediaan ruang dapat dilakukan melalui *zoning regulation*, ialah regulasi tentang penetapan zona-zona khusus PKL, biasanya terletak di sepanjang jalan.

K. PENGELOLAAN KOTA BERBASIS SMART CITY

Tantangan besar yang dihadapi Kota Bogor dalam lima tahun mendatang adalah juga bagaimana perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesatnya dapat dioptimalisasikan untuk mendukung pengelolaan kota. Dalam waktu-waktu mendatang, akan menjadi hal yang jauh tertinggal dan inefisien ketika pengelolaan kota masih dijalankan dengan cara-cara yang konvensional atau cara-cara yang selama ini dipraktekkan selama sekian lama.

Perkembangan teknologi telah membawa berbagai kemudahan dalam hidup kita, dan seyogyanya teknologi itu juga dimanfaatkan dalam pengelolaan kota. Sebenarnya ini bukan menjadi barang baru, karena telah lama kita mengenal istilah *e-government* (atau *e-gov*). Hanya saja, penerapannya yang memang masih menjumpai banyak kendala. Di tingkat negara, pada tahun 2012 Indonesia tidak termasuk daftar 50 negara teratas dalam hal kesiapan penerapan *e-Government* (sedangkan dua negara tetangga kita, yaitu Singapura dan Malaysia, masuk ke dalam daftar tersebut) (United Nations Department of Economic and Social Affairs 2012).

Dalam konteks antar kota di Indonesia, Kota Bogor sudah sangat selayaknya mengimplementasikan sepenuhnya *e-government*. Keberadaan perguruan tinggi terkemuka di kota Bogor dan lembaga-lembaga penelitian dan ilmu pengetahuan sehingga mengentalkan Bogor juga sebagai kota pendidikan, ditambah lagi posisi strategisnya sebagai satelit ibukota negara, memperkuat konteks penerapan *e-gov* di Kota Bogor, bahkan jika memungkinkan menjadi kota yang terdepan dibanding yang lainnya.

Pada akhirnya, penerapan *e-gov* hanya menjadi salah satu pilar dari kota yang cerdas (*smart city*). Pendidikan yang berkualitas, proses pengambilan keputusan publik yang cerdas, dan masyarakat pembelajar (*learning society*), adalah pilar-pilar lainnya sehingga kota yang cerdas ini tidak hanya menyentuh pada aspek infrastruktur teknologi informasi saja, tetapi juga menyentuh soal sosial-budaya masyarakat.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

V.1.VISI

Visi amatlah penting dalam suatu kebijakan pembangunan mengingat visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan adanya visi, maka segala sumber daya dapat digunakan secara terarah, guna mewujudkan kondisi akhir yang dicita-citakan melalui serangkaian tahapan kegiatan. Oleh karena itu, visi pembangunan mempunyai berbagai fungsi diantaranya:

- a. sebagai arah bagi semua kebijakan pembangunan;
- b. sebagai tujuan dan sasaran akhir yang hendak dicapai oleh kebijakan pembangunan,
- c. sebagai acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan, dan
- d. sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kebijakan pembangunan.

Lebih jauh, visi pembangunan dapat menjadi pranata yang berfungsi sebagai pedoman perilaku pembangunan, sebagai alat pemersatu masyarakat dalam pembangunan, dan sebagai sarana pengendali sosial dalam pembangunan. Penentuan visi pembangunan dengan misi dan strategi pencapaiannya amatlah penting, agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas. Berhubung dengan itu, untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah ke depan, maka visi pembangunan Kota Bogor untuk jangka waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut: **“Kota Bogor yang nyaman, beriman dan transparan”**

Kalimat visi di atas mengandung tiga kata kunci yaitu **nyaman, beriman** dan **transparan**. Pemaknaan tiga kata kunci tersebut secara lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

a. Nyaman

Makna **Nyaman** merupakan kondisi yang dirasakan masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas, seperti bekerja, berusaha, belajar, tumbuh dan aktifitas-aktifitas lain yang dilakukan di dalam kota oleh setiap elemen masyarakat. Pada dasarnya kondisi tersebut dapat terpenuhi sedikitnya oleh tiga faktor. Faktor pertama terkait dengan kualitas lingkungan, yang mana kota dapat mencerminkan kondisi yang sehat dan bersih dengan tingkat pencemaran (meliputi air, tanah dan udara) dapat dikendalikan dengan baik. Kota yang nyaman adalah kota yang baik secara klimatik (iklim yang sejuk), indah secara visual, maupun secara aromatik. Kondisi fisik lingkungan yang baik, dicerminkan juga dari sisi ketersediaan fasilitas perkotaan yang memadai untuk seluruh warga termasuk anak, perempuan, lansia, dan difabel, ramah pengguna dengan akses yang mudah dalam mendukung aktifitas masyarakat menuju taraf kehidupan yang lebih baik. Faktor kedua kondisi nyaman juga harus dipenuhi dari sektor ekonomi seperti dunia usaha yg kondusif; kemudahan mendapat pekerjaan; dan berkembangnya ekonomi kreatif. Sedangkan faktor terakhir adalah berkaitan dengan kultur masyarakat yang baik. Kenyamanan didapat ketika warga juga merasa aman dengan kehidupan berbudaya yang tumbuh dilingkupi oleh modal sosial yang guyub.

b. Beriman

Makna **Beriman**, diterjemahkan ke dalam berkembangnya aktivitas kehidupan beragama yang lebih bermakna. Hal ini merupakan perwujudan dari masyarakat yang memiliki nilai-nilai agama dan moral yang tidak hanya sebagai cerminan nilai pribadi, namun terimplementasikan ke dalam kehidupan bersosialisasi antar sesama dan kepedulian terhadap lingkungan hidup yang dijadikan tempat tinggal dan berlangsungnya berbagai aktivitas. Harmonisasi pun tidak hanya terjadi diantara masyarakat saja, namun juga dengan lingkungannya. Selanjutnya perhatian terhadap generasi muda menjadi penting dalam menjamin terjaganya nilai dan norma ditengah gencarnya dampak negatif dari arus globalisasi.

c. Transparan

Makna **Transparan**, lebih ditekankan pada proses berlangsungnya pemerintahan kota dalam mengefektifkan tugas dan fungsi, serta mengawal arah pembangunan kota ke depan. Transparansi menuntut kecakapan dan peran aktif pemerintah dalam membuka diri, melayani, bekerja sama dengan berbagai pihak dalam melaksanakan program-program pembangunan, sehingga pemenuhan target pembangunan menjadi sebuah aksi kolaboratif bersama elemen masyarakat lain. Sebagai bagian dari transparansi, jalannya program-program pembangunan dapat diakses oleh masyarakat sehingga hak masyarakat atas informasi publik dapat terpenuhi.

Makna **Transparan** kemudian diartikan juga sebagai pemerintahan yang demokratis, yang mana pemerintah mampu menyerap aspirasi warganya. Selain itu, transparan mencerminkan penyelenggara pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Pada prosesnya pemerintahan juga mampu menerapkan *e-government* secara adil, tepat, efektif, dan terintegrasi.

V.2.MISI

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Bogor 2015-2019 tersebut, dapat ditempuh melalui enam misi pembangunan sebagai berikut:

a. Menjadikan Bogor kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi

Kota yang cerdas direpresentasikan oleh iklim lingkungan belajar yang tumbuh di tengah masyarakat. Hal ini diharapkan semakin berkembang dengan ketersediaan berbagai fasilitas yang mendorong kemudahan masyarakat untuk mengakses pengetahuan, utamanya lewat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Masyarakat dapat mengakses informasi yang luas dan mendorong terjadinya proses pengambilan keputusan publik yang cerdas. Penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik dilakukan dengan basis Sistem Informasi Manajemen yang terintegrasi. Sistem Informasi Manajemen itu sekaligus menjadi *decision support system* sehingga proses pengambilan keputusan publik dapat dilakukan secara cerdas pula.

b. Menjadikan Bogor kota yang sehat dan makmur

Kota yang sehat mencerminkan masyarakat dengan kemudahan terhadap akses layanan kesehatan. Layanan kesehatan yang memadai kemudian diimbangi pula oleh kesadaran masyarakat dalam berperilaku sehat, mulai dari lingkungan rumah tangga sampai lingkungan perkotaan.

Masyarakat yang sehat mendorong masyarakat yang lebih produktif sehingga masyarakat dapat memperoleh kesempatan berkarya secara maksimal. Kesempatan untuk berkarya inilah yang menjadi kunci menuju

kemakmuran. Selain itu, ketersediaan barang-barang konsumsi yang terjangkau menjadi penunjang bagi kemakmuran sebuah kota.

c. Menjadikan Bogor kota yang berwawasan lingkungan

Wawasan lingkungan bukan hanya menjadi upaya namun juga menjadi budaya bagi setiap elemen masyarakat. Penerapan *green city*, rendah karbon, ramah lingkungan, penanganan sampah, diinternalisasikan sebagai gaya hidup. Kota yang berwawasan lingkungan didukung pula oleh peraturan-peraturan dan kebijakan yang menjamin upaya pelestarian dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan kota.

d. Menjadikan Bogor sebagai kota jasa yang berorientasi pada kepariwisataan dan ekonomi kreatif

Masyarakat dengan individu-individu yang kreatif dapat menumbuhkan industri kreatif, yang pada akhirnya dapat bersinergi dalam mendukung tumbuhnya industri pariwisata. Masyarakat tersebut dapat tumbuh ditengah-tengah karakter kota yang kuat. Hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga upaya mendesain kota harus dilakukan secara komprehensif untuk seluruh sudut kota. Lanskap kota yang berbudaya menguatkan citra kota yang kemudian menjadi aset dan juga identitas kota. Hal tersebut diikuti dengan berkembangnya proses-proses kreatif sehingga industri-industri kreatif dapat terus tumbuh.

e. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan transparan

Pemerintah yang bersih merupakan pemerintah yang dapat menjamin tidak adanya praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam perjalanan roda pemerintahan. Reformasi birokrasi menjadi syarat dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah aktif membuka diri bagi masyarakat dan juga membuka peluang-peluang kerjasama dengan berbagai pihak. Pemenuhan hak masyarakat akan informasi publik menjadi bagian dari upaya transparansi. Selanjutnya sinergitas dilakukan guna menyatukan berbagai potensi dan stabilitas kebijakan demi kemajuan pembangunan kota.

f. Mengokohkan peran moral agama dan kemanusiaan untuk mewujudkan masyarakat madani.

Peran moral agama dan kemanusiaan bukan hanya menjadi hal yang tumbuh dan mempengaruhi ranah individual saja, namun dapat menjadi nafas penggerak pembangunan kota. Kota berkembang dimana masyarakat hidup rukun dan damai. Setiap warga, kelompok, atau lembaga menjadi agen pembawa kedamaian dan kesadaran bagi sesama untuk menerapkan nilai moral, agama, dan kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari.

V.2.1. JANJI-JANJI POLITIK

Visi dan misi Kota Bogor 2015 - 2019 sebagaimana tersebut di atas bersumber dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada saat masa kampanye. Mengiringi visi dan misi tersebut, disampaikan pula janji-janji politik yang rumusannya lebih teknis operasional dibanding visi-misi dan tentunya menjadi bagian dari target yang harus dipenuhi selama lima tahun ke depan.

Janji-janji politik tersebut dikelompokkan berdasarkan misi yang menaungi, disajikan sebagai berikut:

MISI	JANJI-JANJI POLITIK
I. MENJADIKAN BOGOR KOTA YANG CERDAS DAN BERWAWASAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Peningkatan SDM pengajar PAUD dan standarisasi
	Pemerataan ketersediaan SD, SMP, SMA dan SMKN di Sekolah gratis 12 tahun
	Beasiswa bagi guru dan pelajar pada jenjang dasar dan Menyiapkan buku paket pelajaran
	Meningkatkan kegiatan penelitian siswa di sekolah-
	Meningkatkan penggunaan teknologi dalam proses
	Menyiapkan bus pelajar
	II. MENJADIKAN BOGOR KOTA YANG SEHAT DAN MAKMUR
Kunjungan dokter pada keluarga Pra-Sejahtera	
Peningkatan pelayanan Posyandu	
Pelayanan kesehatan gratis	
Pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta	
Meningkatkan sarana prasarana olahraga	
III. MENJADIKAN BOGOR KOTA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Pengendalian perizinan dan mewujudkan pengendalian pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berbudaya
	Peningkatan kawasan pejalan kaki (pedestrian)
	Penataan dan penyediaan lahan parkir
IV. MENJADIKAN BOGOR SEBAGAI KOTA JASA YANG BERORIENTASI PADA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF	Menyiapkan ruang-ruang yang dapat memfasilitasi tumbuh berkembangnya kreatifitas dan jejaring ekonomi kreatif di setiap kelurahan
	Meningkatkan kreatifitas melalui penyelenggaraan <i>event-event</i> kreatif
	Menyiapkan bus wisata
	Memberdayakan sarana publik dan museum
	Menyiapkan kawasan relokasi PKL
V. MEWUJUDKAN PEMERINTAH YANG BERSIH DAN TRANSPARAN	Percepatan infrastruktur daerah
	Transparansi APBD melalui penyediaan akses informasinya di setiap kelurahan
	Kerja sama pengawasan dengan KPK
	Peningkatan pelayanan publik hingga tingkat kelurahan
	Peningkatan BOP bagi Kader Posyadu, RT, RW, LPM, dan Linmas
VI. MENGOKOHKAN PERAN MORAL AGAMA DAN KEMANUSIAAN UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI	Pembangunan kantor KPUD Kota Bogor
	Membangun karakter (<i>character building</i>) dan <i>akhlaqul karimah</i> melalui ekstra kurikuler
	Penambahan kesejahteraan bagi guru mengaji

V.3.TUJUAN DAN SASARAN

Penjabaran seluruh misi ke dalam masing-masing tujuan dan sasaran, selanjutnya ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 1 Tabel Penjabaran Misi, Tujuan dan Sasaran

MISI	TUJUAN	SASARAN
I.MENJADIKAN BOGOR KOTA YANG CERDAS DAN BERWAWASAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	MENINGKATKAN IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT	Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem informasi dan komunikasi
	MENCIPTAKAN LINGKUNGAN BELAJAR DENGAN MODAL SOSIAL YANG KUAT	Berkembangnya minat baca dan belajar di masyarakat Berkembangnya ruang kreasi, inovasi, dan berbagi untuk masyarakat
	MENDORONG PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN PUBLIK YANG CERDAS	Meningkatnya partisipasi masyarakat yang berkualitas dalam perencanaan pembangunan Meningkatnya partisipasi masyarakat yang berkualitas dalam pelaksanaan pembangunan Meningkatnya pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dalam proses pembangunan Tersedianya <i>baseline</i> data yang kuat, akurat dan mutakhir
	MENGEMBANGKAN KUALITAS DAN PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN DALAM UPAYA MENCETAK GENERASI MUDA YANG TANGGUH DAN BERKOMPETEN	Berkembangnya kegiatan pendidikan yang mendukung kompetensi dan karakter Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan formal, non formal dan informal Terciptanya generasi muda yang berprestasi
	II.MENJADIKAN BOGOR KOTA YANG SEHAT DAN MAKMUR	MENINGKATKAN KESADARAN DAN KEMAMPUAN MASYARAKAT UNTUK HIDUP DAN BERPERILAKU SEHAT
MENINGKATKAN KUALITAS PERMUKIMAN		Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pengelolaan air limbah yang layak Berkurangnya kawasan permukiman kumuh Tersedianya pelayanan air minum

MISI	TUJUAN	SASARAN
		yang memadai
	MEREVITALISASI RUANG PERKOTAAN YANG LEBIH SEHAT DAN NYAMAN UNTUK SEMUA ELEMEN MASYARAKAT (TERMASUK ANAK, PEREMPUAN, LANSIA, DAN DIFABEL)	Meningkatnya jumlah dan kualitas taman-taman kota sebagai ruang publik yang sehat, asri, aman, dan ramah pengguna Terpenuhinya kebutuhan kelompok berkebutuhan khusus di ruang publik
	MENINGKATKAN KETAHANAN KELOMPOK PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	Tertangani dan terfasilitasinya kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan kualitas hidup warga miskin Terwujudnya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan
	MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP PENGHIDUPAN YANG LAYAK	Meningkatnya kegiatan perekonomian dan aksesibilitas masyarakat terhadap lapangan pekerjaan yang produktif Meningkatnya jiwa kewirausahaan dan iklim yang kondusif untuk berkreasi dan berusaha di masyarakat Berkembangnya agribisnis perkotaan Terjaminnya kualitas dan kebutuhan pangan masyarakat
III. MENJADIKAN BOGOR KOTA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	MENINGKATKAN KUALITAS PENATAAN RUANG	Tersusunnya kebijakan penataan ruang yang berwawasan lingkungan Meningkatnya implementasi rencana tata ruang dan kendali terhadap pemanfaatan ruang Meningkatnya luasan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Tertatanya Pedagang Kaki Lima (PKL) serta pasar tradisional
	MENINGKATKAN KUALITAS DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN KOTA	Menurunnya tingkat pencemaran akibat aktivitas perkotaan Meningkatnya upaya pemulihan dan konservasi sumber daya alam Terwujudnya penataan dan pelestarian Daerah Aliran Sungai (DAS) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan
	MENGEMBANGKAN TRANSPORTASI KOTA YANG MENGUTAMAKAN ANGKUTAN UMUM MASSAL, PEJALAN	Terwujudnya sistem angkutan umum kota yang nyaman dan ramah lingkungan Meningkatnya kualitas sarana prasarana pejalan kaki dan pengguna sepeda

MISI	TUJUAN	SASARAN	
	KAKI DAN PESEPEDA MENDORONG PEMBANGUNAN KOTA YANG TANGGAP RISIKO BENCANA DAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM	Berkurangnya kemacetan Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Meningkatnya tanggap darurat saat bencana Meningkatnya pemulihan pasca bencana Meningkatnya pengelolaan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim	
	MENERAPKAN PENGELOLAAN SAMPAH YANG TERPADU DAN BERKELANJUTAN	Meningkatnya pelayanan persampahan Meningkatnya Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>) Internalisasi pengelolaan sampah sebagai bagian dari budaya hidup masyarakat	
	IV. MENJADIKAN BOGOR SEBAGAI KOTA JASA YANG BERORIENTASI PADA KEPARIWISATAN DAN EKONOMI KREATIF	MENJADIKAN WARISAN BUDAYA SEBAGAI ASET KOTA	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan warisan budaya Terpeliharanya kelestarian warisan budaya Tersedianya kebijakan/peraturan daerah yang mengatur warisan budaya
		MENGUATKAN IDENTITAS DAN CITRA KOTA BOGOR (<i>CITY BRANDING</i>)	Meningkatnya fungsi kawasan penyangga kebun raya secara fisik, visual dan ekologis Diterapkannya konsep perancangan kota (<i>urban design</i>), termasuk <i>street furniture</i> , yang meningkatkan citra kota Dijadikannya Bogor sebagai Pusat Pengetahuan dan Penelitian bidang pertanian dan botani Tumbuh berkembangnya aktivitas MICE (<i>Meeting, Incentives, Conferences/Convention, Exhibitions/Events</i>)
	MENGEMBANGKAN PARIWISATA KOTA BOGOR YANG BERKARAKTER	Berkembangnya destinasi wisata Meningkatnya peran kelembagaan pariwisata Berkembangnya Industri pariwisata	
	MENGEMBANGKAN IKLIM EKONOMI KREATIF	Terciptanya iklim industri kreatif Terjalinnnya kemitraan antar pelaku industri kreatif Terciptanya SDM yang kreatif dan wirausahawan kreatif	
V. MEWUJUDKAN PEMERINTAH YANG BERSIH DAN TRANSPARAN	MEMPERCEPAT PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Meningkatnya pemenuhan hak	

MISI	TUJUAN	SASARAN
		masyarakat akan informasi publik
	MENINGKATKAN KOORDINASI DAN KERJA SAMA ANTAR DAERAH DAN INTERNASIONAL	Terbangunnya kesepahaman bersama antar daerah mengenai isu-isu lintas wilayah dalam bidang ekonomi dan pengembangan wilayah, pelayanan publik, serta lingkungan hidup
		Menguatnya kelembagaan kerja sama antar daerah dan internasional
	MENINGKATKAN SINERGITAS ANTARA PEMERINTAH KOTA DENGAN ELEMEN MASYARAKAT	Meningkatnya event-event yang memunculkan ikatan dan kecintaan antara warga dan kotanya
		Terfasilitasinya organisasi, komunitas dan sejenisnya yang memiliki fokus terhadap pembangunan kota
		Optimalisasi keberadaan dan peran serta berbagai perguruan tinggi, perusahaan swasta, BUMN, BUMD dan lembaga swadaya masyarakat setempat dalam pembangunan kota Bogor
		Tersedianya ruang bagi elemen warga untuk turut memberi pertimbangan dalam segala pengambilan kebijakan mengenai pembangunan kota
	MENGUATKAN PERUNDANGAN DAERAH	Tersusunnya perundangan daerah yang sinkron dan sinergis
		Harmonisnya perundangan daerah
		Tegaknya perundangan daerah
VI.MENGOLOH KAN PERAN MORAL AGAMA DAN KEMANUSIAAN UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI	MENINGKATKAN INTEGRASI NILAI – NILAI AGAMA DAN KEMANUSIAAN DALAM IMPLEMENTASI KEHIDUPAN	Digunakannya nilai-nilai agama dan kemanusiaan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari
	MENDORONG HARMONISASI DAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA	Terselenggaranya aktivitas lintas agama
		Terdeteksi dan tertanganinya potensi permasalahan antar umat beragama
	MENDORONG PERAN LEMBAGA-LEMBAGA AGAMA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN UMAT	Meningkatnya peran lembaga agama dan organisasi kemasyarakatan dalam aktivitas pembangunan masyarakat

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas horison waktunya dengan serangkaian arah kebijakan.

VI.1. STRATEGI

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut.

Dalam mencapai pembangunan Kota Bogor lima tahun ke depan, maka terdapat strategi-strategi dari setiap sasaran yang disampaikan sebagai berikut:

MISI 1.

MENJADIKAN BOGOR KOTA YANG CERDAS DAN BERWAWASAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

TUJUAN I. MENINGKATKAN IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT

NO	SASARAN	STRATEGI
1	Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mempermudah pertukaran data dan informasi serta proses komunikasi antar unit pemerintah. Untuk itu, dibutuhkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang terintegrasi antar OPD.
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Meningkatkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam memberikan pelayanan publik sehingga pelayanan dapat diberikan secara <i>online</i> yang cepat, mudah dan transparan. OPD-OPD yang ada didorong mengembangkan pelayanan semacam ini melalui pembuatan dan operasionalisasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang terintegrasi.
3	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem informasi dan komunikasi	Meningkatkan akses terhadap internet dalam fungsi edukasi dan produktif di ruang publik, instansi pemerintah, dan lokasi strategis lainnya. Hal ini harus dibarengi dengan upaya <i>e-literacy</i> (melek internet) bagi masyarakat luas.

TUJUAN II. MENCIPTAKAN LINGKUNGAN BELAJAR DENGAN MODAL SOSIAL YANG KUAT

NO	SASARAN	STRATEGI
1	Berkembangnya minat baca dan belajar di masyarakat	Menyusun dan mengembangkan beragam fasilitas baca dan perpustakaan serta lokasi khusus pasar buku murah untuk mempermudah akses masyarakat terhadap bahan bacaan.

NO	SASARAN	STRATEGI
2	Mengembangkan ruang kreasi, inovasi, dan berbagi untuk masyarakat	Menyediakan ruang dan aktivitas yang dapat menumbuhkan aktivitas kreatif dan inovatif.

TUJUAN III. MENDORONG PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN PUBLIK YANG CERDAS

NO	SASARAN	STRATEGI
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat yang berkualitas dalam perencanaan pembangunan	Mengembangkan sistem perencanaan dan <i>monev</i> pembangunan yang meningkatkan kepedulian dan partisipasi publik terutama dalam proses pembangunan formal strategis. Perhatian perlu diberikan pada fenomena “kelelahan berpartisipasi” (<i>participation fatigue</i>), dimana masyarakat jenuh untuk berpartisipasi akibat implementasi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Fenomena ini dapat diminimalkan melalui sedikitnya dua cara yaitu (i) kejelasan anggaran yang disediakan, dan (ii) integrasi antara hasil Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, dan Kota.
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat yang berkualitas dalam pelaksanaan pembangunan	
3	Meningkatnya pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dalam proses pembangunan	
4	Tersedianya <i>baseline</i> data yang kuat, akurat dan mutakhir	Membangun sistem basis data antar instansi secara akurat dan terintegrasi yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan kebijakan publik yang andal. <i>Baseline</i> data ini harus diperankan sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan (<i>decision supporting system</i>) sehingga harus dapat menyajikan berbagai indikator pembangunan seperti pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme untuk mengoptimalkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagai bagian dari <i>baseline</i> data dan <i>decision supporting system</i> .

TUJUAN IV. MENGEMBANGKAN KUALITAS DAN PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN DALAM UPAYA MENCETAK GENERASI MUDA YANG TANGGUH DAN BERKOMPETEN

NO	SASARAN	STRATEGI
1	Berkembangnya kegiatan pendidikan yang mendukung kompetensi dan karakter	Mengembangkan pola pendidikan yang berlandaskan pada nilai dan karakter disamping muatan akademik dan keterampilan. Selain nilai dan karakter yang bersifat universal, nilai dan karakter lokal juga perlu diperkuat sebagai tercermin dalam budaya dan kearifan tradisional yang ada.
2	Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan formal, non formal dan informal	Memeratakan akses pendidikan dan memenuhi standar kualifikasi pendidik dan lembaga pendidikan sehingga mampu mendorong lingkungan pendidikan yang lebih berkualitas.

NO	SASARAN	STRATEGI
3	Terciptanya generasi muda yang berprestasi	Memberikan pembinaan dan insentif dalam peningkatan prestasi kualitas pemuda dalam beragam bidang.

MISI 2.

MENJADIKAN BOGOR KOTA YANG SEHAT DAN MAKMUR

TUJUAN 1. MENINGKATKAN KESADARAN DAN KEMAMPUAN MASYARAKAT UNTUK HIDUP DAN BERPERILAKU SEHAT

NO	SASARAN	STRATEGI
1	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan	Mengembangkan program untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap fasilitas kesehatan. Berbagai program ini haruslah inheren dengan program nasional khususnya BPJS.
2	Menurunnya kasus penyakit menular	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui perbaikan kualitas kesehatan keluarga dan penurunan penyakit menular.
3	Meningkatnya kualitas kesehatan individu dan keluarga	Meningkatkan dan memperbaiki kualitas kesehatan individu dan keluarga dengan pengembangan program-program KB, dan program-program yang mengarah pada perbaikan kesehatan kelompok perempuan, anak, remaja, dan lansia.
4	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai perilaku bersih dan sehat bagi diri sendiri dan lingkungannya	Mengembangkan program yang secara kontinyu memberikan perubahan kesadaran dan perilaku kesehatan masyarakat.

TUJUAN 2. MENINGKATKAN KUALITAS PERMUKIMAN

NO	SASARAN	STRATEGI
1	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pengelolaan air limbah yang layak	Menciptakan standar dan mengembangkan kualitas permukiman yang sehat melalui perbaikan kualitas sanitasi, <i>redesign</i> permukiman kumuh, dan akses terhadap air minum yang layak.
2	Berkurangnya kawasan permukiman kumuh	
3	Tersedianya pelayanan air minum yang memadai	

TUJUAN 3. MEREVITALISASI RUANG PERKOTAAN YANG LEBIH SEHAT DAN NYAMAN UNTUK SEMUA ELEMEN MASYARAKAT (TERMASUK ANAK, PEREMPUAN, LANSIA, DAN DIFABEL)

NO	SASARAN	STRATEGI
1	Meningkatnya jumlah dan kualitas taman-taman kota sebagai ruang publik yang sehat, asri, aman, dan ramah pengguna	Merevitalisasi taman-taman kota dengan peremajaan dan pemeliharaan tanaman, dan pengadaan fasilitas yang ramah anak, lansia, dan difabel. Selain itu, juga diupayakan penambahan taman-taman baru sehingga taman sebagai ruang publik dapat diakses

NO	SASARAN	STRATEGI
2	Terpenuhinya kebutuhan kelompok berkebutuhan khusus di ruang publik	secara lebih luas oleh masyarakat. Untuk itu pembangunan taman akan lebih mengutamakan pada perencanaan berbasis masyarakat. Hal ini dilakukan selain untuk menguatkan karakter Kota Bogor, juga dalam rangka pengayaan dan pemeliharaan jangka panjang taman-taman kota.

TUJUAN 4. MENINGKATKAN KETAHANAN KELOMPOK PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

NO	SASARAN	STRATEGI
1	Tertangani dan terfasilitasinya kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Menertibkan dan membina PMKS sehingga menjadi warga yang lebih produktif dan mandiri melalui beragam lembaga sosial yang ada serta program-program jangka pendek yang menekankan pada pembentukan mental hidup.
2	Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan kualitas hidup warga miskin	Melakukan pembinaan terhadap kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga menjadi warga yang lebih produktif dan mandiri melalui beragam lembaga sosial yang ada serta program-program jangka pendek yang menekankan pada peningkatan taraf hidup warga miskin dan kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
3	Terwujudnya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan	Menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak melalui pembinaan, pengembangan sarana pengaduan serta penindakan yang tegas terhadap pelaku kekerasan.

TUJUAN 5. MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS DAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP PENGHIDUPAN YANG LAYAK

NO	SASARAN	STRATEGI
1	Meningkatnya kegiatan perekonomian dan aksesibilitas masyarakat terhadap lapangan pekerjaan yang produktif	Mengembangkan sistem ketenagakerjaan terpadu melalui pengembangan keterampilan dan mental wirausaha serta sistem informasi kerja yang <i>up-to-date</i> dan iklim bekerja.
2	Meningkatnya jiwa kewirausahaan dan iklim yang kondusif untuk berkreasi dan berusaha di masyarakat	
3	Berkembangnya Agribisnis perkotaan	Mengembangkan pertanian dengan memanfaatkan lahan pertanian yang produktif untuk komoditas tanaman hias, ikan hias, dan pengembangan produk olahan.
4	Terjaminnya kualitas dan kebutuhan pangan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan bahan pangan.

MISI 3.**MENJADIKAN BOGOR KOTA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN****TUJUAN 1. MENINGKATKAN KUALITAS PENATAAN RUANG**

NO	SASARAN	STRATEGI
1	Tersusunnya kebijakan penataan ruang yang berwawasan lingkungan	Mengimplementasikan penataan ruang secara tegas dengan mengembalikan kenyamanan Kota Bogor melalui peran serta masyarakat dalam pengendalian.
2	Meningkatnya implementasi rencana tata ruang dan kendali terhadap pemanfaatan ruang	
3	Meningkatnya luasan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota	Membebaskan sempadan sungai atau sumber air lainnya dan memanfaatkan aset yang belum dioptimalkan serta mengoptimalkan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) eksisting.
4	Tertatanya Pedagang Kaki Lima (PKL) serta pasar tradisional	Menciptakan ruang ekonomi yang memfasilitasi ekonomi tradisional dan pentaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

TUJUAN 2. MENINGKATKAN KUALITAS DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN KOTA

	SASARAN	STRATEGI
1	Menurunnya tingkat pencemaran akibat aktivitas perkotaan	Mengimplementasikan regulasi standar kualitas pencemaran yang diiringi dengan perubahan sistem kota yang lebih ramah lingkungan.
2	Meningkatnya upaya pemulihan dan konservasi sumber daya alam	Memulihkan dan konservasi sumber daya alam dengan prioritas pada sumber air baku.
3	Terwujudnya penataan dan pelestarian Daerah Aliran Sungai (DAS)	Mewujudkan kota <i>riverfront</i> melalui sterilasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dari aktivitas budidaya yang mengganggu. Memperlakukan dua sungai utama yang melalui Kota Bogor yaitu Ciliwung dan Cisadane sebagai <i>ecoregion</i> sehingga pengelolaannya harus dilaksanakan secara lintas daerah.
4	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan	Mewujudkan kota yang lebih ramah lingkungan dengan menekankan pada perubahan kesadaran dan perilaku masyarakat melalui pendidikan formal dan pembinaan secara kontinyu.

TUJUAN 3. MENGEMBANGKAN TRANSPORTASI KOTA YANG MENGUTAMAKAN ANGKUTAN UMUM MASSAL, PEJALAN KAKI DAN PESEPEDA

NO	SASARAN	STRATEGI
1	Terwujudnya sistem angkutan umum kota yang nyaman dan ramah lingkungan	Mewujudkan sistem pergerakan yang efisien dan ramah lingkungan yang berdasarkan pada sistem angkutan massal yang memadai.
2	Meningkatnya kualitas sarana prasarana pejalan kaki dan pengguna sepeda	Peningkatan kenyamanan dalam berjalan kaki yang ramah bagi setiap kalangan. Model sarana pedestrian ideal yang dikembangkan bersama Program <i>Sustainable Urban Transport Improvement Project</i> (SUTIP GIZ) akan menjadi

NO	SASARAN	STRATEGI
		percontohan untuk dikembangkan selanjutnya. Pengembangan jalur pesepeda akan dimulai pada koridor jalan utama yang telah ada, kemudian dalam proses evaluasi akan dikembangkan jalur lain yang memadai.
3	Berkurangnya kemacetan	Menargetkan pengurangan jumlah kendaraan pribadi dengan meningkatkan pelayanan angkutan umum yang memadai disertai dengan evaluasi dan pengembangan kawasan parkir (<i>park on ride</i>). Pengadaan gedung parkir pada pusat kota akan memanfaatkan akuisisi lahan dan <i>land banking</i> . Upaya ini diiringi dengan peningkatan penggunaan <i>non-motorized transport</i> .

TUJUAN 4. MENDORONG PEMBANGUNAN KOTA YANG TANGGAPRISIKO BENCANA DAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM

NO	SASARAN	STRATEGI
1	Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Mewujudkan masyarakat dan pemerintah yang siap-tanggap dalam menghadapi bencana di beberapa daerah prioritas. Selain itu, menjadikan Kota Bogor sebagai bagian dari komunitas internasional yang secara bersama-sama mengurangi pemanasan global diantaranya melalui penghijauan kota, <i>green building</i> , dan partisipasinya dalam berbagai kampanye seperti <i>Earth Hour</i> .
2	Meningkatnya tanggap darurat saat bencana	
3	Meningkatnya pemulihan pasca bencana	
4	Meningkatnya pengelolaan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim	

TUJUAN 5. MENERAPKAN PENGELOLAAN SAMPAH YANG TERPADU DAN BERKELANJUTAN

NO	SASARAN	STRATEGI
1	Meningkatnya pelayanan persampahan	Meningkatkan pelayanan sampah melalui kerjasama antardaerah untuk Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang menerapkan sistem <i>sanitary landfill</i> serta pelayanan pengangkutan sampah.
2	Meningkatnya Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>)	Mereduksi jumlah sampah yang diangkut melalui upaya 3R (<i>Reuse Reduce Recycle</i>) yang didasarkan pada penerapan teknologi dan perubahan kesadaran dan perilaku masyarakat khususnya di tingkat rumah tangga, RT, RW dan kelurahan. Maka dalam penenerapan budaya di masyarakat, peran dan kewenangan kecamatan akan lebih ditingkatkan. Pengembangan bank sampah dapat dikerjasamakan dengan pihak pemulung dengan memulai pada wilayah percontohan yang ditentukan.
3	Internalisasi pengelolaan sampah sebagai bagian dari budaya hidup masyarakat	

MISI 4.**MENJADIKAN BOGOR SEBAGAI KOTA JASA YANG BERORIENTASI PADA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF****TUJUAN 1. MENJADIKAN WARISAN BUDAYA SEBAGAI ASET KOTA**

NO	SASARAN	STRATEGI
1	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan warisan budaya	Mendorong keaktifan beragam organisasi dan lembaga dalam kegiatan pelestarian budaya baik yang bendawi maupun non bendawi.
2	Terpeliharanya kelestarian warisan budaya	Memperkuat upaya pelestarian warisan budayamelalui pembuatan regulasi,
3	Tersedianya kebijakan/peraturan daerah yang mengatur warisan budaya	kemitraan antarpihak, dan sarana prasarana pendukung khususnya di kawasan cagar budaya.

TUJUAN 2. MENGUATKAN IDENTITAS DAN CITRA KOTA BOGOR (CITY BRANDING)

NO	SASARAN	STRATEGI
1	Meningkatnya fungsi kawasan penyangga kebun raya secara fisik, visual dan ekologis	Merencanakan kawasan penyangga Kebun Raya Bogor (KRB) sehingga pengembangan kawasan penyangga dapat kompatibel dengan keberadaan KRB. Membangun regulasi yang kokoh sehingga pengembangan kawasan penyangga sesuai dengan tema <i>Garden Compatible Development</i>
2	Diterapkannya konsep perencanaan kota (<i>urban design</i>), termasuk <i>street furniture</i> , yang meningkatkan citra kota	Membangun beragam tapak di Kota Bogor melalui konsep dan rancangan kota yang jelas dan mendukung imaji kota yang berdasarkan pada panduan rancang kota dan <i>City Branding</i> .
3	Dijadikannya Bogor sebagai pusat pengetahuan dan penelitian bidang pertanian dan botani	Mengaktifkan kembali potensi penelitian dan peningkatan pengetahuan pertanian dan botani Kota Bogor melalui kerjasama dalam negeri dan luar negeri.
4	Tumbuh berkembangnya aktivitas MICE (<i>Meeting, Incentives, Conferences/ Convention, Exhibitions/ Events</i>)	Memfasilitasi berkembangnya aktivitas MICE dengan menerapkan regulasi yang tegas, membangun infrastruktur MICE berskala internasional, dan mendorong sertifikasi hotel dalam batas-batas yang dikendalikan sehingga tidak kontraproduktif terhadap sisi kenyamanan kota.

TUJUAN 3. MENGEMBANGKAN PARIWISATA KOTA BOGOR YANG BERKARAKTER

NO	SASARAN	STRATEGI
1	Berkembangnya destinasi wisata	Mengembangkan industri pariwisata yang terintegrasi melalui pengembangan paket, sarpras pariwisata (peta, petunjuk, kawasan oleh-oleh), promosi dan pemasaran.
2	Meningkatnya peran kelembagaan pariwisata	
3	Berkembangnya Industri pariwisata	

TUJUAN 4. MENGEMBANGKAN IKLIM EKONOMI KREATIF

NO	SASARAN	STRATEGI
1	Terciptanya iklim industri kreatif	<p>Menginisiasi penciptaan iklim yang kondusif bagi ekonomi kreatif melalui penciptaan ruang kreatif, pembinaan SDM kreatif, dan kemitraan sebagai sarana transfer pengetahuan dan praktikal melalui tahapan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Creative-waves</i>, yaitu menciptakan gelombang kreatifitas; 2) <i>Creative-network</i>, yaitu membangun jejaring sesama pelaku ekonomi kreatif; 3) <i>Creative-preneur</i>, yaitu membangun orang-orang kreatif sebagai wirausahawan. <p>Dibutuhkan model <i>triple-helix</i> dalam pengembangan ekonomi kreatif, ialah pelibatan tiga pihak utama meliputi pemerintah, pebisnis, dan kaum intelektual. Hanya saja, intervensi pemerintah perlu dilakukan secara hati-hati dan terukur mengingat kreatifitas justru bisa tenggelam oleh intervensi yang bersifat keproyekan.</p>
2	Terjalannya kemitraan antar pelaku industri kreatif	
3	Terciptanya SDM yang kreatif dan wirausahawan kreatif	

MISI 5.

MEWUJUDKAN PEMERINTAH YANG BERSIH DAN TRANSPARAN

TUJUAN 1. MEMPERCEPAT PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

NO	SASARAN	STRATEGI
1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	<p>Membangun pemerintahan yang berintegritas dengan perbaikan kinerja keuangan dan akuntabilitas melalui komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan standarisasi kompetensi jabatan.</p>
2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja	
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	<p>Memperkuat relasi pemerintah dan masyarakat melalui perbaikan kualitas pelayanan publik dan penyediaan informasi publik secara lebih mudah dan terbuka.</p>
4	Meningkatnya pemenuhan hak masyarakat akan informasi publik	

TUJUAN 2. MENINGKATKAN KOORDINASI DAN KERJA SAMA ANTAR DAERAH DAN INTERNASIONAL

NO	SASARAN	STRATEGI
1	Terbangunnya kesepahaman bersama antar daerah mengenai isu-isu lintas wilayah dalam bidang ekonomi dan pengembangan wilayah, pelayanan	<p>Memperkuat kerjasama antardaerah dalam pembangunan dalam bidang-bidang prioritas. Selain itu, kerja sama ini juga dilakukan dalam rangka menguatkan posisi Kota Bogor dalam konstelasi Jabodetabekpunjur.</p>

NO	SASARAN	STRATEGI
	publik, serta lingkungan hidup	
2	Menguatnya kelembagaan kerja sama antar daerah dan internasional	

TUJUAN 3. MENINGKATKAN SINERGITAS ANTARA PEMERINTAH KOTA DENGAN ELEMEN MASYARAKAT

NO	SASARAN	STRATEGI
1	Meningkatnya event-event yang memunculkan ikatan dan kecintaan antara warga dan kotanya	Memfasilitasi interaksi antara kota dengan masyarakat dan komunitas melalui beragam kegiatan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat didalamnya. Sebagai contoh diantaranya adalah Lomba Mulung di Ciliwung Antar Kelurahan yang dilakukan setiap Hari Jadi Kota Bogor.
2	Terfasilitasinya organisasi, komunitas dan sejenisnya yang memiliki fokus terhadap pembangunan kota	
3	Optimalisasi keberadaan dan peran serta berbagai perguruan tinggi, perusahaan swasta, BUMN, BUMD dan lembaga swadaya masyarakat setempat dalam pembangunan kota Bogor	Menggunakan kajian dan kepakaran IPTEK dan inovasi perguruan tinggi dan LSM kompeten dalam pengambilan kebijakan pembangunan.
4	Tersedianya ruang bagi elemen warga untuk turut memberi pertimbangan dalam segala pengambilan kebijakan mengenai pembangunan kota	Memfasilitasi terbentuknya Dewan Kota atau nama lain sebagai sarana peningkatan proses partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik strategis.

TUJUAN 4. MENGUATKAN PERUNDANGAN DAERAH

NO	SASARAN	STRATEGI
1	Tersusunnya perundangan daerah	Menyusun peraturan perundangan yang tidak tumpang tindih melalui harmonisasi perundangan daerah.
2	Harmonisnya	
3	Tegaknya perundangan daerah	Menegakkan peraturan perundangan daerah, terutama untuk menjaga ketertiban dan keamanan, kenyamanan, dan konsistensi tata ruang.

MISI 6. MENGOKOHKAN PERAN MORAL AGAMA DAN KEMANUSIAAN UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI

TUJUAN 1. MENINGKATKAN INTEGRASI NILAI-NILAI AGAMA DAN KEMANUSIAAN DALAM IMPLEMENTASI KEHIDUPAN

NO	SASARAN	STRATEGI
1	Digunakannya nilai-nilai agama dan kemanusiaan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari	Mengimplementasikan nilai agama dan kemanusiaan untuk meningkatkan kualitas nilai kehidupan. Hal ini terekspresikan dalam penurunan kriminalitas dan penyakit masyarakat.

TUJUAN 2. MENDORONG HARMONISASI DAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA

NO	SASARAN	STRATEGI
1	Terselenggaranya aktivitas lintas agama	Mewujudkan pemahaman antar umat beragama melalui dialog dan aktivitas rutin antar agama untuk menurunkan potensi konflik horizontal.
2	Terdeteksi dan tertanganinya potensi permasalahan antar umat beragama	Mengembangkan deteksi dini dalam potensi konflik dengan melakukan intermediasi dan pencerdasan publik melalui media.

TUJUAN 3. MENDORONG PERAN LEMBAGA-LEMBAGA AGAMA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN UMAT

NO	SASARAN	STRATEGI
1	Meningkatnya peran lembaga agama dan organisasi kemasyarakatan dalam aktivitas pembangunan masyarakat	Memfasilitasi lembaga keagamaan dan kemasyarakatan untuk berkontribusi dalam pembangunan khususnya pemberantasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi rakyat, diantaranya melalui pemanfaatan zakat atau bentuk-bentuk dana umat lainnya. Termasuk didalam lembaga keagamaan tersebut adalah lembaga penyelenggara pendidikan seperti Diniyah Takmiliah dengan kontribusinya pada pembangunan sumber daya manusia dan karakter.

VI.2. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan Kota Bogor dalam pentahapan strategi lima tahun ke depan ditunjukkan sebagai berikut:

MISI 1. MENJADIKAN BOGOR KOTA YANG CERDAS DAN BERWAWASAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-)				
	1	2	3	4	5
Terwujudnya sistem pemerintaha	Optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mempermudah pertukaran data dan informasi serta proses komunikasi antar unit				

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-)				
	1	2	3	4	5
n berbasis Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK)	pemerintah. Untuk itu, dibutuhkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang terintegrasi antar OPD.				
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK)	Meningkatkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam memberikan pelayanan publik sehingga pelayanan dapat diberikan secara <i>online</i> yang cepat, mudah dan transparan. OPD-OPD yang ada didorong mengembangkan pelayanan semacam ini melalui pembuatan dan operasionalisasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang terintegrasi.				
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem informasi dan komunikasi	-	-	Meningkatkan akses terhadap internet dalam fungsi edukasi dan produktif di ruang publik, instansi pemerintah, dan lokasi strategis lainnya. Hal ini harus dibarengi dengan upaya <i>e-literacy</i> (melek internet) bagi masyarakat luas.		
Berkembangnya minat baca dan belajar di masyarakat	Menyusun dan mengembangkan beragam fasilitas baca dan perpustakaan serta lokasi khusus pasar buku murah untuk mempermudah akses masyarakat terhadap bahan bacaan.		Kampanye gemar membaca, pengadaan event-event yang menumbuhkan iklim belajar sehingga Kota Bogor menjadi <i>smart city for smart people</i> .		
Mengembangkan ruang kreasi, inovasi, dan berbagi untuk masyarakat	-	Menyediakan ruang dan aktivitas yang dapat menumbuhkan aktivitas kreatif dan inovatif		-	
Meningkatnya partisipasi masyarakat yang berkualitas dalam perencanaan pembangunan	Mengembangkan sistem perencanaan dan <i>move</i> pembangunan yang meningkatkan kepedulian dan partisipasi publik terutama dalam proses pembangunan formal strategis. Perhatian perlu diberikan pada fenomena “kelelahan berpartisipasi” (<i>participation fatigue</i>), dimana masyarakat jenuh untuk berpartisipasi akibat implementasi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Fenomena ini dapat diminimalkan melalui sedikitnya dua cara yaitu (i) kejelasan anggaran yang disediakan, dan (ii) integrasi antara hasil Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, dan Kota.				
Meningkatnya partisipasi masyarakat yang berkualitas dalam					

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-)				
	1	2	3	4	5
pelaksanaan pembangunan					
Meningkatnya pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dalam proses pembangunan					
Tersedianya <i>baseline</i> data yang kuat, akurat dan mutakhir	Membangun sistem basis data antar instansi secara akurat dan terintegrasi. Sistem basis data ini harus dapat menyajikan berbagai indikator pembangunan seperti pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU).	Pemanfaatan basis data untuk menghasilkan kebijakan publik yang andal. <i>Baseline</i> data ini harus diperankan sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan (<i>decision supporting system</i>). -			
Berkembangnya kegiatan pendidikan yang mendukung kompetensi dan karakter	Mengembangkan pola pendidikan yang berlandaskan pada nilai dan karakter disamping muatan akademik dan keterampilan. Selain nilai dan karakter yang bersifat universal, nilai dan karakter lokal juga perlu diperkuat sebagaimana tercermin dalam budaya dan kearifan tradisional yang ada.	-		-	
		Membangun keteladanan bagi generasi muda melalui interaksi dan komunikasi yang intens, dan hal ini dimulai dan didorong oleh aparatur Pemda. Selain itu, disediakan wahana-wahana bagi generasi muda untuk menyalurkan dan mengembangkan aktivitas-aktivitas positifnya.			
Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan formal, non formal dan	Memeratakan akses pendidikan dan memenuhi standar kualifikasi pendidik, standar proses dan standar sarana dan prasarana sehingga mampu mendorong pendidikan formal yang lebih berkualitas.			-	

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-)				
	1	2	3	4	5
informal					
			Membangun masyarakat pembelajar (<i>learning society</i>), sehingga keluarga dan lingkungan sekitar memiliki kepedulian dan mampu mendorong pendidikan generasi muda.		
Terciptanya generasi muda yang berprestasi	Memberikan pembinaan dan insentif dalam peningkatan prestasi kualitas pemuda dalam beragam bidang.				

MISI 2. MENJADIKAN BOGOR KOTA YANG SEHAT DAN MAKMUR

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN				
	1	2	3	4	5
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan	-	Mengembangkan program untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap fasilitas kesehatan. Berbagai program ini haruslah inheren dengan program nasional khususnya BPJS.			
Menurunnya kasus penyakit menular	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui perbaikan kualitas kesehatan keluarga dan penurunan penyakit menular.				
Meningkatnya kualitas kesehatan individu dan keluarga	Meningkatkan dan memperbaiki kualitas kesehatan individu dan keluarga dengan pengembangan program-program KB, dan program-program yang mengarah pada perbaikan kesehatan kelompok perempuan, anak, remaja, dan lansia				
Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai perilaku bersih dan sehat bagi diri sendiri dan lingkungannya	Mengembangkan program yang secara kontinyu memberikan perubahan kesadaran dan perilaku kesehatan masyarakat.				
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap air limbah yang layak	Menciptakan standar dan mengembangkan kualitas permukiman yang sehat melalui perbaikan kualitas sanitasi, <i>redesign</i> permukiman kumuh, dan akses terhadap air minum yang layak.				
Berkurangnya kawasan pemukiman kumuh	-				
Tersedianya pelayanan air minum yang	-				

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN				
	1	2	3	4	5
memadai					
Meningkatnya jumlah dan kualitas taman-taman kota sebagai ruang publik yang sehat, asri, aman, dan ramah pengguna	-	-	Merevitalisasi taman-taman kota dengan peremajaan dan pemeliharaan tanaman, dan pengadaan fasilitas yang ramah anak, lansia, dan difabel. Selain itu, juga diupayakan penambahan taman-taman baru sehingga taman sebagai ruang publik dapat diakses secara lebih luas oleh masyarakat. Untuk itu pembangunan taman akan lebih mengutamakan pada perencanaan berbasis masyarakat. Hal ini dilakukan selain untuk menguatkan karakter Kota Bogor, juga dalam rangka pengayaan dan pemeliharaan jangka panjang taman-taman kota.		
Terpenuhinya kebutuhan kelompok berkebutuhan khusus di ruang publik					
Tertangani dan terfasilitasinya kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Menertibkan dan membina PMKS sehingga menjadi warga yang lebih produktif dan mandiri melalui beragam lembaga sosial yang ada serta program-program jangka pendek yang menekankan pada pembentukan mental hidup.				
Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan kualitas hidup warga miskin	Melakukan pembinaan terhadap kelompok PMKS sehingga menjadi warga yang lebih produktif dan mandiri melalui beragam lembaga sosial yang ada serta program-program jangka pendek yang menekankan pada peningkatan taraf hidup warga miskin dan kelompok PMKS.				
Terwujudnya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan	-	-	Menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak melalui pembinaan, pengembangan sarana pengaduan serta penindakan yang tegas terhadap pelaku kekerasan.		
Meningkatnya kegiatan perekonomian dan aksesibilitas masyarakat terhadap lapangan pekerjaan yang produktif	-	Mengembangkan sistem ketenagakerjaan terpadu melalui pengembangan keterampilan dan mental wirausaha serta sistem informasi kerja yang <i>up-to-date</i> dan iklim bekerja.			
Meningkatnya jiwa kewirausahaan dan iklim yang kondusif untuk berkreasi dan berusaha di masyarakat					

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN				
	1	2	3	4	5
Berkembangnya agribisnis perkotaan	-	Mengembangkan pertanian dengan memanfaatkan lahan pertanian yang produktif untuk komoditas tanaman hias, ikan hias, dan pengembangan produk olahan			
Terjaminnya kualitas dan kebutuhan pangan masyarakat		Meningkatkan ketersediaan bahan pangan			

MISI 3. MENJADIKAN BOGOR KOTA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN				
	1	2	3	4	5
Tersusunnya kebijakan penataan ruang yang berwawasan lingkungan	Mengimplementasikan penataan ruang secara tegas dengan mengembalikan kenyamanan Kota Bogor melalui peran serta masyarakat dalam pengendalian.				
Meningkatnya implementasi rencana tata ruang dan kendali terhadap pemanfaatan ruang					
Meningkatnya luasan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota	Membebaskan sempadan sungai atau sumber air lainnya dan memanfaatkan aset yang belum dioptimalkan serta mengoptimalkan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) eksisting.				
Tertatanya Pedagang Kaki Lima (PKL) serta pasar tradisional	Membangun pangkalan data PKL yang digunakan sebagai basis dalam melakukan identifikasi dan pembatasan jumlah pedagang, disertai dengan pendekatan humanis secara kelembagaan		Mengembangkan sistem monitoring, pengendalian, dan penindakan bagi PKL yang melanggar		
			Menciptakan ruang ekonomi yang memfasilitasi PKL melalui <i>zoning and timing regulations</i>		
	Revitalisasi pasar tradisional sebagai upaya relokasi PKL dan menarik minat pengunjung				
Menurunnya tingkat pencemaran akibat	Mengimplementasikan regulasi standar kualitas pencemaran yang diiringi dengan perubahan sistem kota yang lebih ramah lingkungan.				

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN				
	1	2	3	4	5
Meningkatnya upaya pemulihan dan konservasi sumber daya alam	Memulihkan dan konservasi sumber daya alam dengan prioritas pada sumber air baku.				
Terwujudnya penataan dan pelestarian Daerah Aliran Sungai (DAS)	-	-	Mewujudkan kota <i>riverfront</i> melalui sterilasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dari aktivitas budidaya yang mengganggu. Memperlakukan dua sungai utama yang melalui Kota Bogor yaitu Ciliwung dan Cisadane sebagai <i>ecoregion</i> sehingga pengelolaannya harus dilaksanakan secara lintas daerah.		
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan	Mewujudkan kota yang lebih ramah lingkungan dengan menekankan pada perubahan kesadaran dan perilaku masyarakat melalui pendidikan formal dan pembinaan secara kontinyu.				
Terwujudnya sistem angkutan	-	-	Mewujudkan sistem pergerakan yang efisien dan ramah lingkungan berdasarkan pada		
Meningkatnya kualitas sarana prasarana pejalan kaki dan pengguna sepeda	Peningkatan kenyamanan dalam berjalan kaki yang ramah bagi setiap kalangan. Model sarana pedestrian ideal yang dikembangkan bersama Program <i>Sustainable Urban Transport Improvement Project</i> (SUTIP GIZ) akan menjadi percontohan untuk dikembangkan selanjutnya. Pengembangan jalur pesepeda akan dimulai pada koridor jalan utama yang telah ada, kemudian dalam proses evaluasi akan dikembangkan jalur lain yang memadai.				
Berkurangnya kemacetan	Menargetkan pengurangan jumlah kendaraan pribadi dengan meningkatkan pelayanan angkutan umum yang memadai disertai dengan evaluasi dan pengembangan kawasan parkir (<i>park on ride</i>). Pengadaan gedung parkir pada pusat kota akan memanfaatkan akuisisi lahan dan <i>land banking</i> . Upaya ini diiringi dengan peningkatan penggunaan <i>non-motorized transport</i> .				

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN				
	1	2	3	4	5
Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Mewujudkan masyarakat dan pemerintah yang siap-tanggap dalam menghadapi bencana di beberapa daerah prioritas. Selain itu, menjadikan Kota Bogor sebagai bagian dari komunitas internasional yang secara bersama-sama mengurangi pemanasan global diantaranya melalui penghijauan kota, <i>green building</i> , dan partisipasinya dalam berbagai kampanye seperti <i>Earth Hour</i> .				
Meningkatnya tanggap darurat saat bencana					
Meningkatnya pemulihan pasca bencana					
Meningkatnya pengelolaan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim					
Meningkatnya pelayanan persampahan	Pelayanan pengangkutan sampah.				
		Meningkatkan pelayanan sampah melalui kerjasama antardaerah untuk Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) regional yang menerapkan sistem <i>sanitary landfill</i> serta pelayanan pengangkutan sampah.			
Meningkatnya Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (<i>Reduce Reuse Recycle</i>)	Mereduksi jumlah sampah yang diangkut melalui upaya 3R (<i>Reuse Reduce Recycle</i>) yang didasarkan pada penerapan teknologi dan perubahan kesadaran dan perilaku masyarakat khususnya di tingkat rumah tangga, RT, RW dan kelurahan. Maka dalam penenerapan budaya di masyarakat, peran dan kewenangan kecamatan akan lebih ditingkatkan.				
Internalisasi pengelolaan sampah sebagai bagian dari budaya hidup masyarakat	Pengembangan bank sampah dapat dikerjasamakan dengan pihak pemulung dengan memulai pada wilayah percontohan yang ditentukan.				

MISI 4. MENJADIKAN BOGOR SEBAGAI KOTA JASA YANG BERORIENTASI PADA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN				
	1	2	3	4	5
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan warisan budaya	Mendorong keaktifan beragam organisasi dan lembaga dalam kegiatan pelestarian budaya baik yang bendawi maupun non bendawi.				
Terpeliharanya kelestarian warisan budaya	Memperkuat upaya pelestarian warisan budaya melalui pembuatan regulasi, kemitraan antarpihak, dan sarana prasarana pendukung khususnya di kawasan cagar budaya.				
Tersedianya kebijakan/peraturan daerah yang mengatur warisan budaya					
Meningkatnya fungsi kawasan penyangga kebun raya secara fisik, visual dan ekologis	Merencanakan kawasan penyangga Kebun Raya Bogor (KRB) sehingga pengembangan kawasan penyangga dapat kompatibel dengan keberadaan KRB	Membangun regulasi yang kokoh sehingga pengembangan kawasan penyangga sesuai dengan tema <i>Garden Compatible Development</i>			
Diterapkannya konsep perancangan kota (<i>urban design</i>), termasuk <i>street furniture</i> , yang meningkatkan citra kota	Membangun beragam tapak di Kota Bogor melalui konsep dan rancangan kota yang jelas dan mendukung imaji kota yang berdasarkan pada panduan rancang kota dan <i>City Branding</i> .				
Dijadikannya Bogor sebagai pusat pengetahuan dan penelitian bidang pertanian dan botani	-	-	-	Mengaktifkan kembali potensi penelitian dan peningkatan pengetahuan pertanian dan botani Kota Bogor melalui kerjasama dalam negeri dan luar negeri.	
Tumbuh berkembangnya aktivitas MICE (<i>Meeting, Incentives, Conferences/Convention, Exhibitions/Events</i>)	Memfasilitasi berkembangnya aktivitas MICE dengan menerapkan regulasi yang tegas, membangun infrastruktur MICE berskala internasional, dan mendorong sertifikasi hotel dalam batas-batas yang dikendalikan sehingga tidak kontraproduktif terhadap sisi kenyamanan kota.				

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN				
	1	2	3	4	5
ents)					
Berkembangnya destinasi wisata	Mengembangkan industri pariwisata yang terintegrasi melalui pengembangan paket, sarpras pariwisata (peta, petunjuk, kawasan oleh-oleh), promosi dan pemasaran.				
Meningkatnya peran kelembagaan pariwisata					
Berkembangnya Industri pariwisata					
Terciptanya iklim industri kreatif	Menginisiasi penciptaan iklim yang kondusif bagi ekonomi kreatif melalui penciptaan ruang kreatif, pembinaan SDM kreatif, dan kemitraan sebagai sarana transfer pengetahuan dan praktikal melalui tahapan berikut: 1) <i>Creative-waves</i> , yaitu menciptakan gelombang kreatifitas; 2) <i>Creative-network</i> , yaitu membangun jejaring sesama pelaku ekonomi kreatif; 3) <i>Creative-preneur</i> , yaitu membangun orang-orang kreatif sebagai wirausahawan. Dibutuhkan model <i>triple-helix</i> dalam pengembangan ekonomi kreatif, ialah pelibatan tiga pihak utama meliputi pemerintah, pebisnis, dan kaum intelektual. Hanya saja, intervensi pemerintah perlu dilakukan secara hati-hati dan terukur mengingat kreatifitas justru bisa tenggelam oleh intervensi yang bersifat keproyekan.				
Terjalannya kemitraan antar pelaku industri kreatif					
Terciptanya SDM yang kreatif dan wirausahawan kreatif					

MISI 5.

MEWUJUDKAN PEMERINTAH YANG BERSIH DAN TRANSPARAN

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN				
	1	2	3	4	5
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Membangun pemerintahan yang berintegritas dengan perbaikan kinerja keuangan dan akuntabilitas melalui komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan standarisasi kompetensi jabatan.				
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi					
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Memperkuat relasi pemerintah dan masyarakat melalui perbaikan kualitas pelayanan publik dan penyediaan informasi publik secara lebih mudah dan terbuka.				
Meningkatnya pemenuhan hak masyarakat akan informasi publik					

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN				
	1	2	3	4	5
Terbangunnya kesepahaman bersama antar daerah mengenai isu-isu lintas wilayah dalam bidang ekonomi dan pengembangan wilayah, pelayanan publik, serta lingkungan hidup	Memperkuat kerjasama antardaerah dalam pembangunan dalam bidang-bidang prioritas. Selain itu, kerja sama ini juga dilakukan dalam rangka menguatkan posisi Kota Bogor dalam konstelasi Jabodetabekpunjur.				
Menguatnya kelembagaan kerja sama antar daerah dan internasional					
Meningkatnya event-event yang memunculkan ikatan dan kecintaan antara warga dan kotanya	Memfasilitasi interaksi antara kota dengan masyarakat dan komunitas melalui beragam kegiatan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat didalamnya. Sebagai contoh diantaranya adalah Lomba Mulung di Ciliwung Antar Kelurahan yang dilakukan setiap Hari Jadi Kota Bogor.				
Terfasilitasinya organisasi, komunitas dan sejenisnya yang memiliki fokus terhadap pembangunan kota					
Optimalisasi keberadaan dan peran serta berbagai perguruan tinggi, perusahaan swasta, BUMN, BUMD dan lembaga swadaya masyarakat setempat dalam pembangunan kota Bogor	Menggunakan kajian dan kepakaran IPTEK dan inovasi perguruan tinggi dan LSM kompeten dalam pengambilan kebijakan pembangunan.				
Tersedianya ruang bagi elemen warga untuk turut memberi pertimbangan dalam segala pengambilan kebijakan mengenai	Memfasilitasi terbentuknya Dewan Kota atau nama lain sebagai sarana peningkatan proses partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik strategis.				

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN				
	1	2	3	4	5
pembangunan kota					
Tersusunnya perundangan daerah yang sinkron dan sinergis	Menyusun peraturan perundangan yang tidak tumpang tindih melalui harmonisasi perundangan daerah.				
Harmonisnya perundangan daerah					
Tegaknya perundangan daerah	Menegakkan peraturan perundangan daerah, terutama untuk menjaga ketertiban dan keamanan, kenyamanan, dan konsistensi tata ruang.				

MISI 6. MENGOKOHKAN PERAN MORAL AGAMA DAN KEMANUSIAAN UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN				
	1	2	3	4	5
Digunakannya nilai-nilai agama dan kemanusiaan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari	Mengimplementasikan nilai agama dan kemanusiaan untuk meningkatkan kualitas nilai kehidupan. Hal ini terekspresikan dalam penurunan dan penyakit masyarakat.				
Terselenggara nya aktivitas lintas agama	Mewujudkan pemahaman antar umat beragama melalui dialog dan aktivitas rutin antar agama untuk menurunkan potensi konflik horizontal.				
Terdeteksi dan tertanganinya potensi permasalahan antar umat beragama	Mengembangkan deteksi dini dalam potensi konflik dengan melakukan intermediasi dan pencerdasan publik melalui media.				
Meningkatnya peran lembaga agama dan organisasi kemasyarakatan dalam aktivitas pembangunan masyarakat	Memfasilitasi lembaga keagamaan dan kemasyarakatan untuk berkontribusi dalam pembangunan khususnya pemberantasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi rakyat, diantaranya melalui pemanfaatan zakat atau bentuk-bentuk dana umat lainnya. Termasuk didalam lembaga keagamaan tersebut adalah lembaga penyelenggara pendidikan seperti Diniyah Takmiliah dengan kontribusinya pada pembangunan sumber daya manusia dan karakter.				

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan sasaran serta indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program prioritas pembangunan jangka menengah daerah. Adapun program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Terdapat enam bidang prioritas yang menjadi agenda terdepan pembangunan di Kota Bogor dalam periode 2015 – 2019. Keenam bidang prioritas tersebut adalah:

1. Penataan transportasi dan angkutan umum

Terdapat stigma negatif yang melekat untuk Kota Bogor selama ini yaitu “kota sejuta angkot“. Stigma ini melekat bersamaan dengan berbagai permasalahan transportasi yang muncul lainnya seperti kemacetan dan isu lainnya seperti transportasi ramah lingkungan. Bidang prioritas ini akan memuat program-program untuk mengatasi segala permasalahan tersebut sekaligus membangun fondasi bagi pengembangan transportasi kota yang berkelanjutan di masa mendatang. Strategi-strategi yang digunakan diantaranya adalah rasionalisasi jumlah dan ukuran angkutan kota, memaknai transportasi sebagai “pergerakan, bukan perpindahan“ orang melalui jalur sepeda dan pedestrian, serta minimalisasi pergerakan kendaraan melalui penyediaan fasilitas parkir yang tersentralisasi. Penataan transportasi dan angkutan umum akan diwujudkan dengan lima program yang akan dilaksanakan pada kurun waktu RPJMD 2015-2019, sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan Angkutan;
2. Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi;
3. Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
4. Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi;
5. Pengembangan Transportasi Ramah Lingkungan.

2. Penataan pelayanan persampahan dan kebersihan kota

Menjaga karakter Kota Bogor sebagai kota yang hijau dan penuh dengan taman menjadi tantangan tersendiri ketika menghadapi permasalahan soal sampah. Kompleksitas pengelolaan sampah selalu berkorelasi positif dengan jumlah penduduk, dan dengan jumlah penduduk yang sudah menembus angka satu juta jiwa (dan ini yang menjadi definisi kawasan metropolitan), maka kompleksitasnya membutuhkan penanganan yang tidak hanya sekadar *business as usual*. Bidang prioritas ini menysasar pengelolaan sampah secara holistik, mulai dari level bangkitan timbulan (penghasil sampah baik rumah tangga maupun non rumah tangga), pengangkutan, penampungan, pengolahan, hingga pembuangan. Pengelolaan ini dimulai dari level pertama, sekaligus menjadi tantangan terbesar, yaitu bagaimana timbulan sampah dikurangi sejak dari tingkat rumah tangga. Terwujudnya pelayanan persampahan dan kebersihan kota didukung oleh empat program yakni:

1. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
2. Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA;
3. Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R;
4. Pengembangan Lingkungan Sehat.

3. Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Sejarah krisis moneter di Indonesia menunjukkan bahwa sektor non formal seperti pedagang kaki lima adalah sektor dengan daya tahan yang tangguh terhadap segala macam guncangan ekonomi. Sektor ini dapat bertahan dan mampu menjadi penyelamat bagi ratusan ribu, mungkin jutaan, orang yang

menggelutinya sebagai profesi dan jauh lebih banyak lagi dari sisi keluarga yang dihidupi.

Di sisi lain, muncul banyak ekses negatif dari aktivitas Pedagang Kaki Lima yang tidak tertata seperti kemacetan, kekumuhan, terampasnya ruang publik, hingga premanisme. Oleh karenanya, penataan Pedagang Kaki Lima mutlak dilakukan sehingga sebagai aktivitas ekonomi, Pedagang Kaki Lima dapat dipertahankan namun dengan ekses negatif yang tetap diminimalkan.

Beberapa strategi yang diambil adalah penyediaan lokasi pengganti (melalui relokasi berdasar *zoning regulation* dan revitalisasi pasar), menguatkan kelembagaan Pedagang Kaki Lima sehingga anggotanya yang berprofesi sebagai Pedagang Kaki Lima itu jelas dan terdata, kemudian kampanye hingga strategi terakhir adalah penindakan, baik oleh Satpol PP maupun dukungan bantuan dari TNI/Polri. Dua program yang mendukung penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima antara lain:

1. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
2. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

4. Penataan ruang publik, pedestrian, taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, Bogor adalah kota dengan karakter hijau, sebuah kota di dalam taman. Penataan ruang publik, pedestrian, taman dan Ruang Terbuka Hijau lainnya menjadi penguat akan karakter tersebut, dan dapat menjadi pembeda dengan kota-kota lainnya. Ruang yang disasar khususnya adalah ruang sepanjang sungai (bantaran), sepanjang jalan, aset-aset (baik milik daerah maupun pihak lainnya) yang bisa dioptimalisasi menjadi Ruang Terbuka Hijau, dan ruang privat (pekarangan rumah). Selain itu, mekanisme insentif dan disinsentif juga perlu dikembangkan baik bagi individu maupun institusi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pelaksanaan prioritas ini. Program yang mendukung terwujudnya penataan ruang publik, pedestrian, taman dan RTH adalah:

1. Pembangunan Prasarana Pedestrian dan Pesepeda;
2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

5. Transformasi budaya dan reformasi birokrasi

Reformasi birokrasi telah menjadi agenda nasional untuk sekian lamanya namun tak kunjung juga memperlihatkan hasil nyatanya. Salah satu penyebab utama dari lambatnya reformasi birokrasi bergulir adalah bahwa segala permasalahan di dalam birokrasi yang hendak direformasi ini bukanlah sekadar permasalahan struktural semata, melainkan sudah menjadi permasalahan budaya/kultur.

Soal struktural akan lebih mudah untuk ditangani karena cukup diselesaikan di level kebijakan saja, akan tetapi soal kultural, dengan praktek dan kebiasaan yang telah menurun selama puluhan tahun lamanya, menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, bidang prioritas kelima dari Walikota Kota Bogor adalah “Transformasi budaya dan reformasi birokrasi”, karena birokrasi yang berubah tidak dapat dipisahkan dengan budaya yang bertransformasi.

Pada akhirnya, mengubah budaya ini harus diawali dengan menerapkan sistem yang baik dan mampu memaksa anggota sistemnya untuk berperilaku sebagaimana digariskan. Mengawali pembentukan kebiasaan baru adalah dengan pemaksaan, dan pemaksaan yang elegan (bukan arogan), adalah pemaksaan melalui sebuah sistem.

Pada tataran sistem, pemerintah pusat telah menyiapkan berbagai instrumen kebijakan dengan sedemikian lengkapnya mencakup *Grand Design*, *Road Map* dan berbagai pedoman bagi daerah untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Kota Bogor bertekad mendukung kebijakan nasional ini dengan tidak hanya melaksanakannya saja, tetapi juga melakukan percepatan.

Sebagai salah satu katalisator untuk percepatan ini, hendak digagas kerja sama antara Kota Bogor dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain itu, kebijakan-kebijakan lainnya yang akan diambil adalah penempatan jabatan secara terbuka dengan kualifikasi yang terstandarisasi, pengembangan mekanisme insentif sebagai motivasi ekstra bagi aparatur sipil negara, meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga memungkinkan kontrol sosial, serta penerapan *e-government* untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi, dan kepastian.

Sebagai bagian dari reformasi birokrasi ini, pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan senantiasa mengedepankan prinsip efisiensi dan realokasi anggaran. Efisiensi anggaran ialah penghematan anggaran pada pos-pos yang anggarannya masih memungkinkan untuk dikurangi tanpa mengorbankan *output* atau *outcomes*, dan dana hasil efisiensi itu kemudian direalokasikan untuk pos-pos lain yang dibutuhkan bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Program-programnya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
2. Penataan Tata Laksana;
3. Penataan dan Penguatan Organisasi;
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
5. Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan;
6. Pembinaan dan Penataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan;
7. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
8. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
9. Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa;
10. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
11. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah;
13. Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.

6. Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah global yang dihadapi setiap daerah di negeri ini. Penanggulangan kemiskinan pun merupakan agenda penting yang selalu menjadi perhatian Kepala Negara dan Kepala Daerah dengan targetnya untuk terus diturunkan. Lahirnya Perpres Nomor 1 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 mengamanatkan daerah untuk menyusun dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagai komitmen pemerintah untuk menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai dasar pembangunan. Kemiskinan merupakan permasalahan lintas sektor yang dalam penanggulangannya memerlukan kerja keras dari berbagai pihak, sehingga strategi penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan dengan menyelaraskan berbagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, dan para pihak yang peduli.

Data yang dirilis oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada 2011 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Kota Bogor pada tahun 2010 adalah sebesar 9,47%. Meskipun tingkat ini lebih baik daripada tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat yang sebesar 11,27%, tetap upaya penanggulangan kemiskinan harus terus dilakukan dan ditingkatkan demi harkat, martabat, dan kesejahteraan masyarakat.

Hal yang patut diperhatikan adalah bahwa permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi. Permasalahan ini tidak hanya menyangkut soal pendapatan rumah tangga atau pekerjaan saja, tetapi juga mengenai akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, pangan, air bersih, hingga sanitasi. Oleh karena itu, kemiskinan bukan lagi kondisi kekurangan kebutuhan dasar saja, melainkan merupakan kondisi tidak tercapainya

suatu standar kehidupan yang dianggap layak oleh masyarakat (SMERU, TNP2K, dan SEADI-USAID 2013).

Strategi penanggulangan kemiskinan kota Bogor difokuskan pada pemenuhan hak dasar dengan sasaran pada tiga kategori miskin (miskin, hampir miskin, dan rentan miskin). Terdapat 20 program pemerintah Kota Bogor dalam RPJMD yang mendukung pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ini yaitu:

1. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
2. Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;
4. Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata;
5. Perbaikan Gizi Masyarakat;
6. Peningkatan Ketahanan Pangan;
7. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak;
8. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
9. Pendidikan Menengah;
10. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
11. Peningkatan Kesempatan Kerja;
12. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
13. Lingkungan Sehat Perumahan;
14. Pengembangan Lingkungan Sehat;
15. Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya;
16. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
17. Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, psk, narkoba dan penyakit sosial lainnya);
18. Pembinaan Anak Terlantar;
19. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
20. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

Program-program pembangunan daerah yang ditampilkan pada tabel berikut ini adalah program-program prioritas yang i) berhubungan dengan pencapaian sasaran pembangunan daerah dan ii) berhubungan dengan enam bidang prioritas Kota Bogor 2015-2019 sebagaimana diuraikan sebelumnya. Penyajian kebijakan umum dan program pembangunan daerah terdapat pada tabel berikut:

MISI I.

MENJADIKAN BOGOR KOTA YANG CERDAS DAN BERWAWASAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Tujuan I. 1. Meningkatkan implementasi e-government

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Jumlah regulasi tentang implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (dokumen perwali)	1	16	Optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mempermudah pertukaran data dan informasi serta proses komunikasi antar unit pemerintah. Untuk itu, dibutuhkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang terintegrasi antar OPD.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa • Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 	Komunikasi dan Informatika	Kantor Komunikasi dan Informatika
	Jumlah unit kerja (OPD, UPTD, kelurahan, kecamatan, Puskesmas, BUMD) yang terkoneksi internet	127	212				
	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) terintegrasi antar OPD (%)	20	100				
	Pembangunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) OPD (unit)	23	48				
	Penyediaan <i>repository data warehouse</i> sebagai basis <i>decision support system</i>	Tidak tersedia	Tersedia				
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah OPD yang memberikan pelayanan publik berbasis internet	3	9	Meningkatkan penggunaan Teknologi Informasi dan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 	Komunikasi dan Informatika	Sekretariat Daerah (Bag. Humas)

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Pengadaan barang dan jasa berbasis internet (%)	-	100	Komunikasi (TIK) dalam memberikan pelayanan publik sehingga pelayanan dapat diberikan secara online yang cepat, mudah dan transparan. OPD-OPD yang ada didorong mengembangkan pelayanan semacam ini melalui pembuatan dan operasionalisasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang terintegrasi.	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Otonomi Daerah	Dinas Pendapatan Daerah
	Tingkat pelayanan promosi dan investasi berbasis internet (%)	50	100				
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem informasi dan	Jumlah lokasi ruang publik berfasilitas wifi (titik)	1	41	Meningkatkan akses terhadap internet dalam fungsi edukasi dan produktif di ruang publik,	Pendidikan Menengah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Rasio instansi pemerintah berfasilitas wifi publik (%)	60	100				

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
komunikasi	Jumlah sekolah yang memiliki akses terhadap layanan internet	367	523	instansi pemerintah, dan lokasi strategis lainnya. Hal ini harus dibarengi dengan upaya <i>e-literacy</i> (melek internet) bagi masyarakat luas.	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Komunikasi dan Informatika	Kantor Komunikasi dan Informatika - Sekretariat Daerah (Bag. Humas)
	Jumlah kunjungan web Pemerintah Kota Bogor sebagai media komunikasi dan <i>e-literacy</i> warga	16,8 juta Kunjungan	17 juta kunjungan		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		
	Persentase Radio Komunitas yang aktif (%)	60	80		Kerjasama Informasi dengan Media Massa		

Tujuan I. 2. Menciptakan lingkungan belajar dengan modal sosial yang kuat

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Berkembangnya minat baca dan belajar di masyarakat	Jumlah Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	18	34	Menyusun dan mengembangkan beragam fasilitas bacaan dan perpustakaan serta lokasi khusus pasar buku murah untuk mempermudah akses masyarakat terhadap bahan bacaan	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Pendidikan Non Formal 	Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Jumlah perpustakaan di satuan pendidikan	453	606		<ul style="list-style-type: none"> ▸ Pendidikan Anak Usia Dini 		
	- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	95	115		<ul style="list-style-type: none"> ▸ Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 		
	- Pendidikan Dasar	275	374		<ul style="list-style-type: none"> ▸ Pendidikan Menengah 		
	- Pendidikan Menengah	83	117		<ul style="list-style-type: none"> ▸ Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 	Perpustakaan	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
	Jumlah pengunjung perpustakaan umum daerah dan keliling	37.00 0	97.00 0		<ul style="list-style-type: none"> ▸ Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan 		
	Jumlah perpustakaan bertaraf internasional	0	1				
Berkembangnya ruang kreasi, inovasi, dan	Jumlah sarana kreativitas pemuda di ruang publik	0	3	Menyediakan ruang dan aktivitas yang	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan dan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
berbagi untuk masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana olahraga	379	384	dapat menumbuhkan aktivitas kreatif dan inovatif	(RTH)	Kepemudaan dan Olah Raga	Pertamanan
	Jumlah penyelenggaraan event kreatif budaya	4	7		<ul style="list-style-type: none"> ▸ Pengembangan dan Keresasian Kebijakan Pemuda ▸ Peningkatan Peran Serta Kepemudaan ▸ Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 		Kantor Pemuda dan Olah Raga
	Jumlah kegiatan kepemudaan	12	60		<ul style="list-style-type: none"> ▸ Pengelolaan Keragaman Budaya 		Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	0	272		<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kesempatan Kerja 	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi
	Masterplan kompleks olahraga (GOR)	0	1				Kantor Pemuda dan Olah Raga

Tujuan I. 3. Mendorong proses pengambilan keputusan publik yang cerdas

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ	
		AWAL	AKHIR					
Meningkatnya partisipasi masyarakat yang berkualitas dalam perencanaan pembangunan	Tingkat partisipasi Musrenbang Kelurahan (%)	50	70	Mengembangkan sistem perencanaan dan monev pembangunan yang meningkatkan kepedulian dan partisipasi publik terutama dalam proses pembangunan formal strategis. Perhatian perlu diberikan pada fenomena “kelelahan berpartisipasi” (participation fatigue), dimana masyarakat jenuh untuk berpartisipasi akibat implementasi yang tidak sesuai dengan yang	Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Tingkat partisipasi Musrenbang Kecamatan (%)	80	90				Kecamatan	
	Tingkat partisipasi Musrenbang Kota (%)	90	95				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
Meningkatnya partisipasi masyarakat yang berkualitas dalam pelaksanaan pembangunan	Keswadayaan warga dalam Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) (%)	NA	10		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	Kecamatan	
	Tingkat partisipasi dalam Pemilu Kota (%)	75	78					Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
	Tingkat partisipasi dalam Pemilu Provinsi (%)	66	70					Pendidikan Politik Masyarakat

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
	Tingkat partisipasi dalam Pemilu Nasional (%)	75	78	direncanakan. Fenomena ini dapat diminimalkan melalui			
Meningkatnya pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dalam proses pembangunan	Jumlah aduan yang diselesaikan (%)	NA	100	sedikitnya dua cara yaitu (i) kejelasan anggaran yang disediakan, dan (ii) integrasi antara hasil Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, dan Kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 	Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah (Bag. Humas)
Tersedianya baseline data yang kuat, akurat dan mutakhir	<i>Repository data warehouse</i>	Tidak tersedia	Tersedia	Membangun sistem basis data antarinstansi secara akurat dan terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 	Komunikasi dan Informatika	Kantor Komunikasi dan Informatika
	Tingkat integrasi database mencakup data capaian SPM, IKU/IKK, Indikator Kinerja Daerah RPJM, Indikator Sasaran RPJM (%)	Tidak tersedia	Tersedia	yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan kebijakan publik yang andal. Baseline data ini	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Data dan Informasi 	Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
	Jumlah OPD yang menerapkan sistem kearsipan berbasis TI	Tidak Tersedia	Tersedia	harus diperankan sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan (<i>decision supporting system</i>) sehingga harus dapat menyajikan berbagai indikator pembangunan seperti pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme untuk mengoptimalkan	<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Kearsipan Statistik 	<ul style="list-style-type: none"> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
				Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagai bagian dari <i>baseline data</i> dan <i>decision supporting system</i> .			

Tujuan I. 4. Mengembangkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan dalam upaya mencetak generasi muda yang tangguh dan berkompeten

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Berkembangnya kegiatan pendidikan yang mendukung kompetensi dan karakter	Persentase pendidik yang mendapatkan pelatihan pembelajaran tematik dan pendidikan karakter	31	41	Mengembangkan pola pendidikan yang berlandaskan pada nilai dan karakter disamping muatan akademik dan keterampilan. Selain nilai dan karakter yang bersifat universal, nilai dan karakter lokal juga perlu diperkuat sebagai tercermin dalam budaya dan kearifan tradisional yang ada.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 	Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Jumlah sekolah yang mendapat pelatihan pendidikan karakter	6	56		<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Anak Usia Dini • Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 		
	Persentase <i>Dinniyah Takmiliyah</i> yang dibantu penyelenggaraannya oleh pemerintah daerah	NA	100		<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Menengah • Pendidikan Non Formal 		
					<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan Lembaga Sosial 		
Meningkatnya pemerataan akses dan	Pendidik non formal dan informal dengan kulaifikasi S1 (%)	72,14	75,62	Memetarakan akses pendidikan dan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 	Pendidikan	Dinas Pendidikan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
kualitas pendidikan formal, non formal dan informal	Persentase satuan pendidikan formal yang terakreditasi A	52	175	menetapkan standar kualifikasi pendidik dan lembaga pendidikan sehingga mampu mendorong lingkungan pendidikan yang lebih berkualitas.	Kependidikan ‣ Pendidikan Non-Formal ‣ Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun ‣ Pendidikan Menengah ‣ Manajemen Pelayanan Pendidikan		
	Persentase satuan pendidikan non formal yang terakreditasi (%)	16	36				
	Persentase satuan pendidikan yang menerima bantuan sarana dan prasarana pendidikan (%)	20	45				
	Angka rata-rata lama sekolah	9,93	10,5				
	Angka Partisipasi Murni (APM)						
	- SD/MI/Paket A	97,18	100				
	- SMP/MTs/Paket B	89,60	92				
	- SMA/SMK/MA/Paket C	99,94	100				

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Terciptanya generasi muda yang berprestasi	Jumlah medali yang diraih olahragawan pelajar tingkat wilayah dan provinsi	52	175	Memberikan pembinaan dan insentif dalam peningkatan prestasi kualitas pemuda dalam beragam bidang.	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 	Kepemudaan dan Olah Raga	Kantor Pemuda dan Olah Raga
	Jumlah pemuda pelopor tingkat Jawa Barat dan Nasional	1	1		<ul style="list-style-type: none"> Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 	Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Jumlah siswa berprestasi tingkat propinsi	43	53		<ul style="list-style-type: none"> Manajemen Layanan Pendidikan 		
	Jumlah siswa berprestasi tingkat nasional	10	15		<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan Menengah 		
	Jumlah siswa berprestasi tingkat internasional	14	14				
	Jumlah tawuran antar pelajar	80	8				

MISI II.

MENJADIKAN BOGOR KOTA YANG SEHAT DAN MAKMUR

Tujuan II. 1. Meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk hidup dan berperilaku sehat

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan (%)	62	100	Mengembangkan program untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap fasilitas kesehatan. Berbagai program ini haruslah inheren dengan program nasional khususnya BPJS.	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Persentase masyarakat miskin terlayani di sarana kesehatan dasar dan rujukan (%)	100	100		<ul style="list-style-type: none"> Upaya Kesehatan Masyarakat 		
	<i>Bed occupancy rate</i> (BOR) di RSUD (%)	0	75		<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 		
	Rasio puskesmas /pustu per kelurahan	0,78	1,00		<ul style="list-style-type: none"> Standarisasi Pelayanan Kesehatan 		
	Sarana kesehatan pemerintah yang terakreditasi	12	25		<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah 		

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
					Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata		
	Persentase sarana kesehatan swasta yang memenuhi standar (%)	68	73				
	Jumlah puskesmas rawat inap	3	6				
	Persentase kunjungan dokter pada keluarga pra sejahtera (%)	0	85				
Menurunnya kasus penyakit menular	Prevalensi Tuberculosis BTA positif (per 100.000 penduduk)	110	105	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui perbaikan kualitas kesehatan keluarga dan penurunan penyakit menular.	• Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Angka kematian balita akibat diare	0,7	0,21		• Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita		
	Prevalensi HIV AIDS	0,2	<0,5		• Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS	Keluarga Berencana dan	Badan Pemberdayaan Masyarakat

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
					Termasuk HIV/AIDS	Keluarga Sejahtera	dan Keluarga Berencana
	Persentase angka kesembuhan TBC (%)	84	86			Kepemudaan dan Olahraga	Kantor Pemuda dan Olah Raga
	Tingkat pengetahuan masyarakat tentang HIV/AIDS secara komprehensif	68,40	95,00				
	Jumlah pemuda yang mengetahui bahaya Narkoba dan HIV/AIDS	70	370				
Meningkatnya kualitas kesehatan individu dan keluarga	Persentase balita gizi buruk (%)	0,47	0	Meningkatkan dan memperbaiki kualitas kesehatan individu dan keluarga dengan pengembangan program-program KB, dan program-program yang mengarah pada perbaikan kesehatan kelompok perempuan, anak, remaja, dan lansia	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Perbaiki Gizi Masyarakat ▸ Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak Balita ▸ Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi	81	85				
	Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) (%)	0	15				
	Rasio kematian Ibu per 100.000	13	10				

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
	kelahiran hidup						
	Rasio kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	62	49		<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan Obat dan Makanan 		
	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100		<ul style="list-style-type: none"> • Upaya Kesehatan Masyarakat 		
	Persentase remaja yang mendapat pelayanan kesehatan	39	50		<ul style="list-style-type: none"> • Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 		
	Persentase posyandu berstrata mandiri (%)	58	68		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 		
	Persentase lansia yang mendapat pelayanan kesehatan	30	100			Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
	Kesertaan ber-KB (Akseptor)	111.18 3	156.18 3		<ul style="list-style-type: none"> • Keluarga Berencana 		
	Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja	24	29		<ul style="list-style-type: none"> • Kesehatan Reproduksi Remaja 		
	Jumlah fasilitasi	15	90		<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan Pemasaryakatan 	Kepemudaan dan Olah	• Kantor Pemuda dan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ	
		AWAL	AKHIR					
	penyelenggaraan event olahraga Kota Bogor				Olahraga	Raga	Olah Raga	
Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai perilaku bersih dan sehat bagi diri sendiri dan lingkungannya	Persentase masyarakat ber-PHBS (%)	64,88	75	Mengembangkan program yang secara kontinyu memberikan perubahan kesadaran dan perilaku kesehatan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Lingkungan Sehat • Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat • Lingkungan Sehat Perumahan 	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
	Persentase Kelurahan siaga aktif (%)	100	100					
	persentase Kawasan yang mematuhi Perda KTR (%)	22,49	55					
	Persentase RW yang mendapatkan sosialisasi mengenai perilaku bersih dan sehat (%)	0	50					
	Persentase akses jamban keluarga (%)	79,3	82,5					

Tujuan II. 2. Meningkatkan kualitas permukiman

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pengelolaan air limbah yang layak	cakupan rumah tangga yang terlayani sistem <i>offsite</i>	366	600	Menciptakan standar dan mengembangkan kualitas permukiman yang sehat melalui perbaikan kualitas sanitasi, redesign permukiman kumuh, dan akses terhadap air minum yang layak.	• Lingkungan Sehat Perumahan	Perumahan Rakyat	Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman
	Cakupan rumah tangga dengan pengelolaan air limbah yang layak (%)	2,21	6,17		- Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pekerjaan Umum	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	Cakupan rumah tangga yang terlayani sistem intermediate (KK)	1.020	12.200				Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman
Berkurangnya kawasan permukiman kumuh	Jumlah kawasan kumuh (titik)	43	28		• Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Persentase Rumah Sehat (%)	79.5	82.5				
Tersedianya pelayanan air minum yang memadai	Jumlah rumah tangga berakses air minum bersih (non PDAM) *intervensi per tahun)	840	2.500		• Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pekerjaan Umum	Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman

Tujuan II. 3. Merevitalisasi ruang perkotaan yang lebih sehat dan nyaman untuk semua elemen masyarakat (termasuk anak, perempuan, lansia dan difabel)

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Meningkatnya jumlah dan kualitas taman-taman kota sebagai ruang publik yang sehat, asri, aman dan ramah pengguna	Jumlah taman kota yang dilengkapi dengan fasilitas yang ramah lansia			Merevitalisasi taman-taman kota dengan peremajaan dan pemeliharaan tanaman, dan pengadaan fasilitas yang ramah anak, lansia, dan difabel. Selain itu, juga diupayakan penambahan taman-taman baru sehingga taman sebagai ruang publik dapat diakses secara lebih luas oleh masyarakat. Hal ini dilakukan demi menguatkan karakter Kota Bogor.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	Jumlah lapangan bermain						
	Jumlah taman kota yang dilengkapi dengan fasilitas bermain anak						
Terpenuhinya kebutuhan kelompok berkebutuhan khusus di ruang publik	Jumlah ruang publik yang memiliki fasilitas difabel				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Tujuan II. 4. Meningkatkan ketahanan kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Tertangani dan terfasilitasi ya kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Rumah Tangga Sangat Miskin(RTSM)/KSM Eks Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)	10.487	9744	Menertibkan dan membina PMKS sehingga menjadi warga yang lebih produktif dan mandiri melalui beragam lembaga sosial yang ada serta program-program jangka pendek yang menekankan pada pembentukan mental hidup.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial • Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 	Sosial	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi
	Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang ditangani	75	562		<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 		
	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan (%)	100	100		<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 		
	Jumlah jenis PMKS yang ditangani	19	24		<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Anak Terlantar 		
	Persentase PMKS yang ditangani (%)	53	63		<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 		
	Peningkatan kualitas	50	900		<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan 		

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
	hidup bagi lansia				Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		Kecamatan
Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan kualitas hidup warga miskin	Persentase KK miskin (%)	8,26	7,18	Melakukan pembinaan terhadap kelompok PMKS sehingga menjadi warga yang lebih produktif dan mandiri melalui beragam lembaga sosial yang ada serta program-program jangka pendek yang	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Partisipasi Masyarakat • Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 	Sosial	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi
	Jumlah perempuan kepala keluarga yang dibina	170	420		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kelembagaan Ekonomi Kelurahan 	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
	Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni (unit)	-	544		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga 	Perumahan Rakyat	Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
				menekankan pada peningkatan taraf hidup warga miskin dan kelompok PMKS.	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Lingkungan Sehat ▸ Perumahan 		
Terwujudnya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan	Persentase kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang ditangani dan terselesaikan (%)	65	75	Menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak melalui pembinaan, pengembangan sarana pengaduan serta penindakan yang tegas terhadap pelaku kekerasan.	▸ Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
	Persentase pendampingan kasus kekerasan terhadap	100	100		▸ Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan	Sosial	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi
	Jumlah pekerja anak	100	100		▸ Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi
					▸ Peningkatan kelembagaan Ekonomi Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana

Tujuan II. 5. Meningkatkan produktifitas dan akses masyarakat terhadap penghidupan yang layak

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Meningkatnya kegiatan perekonomian dan aksesibilitas masyarakat terhadap lapangan pekerjaan yang produktif	Jumlah UMKM yang produktif	10.823	11.002	Mengembangkan sistem ketenagakerjaan terpadu melalui pengembangan keterampilan dan mental wirausaha serta sistem informasi kerja yang uptodate dan iklim bekerja.	▸ Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Jumlah IKM yang produktif	700	1075		▸ Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Jumlah SIUP	600	960		▸ Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Jumlah TDP	600	960		▸ Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	Penanaman Modal	- Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal - Kecamatan
	Jumlah penyerapan tenaga kerja	1.308	1.514		▸ Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi
	Persentase optimalisasi fungsi BLK (%)	0	100		▸ Peningkatan Kesempatan Kerja	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi,
	Persen pencari kerja yang dilatih di BLK yang terserap di pasar kerja (%)	26	29				Dinas Perindustrian dan Perdagangan,

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
	Jumlah wirausaha baru	128	944				Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Meningkatnya jiwa kewirausahaan dan iklim yang kondusif untuk berkreasi dan berusaha di masyarakat	Jumlah sentra IKM	0	5		<ul style="list-style-type: none"> ▸ Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Jumlah IKM yang menerapkan Teknologi	12	37		<ul style="list-style-type: none"> ▸ Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 		Sekretariat Daerah (Bag. Perekonomian)
	Jumlah produk yang tersertifikasi yang dihasilkan UMKM				<ul style="list-style-type: none"> ▸ Peningkatan Kualitas 		
	- halal	590	1090		<ul style="list-style-type: none"> ▸ Pengembangan Industri Kecil 	Industri	Dinas Perindustrian dan
	- haki	200	450		<ul style="list-style-type: none"> ▸ Peningkatan Kemampuan 		Sekretariat Daerah (Bag. Perekonomian)
	Jumlah promosi yang dilakukan				<ul style="list-style-type: none"> ▸ Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil 		

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
					Menengah		
	- ekonomi	10	20		Perindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	- perdagangan	21	41		Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		Sekretariat Daerah (Bag. Perekonomian)
	- perindustrian	15	35		Peningkatan dan Pengembangan Ekspor		
	- koperasi	28	69			Pertanian	Dinas Pertanian
	- pertanian	10	50				
	Jumlah kemitraan dan kerjasama UMKM	3	13		Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan		Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
	Jumlah koperasi aktif	301	726				
	Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang menjadi Lembaga Keuangan Mikro berbadan hukum	136	0				

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Berkembangnya agribisnis perkotaan	Produksi Tanaman Hias (Tangkai/Pot)	556.000	597.000	Mengembangkan pertanian dengan memanfaatkan lahan pertanian yang produktif untuk komoditas tanaman hias, ikan hias, dan pengembangan produk olahan.	Program Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan, dan Perikanan	Pertanian	Dinas Pertanian
	Produksi Ikan Hias (Ekor)	14.768.300	20.000.000				
	Jumlah hewan yang dipotong di RPH (Ekor)	174.526	822.960				
	Jumlah produk olahan pertanian binaan	24	84		Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan		
	Produk hasil pertanian binaan yang dipasarkan	34	119				
Terjaminnya kualitas dan kebutuhan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	86	100	Meningkatkan ketersediaan bahan pangan.	Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan	Kantor Ketahanan Pangan
	Stabilitas harga dan pasokan pangan (%)	100	100		Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Kantor Ketahanan Pangan - Sekretariat Daerah (Bag. Perekonomia)
	Persentase tingkat pemantauan dan pengendalian inflasi daerah	100	100				

MISI III.

MENJADIKAN BOGOR KOTA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

Tujuan III. 1. Meningkatkan kualitas penataan ruang

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ	
		AWAL	AKHIR					
Tersusunnya kebijakan penataan ruang yang berwawasan lingkungan	Peninjauan ulang RTRW Kota Bogor 2011-2031 (dokumen)	0	1	Mengimplementasikan penataan ruang secara tegas dengan mengembalikan kenyamanan Kota Bogor melalui peran serta masyarakat dalam pengendalian.	Perencanaan Tata Ruang	Penataan Ruang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Jumlah rencana umum, rencana detil dan rencana pengembangan kawasan yang disusun (RDTR/RTBL)	6	36				Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman	
Meningkatnya implementasi rencana tata ruang dan kendali terhadap pemanfaatan ruang	Frekuensi pembinaan kepada masyarakat (per tahun)	1	11		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang	Pemanfaatan Ruang	Penataan Ruang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Jumlah regulasi penataan ruang (perda/perwali)	10	20					
	Persentase tindak lanjut atas pengaduan pelanggaran tata ruang (%)	100	100					
	Tingkat konsistensi pemanfaatan ruang	0	90					

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Meningkatnya luasan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota	Luas Ruang Terbuka Hijau (ha)	39	43.15	Membebaskan sempadan sungai atau sumber air lainnya dan memanfaatkan aset yang belum dioptimalkan serta mengoptimisasikan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) eksisting.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Areal Pemakamam • Pemanfaatan Ruang 	Perumahan Rakyat Penataan Ruang	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	Persentase luas Ruang Terbuka Hijau Kota dalam kondisi terpelihara (%)	100	100				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan Konservasi Sumber daya alam 	Lingkungan Hidup
				<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 	Dinas Kebersihan dan Pertamanan		
Tertatanya Pedagang Kaki Lima serta pasar tradisional	Persentase Pedagang Kaki Lima yang mendapatkan pembinaan (%)	-	100	Menciptakan ruang ekonomi yang memfasilitasi ekonomi tradisional dan pentaan Pedagang Kaki Lima.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan • Peningkatan Efisiensi Perdagangan 	Perdagangan	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Jumlah review zoning Pedagang Kaki Lima terhadap 14 zona	-	100				PD Pasar

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
	Pedagang Kaki Lima (%)				Dalam Negri		
	Jumlah pasar tradisional yang ditata	2	7		<ul style="list-style-type: none"> ▸ Peningkatan Kantrantibma ▸ Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi ▸ Perencanaan Tata Ruang ▸ Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 	<ul style="list-style-type: none"> Otonomi Daerah Perhubungan Penataan Ruang Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> Satuan Polisi Pamong Praja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kebersihan dan Pertamanan

Tujuan III. 2. Meningkatkan kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan kota

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Menurunnya tingkat pencemaran akibat aktivitas perkotaan	Tingkat pemenuhan baku mutu kualitas	20	100	Mengimplementasikan regulasi standar kualitas pencemaran yang diiringi dengan perubahan sistem kota yang lebih ramah lingkungan.	▸ Pengendalian Pencemaran	Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan
	Tingkat pemenuhan baku mutu kualitas	20	100		▸ Program Pengembangan	Perhubungan	Dinas Lalu Lintas dan
	Tingkat pemenuhan baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa (%)	20	100		▸ Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pekerjaan Umum	· Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman - Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Meningkatnya upaya pemulihan dan konservasi sumber daya alam	Jumlah sumber mata air yang dilindungi (lokasi)	34	40	Memulihkan dan konservasi sumber daya alam dengan prioritas pada sumber air baku.	▸ Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	Jumlah Situ/Danau/Kelam	5	7		▸ Penguatan Kebijaksanaan dan	Pekerjaan Umum	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
	Panjang Saluran Irigasi Berkondisi Baik (km)	11	11		▸ Pengembangan dan Pengelolaan		
Terwujudnya penataan dan	Panjang Sungai/Saluran	174,54	194,54	Mewujudkan kota riverfront melalui	▸ Pengembangan, Pengelolaan,	Pekerjaan Umum	Dinas Bina Marga dan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
pelestarian Daerah Aliran Sungai (DAS)	Berkondisi Baik (km)			sterilasi Daerah Aliran Sungai dari aktivitas budidaya yang mengganggu.	dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya		Sumber Daya Air
				Memperlakukan dua sungai utama yang melalui Kota Bogor yaitu Ciliwung dan Cisadane sebagai <i>ecoregion</i> sehingga pengelolaannya harus dilaksanakan secara lintas daerah	Perencanaan Sosial Budaya		Perencanaan Pembangunan
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan	Jumlah sekolah yang dibina untuk menjadi sekolah Adiwiyata dan sekolah berbudaya lingkungan per tahun	50	100	Mewujudkan kota yang lebih ramah lingkungan dengan menekankan pada perubahan kesadaran dan perilaku masyarakat melalui pendidikan formal dan pembinaan secara kontinyu.	Perencanaan Sosial Budaya	Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	Jumlah sosialisasi lingkungan hidup (tema)	1	3		Perencanaan Sosial Budaya		Perencanaan Pembangunan

Tujuan III. 3. Mengembangkan transportasi kota yang mengutamakan angkutan umum massal, pejalan kaki dan pesepeda

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Terwujudnya sistem angkutan umum kota yang nyaman dan ramah lingkungan	Jumlah angkutan umum berbahan bakar alternatif	0	1000	Mewujudkan sistem pergerakan yang efisien dan ramah lingkungan yang berdasarkan pada sistem angkutan massal yang memadai.	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Transportasi Ramah Lingkungan 	Perhubungan	Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
					<ul style="list-style-type: none"> Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 	Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
					<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana 	Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Jumlah Prasarana & Sarana Perhubungan Terbangun & Terpelihara	4	72		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi 		
	Operasional Jumlah Koridor BTS Trans Pakuan (koridor)	3	7		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kualitas Pelayanan Angkutan Umum 		
Jumlah panjang ruas jalan utama (Arteri, Kolektor & Lokal) terbangun sesuai arahan RTRW 2011 - 2031 (km)	266.468	276.048	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Jalan dan Jembatan 	Pekerjaan Umum	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air		

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
	Persentase Panjang Jalan Berkondisi Mantap (Baik & Sedang) (%)	86	89		<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Peningkatan sarana prasarana perkotaan 		
Meningkatnya kualitas sarana prasarana pejalan kaki dan pengguna sepeda	Panjang Prasarana Pedestrian yang meningkat kapasitasnya (km)	0,545	24,813	Peningkatan kenyamanan dalam berjalan kaki yang ramah bagi setiap kalangan. Model sarana pedestrian ideal yang dikembangkan bersama Program <i>Sustainable Urban Transport Improvement Project</i> (SUTIP) GIZ akan menjadi percontohan untuk dikembangkan selanjutnya. Pengembangan jalur pesepeda akan dimulai pada koridor jalan utama yang telah ada, kemudian dalam proses	Peningkatan Prasarana Pedestrian	Pekerjaan Umum	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
	Panjang Prasarana Pedestrian Jalan Utama Terbangun (km)	249.40	271.06				
	Jalur sepeda yang dikembangkan (koridor)	0	3				
						Perhubungan	Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
				evaluasi akan dikembangkan jalur lain yang memadai.			
Berkurangnya kemacetan	Rata-rata waktu tempuh di lokasi rawan kemacetan (km/jam)	20,08	23	Menargetkan pengurangan jumlah kendaraan pribadi dengan meningkatkan pelayanan angkutan umum yang memadai disertai dengan evaluasi dan pengembangan kawasan parkir (<i>park on ride</i>). Pengadaan gedung parkir pada pusat kota akan memanfaatkan akuisisi lahan dan <i>land banking</i> . Upaya ini diiringi dengan peningkatan penggunaan <i>non-motorized transport</i> .	<ul style="list-style-type: none"> › Peningkatan Kualitas Pelayanan Angkutan Umum › Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi › Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi 	Perhubungan	Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Tujuan III. 4. Mendorong pembangunan kota yang tanggap risiko bencana dan dampak perubahan iklim

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah kejadian bencana	295	286	Mewujudkan masyarakat dan pemerintah yang siap-tanggap dalam menghadapi bencana di beberapa daerah prioritas. Selain itu, menjadikan Kota Bogor sebagai bagian dari komunitas internasional yang secara bersama-sama mengurangi pemanasan global diantaranya melalui penghijauan kota, <i>green building</i> , dan partisipasinya	▸ Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	Persentase ketersediaan sarpras terhadap kebutuhan	10	100		▸ Lingkungan sehat perumahan	Perumahan	Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman
					▸ Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya tanggap darurat saat bencana	Tingkat penanganan kejadian bencana (%)	100	100		▸ Pengendalian Banjir	Pekerjaan Umum	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
						Sosial	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi
					▸ Tanggap Darurat Bencana	Pekerjaan Umum	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
				dalam berbagai kampanye seperti <i>Earth Hour</i> .			Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Dinas Kesehatan Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman
					<ul style="list-style-type: none"> › Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran › Penanganan 	Sosial Kesehatan Perumahan Kesatuan	Kantor
Meningkatnya pemulihan pasca bencana	Tingkat pemulihan pasca bencana (%)	100	100		<ul style="list-style-type: none"> › Pemulihan Pasca Bencana 	Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
							Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi
						Pekerjaan Umum	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
							Dinas Kebersihan dan Pertamanan
					▸ Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Perumahan	Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman
Meningkatnya pengelolaan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim	Jumlah kampung iklim	0	5		▸ Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Lingkungan Hidup	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan III. 5. Menerapkan pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Meningkatnya pelayanan persampahan	Volume sampah terangkut	70,37	75,37	Meningkatkan pelayanan sampah melalui kerjasama antardaerah untuk Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang menerapkan sistem sanitary landfill serta pelayanan pengangkutan sampah.	Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	Volume sampah yang diolah di TPA	1.756	1.941				
						Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup
Meningkatnya Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	Jumlah TPS 3R di tempat yang belum terlayani oleh angkutan (lokasi)	13	18	Mereduksi jumlah sampah yang diangkut melalui upaya 3R (<i>Reuse Reduce Recycle</i>) yang didasarkan pada penerapan teknologi dan perubahan kesadaran dan perilaku masyarakat khususnya di tingkat rumah tangga, RT, RW dan	Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R	Lingkungan Hidup Perencanaan Pembangunan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	Jumlah Bank Sampah (lokasi)	10	85				
					Perencanaan Sarana Prasarana Kota		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Internalisasi pengelolaan sampah sebagai bagian dari	Persentase Reduksi Sampah (%)	3,2	4,7		Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	Persentase pengelolaan sampah	13	18				

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
budaya hidup masyarakat	di tingkat rumahtangga (%)			kelurahan. Maka dalam penenerapan budaya di masyarakat, peran dan kewenangan kecamatan akan lebih ditingkatkan. Pengembangan bank sampah dapat dikerjasamakan dengan pihak pemulung dengan memulai pada wilayah percontohan yang ditentukan.			

MISI IV.

MENJADIKAN BOGOR SEBAGAI KOTA JASA YANG BERORIENTASI PADA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF

Tujuan IV. 1. Menjadikan warisan budaya sebagai aset kota

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan warisan budaya	Persentase grup kesenian yang aktif memelihara dan mengembangkan seni dan budaya (%)	70	100	Mendorong keaktifan beragam organisasi dan lembaga dalam kegiatan pelestarian budaya baik maupun non bendawi	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Nilai Budaya 	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Jumlah lembaga yang menangani bidang kesenian dan budaya	8	16		<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 		
	Jumlah kelompok pelestari warisan budaya	51	62				
	Jumlah kegiatan pelestarian warisan budaya yang melibatkan masyarakat	91	130				
Terpeliharanya kelestarian warisan budaya	Jumlah kemitraan dalam pelestarian warisan budaya	9	16	Memperkuat upaya pelestarian warisan budaya melalui pembuatan regulasi,	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	1	5		<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan Kekayaan Budaya 		

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
	Jumlah gelar seni dan budaya yang diselenggarakan	30	80	kemitraan antarpihak, dan sarpras pendukung khususnya di kawasan cagar budaya.	▸ Pengelolaan Keragaman Budaya		
	jumlah kegiatan pengadaan sarana prasarana pendukung di kawasan Cagar budaya	30	70		▸ Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penataan Ruang	Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman
	jumlah kegiatan pengadaan sarana prasarana kesenian budaya	68	145		▸ Perencanaan Tata Ruang	Penataan Ruang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman
	Gedung Kesenian	1	2				
	Jumlah kelompok/komunitas kesenian budaya di Kota Bogor yang dibina	20	30		▸ Penataan dan Pengaturan Bangunan Gedung	Perumahan Rakyat	Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman
	Jumlah sanggar kesenian budaya di Kota Bogor yang dibina	40	52				
	Jumlah Cagar Budaya yang diinventarisir	224	239				
	Jumlah peraturan daerah yang mengatur pelestarian				▸ Peningkatan Utilitas Perkotaan	Koperasi dan Usaha Kecil	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
					▸ Penataan dan Pemberdayaan		

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
	budaya				Pedagang Kaki Lima › Pembangunan Prasarana Pedestrian dan Pesepeda › Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi › Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau › Mitigasi dan Perubahan Iklim	dan Menengah Pekerjaan Umum Perhubungan Lingkungan Hidup	Kecil dan Menengah Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BPLH
Tersedianya kebijakan/peraturan daerah yang mengatur Warisan Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan oleh Peraturan daerah	30	40		› Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tujuan IV. 2. Memperkuat identitas dan citra Kota Bogor (*City Branding*)

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Meningkatnya fungsi kawasan penyangga kebun raya secara fisik, visual dan ekologis	Jumlah kebijakan/peraturan daerah yang menetapkan Kebun Raya Bogor sebagai benchmark pembangunan kota			Merencanakan kawasan penyangga Kebun Raya Bogor (KRB) sehingga pengembangan kawasan penyangga dapat kompatibel dengan keberadaan KRB. Membangun regulasi yang kokoh sehingga pengembangan kawasan penyangga sesuai dengan tema <i>Garden Compatible Development</i>	Perencanaan Tata Ruang	Penataan Ruang	Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman
	Rencana rinci pengembangan kawasan penyangga Kebun Raya Bogor	Belum ada	ada				
Diterapkannya konsep perancangan kota (<i>urban design</i>), termasuk <i>street furniture</i> yang meningkatkan citra kota	Jumlah panduan rancang kota	Belum ada	ada	Membangun beragam tapak di Kota Bogor melalui konsep dan rancangan kota yang jelas dan			
	Dokumen konsep pengembangan <i>city branding</i>	Belum ada	ada				

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
				mendukung imaji kota yang berdasarkan pada panduan rancang kota dan City Branding			
Dijadikannya Bogor sebagai Pusat Pengetahuan dan Penelitian bidang pertanian dan botani	Jumlah kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga penelitian dalam dan luar negeri	10	15	Mengaktifkan kembali potensi penelitian dan peningkatan pengetahuan pertanian dan botani Kota Bogor melalui kerjasama dalam negeri dan luar negeri.	<ul style="list-style-type: none"> Kerjasama Pembangunan 	Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tumbuh berkembangnya aktivitas MICE (<i>Meeting, Incentives, Conferences/Convention, Exhibitions/Events</i>)	Jumlah sarana dan prasaranan pendukung MICE	6	14	Memfasilitasi berkembangnya aktivitas MICE dengan membangun infrastruktur MICE berskala internasional, mendorong sertifikasi hotel, dan dengan	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Destinasi Pariwisata 	Pariwisata	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
				menerapkan regulasi yang tegas sehingga membuat Kota Bogor tetap nyaman. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur MICE (seperti convention centre, hotel) harus dalam batas-batas yang dikendalikan agar tidak kontraproduktif terhadap sisi kenyamanan kota.			

Tujuan IV. 3. Mengembangkan Pariwisata Kota Bogor yang berkarakter

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Berkembangnya destinasi wisata	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	16	18	Mengembangkan industri pariwisata yang terintegrasi melalui pengembangan paket, sarpras pariwisata (peta, petunjuk, kawasan oleh-oleh), promosi dan pemasaran.	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pariwisata	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Jumlah Kunjungan Wiasatawan Nusantara	3.769.787	6.071.280		Pengembangan Pemasaran Pariwisata		
	Jumlah Kunjungan Wiasatawan Mancanegara	183.807	296.023				
	Jumlah event/pameran yang diikuti per tahun	6	8				
	Badan promosi pariwisata daerah yang terbentuk	0	1				
Meningkatnya peran kelembagaan pariwisata	Jumlah kompepar	1	6		Pengembangan Kemitraan	Pariwisata	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Jumlah kerjasama yang dilakukan	1	1				

Tujuan IV. 4. Mengembangkan iklim ekonomi kreatif

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Terciptanya iklim industri kreatif	Jumlah Industri kreatif	172	342	Menginisiasi penciptaan iklim yang kondusif bagi ekonomi kreatif melalui penciptaan ruang kreatif, pembinaan SDM kreatif, dan kemitraan sebagai sarana transfer pengetahuan dan praktikal. Melalui Tahapan berikut:	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Industri	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Terjalannya kemitraan antar pelaku industri kreatif	<i>Bogor Creative Forum</i>	0	1	1) Creative-waves, yaitu menciptakan gelombang kreatifitas; 2) Creative-network, yaitu membangun jejaring sesama pelaku ekonomi kreatif; 3) Creative-preneur, yaitu	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Saung Kreaktif	0	68				Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Jumlah komunitas kreatif	10	60				Sekretariat Daerah (Bag. Kemasyarakatan)

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Terciptanya SDM yang kreatif dan wirausahawan kreatif	Jumlah insan kreatif yang menerima penghargaan	1	3	membangun orang-orang kreatif sebagai wirausahawan. Dibutuhkan model triple-helix dalam pengembangan ekonomi kreatif, ialah pelibatan tiga pihak utama meliputi pemerintah, pebisnis, dan kaum intelektual. Hanya saja, intervensi pemerintah perlu dilakukan secara hati-hati dan terukur mengingat kreatifitas justru bisa tenggelam oleh intervensi yang bersifat keproyekan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri • Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 	Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Jumlah pelatihan kewirausahaan industri kreatif	4	9				Kantor Koperasi dan UMKM
	Jumlah produk berkualitas ekspor	19	29				

MISI V.

MEWUJUDKAN PEMERINTAH YANG BERSIH DAN TRANSPARAN

Tujuan V. 1. Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Indeks integritas daerah	7.29	7.51	Membangun pemerintahan yang berintegritas dengan perbaikan kinerja keuangan dan akuntabilitas melalui komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan standarisasi kompetensi jabatan.	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 	Seluruh Urusan	Seluruh OPD
					<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal 	Penanaman Modal	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
					<ul style="list-style-type: none"> Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 		Sekretariat Daerah (Bag. Humas)
	Penetapan zona integritas/wilayah bebas korupsi (OPD)	0 (2014)	5		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 	Otonomi Daerah	Inspektorat
Opini BPK atas laporan keuangan	WDP	WTP	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan 	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan			
						Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ	
		AWAL	AKHIR					
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	CC (2012)	B		Aset Daerah			
					<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
								Sekretariat Daerah (Bag.Keuangan)
						<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 	Seluruh Urusan	Seluruh OPD Sekretariat Daerah (Bag. Perekonomian)
		Aparatur yang memenuhi standar kompetensi jabatan	60%	85%		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 		
						<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan 	Otonomi Daerah,	Sekretariat Daerah (Bag.Pemerintahan)
	Terbentuknya OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>) (perda)	1	1 Perda		<ul style="list-style-type: none"> Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 	Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah (Bag.Organisasi)	
	Konsistensi antara	97	>97					

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
	rencana kegiatan OPD dan implementasinya (%)						
	Pengisian jabatan melalui seleksi terbuka (%)	100			<ul style="list-style-type: none"> ▸ Penataan dan Penguatan Organisasi ▸ Pengendalian Pembangunan ▸ Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi ▸ Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah ▸ Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 		Sekretariat Daerah (Bag Pengendalian Program) Sekretariat Daerah (Bag. Humas) Sekretariat DPRD ·Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
Meningkatnya kualitas pelayanan	Indeks kepuasan masyarakat pada seluruh OPD yang	2,5.	3,25	Memperkuat relasi pemerintah	▸ Peningkatan Sarana dan Prasarana	Seluruh Urusan	Seluruh OPD

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
publik kepada masyarakat	memberikan pelayanan publik			dan masyarakat melalui perbaikan kualitas pelayanan publik dan penyediaan informasi publik secara lebih mudah dan terbuka.	Aparatur		
	Persentase OPD yang menetapkan SOP pelayanan publik (%)	50	100		<ul style="list-style-type: none"> ▸ Pembinaan dan Penataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan 	Otonomi Daerah	Kecamatan
					<ul style="list-style-type: none"> ▸ Penataan Tata Laksana 		Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi)
					<ul style="list-style-type: none"> ▸ Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 		Sekretariat Daerah (Ba. Organisasi)
					<ul style="list-style-type: none"> ▸ Penataan Administrasi Kependudukan 	Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya pemenuhan hak masyarakat akan informasi publik	OPD yang menyediakan informasi publik sesuai UU KIP (%)	10	100		<ul style="list-style-type: none"> ▸ Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 	Komunikasi dan Informastika	Sekretariat Daerah (Bag. Humas)
	Persentase permintaan akan informasi publik yang terlayani oleh PPID dan PPID pembantu (%)	20	100				

Tujuan V. 2. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar daerah dan internasional

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Terbangunnya kesepahaman bersama antar daerah mengenai isu-isu lintas wilayah dalam bidang ekonomi dan pengembangan wilayah, pelayanan publik, serta lingkungan hidup	Jumlah bidang kesepakatan bersama antar daerah (bidang)	5	18	Memperkuat kerjasama antardaerah dalam pembangunan dalam bidang-bidang prioritas. Selain itu, kerja sama ini juga dilakukan dalam rangka menguatkan posisi Kota Bogor dalam konstelasi Jabodetabekpunjur	Kerja Sama Pembangunan	Otonomi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat Daerah (Bag. Pemerintahan) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Menguatnya kelembagaan kerja sama antar daerah dan internasional	Kelembagaan kerja sama regional yang berjalan	2	2				
	Jumlah forum internasional yang digiati	2	3				
	Jumlah kerja sama dengan pihak ketiga internasional	6	6				
	Jumlah kerja sama dengan kota-kota luar negeri	2					
	Jumlah perusahaan swasta, BUMD yang berkontribusi terhadap pembangunan Kota Bogor.	9	14				

Tujuan V. 3. Meningkatkan sinergitas antara pemerintah kota dengan elemen masyarakat

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Meningkatnya event-event yang memunculkan ikatan dan kecintaan antara warga dan kotanya	Jumlah event yang memunculkan ikatan dan kecintaan antara warga dan kotanya	10	15	Memfasilitasi interaksi antara kota dengan masyarakat dan komunitas melalui beragam kegiatan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat didalamnya. Sebagai contoh diantaranya adalah Lomba Mulung di Ciliwung Antar Kelurahan yang dilakukan setiap Hari Jadi Kota Bogor.	• Pengelolaan Keragaman Budaya	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Jumlah warga yang berpartisipasi dalam event-event dimaksud	250	500		• Pengelolaan Keragaman Budaya		
Terfasilitasinya organisasi, komunitas dan sejenisnya yang memiliki fokus terhadap pembangunan kota	Jumlah organisasi, komunitas, dan sejenisnya yang difasilitasi	78	78		Mengggunakan kajian dan kepakaran IPTEK dan inovasi	• Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Kepemudaan dan Olahraga
	Jumlah kegiatan bersama yang diadakan oleh pemerintah daerah dan organisasi/komunitas dimaksud	4	29				
Optimalisasi keberadaan dan peran serta berbagai perguruan	Persentase perguruan tinggi dan LSM setempat yang bekerjasama dengan pemerintah kota (%)	3	6		• Kerjasama Pembangunan	Perencanaan Pembangunan	Sekretariat Daerah (Bag. Pemerintahan)

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
tinggi dan lembaga swadaya masyarakat setempat dalam pembangunan kota Bogor	Jumlah ormas yang bekerjasama dengan pemerintah kota	34	40	perguruan tinggi dan LSM kompeten dalam pengambilan kebijakan pembangunan	Pemberdayaan Lembaga Sosial	Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah (Bag. Kemasyarakatan)
Tersedianya ruang bagi elemen warga untuk turut memberi pertimbangan dalam segala pengambilan kebijakan mengenai pembangunan kota	Dewan kota atau nama lain yang menjadi ruang bagi elemen warga untuk turut memberi pertimbangan dalam segala pengambilan kebijakan mengenai pembangunan kota	Belum ada	Terbentuk dan berjalan	Memfasilitasi terbentuknya Dewan Kota atau nama lain sebagai sarana peningkatan proses partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik strategis.			

Tujuan V. 4. Memperkuat perundang-undangan daerah

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Tersusunnya perundang-undangan daerah yang sinkron dan sinergis	Perundang-undangan daerah yang penyusunan/perubahannya dikonsultasikan dengan seluruh pemangku kepentingan (%)	100	100	Menyusun peraturan perundang-undangan yang tidak tumpang tindih melalui harmonisasi perundang-undangan daerah.	<ul style="list-style-type: none"> Penataan Peraturan Perundang-undangan 	Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah (Bag.Hukum)
					<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan Tata Ruang 	Penataan Ruang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang 		
Harmonisnya perundang-undangan daerah	Perundang-undangan daerah yang harmonis (%)	100	100		<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang 		
Tegaknya perundang-undangan daerah	Penindakan tindak pidana ringan (%)	60	80	Menegakkan peraturan perundang-undangan daerah, terutama untuk menjaga ketertiban dan keamanan, kenyamanan, dan konsistensi tata ruang.	<ul style="list-style-type: none"> Penataan Peraturan Perundang-undangan 	Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah (Bag.Hukum)
	Jumlah gugatan perkara hukum tata usaha negara dan perdata	20 perkara	<20 perkara		<ul style="list-style-type: none"> Penegakan Hukum dan Penerapan HAM 		
	Konsistensi rencana tata ruang (WP)	5	5		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Satuan Polisi Pamong Praja
					<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 		

MISI VI.

MENGOKOHKAN PERAN MORAL AGAMA DAN KEMANUSIAAN UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI

Tujuan VI. 1 Meningkatkan integrasi nilai dan norma agama dalam implementasi kehidupan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Digunakannya nilai-nilai agama dan kemanusiaan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari	Angka kriminalitas	0,142 (2012)	< 0,142	Mengimplementasikan nilai agama dan kemanusiaan untuk meningkatkan kualitas nilai kehidupan. Hal ini terekspresikan diantaranya dari penurunan angka kriminalitas dan penyakit masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan Lembaga Sosial 	Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah (Bag. Kemasyarakatan)
	Jumlah Korban Narkotika dan HIV/AIDS/WTS yang dibina	50	1.550		<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial Peningkatan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 	Sosial	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi
						Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kecamatan

Tujuan VI. 2. Mendorong harmonisasi dan kerukunan antar umat beragama

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Terselenggaranya aktivitas lintas agama	Jumlah dialog rutin lintas agama (kali/tahun)	7	35	Mewujudkan pemahaman antar umat beragama melalui dialog dan aktivitas rutin antar agama untuk menurunkan potensi konflik horizontal.	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Terdeteksi dan tertanganinya potensi permasalahan antar umat beragama	Persentase deteksi dini permasalahan antar umat beragama (%)	100	100	Mengembangkan deteksi dini dalam potensi konflik dengan melakukan intermediasi dan pencerdasan publik melalui media.	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Persentase Deteksi dini permasalahan antar umat beragama yang dapat tertangani (%)	100	100				
	Konflik SARA	0	0				

Tujuan VI. 3. Mendorong peran lembaga-lembaga agama dan organisasi kemasyarakatan dalam meningkatkan kualitas kehidupan umat

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Meningkatnya peran lembaga agama dan organisasi kemasyarakatan dalam aktivitas pembangunan masyarakat	Jumlah lembaga keagamaan yang dibina			Memfasilitasi lembaga keagamaan dan kemasyarakatan untuk berkontribusi dalam pembangunan khususnya pemberantasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi rakyat, diantaranya melalui pemanfaatan zakat atau bentuk-bentuk dana umat lainnya. Termasuk didalam lembaga keagamaan tersebut adalah lembaga penyelenggara pendidikan seperti Diniyah Takmiliah dengan kontribusinya pada pembangunan sumber daya manusia dan karakter.	<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 	Sosial	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi
	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang dibina	34	40				
	Jumlah kegiatan sosial pemberdayaan ekonomi				<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan Lembaga Sosial Pemberdayaan Umat Islam dan Umat Beragama Lainnya 	Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah (Bag. Kemasyarakatan)
	Jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang terbentuk	16	68				
	Jumlah panti asuhan yang dibina	72	84		<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kemitraan Pengembangan 	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Jumlah panti asuhan milik Pemda	0	1				

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
					gan Wawasan Kebangsaan		
	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan (orang per tahun)	600	600		• Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Jumlah penyuluhan kepada ormas dan LSM (kali/tahun)	2	3		• Pemberdayaan Fakir Miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Sosial	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi
	Jumlah lembaga sosial yang berpartisipasi aktif dalam penanganan PMKS	65	90				Kecamatan

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Program prioritas merupakan program-program yang secara khusus berhubungan dengan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Bab sebelumnya telah menampilkan daftar program-program prioritas berikut keterkaitannya dengan sasaran yang dituju.

Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Walikota dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi dan misi daerah. Bagi program prioritas I, menjadi tanggung jawab bersama Kepala OPD dengan Walikota pada tingkat kebijakan.

Pada periode 2015-2019, prioritas I Kota Bogor mencakup enam bidang meliputi:

1. Penataan transportasi dan angkutan umum;
2. Penataan pelayanan persampahan dan kebersihan kota;
3. Penataan dan pemberdayaan PKL;
4. Penataan ruang publik, pedestrian, taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) lainnya;
5. transformasi budaya dan reformasi birokrasi; dan
6. Penanggulangan kemiskinan. Masing-masing dari keenam bidang prioritas ini kemudian dijabarkan menjadi berbagai program, baik sebagai program prioritas (yang berkorelasi langsung dengan pencapaian enam bidang prioritas), program wajib (program-program untuk memenuhi dan melaksanakan urusan wajib pemerintah daerah), maupun program rutin yang menjadi pendukung. Program-program tersebut, berikut pendanaan indikatifnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel VIII. 1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Bogor

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR (2019)	OPD PJ ^(*)
			2015		2016		2017		2018		2019			
			TARGE T	RP (JUTA)	TARGE T	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)		
SELURUH OPD														
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD (Honor pegawai non PNS, ATK, Barang cetakan.	12	12	110.659	12	113.980	12	117.383	12	120.909	12	124.558	12	Seluruh OPD (44 OPD)
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil evaluasi LAKIP SKPD yang memenuhi kriteria minimal "Cukup" (%)	40	45	210	50	210	55	210	60	210	65	210	65	Inspektorat
	Penyusunan laporan pemerintahan daerah (LPPD, EKPPD, ILPPD) tingkat kota (%)	100	100	200	100	220	100	220	100	250	100	375	100	Sekretariat Daerah (Bag. Pemerintahan)
	Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%)	100	100	2.100	100	2.100	100	2.310	100	2.310	100	2.520	100	Seluruh OPD(44 OPD)
	Akuntabilitas Kinerja BUMD	4	4		4		4		4		4		4	Sekretariat Daerah (Bag. Perekonomian)
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor (%)	100	100	103.117	100	106.211	100	109.397	100	112.679	100	116.059	100	Seluruh OPD(44 OPD)
	Inventaris kantor yang terpelihara (%)	100	100		100		100		100		100		100	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kualitas SDM dalam pemenuhan	60	70	30.294	75	21.174	75	21.474	80	21.974	80	22.474	80	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR (2019)	OPD PJ(*)
			2015		2016		2017		2018		2019			
			TARGE T	RP (JUTA)	TARGE T	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)		
	kompetensi jabatan (%)													
	Persentase aparatur OPD yang ditingkatkan kapasitasnya (%)	10		20	2.100	20	2.100	20	2.100	20	2.100			Seluruh OPD(44 OPD)
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	Pembangunan SIM OPD	23	5	5		5		5		5		48		Seluruh OPD(44 OPD)
URUSAN WAJIB														
PENDIDIKAN														
Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase PAUD yang memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain (%)	45	50	1.388	55	1.488	60	1.638	65	1.838	70	2.088	70	Dinas Pendidikan
	Persentase PAUD yang telah menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS)(%)	25	30		35		40		45		50		50	
	Persentase Akreditasi satuan pendidikan PAUD													
	- PAUD Formal (%)	45,93	45		55		65		75		100		100	
	- PAUD Non Formal (%)	18,65	25		31		37		43		50		50	
	Jumlah PAUD Negeri	1	1		2		2		2		2		2	
	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Rasio Guru dengan Siswa SD/MI	1 : 23	1:26	24.807	1:27	25.551	1:28	26.318	1:28	27.107	1:28	28.920	
	Rasio Murid dengan Rombel SD/MI	1 : 33	1:32		1:32		1:32		1:32		1:32		1:32	
	Jumlah sekolah yang melayani pendidikan inklusif SD	6	7		8		9		10		11		11	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR (2019)	OPD PJ(*)
			2015		2016		2017		2018		2019			
			TARGE T	RP (JUTA)	TARGE T	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)		
	Persentase Sekolah yang memiliki Perpustakaan SD/MI(%)	69,77	70		71		73		75		77		80	
	Jumlah siswa SD/MI yang menerima bantuan BOS	113.433	113.583		113.783		113.933		114.046		114.171		114.171	
	Persentase ruang kelas SD/MI yang memadai(%)	77,31	79		80		82		84		86		86	
	Rasio Murid dengan Rombel SMP/MTs	1 : 34	1:32		1:32		1:31		1:30		1:29		1:29	
	Persentase Sekolah yang memiliki Perpustakaan SMP/MTs(%)	69,66	70		72		74		75		76		76	
	Persentase Jumlah ruang kelas SMP/MTs yang memadai (%)	87,25	88		90		92		94		96		96	
	Jumlah SMP yang mengadakan Kelompok Ilmiah Remaja (KIR)	3	5		7		9		10		12		12	
Pendidikan Menengah	Rasio Murid dengan Rombel SMA/MA/SMK	1 : 33	1:32	22.256	1:31	22.924	1:30	23.612	1:29	24.320	1:28	25.049	1:28	Dinas Pendidikan
	Persentase Sekolah yang memiliki Perpustakaan SMA/SMK/MA(%)	66,67	68		70		72		73		74		74	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR (2019)	OPD PJ(*)
			2015		2016		2017		2018		2019			
			TARGE T	RP (JUTA)	TARGE T	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)		
	Jumlah jam efektif pembelajaran MULOK tingkat SMA/MA/SMK (jam)	4	4		4		4		4		4		4	
	Jumlah siswa SMAN/SMKN yang menerima bantuan BOS	14.997	15.147		15.250		15.325		15.390		15.440		15.440	
	Persentase ruang kelas SMA/SMK yang memadai(%)	93,29	94		95		96		97		98		99	
	Jumlah SMA/SMK yang mengadakan Kelompok Ilmiah Remaja (KIR)	4	6		7		8		9		10		10	
Manajemen Layanan Pendidikan	Persentase sekolah berbasis TI (%)	85	86	18.989	87	19.558	88	20.145	89	20.750	90	21.372	90	Dinas Pendidikan
	Persentase pemenuhan Kebutuhan Administrasi Sekolah disemua jenjang(%)	65	65,05		65,08		70		70,02		70,04		70,06	
	Persentase Guru Berprestasi disemua jenjang (%)	3	3		3		3		3		3		3	
	Sosialisasi sistem pendaftaran siswa baru melalui PPDB online	8	10		14		18		22		24		24	
	Persentase Pemutakhiran sistem PPDB (%)	100	100		100		100		100		100		100	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR (2019)	OPD PJ(*)
			2015		2016		2017		2018		2019			
			TARGE T	RP (JUTA)	TARGE T	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)		
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Kualifikasi Pendidik PAUD (%)	21,26	23	488	24	503	25	518	26	534	27	550	27	Dinas Pendidikan
	Persentase Kompetensi Pendidik PAUD (%)	44,11	45		46		47		48		49		49	
	Persentase Kompetensi Tenaga Kependidikan PAUD (%)	33,89	34		35		36		37		38		38	
	Persentase Kualifikasi Pendidik SD (%)	67,88	68		69		70		71		72		72	
	Persentase Kompetensi Pendidik SD (%)	53	54		55		56		57		58		58	
	Persentase Kompetensi Tenaga Kependidikan SD (%)	67,68	68		69		70		71		72		72	
	Persentase Kualifikasi Pendidik SMP (%)	86,76	87		88		89		90		91		91	
	Persentase Kompetensi Pendidik SMP (%)	62,77	63		64		65		66		67		67	
	Persentase Kompetensi Tenaga Kependidikan SMP (%)	44	45		46		47		48		49		49	
	Persentase Kualifikasi Pendidik SMA/SMK (%)	88,56	89		90		91		92		93		93	
	Persentase Kompetensi Pendidik SMA/SMK (%)	57,45	58		59		60		61		62		62	
Pendidikan Non-Formal	Persentasebuta huruf usia 15-55	99,88	99,90	1.405	99,92	175	99,94	180	99,96	225	99,98	23	99,98	Dinas Pendidikan

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR (2019)	OPD PJ(*)
			2015		2016		2017		2018		2019			
			TARGE T	RP (JUTA)	TARGE T	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)		
	tahun yang tertangani(%)													
	Persentase Peserta paket A bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah SD/MI (%)	0,0002	0,0001		0,0001		0,0001		0,0001		0,0001		0,0001	
	Persentase Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan (%)	90	92		94		96		98		100		100	
	Persentase satuan pendidikan non formal yang sudah terakreditasi(%)	16	17		18		19		20		21		30%	
	Persentase Kursus-kursus/pelatihan yang dibina secara terus menerus(%)	100	100		100		100		100		100		100	
	Persentase Lulusan kursus keterampilan dan pelatihan yang dapat memasuki dunia kerja(%)	75	76		80		85		90		95		95	
	Persentase Pemenuhan jumlah tenaga pendidik, instruktur, atau penguji praktek dari kursus-kursus/pelatihan yang diperlukan (%)	100	100		100		100		100		100		100	
	Persentase Kualifikasi Pendidikprogram	80	81		83		84		85		86		86	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR (2019)	OPD PJ(*)
			2015		2016		2017		2018		2019			
			TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)		
	kesetaraan (%)													
	Persentase Kompetensi Pendidik program kesetaraan (%)	80	81	83		84		85		86		86		
	Persentase Kompetensi pendidik Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) (%)	45	46	50		55		60		65		65		
	Persentase jumlah kursus-kursus/pelatihan yang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan (%)	80	81	83		86		89		92		92		
	Ratio modul Paket A terhadap warga belajar	1 : 05	1:04	1:03		1:02		1:01		1:01		1:01		
	Persentase kelulusan Paket A (%)	100	92	94		96		98		100		100		
	Ratio modul Paket B terhadap warga belajar (%)	100	90	91		92		93		94		94		
	Persentase kelulusan Paket B (%)	3	89	90		91		92		93		93		
	Ratio modul Paket C terhadap warga belajar	100	91	92		93		94		95		95		
	Persentase kelulusan Paket C (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Kendaraan perpustakaan keliling (unit)	3						3				6		

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR (2019)	OPD PJ(*)
			2015		2016		2017		2018		2019			
			TARGE T	RP (JUTA)	TARGE T	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)		
	Persentase Diniyah Takmilyah yang dibantu operasionalnya	NA	40		50		60		70		80		80	
KESEHATAN														
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase Jumlah kunjungan masyarakat miskin di sarana kesehatan dasar yang terlayani (%)	100	100	36.000	100	34.000	100	34.000	100	35.000	100	35.000	100	Dinas Kesehatan
	Persentase kunjungan masyarakat miskin di sarana kesehatan rujukan yang terlayani (%)	100	100		100		100		100		100		100	
	Persentase integrasi jamkesda ke JKN (jumlah peserta Jamkesda yang diintegrasikan ke BPJS dibagi jumlah peserta Jamkesda)(%)	-	30		66		100		100		100		100	
Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase pelayanan ibu hamil (K4)(%)	96	96	900	96,5	1.150	97	1.200	97.5	1.300	98	1.350	98	Dinas Kesehatan
	Persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan(%)	92	92		92,5		93		93,5		94		94	
	Persentase Komplikasi ibu bersalin yang ditangani (%)	75,6	76		77		78		79		80		80	
	Persentase Pelayanan KB Aktif(%)	60,07	61		62		62,5		63		63,5		64	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR (2019)	OPD PJ(*)
			2015		2016		2017		2018		2019			
			TARGE T	RP (JUTA)	TARGE T	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)		
	Persentase pelayanan kesehatan neonatus lengkap (KN Lengkap)(%)	100	100		100		100		100		100		100	
	Persentase Komplikasi neonatus yang ditangani(%)	54,5	60		65		70		75		80		80	
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Persentase pelayanan kesehatan bayi (kunjungan bayi)(%)	95	95,5	200	96	300	96,5	400	97	400	97,5	500	97,5	Dinas Kesehatan
	Persentase pelayanan anak balita (kunjungan Balita)(%)	90,3	91		92		93		94		95		95	
Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah kunjungan masyarakat di sarana kesehatan dasar	1.303.416	1.330.000	8.905	1.380.000	11.500	1.400.000	11.600	1.430.000	12.000	1.450.000	12.000	1.460.000	Dinas Kesehatan
	Persentase kunjungan remaja yang melakukan konseling(%)	3,3	5		8		10		12		15		15	
	Persentase sekolah yang memiliki Perconselor(%)	45,1	50		55		60		65		70		70	
	Persentase sekolah yang memiliki guru terlatih PKPR(%)	91,2	93		95		97		98		100		100	
	Persentase sekolah memiliki Dokcil(%)	50,1	55		57		59		62		70		70	
	Persentase kasus Kekerasan Terhadap Anak	100	100		100		100		100		100		100	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR (2019)	OPD PJ(*)
			2015		2016		2017		2018		2019			
			TARGE T	RP (JUTA)	TARGE T	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)		
	(KTA) yang ditangani(%)													
	Persentase penjangkauan kesehatan siswa(%)	96,5	100	100		100		100		100		100		
	Persentase anemia remaja putri anak sekolah (SMP & SMA kelas 1)(%)	9,14	9	8		7		6		5		5		
	Persentase puskesmas yang melaksanakan Penyakit Tidak Menular (PTM) terintegrasi(%)	70	80	90		95		100		100		100		
	Persentase posbindu yang melaksanakan Penyakit Tidak Menular (PTM) terintegrasi(%)	25	35	40		45		50		55		55		
	Persentase kunjungan rawat jalan gigi dalam wilayah puskesmas yang tertangani (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase pemeriksaan laboratorium di Puskesmas(%)	10	13	15		18		20		20		20		
	Persentase calon jemaah haji yang diperiksa kesehatannya(%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase kelompok olah raga yang dibina(%)	69	72	75		78		80		83		83		
	Persentase keluarga rawan kesehatan yang dibina(%)	100	100	100		100		100		100		100		

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR (2019)	OPD PJ(*)
			2015		2016		2017		2018		2019			
			TARGE	RP	TARGE	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
			T	(JUTA)	T	(JUTA)	(JUTA)	(JUTA)	(JUTA)	(JUTA)	(JUTA)	(JUTA)		
	Persentase keluarga mandiri(%)	81,80	83	85		87		90		92		92		
	Persentase POS UKK yang dibina(%)	60	70	80		90		100		100		100		
	Persentase penanganan pasien gangguan kesehatan jiwa di puskesmas(%)	80	85	90		95		100		100		100		
	Persentase puskesmas siaga sehat jiwa(%)	16,67	20,80	25		29,10		33,30		37,50		37,50		
	Presentase penanganan kasus gangguan refraksi pada anak sekolah(%)	60	70	75		80		85		90		90		
	Jumlah operasi katarak pada masyarakat miskin	140	160	170		180		190		200		200		
	Persentase Pengobat tradisional yang dibina(%)	20	50	60		65		70		75		75		
	Persentase posyandu yang memiliki Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat (UKGM) (%)	71	76	82		88		94		100		100		
	Persentase posyandu yang memiliki Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) (%)	80	82	85		87		90		90		90		
	Persentase penjangkaran gangguan refraksi pada anak sekolah	20	40	50		60		70		80		80		

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR (2019)	OPD PJ(*)
			2015		2016		2017		2018		2019			
			TARGE T	RP (JUTA)	TARGE T	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)		
	(%)													
	Persentase penanganan kasus gangguan refraksi pada anak sekolah (%)	60	70		75		80		85		90		90	
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase posbindu yang dibina(%)	85	87	600	89	700	90	700	92	800	93	800	93	Dinas Kesehatan
	Persentase puskesmas ramah lansia(%)	100	100		100		100		100		100		100	
	Persentase lansia yang dibina (%)	100	100		100		100		100		100		100	
Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Balita gizi Buruk(%)	0,47	0,35	2.030	0,3	2.500	0,25	2.700	0,2	3.000	0,15	3.000	0,15	Dinas Kesehatan
	Persentase Balita pendek (%)	9,4	9,3		9,2		9		8,5		8		8	
	Persentase cakupan ASI Eksklusif(%)	76,4	77		78		80		85		90		90	
	Persentase Balita mendapat kapsul Vitamin A(%)	90,41	91		92		93		94		95		95	
	Persentase Balita yang ditimbang(%)	70	80		85		90		95		100		100	
	Persentase Remaja Putri Mendapat Fe(%)	0	15		20		25		30		35		35	
	Persentase Ibu hamil anemia(%)	20	19		18		17		16		15		15	
	Persentase balita gizi kurang (%)	2,8	8		7,5		7		6,5		6		6	
	Persentase balita pendek (%)	9,4	9,3		9,2		9		8,5		8		8	
	Persentase cakupan ASI Eksklusif (%)	76,4	77		78		80		85		90		90	
	Persentase balita	90,41	91		92		93		94		95		95	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR (2019)	OPD PJ(*)
			2015		2016		2017		2018		2019			
			TARGE T	RP (JUTA)	TARGE T	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)		
	mendapat kapsul Vitamin A (%)													
	Persentase ibu hamil KEK (%)	20	19		18		17		16		15		15	
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase lokasi bebas jentik nyamuk DBD(%)	93,5	95	3.700	95,1	3.950	95,2	4.200	95,3	4.500	95,4	4.800	95,4	Dinas Kesehatan
	Menurunnya angka kesakitan (IR) akibat DBD (per 100.000 penduduk)	75	60		55		50		45		40		40	
	Presentase penemuan kasus baru BTA positif TBC (CDR)(%)	91,4	91,52		91,64		91,76		91,88		92		92	
	Persentase angka kesembuhan TBC (cure rate)(%)	84	85		85		86		86		86		86	
	Persentase Angka konversi TBC(%)	82	83		84		85		86		87		87	
	Persentase penemuan diare balita(%)	96,7	96,8		96,9		97		97,1		97,2		97,2	
	Persentase penderita kusta minum obat(%)	100	100		100		100		100		100		100	
	Persentase penanganan kasus malaria(%)	100	100		100		100		100		100		100	
	Persentase penemuan kasus pneumonia Balita(%)	78,6	80		85		90		95		100		100	
	Persentase keberhasilan pengobatan TBC (Succes Rate) (%)	91	86		87		88		89		90		90	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR (2019)	OPD PJ(*)
			2015		2016		2017		2018		2019			
			TARGE T	RP (JUTA)	TARGE T	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)		
	Cakupan Angka Notifikasi Kasus (CNR) TBC per 100.000 penduduk	146	162		171		180		189		199		199	
	Persentase penanganan diare balita (%)	100	100		100		100		100		100		100	
	Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi (%)	80	81		82		83		84		85		85	
	Persentase pengetahuan Komprehensif HIV/AIDS Usia 15-24 tahun(%)	68,4	70		75		80		85		95		95	
	Persentase konseling tes HIV (VCT/PITC)(%)	6,6	10		15		20		25		30		30	
	Persentase ODHA yang mendapat ART(%)	45,4	65		70		75		80		85		85	
Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Jumlah puskesmas/pustu yang terbangun	53	56	8.000	59	8.500	62	9.500	65	9.000	68	9.000	68	Dinas Kesehatan
	Jumlah Puskesmas perawatan	3	4		5		6		6		6		6	
	Tersedianya Sistem informasi rujukan/kesehatan	0	1		1		2		2		2		2	
Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Sarana Kesehatan pemerintah dengan sistem pengelolaan keuangan BLUD(%)	0	20	1.050	40	2.100	60	2.200	80	3.250	100	3.350	100	Dinas Kesehatan
	Sarana kesehatan swasta yang dibina(%)	65	75		80		85		85		90		90	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR (2019)	OPD PJ(*)	
			2015		2016		2017		2018		2019				
			TARGE T	RP (JUTA)	TARGE T	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)			
	Persentase sarana kesehatan pemerintah yang terakreditasi nasional (%)	0	20		40		60		80		100		100		
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase JKN mandiri (jumlah peserta JKN mandiri dibagi jumlah penduduk)(%)	0	20	4.250	30	4.825	40	5.225	45	5.600	50	5.650	50	Dinas Kesehatan	
	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS(%)	61,7	63		65		67		70		72		72		
	Persentase Penyuluhan Kesehatan kepada Masyarakat(%)	65	67		69		71		73		75		75		
	Persentase Institusi yang Menerapkan 100% KTR(%)	22,49	45		50		55		60		75		75		
	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) madya (%)	0	6		7		8		9		10		10		
	Persentase tempat PBM Sekolah ber-PHBS (%)	57,9	61		64		67		70		74		74		
	Persentase kelurahan siaga aktif (%)	65	65		70		75		80		85		85		
	Persentase posyandu mandiri (%)	15	20		21		24		27		30		30		
	Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase akses jamban keluarga(%)	79,3	80,5	1.460	81	1.880	81,5	2.065	82	2.235	82,5	2.400	82,5	Dinas Kesehatan
		Persentase akses air bersih (%)	87,4	89		92		95		98		100		100	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR (2019)	OPD PJ(*)
			2015		2016		2017		2018		2019			
			TARGE T	RP (JUTA)	TARGE T	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)		
	Persentase akses SPAL yang memenuhi syarat (%)	27,6	29,5		30		30,5		31		31,5		31,5	
	Persentase akses pengelolaan sampah (%)	66,9	68,7		68,8		70		70,2		70,5		70,5	
	Persentase kelurahan STBM (%)	0,00	40		60		70		80		90		90	
	Persentase kelurahan ODF (%)	-	1		2		3		4		5		5	
	Persentase air minum yang memenuhi syarat(%)	75	89		90		91		92		93		93	
	Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas dengan RTH (%)	16	20		40		60		80		100		100	
	Persentase Industri dengan sanitasi layak(%)	20	25		30		35		40		45		45	
	Persentase Peskontrol yang memenuhi syarat(%)	50	55		60		65		70		75		75	
Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase TPM yang laik sehat(%)	25	30	4.600	50	5.080	60	5.560	80	6.030	100	6.100	100	Dinas Kesehatan
	Persentase produk makanan yang diuji memenuhi syarat kesehatan(%)	70	74		78		82		86		90		90	
	Persentase produk farmasi yang diuji memenuhi syarat kesehatan(%)	50	73		75		77		79		81		81	
	Persentase sarana industri rumah tangga	90	95		96,5		98		99		100		100	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR (2019)	OPD PJ(*)
			2015		2016		2017		2018		2019			
			TARGE	RP	TARGE	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
			T	(JUTA)	T	(JUTA)		(JUTA)		(JUTA)		(JUTA)		
	pangan (IRTP) yang di bina dan memenuhi syarat kesehatan(%)													
	Persentase jenis obat dengan tingkat ketesediaa minimal 18 bulan(%)	97	100		100		100		100		100		100	
	Persentase penggunaan obat generik di sarana kesehatan dasar(%)	100	100		100		100		100		100		100	
Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Rumah Sakit Umum Daerah	0	1	15.00	0	20.00	0	25.000	0	30.000	0	35.00	1	Rumah Sakit Umum Daerah dan Dinas Kesehatan
				0		0						0		
	Persentase Perawatan per tempat tidur(%)	0	55		60		65		67		70		70	
	Persentase Jumlah tempat tidur Kelas III RS Pemerintah(%)	0	40		40		40		40		40		40	
	Cakupan pelayanan kesehatan untuk BPJS(%)	0	100		100		100		100		100		100	
	Persentase Jumlah RS dengan proporsi 25% ruang tidur bagi kelas III(%)	0	25		25		25		25		25		25	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR (2019)	OPD PJ ^(*)
			2015		2016		2017		2018		2019			
			TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)		
PEKERJAAN UMUM														
Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jumlah panjang ruas jalan utama (Arteri, Kolektor & Lokal) terbangun sesuai arahan RTRW 2011 – 2031 (km)	266.468	268.818	218.470	270.418	157.330	272.198	232.325	274.598	232.325	276.048	111.975	276.048	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
	Jumlah simpang yang meningkat kapasitasnya	0	0		0		2		4		6		6	
	Jumlah panjang ruas jalan yang dilebarkan/ditingkatkan kapasitasnya (km)	0	0		0		1,8		3,4		5,74		5,74	
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jumlah panjang ruas jalan yang ditingkatkan strukturnya/kelasnya (km)	48,857	50,857	109.385	52,857	120.306	54,857	132.335	56,857	145.587	58,857	160.185	58,9	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
	Persentase panjang jalan berkondisi mantap (baik & sedang) dari seluruh panjang jalan (%)	86	86,5		87		87,5		88		88,5		88,5	
Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Penurunan jumlah lokasi rawan genangan	16	16	800	12	16.000	9	13.200	6	14.400	4	10.400	4	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Pembangunan Prasarana Pedestrian dan Pesepeoda	Panjang prasarana pedestrian yang meningkat kapasitasnya (pelebaran prasarana pedestrian) (km)	0,545	5,399	7.181	10,253	31.459	15,107	32.137	19,961	36.966	24,813	28.118	24,813	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air &
	Panjang prasarana pedestrian jalan utama terbangun (km)	249,402	250,62		255,292		260,762		266,952		271,062		271,062	
	Jalur sepeda yang dikembangkan (koridor)	0	0		1		2		2		3		3	
Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Jumlah sistem ter-update	2	0		1	1.000	1		2	1.200	2		2	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR (2019)	OPD PJ(*)
			2015		2016		2017		2018		2019			
			TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Rasio sarana dan prasarana terhadap beban layan (%)	65	70	3.500	75	3.745	80	4.007	85	4.288	90	4.588	90	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Penguatan Kebijakan dan Regulasi Kebinamargaan	Jumlah peraturan bidang Bina Marga (peraturan)	1	1	500	2	550	3	600	5	1.300	6	700	6	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Panjang saluran irigasi berkondisi baik (km)	11	11	9.625	11	10.299	11	11.020	11	11.791	11	12.616	11	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Panjang sungai/saluran berkondisi baik (km)	174,54	176,54	59.101	178,54	74.570	180,54	84.174	182,54	87.313	184,54	77.162	184,54	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
	Panjang sungai/saluran yang ditingkatkan kapasitasnya (km)	0	0		2		4		6		8		10	
	Jumlah situ/danau/kolam retensi berkondisi baik	5	5		6		6		7		7		7	
Pengendalian Banjir	Jumlah kawasan rawan banjir (lokasi)	4	4	4.000	3	4.400	2	4.800	2	5.200	1	5.600	1	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Pembangunan Dan Pengelolaan Sistim Informasi/Data Base Sumber Daya Air	Jumlah sistem data SDA	2	0	-	1	1.000	1	-	2	1.200	2	-	2	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Penguatan Kebijakan dan Regulasi Sumber Daya Air	Jumlah peraturan bidang Sumber Daya Air (SDA) (peraturan)	1	1	500	2	550	3	600	4	650	4	-	4	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Jumlah rumah tangga berakses air minum bersih (non PDAM)	840	500	52.450	500	57.400	500	5.600	500	7.000	500	5.000	2500	Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman
	Perda pengelolaan	0	1		-		-		-		-		1	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	Penambahan	381	50		70		100		-		-		601	
	Pembangunan IPAL	0	1		1		-		-		-		1	
	Pembangunan SP IPAL	-	-		500		500		500		500		500	
	Pembangunan IPLT	1	-		1		-		1		-		3	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR (2019)	OPD PJ(*)
			2015		2016		2017		2018		2019			
			TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)		
	Peningkatan pelayanan limbah cair domestik (%)	1	1,2		1,5		1,7		2		2,5		2,5	
Tanggap Darurat Bencana Daerah	Tingkat penanganan kejadian bencana (%)	100	100	3.000	100	3.000	100	3.000	100	10.000	100	3.000	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Pemulihan Pasca Bencana	Tingkat pemulihan pasca bencana (%)	100	100	12.000	100	12.000	100	12.000	100	3.000	100	12.000	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Dinas Kebersihan dan Pertamanan
		10	15		15		15		15		15		15	Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman
PERUMAHAN RAKYAT														
Lingkungan Sehat Perumahan	Peningkatan Jumlah Rumah layak huni (unit)		272	77.372	340	77.440	408	77.958	476	78.026	544	78.094	544	Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman
	Pengurangan Jumlah titik lokasi kawasan kumuh (titik)	43	3		3		3		3		3		28	
	Terpeliharanya jalan lingkungan dalam kondisi baik (m2)	548.153	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		1.048.153	
	Berkurangnya lokasi rawan longsor di lingkungan permukiman (titik)	3.400	120		120		120		120		120		2.800	
	Peningkatan Panjang saluran pembuangan air	767,400	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		867,400	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR (2019)	OPD PJ(*)
			2015		2016		2017		2018		2019			
			TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)		
	hujan perumahan (m2)													
	Jumlah Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) yang dibangun	17	6		6		6		6		6		47	
	Peningkatan jumlah hunian Rusunawa/Rusunami (unit)	320	518		518		518		518		518		518	
	Cakupan rumah tangga yang dilayani Sanimas (SR)	4.700	6.200		7.700		9.200		10.700		12.200		12.200	
Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Respon time kebakaran (menit)	11	11	5.500	11	5.500	11	5.500	11	5.500	11	5.500	11	Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman
Pengelolaan Areal Pemakaman	Jumlah TPU (lokasi)	8	8	11.156	8	6.156	8	7.695	8	9.079	8	11.349	8	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Peningkatan Utilitas Perkotaan	Jumlah PJU (TL)	12.000	13.000	22.000	14.000	23.000	14.500	23.500	15.000	24.000	15.500	24.500	15.500	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Penataan dan Pengaturan Bangunan Gedung	Jumlah jenis bantuan Revitalisasi kawasan	5	5	2.500	5	2.500	5	2.500	5	2.500	5	2.500	5	Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman
	Kajian teknis bangunan	0	1		1		1		1		1		5	
		4	2		2		2		2		2		14	
Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan Jasa Konstruksi	Jumlah asosiasi penyedia jasa yang mendapat pembinaan teknis	28	28	150	28	160	28	165	28	170	28	190	28	Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman
PENATAAN RUANG														
Perencanaan Tata Ruang	Jumlah rencana umum, rencana detil dan rencana pengembangan kawasan yang disusun	6	6	2.350	6	2.700	6	2.250	6	2.750	6	2.250	36	Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman
	Rencana rinci pengembangan kawasan penyangga Kebun Raya Bogor				Ada								Ada	Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR (2019)	OPD PJ(*)
			2015		2016		2017		2018		2019			
			TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)		
	Presentase kerlaksanaan perencanaan tata ruang (%)	0	20		40		60		80		100		100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pemanfaatan Ruang	Jumlah review zoning PKL (terhadap 14 zona PKL)	0	0		1	550	1	200	1	200	1	200	4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Tingkat konsistensi pemanfaatan ruang	0	0		90		90		90		90		90	
Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Presentase keterlaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang	0	20	1.050	40	1.150	60	1.150	80	1.150	100	1.150	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Kesesuaian antara IMB dengan bangunan dilapangan (%)	90	90	100	92	523	94	683	96	752	98	827	98	Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman
	Pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin (%)	70	72		74		76		78		80		80	
	Tindak lanjut atas pengaduan pelanggaran tata ruang (%)	100	100		100		100		100		100		100	
	Jumlah regulasi penataan ruang (perda/perwali)	10	2		2		2		2		2		20	
	Tingkat kesesuaian antara PSU dengan perizinan	0	100		100		100		100		100		100	
	Jumlah PSU yang diserahkan pengembang	0	3		3		3		3		3		15	
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang	penyelenggaraan sosialisasi penataan ruang (%)	100	100	250	100	500	100	500	100	500	100	500	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Tindak lanjut Pengaduan masyarakat akan pelanggaran tata ruang	100		100		100		100		100		100		

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR (2019)	OPD PJ ^(*)
			2015		2016		2017		2018		2019			
			TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)		
PERENCANAAN PEMBANGUNAN														
Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Presentase keterlaksanaan perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	0	20	750	40	100	60	100	80	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Sarana Prasarana Kota	Jumlah dokumen perencanaan sarana prasarana perkotaan	0	2	1.200	2	1.200	2	1.200	2	1.200	2	1.200	10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kerja Sama Pembangunan	Jalinan kerja sama antar daerah, regional (Jabodetabekpunjur) dan internasional yang terjalin	Terjalin dan aktif	Terjalin dan aktif	713	Terjalin dan aktif	713	Terjalin dan aktif	650	Terjalin dan aktif	650	Terjalin dan aktif	800	Terjalin dan aktif	Sekretariat Daerah (Bag. Pemerintahan)
	Tingkat pencapaian koordinasi pembangunan(%)	20	20		40		60		80		100		100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya dokumen rencana kegiatan prioritas kecamatan (%)	100	100	4.000	100	4.000	100	4.000	100	4.000	100	4.000	100	Kecamatan
	Tingkat pelaksanaan proses perencanaan pembangunan daerah(%)	20	20		40		60		80		100		100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tingkat penyusunan dokumen perencanaan sektoral bidang ekonomi	20	20	375	40	375	60	1.238	80	1.275	100	1.313	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengembangan Data dan Informasi	Tingkat ketersediaan dan validitas data/informasi untuk perencanaan(%)	80	20	450	40	450	60	900	80	927	100	955	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana	Tingkat penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sarana prasarana(%)	20	20	500	40	500	60	500	80	500	100	500	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR (2019)	OPD PJ ^(*)
			2015		2016		2017		2018		2019			
			TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)		
Perencanaan Sosial Budaya	Tingkat penyusunan dokumen perencanaan sektoral bidang sosial budaya(%)	20	20	638	40	638	60	591	80	609	100	627	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Tingkat penyusunan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam(%)	20	20	500	40	500	60	500	80	500	100	500	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PERHUBUNGAN														
Peningkatan Pelayanan Angkutan	Operasional (Jumlah Koridor BTS Trans Pakuan	3	4	45.783	5	19.607	6	19.351	7	34.436	7	3.307	7	Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	Jumlah Travek Feeder	6	10		14		17		20		23		23	
	Penurunan Jumlah Becak	1.725	1.300		1.000		750		500		250		250	
	Jumlah koridor bus	0	0		1		1		1		0		3	
	Angkutan wisata dalam kota (paket)	0	0		0		2		0		0		2	
Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportai	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis	6	29	325.250	22	463.960	16	190.314	14	299.729	12	19.090	99	Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	Luas lahan yang di Bebaskan (Hektar)	0	8,25		7,5		5		3,5		0,5		24,75	
	Jumlah Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana & Sarana Perhubungan	4	12		14		17		14		11		72	
Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Jumlah Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Terpasang	51	8	22.495	7	21.186	9	20.367	7	17.479	7	17.346	89	Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	Jumlah Pelaksanaan Operasi Penertiban Gabungan	60	108		108		108		108		108		600	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR (2019)	OPD PJ ⁹⁾
			2015		2016		2017		2018		2019			
			TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)		
Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi	Jumlah Peserta Penyegaran Petugas Operasional LLAJ	-	100	1.470	100	1.642	100	1.682	100	1.835	100	1.927	500	Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	Jumlah Peserta Sosialisasi	2.100	900		1.000		1.000		1.000		1.000		7.000	
Pengembangan Transportasi Ramah Lingkungan	Pelaksanaan Uji Petik Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor	6	12	1,620	12	2,013	12	923	12	962	12	1,005	66	Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	22.418	21.925		21.769		21.771		21.227		22.435		22.435	
	Jumlah Kendaraan Umum Berbahan Bakar Alternatif	0	200		400		600		800		1000		1000	
LINGKUNGAN HIDUP														
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Volume Sampah Terangkut (persen)	70,37	71,37	30.000	72,37	35.000	73,37	40.000	74,37	45.000	75,37	50.000	75,37	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	Jumlah kelompok masyarakat (Pokmas) pengelola sampah berbasis 3R (Pokmas per kelurahan)	2	2		2		2	1.960	2	2.156	2	176	12	Kecamatan
Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA	Volume sampah yang diolah di TPA Galuga (m ³)	1.756	1.791	29.357	1.827	32.688	1.864	31.108	1.902	33.903	1.941	22.920	1.941	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	Persentase volume sampah yang diolah di TPA (%)	98,16	98,16		98,16		98,16		98,16		98,16		98,16	
	Jenis pengolahan/pemrosesan akhir sampah	12	12		12		12		12		12		12	
	Jumlah fasilitas pengolahan/pemrosesan akhir sampah	5	6		6		6		6		6		6	
	Kapasitas pengolahan (m3/hari)	2.520	2.587		2.635		2.684		2.733		2.783		2.783	
Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R	Reduksi Sampah (%)	3,2	3,5	9.583	3,8	9.656	4,1	9.728	4,4	9.800	4,7	9.872	4,7	Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Kecamatan
	Jumlah TPS 3R di daerah yang belum terlayani oleh angkutan (lokasi)	13	14		15		16		17		18		18	
	Jumlah Bank Sampah (lokasi)	10	25		40		55		70		85		85	
	Pengembangan kemitraan (kelompok)	0	5		10		15		20		25		25	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR (2019)	OPD PJ(*)
			2015		2016		2017		2018		2019			
			TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)		
	Terpenuhinya target retribusi (%)	100	100		100		100		100		100		100	
	Persentase pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga	13	14		15		16		17		18		18	
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air (%)	-	20	2.550	40	2.850	60	2.550	80	2.550	100	2.550	100	Badan Pengelola Lingkungan Hidup
	Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tak bergerak yang telah mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara (%)	-	20		40		60		80		100		100	
	Luasan yang telah ditetapkan yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	-	20		40		60		80		100		100	
	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang memiliki ijin pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan (IPLC dan TPS B3)		5		5		5		5		5		25	
	Jumlah pengawasan pengelolaan lingkungan dari kegiatan dan/atau	400	150		150		150		150		150		750	
	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (%)	-	60		70		80		90		100		100	
	Jumlah pengelolaan limbah B3 yang dipantau	30	40		40		40		40		200		200	
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya	Jumlah pengendalian pemanfaatan air tanah di Kota Bogor (kegiatan usaha)	180	200	3.250	200	3.250	200	3.250	200	3.250	200	3.250	200	Badan Pengelola Lingkungan Hidup

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR (2019)	OPD PJ ¹⁾
			2015		2016		2017		2018		2019			
			TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)		
Alam	Jumlah sumber mata air yang dilindungi (lokasi)	34	8		8		8		8		8		74	
	Jumlah bangunan konservasi air tanah (unit)	1.306	100		100		100		100		100		1.806	
	Jumlah perlindungan, pelestarian dan pengembangan keanekaragaman hayati (lokasi)	13	7		7		7		7		7		48	
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi	Jumlah dokumen informasi kualitas lingkungan	2	2	950	2	950	2	950	2	950	2	950	2	Badan Pengelola Lingkungan Hidup
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth)	Luas Taman yang memenuhi kriteria ramah anak, lansia dan difabel (m2)	398.328,63	408.328	8.800	423.328	10.500	428.328	11.500	433.328	12.500	438.328	13.500	438.328	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	Jumlah taman tematik		2		2		2		2		2		10	
	Jumlah taman yang dikelola komunitas		2		2		2		2		2		10	
	Jumlah Hutan Kota yang terbangun (lokasi)	1	0		1		0		1		0		3	Badan Pengelola Lingkungan Hidup
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah inventarisasi dan identifikasi GRK	-	1	10.100	1	12.250	1	13.250	1	14.200	1	16.100	5	Badan Pengelola Lingkungan Hidup
	Jumlah kampung iklim	-	1		1		1		1		1		5	
	Jumlah energy terbarukan	1	1		1		1		1		1		1	
	Fasilitasi penyelenggaraan koordinasi dan perencanaan lingkungan hidup dan perubahan iklim	0	20		40	450	60	450	80	450	100	450	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kemitraan Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yang difasilitasi dan dibina teknis Program Adiwiyata dan sekolah berbudaya lingkungan	50	60	850	70	850	80	850	90	900	100	900	100	Badan Pengelola Lingkungan Hidup
	Jumlah sosialisasi lingkungan hidup (tema)	1	3		3		3		3		3		3	
	Jumlah kampanye lingkungan hidup	-	1		1		1		1		1		5	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR (2019)	OPD PJ(*)
			2015		2016		2017		2018		2019			
			TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)		
PERTANAHAN				-		-								
Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Masalah pertanahan yang termediasi (%)	83	83	350	83	350	83	475	83	475	83	475	83	Sekretariat Daerah (Bag. Pemerintahan)
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL														
Penataan administrasi kependudukan	Tertatanya administrasi kependudukan (%)	100	100	3.000	100	3.100	100	3.200	100	3.500	100	3.800	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Penguatan fungsi RT/RW dalam penertiban dan	NA	100		100		100		100		100		100	
	Pengembangan kebijakan daerah untuk meminimalkan dampak negatif dari urbanisasi	0	-	-	-	-	1	300	-	-	-	-	1	
KETAHANAN PANGAN														
Peningkatan Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (%)	81	90	2.197	94	2.263	96	2.331	98	2.401	100	2.473		Kantor Ketahanan Pangan
	Stabilitas harga dan pasokan pangan (%)	100	100		100		100		100		100		100	
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK														
Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan (%)	65	67		69		71		73		75		75	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	Jumlah perempuan yang memperoleh pendidikan politik (orang)	500	550		600		650		700		750		750	
	Jumlah perempuan yang berperan aktif di tiap kelurahan dalam kegiatan P2WKSS (KK)	500	600		700		800		900		1000		1000	
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah instansi terkait yang memahami perlindungan dan hak-hak anak	10	12		14		16		18		20		20	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
	Jumlah aparatur pimpinan wilayah yang memahami perlindungan dan hak-hak anak	74	74		74		74		74		74		74	
	Jumlah orang tua yang memahami perlindungan dan hak-hak anak	0	68		136		170		204		238		238	
	Jumlah anak yang	100	136		170		204		238		272		272	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR (2019)	OPD PJ ¹⁾
			2015		2016		2017		2018		2019			
			TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)		
	memahami perlindungan dan hak-hak anak													
	Jumlah satuan pendidikan yang memahami perlindungan dan hak-hak anak	0	12		18		24		30		36		36	
	Jumlah Peserta pelatihan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG)	30	30		30		30		30		30		30	
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA														
Kesehatan Reproduksi Remaja	Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja	24	25		27		27		28		29		29	Keluarga Berencana
Keluarga Berencana	Kesertaan ber-KB (Akseptor)	111.183	120.183		129.183		138.183		147.183		156.183		156.183	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Peningkatan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Anggota Kelompok ketahanan keluarga dalam kesertaan ber KB	6.656	6.706		6.756		6.806		6.856		6.906		6.906	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
	Anggota kelompok ketahanan keluarga dalam bidang ketahanan sosial	NA	500		600		700		800		900		900	
SOSIAL														
Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	Domunen Profil Bidang Sosial	0	1	2.575	0		1	3.025	0		1	3.475	3	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi
	Jumlah operator, Pendamping dan Rumah Tangga Sangat Miskin(RTSM)/KSM Program Keluarga Harapan (PKH) yang dibina	10.579	10.419		10.259		10.099		9.939		9.779		9.779	
	Rumah Tangga Sangat Miskin(RTSM)/KSM Eks Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)	10.544	160		160		160		160		160		9.744	
	Jumlah Lanjut Usia yang ditangani	75	150		150		150		150		150		825	
	Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang ditangani	75	90		97		100		100		100		562	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR (2019)	OPD PJ(*)
			2015		2016		2017		2018		2019			
			TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)		
	Terfasilitasinya dan Terlayani Pemulangan OT Ke Tempat Asalnya	100	100		100			100		100			100	
	Pengurusan / Pemulasaran Bagi Mayat Terlantar	100	100		100			100		100			100	
Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Jumlah panti asuhan yang dibina	72	74	150	74	150	74	190	79	240	78	230	78	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi
	Pesentase Pengadaan Lahan Panti (%)	0	0		0		100		0		0		100	
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah Anjal, Gepeng, dan PSK yang ditangani			1.200		1.350		1.500		1.650		1.800		Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi
	Anjal	122	125		128		131		134		137		137	
	Gepeng	216	221		227		233		239		245		245	
	PSK	101	104		107		110		113		116		116	
Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, psk, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Jumlah Korban Narkotika dan HIV/AIDS/WTS yang dibina	25	250	700	300	750	300	800	300	850	300	900	1.475	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi
	Jumlah Eks Psikotik yang dibina	25	100		100		100		100		100		525	
	Sosialisasi Pencegahan Korban Tindak Kekerasan dan Trafficking (%)	80	100		100		100		100		100		100	
Pembinaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar / Anak Jalanan yang dibina	50	50	550	50	575	50	650	50	675	50	750	2.750	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi
Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Penyandang Cacat Trauma yang dibina	93	230	550	230	650	230	750	230	850	230	900	1.243	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah makam pahlawan yang terpelihara/terawat	1.060	1.065	900	1.070	1.000	1075	1.100	1.080	1.200	1.085	1.300	1.085	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi
	Jumlah PSKS yang terbina	77	82		87		92		97		102		102	
	Jumlah PSKS yang menerima bantuan	6	10		12		14		16		18		18	
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi korban Bencana	100	100	500	100	600	100	650	100	700	100	750	100	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi
	Jumlah pengadaan sekretariat POSKO Penanggulangan Bencana	1	0		2		2		2		0		7	
	Jumlah Mobil Rescue	1	2		2		2		3		3		3	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR (2019)	OPD PJ ¹⁾
			2015		2016		2017		2018		2019			
			TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)		
	Motor Rescue	0	1		2		3		4		5		5	
KETENAGAKERJAAN														
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah pencari kerja yang dilatih di BLK	786	128	795	128	819	144	844	144	989	144	895		Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi
	Jumlah pencari kerja yang magang di perusahaan	130	50		50		50		50		55		55	
	Jumlah Keluarga Miskin yang dialih	322	105		105		105				120		435	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi
	Persentase Lembaga Latihan Swasta (LLS) yang dibina (%)	50	100		100		100		100		100		100	
	Jumlah Kejuruan yang memiliki sarana dan prasarana pelatihan kerja memadai	13	13		13		13		13		13		13	
	Jumlah Balai latihan kerja	1	1		1		2		3		3		3	
Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah pekerja anak	100	100	1.437	100	1.480	100	1.525	100	1.570	100	1.570	100	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi
	Upah Minimum Kota sesuai Kriteria Hidup Layak (Rp)	2.002.000	2.493.941		2.634.632		2.775.773		2.916.914		3.058.055		3.058.055	
	Jumlah Angka Kecelakaan Kerja	344	333		322		311		300		289		289	
Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah penyerapan tenaga kerja	1.308	1.347	344	1.387	355	1.428	365	1.470	376	1.514	388	1.514	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi
	Jumlah wirausaha baru	128	253		194		148		57		164		944	
	Persen pencari kerja yang dilatih di BLK yang terserap di pasar kerja	26	27		27		28		28		29		29	
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH														
Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Jumlah UMKM yang produktif	10.832	20		25		35		40		50		11.002	Dinas Koperasi dan UMKM
	Jumlah kelompok usaha yang mendapat bantuan permodalan	72	75		78		81		83		87		476	
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi aktif	301	85	419	85	431	85	444	85	457	85	471	726	Dinas Koperasi dan UMKM
	Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang menjadi Lembaga	136	27		27		27		27		28		0	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR (2019)	OPD PJ(*)
			2015		2016		2017		2018		2019			
			TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)		
	Keuangan Mikro berbadan hukum													
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah promosi yang dilakukan	25	5	1.835	5	1.890	5	1.947	5	2.005	5	2.065	25	Dinas Koperasi dan UMKM
	Jumlah kemitraan dan kerjasama UMKM	3	5		7		9		11		13		13	
	Jumlah promosi ekonomi	10	2	1.105	2	1.138	2	1.172	2	1.207	2	1.243	20	Sekretariat Daerah (Bag. Perekonomian)
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Persentase PKL yang terelokasikan berdasarkan zona	0	100	4.323	100	4.452	100	4.585	100	4.723	100	344.712	100	Dinas Koperasi dan UMKM
	Persentase Pedagang Kaki Lima yang direlokasi dan mendapatkan pembinaan (%)	0	100		100		100		100		100		100	
PENANAMAN MODAL				-	-									
Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	Persentase perizinan dan non perizinan yang dapat dilayani sesuai dengan SOP (%)	100	100	7.244	100	8.015	100	8.973	100	9.863	100	10.912	100	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
	Nilai realisasi investasi (dalam miliar rupiah)	3.583	2.100		2.205		2.315		2.431		2.552		2.552	
	Jumlah promosi penanaman modal	4	4		4		4		4		4		20	
	Cakupan perizinan yang terlayani (%)	100	100		100		100		100		100		100	Kecamatan
KEBUDAYAAN														
Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah pemberian Bantuan sarana prasarana kesenian	1	2	1.125	0	1.295	4	1.685	0	1.745	68	1.805	68	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Jumlah Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama dibidang Budaya	6	6		6		6		8		10		42	
	Jumlah Sosialisasi Nilai Budaya	1	1		2		2		3		3		12	
	Jumlah Penggandaan Buku Sejarah Bogor	666	666		-		900		-		1.000		3.232	
	Jumlah Sekolah yang mendapatkan sosialisasi nilai nilai tradisi.	0	10		15		18		21		23		51	
	Jumlah kelompok Peserta	24	26		27		29		30		31		31	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR (2019)	OPD PJ ¹⁾
			2015		2016		2017		2018		2019			
			TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)		
	Lomba Seni tradisional tingkat sekolah SD, SMP,SMA													
Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah perekaman dan digitalisasi bahan pustaka	-	1	380	1	465	1	455	2	785	2	990	2	Pengelolaan Kekayaan Budaya
	Jumlah pelajar dan generasi muda yang mengikuti Sosialisasi Sejarah Tradisional	0	40		45		50		50		50		235	
	Jumlah Seminar Pelestarian dan pengembangan Wayang	0	1		2		2		3		4		12	
	Jumlah Situs dan Cagar Budaya yang terpelihara	16	2		0		0		0		0		18	
	Jumlah Sekolah yang mendapatkan sosialisasi Cagar Budaya	35	20		20		22		24		26		112	
	Jumlah rapat koordinasi cagar budaya	1			1				1				3	
	Jumlah papan nama/ paneng cagar budaya	30	6		6		6		6				54	
	Jumlah Pameran Kepurbakalaan	0	1		1		1		1		1		6	
Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah gelar seni yang diikuti oleh komunitas, kelompok /sanggar seni	30	32	2.221	33	2.692	35	3.028	38	3.500	40	3.872	208	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Jumlah festival seni yang diikuti oleh sanggar seni	4	7		8		9		10		11		11	
	Jumlah Pameran Seni Rupa yang diikuti oleh komunitas seni rupa	2	3		3		3		4		4		4	
	Jumlah dialog Kebudayaan	0	2		4		6		6		8		26	
	Jumlah Pagelaran Kesenian dan Kebudayaan Daerah	2	25		26		28		28		29		138	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR (2019)	OPD PJ(*)
			2015		2016		2017		2018		2019			
			TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)		
	Pagelaran Wayang Golek	2	2		2		2		2		2		2	
Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah kemitraan yang terjalin dengan lembaga kebudayaan	3	4	160	5	245	6	360	7	395	8	450	8	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Jumlah kemitraan yang terjalin dengan lembaga kebudayaan	0	1		2		3		3		3		12	Dinas Kebudayaan
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA														
Peningkatan Peran serta kepemudaan	Jumlah siswa yang mengikuti seleksi dan diklat PASKIBRAKA	200	225	705	250	726	275	748	300	770	325	793	450	Kantor Pemuda dan Olah Raga
	Jumlah pemuda yang mengikuti PAPAN dan BPAP	30	40		50		60		70		80		80	
	Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan Pemuda Pelopor	30	32		34		36		38		40		40	
	Jumlah pemuda/pelajar yang mengikuti pembinaan/pendidikan keagamaan di luar jam sekolah	NA	100		100		100		100		100		500	
Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Jumlah pemuda yang memahami tentang undang - undang kepemudaan	0	68	9.477	136	9.762	136	10.055	136	10.356	136	10.667	612	Kantor Pemuda dan Olah Raga
Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Jumlah Atlet dengan cabang olahraga yang diikutsertakan dalam POPWIL	114	127	7.034	0	7.245	127	7.462	0	7.686	127	7.917	127	Kantor Pemuda dan Olah Raga
	Jumlah Atlet dengan cabang olahraga yang diikutsertakan dalam POPDA	116	0		130		0		140		0		140	
	Jumlah Atlet dengan cabang olahraga yang diikutsertakan dalam Pekan Olahraga Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA)						300		250		150		150	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR (2019)	OPD PJ ¹⁾	
			2015		2016		2017		2018		2019				
			TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)			
	Pekan Olahraga Pondok Pesantren Daerah tingkat Wilayah (POSPEDAWIL)	120	0		0			130		0		0		130	Sekretariat Daerah (Bag. Masyarakat)
	Pekan Olahraga Pondok Pesantren Daerah tingkat Jawa Barat (POSPEDAJABAR)	0	75		0			0		80		0		80	
	Pekan Olahraga Pondok Pesantren Daerah tingkat Nasional (POSPEDANAS)	0	0		25			0		0		30		30	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Lapangan Olahraga yang di renovasi	7	300	1.107	5	1.140	5	1.174	-	1.210	5	1.246	-		Kantor Pemuda dan Olah Raga
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI															
Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Penyelenggaraan peringatan hari hari besar	1	1	1.459	1	1.496	1	1.961	1	2.012	1	2.085	1		Sekretariat Daerah (Bag. Umum)
	Jumlah dialog lintas agama	7	7		7			7		7		7		35	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan(per tahun)	600	600	150	600	150	600	150	600	150	600	150	600		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Pendidikan Politik Masyarakat	Tingkat partisipasi dalam Pemilu Kota (%)	75	-	-	-	-	-	-	78	2.300	-	1.000	78		
	Tingkat partisipasi dalam Pemilu Provinsi (%)	66	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	70		
	Tingkat partisipasi dalam Pemilu Nasional (%)	75	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	78		
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah pengendalian dan penindakan yang dilakukan perangkat daerah (kasus)	36	46	500	56	500	66	600	76	600	86	700	86		
Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Titik rawan PKL yang menjadi titik tertib PKL (titik lokasi)	10	10	10.295	10	11.357	10	12.428	10	12.824	10	14.428	10		Satuan Polisi Pamong Praja

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR (2019)	OPD PJ(*)
			2015		2016		2017		2018		2019			
			TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)		
	Anjal yang terjaring	850	850		800		750		700		650		650	
	Titik-titik rawan anjal menjadi bebas anjal	0	2		3		3		3		3		14	
	Aktivitas penegakan Perda dan ketertiban umum (kali)	420	420		450		450		450		450		450	
	Jumlah Linmas (orang)	3.875	3.895		3.915		3.935		3.955		3.975		3.975	
	Kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan SIMSWAKARSA (aparat)	69	69		69		69		69		69		69	
	Penertiban pedagang dan pendatang ilegal (kali)	NA	12		12		12		12		12		60	
	Persentase penanganan kejadian konflik antar golongan dan SARA (%)	100	100		100		100		100		100		100	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN														
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Ketaatan SKPD terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku (%)	10	20	1.620	30	1.635	40	2.185	50	2.230	60	2.395	60	Inspektorat
	Persentase pejabat yang melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara tepat waktu (%)	100	100		100		100		100		100		100	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen keuangan (APBD dan DPA SKPD), laporan keuangan, dan pelayanan keuangan yang dihasilkan secara tepat	100	100	990	100	1.089	100	1.150	100	1.200	100	1.300	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR (2019)	OPD PJ ¹⁾
			2015		2016		2017		2018		2019			
			TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)		
	waktu (%)													
	Tingkat tertib administrasi pengelolaan keuangan (ketepatan waktu penyampaian dokumen laporan keuangan daerah) (%)	100	100	700	100	700	100	700	100	700	100	700	100	Sekretariat Daerah (Bag. Keuangan)
	Tingkat realisasi pendapatan daerah (juta rupiah)	1.410.874	1.801.999	7.750	1.928.139	8.250	2.063.108	11.500	2.207.526	12.000	2.362.053	12.500	2.362.053	Dinas Pendapatan Daerah
	Jumlah wajib pajak yang melakukan pelaporan dan pembayaran secara online melalui Sistem Informasi Pajak Daerah (SIP DEH) (%)	n.a	60		80		100		100		100		100	
	Wajib pajak yang puas dengan pelayanan pembayaran pajak (%)	n.a	65		Meningkat		mening kat		meningka t		meningkat		meningkat	
	Jumlah Objek Pajak (OP) PBB yang telah dimutakhirkan (OP)	11.366	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		220.000	Dinas Pendapatan Daerah/Kecamatan
Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	Pelaporan, inventarisasi, pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Daerah (%)	100	100	5.970	100	6.100	100	6,260	100	6.500	100	6.700	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pengendalian Pembangunan	Tingkat tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan (%)	97	> 97	1,375	> 97	1,400	> 97	1,425	> 97	1,450	> 97	1,475	> 97	Sekretariat Daerah (Bag. Pengendalian Program)
Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Pemerintah Daerah	Nama Rupabumi di Kota Bogor yang dibakukan	0,47	0,49	131	0,6	131	0,8	175	0,9	175	-	-	-	Sekretariat Daerah (Bag. Pemerintahan)

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR (2019)	OPD PJ(*)
			2015		2016		2017		2018		2019			
			TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)		
Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Rapat kerja Walikota/Wakil Walikota yang terfasilitasi (%)	90	90	800	90	850	90	900	90	900	90	950	90	Sekretariat Daerah (Bag. Pemerintahan)
	Tingkat realisasi agenda kedinasan kepala daerah (%)	100	100	3.500	100	3.500	100	3.500	100%	3.500	100	3.500	100	Sekretariat Daerah (Bag. Keuangan)
Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan	Tingkat pelaksanaan urusan yang dilimpahkan kepada kecamatan dan kelurahan (%)	100	100	1.725	100	1.045	100	1.260	100	1.385,45	100	1.524	100	Sekretariat Daerah (Bag. Pemerintahan)
Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Pengaduan masyarakat yang ditangani (%)	NA	100	100	100	100	100	150	100	150	100	150	100	Sekretariat Daerah (Bag. Humas)
Pemberdayaan Lembaga Sosial	Persentase Lembaga sosial yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan (%)	NA	60	200	65	200	70	200	75	200	80	200	80	Sekretariat Daerah (Bag. Kemasyarakatan)
	Tenaga pendidik Diniyah Takmiliyah yang mendapat insentif (%)	NA	60		70		80		90		100		100	
	Jumlah anggota masyarakat peserta pembinaan keagamaan	NA	10.000		12.500		15.000		17.500		20.000		25.000	
	Jumlah lembaga keagamaan yang mendapatkan bantuan sarana-prasarana	NA	20		25		30		35		40		150	
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat pada seluruh SKPD yang memberikan pelayanan publik	2,50	2,65	1.050	2,80	1.100	2,95	1.125	3,10	1.150	3,25	1.175	3,25	Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi)
Penataan Tata Laksana	Persentase SKPD yang menetapkan SOP pelayanan publik (%)	50	60	100	70	100	80	100	90	100	100	100	100	Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi)
Penataan dan Penguatan Organisasi	Organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (%)	100	100	500	100	500	100	500	-	-	-	-	100	Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi)

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR (2019)	OPD PJ ¹⁾
			2015		2016		2017		2018		2019			
			TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)		
Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	CC	C	550	BB	300	BB	300	B	300	B	550	B	Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi)
Penerapan Reformasi Birokrasi	Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi (%)	-	100	500	-	-	-	-	-	-	-	-	100	Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi)
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Prolegda yang disetujui menjadi Perda (%)	80	80	23.926	80	24.644	80	33.844	80	34.860	80	35.905	80	Sekretariat DPRD
Pembinaan dan Penataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan	Tingkat kemampuan dan pengetahuan aparatur kecamatan kelurahan (%)		Meningkat	12.172	Meningkat	13.389	Meningkat	19.638	Meningkat	21.601	Meningkat	23.762	Meningkat	Kecamatan
Kerjasama Pembangunan	Kerjasama regional dan internasional (termasuk forum-forum dan <i>sister city</i>) yang digiati	12	12	925	13	650	13	650	14	650	14	800	14	Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)
	Jumlah kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga penelitian dalam dan luar negeri	10	11		12		13		14		15		15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Jumlah perusahaan swasta, BUMD yang berkontribusi terhadap pembangunan Kota Bogor.	9	10		11		12		13		14		14	Sekretariat Daerah (Bag. Perekonomian)
Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyusunan produk hukum daerah sesuai perundang-undangan (%)	100	100	1.700	100	1.800	100	1.900	100	2.000	100	2.000	100	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
Penegakan Hukum dan Penerapan HAM	Persentase penanganan perkara perdata, TUN dan HAM (%)	100	100	1.300	100	1.500	100	1.700	100	1.700	100	1.700	100	
	Penilaian penerapan HAM oleh Kementerian	80	83		86		89		92		95		95	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR (2019)	OPD PJ(*)
			2015		2016		2017		2018		2019			
			TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)		
Penelitian Pengembangan	Ketersediaan dokumen penelitian dan pengembangan (%)	100	100	400	100	500	100	500	100	500	100	500	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Pengisian jabatan yang memenuhi standar kompetensi	0,5	0,6	5.239	0,65	7.021	0,7	7.010	0,75	7.017	0,8	7.330	0,8	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian secara lengkap (%)	90	95		95		100		100		100		100	
	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi dasar sesuai kebutuhan (%)	65	70		75		80		85		90		90	
	Gedung pendidikan dan pelatihan	0	0		DED		Pembangunan gedung		Penyediaan sarana prasarana		1		1	
	Jumlah anggota KORPRI yang mendapat pembinaan, pendampingan, bantuan, dan/atau santunan (orang)	245	250	1.500	250	1.500	250	1.600	250	1.600	250	1.650	1.495	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
	Kualitas atlet PNS daerah	Meningkat	Meningkat		Meningkat		Meningkat		Meningkat		Meningkat		Meningkat	
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Pemeringkatan jabatan untuk setiap jabatan pada OPD (%)		50	350	50	250		100	-		-		-	Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi)
	Pengaturan jabatan fungsional dalam rangka pengembangan karir dan profesionalisme aparatur (Kepwal)		1				1							

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR (2019)	OPD PJ ¹⁾
			2015		2016		2017		2018		2019			
			TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)		
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN														
Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan	Jumlah pelaku usaha yang mampu menggunakan teknologi tepat guna (orang)	240	300	796	360	820	420	1.126	480	1.159	540	1.194	540	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
	Jumlah Pengurus UEK SP yang mendapat pelatihan	204	204		204		204		204		204		204	
	Jumlah penerima KUBE Gakin	2.762	2.787		2.812		2.837		2.862		2.887		2.887	
	jumlah santri yang mendapat pelatihan usaha ekonomi syariah	400	500		600		700		800		900		900	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Persentase keswadayaan masyarakat dalam pembangunan	0,7	0,72	11.304	0,73	11.643	0,74	15.990	0,75	16.469	0,76	16.963	0,76	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kecamatan
	Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan yang dilatih	68	68		68		68		68		68		68	
	Pengurus TP-PKK yang dilatih (PKK)	74	74		74		74		74		74		74	
	Kader Pemberdayaan Masyarakat yang dilatih (kader)	340	476		612		748		884		1.020		1.020	
	Kader Pos Daya yang dilatih	68	68		68		68		68		68		68	
	Sarana Administrasi RT/RW Se- Kota Bogor (buku)	2.048	2.505		2.962		3.419		3.876		4.335		4.335	
	Persentase partisipasi masyarakat	80	80		85		85		90		90		90	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR (2019)	OPD PJ(*)
			2015		2016		2017		2018		2019			
			TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)		
	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) (orang per kecamatan)	300	300		300		300		300		300		1.800	Kecamatan
Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan	Jumlah anggota organisasi perempuan yang berperan aktif terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak (orang)	150	250	300	350	300	450	300	550	300	650	300	650	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
	Jumlah lingkungan ramah anak (LRA)	74	80		86		92		98		104		104	
Peningkatan Kreatifitas Masyarakat	Jumlah saung kreatif per kelurahan	0	13	-	13	-	14		14		14		68	Sekretariat Daerah (Bag Kemasyarakatan)
														Dinas Perindustrian &Perdagangan
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase program yang dilaksanakan Kecamatan (%)	80	80	450	80	463	80	636	80	655	80	675	80	Kecamatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
	Masyarakat dan Kelompok Binaan yang mengikuti Lomba Kelurahan (orang)	400	480		560		640		720		800		800	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
Pembinaan dan Penataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah pembinaan di wilayah (kali/tahun)	12	12		12		12		12		12		12	Kecamatan

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR (2019)	OPD PJ ¹⁾
			2015		2016		2017		2018		2019			
			TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)		
STATISTIK														
Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase ketersediaan data/informasi statistik daerah (%)	80	20	300	40	300	60	350	80	350	100	400	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase pemutakhiran data profil kelurahan	80	85		85		87		90		90		90	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
KEARSIPAN														
Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Penataan tata naskah kepegawaian setiap PNS (%)	40	50	160	60	65	70	70	80	75	90	80	90	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Persentase SKPD yang terbina sistem kearsipan (%)		20	500	40	520	60	540	80	560	100	580	100	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah	Jumlah unit kerja yang mengintegrasikan arsipnya dalam pengelolaan Kantor Arsip dan Perpustakaan	15	5	425	7	450	8	480	10	500	12	525	57	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
Tingkat pemeliharaan dan penataan dokumen arsip kepegawaian (%)	40	50		60		70		80		90		90	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Tingkat pemeliharaan dan penataan dokumen arsip kepegawaian (%)
	Tingkat pemeliharaan dan penataan dokumen arsip kepegawaian (%)	40	50		60		70		80		90		90	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR (2019)	OPD PJ ^(*)
			2015		2016		2017		2018		2019			
			TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)		
PERPUSTAKAAN														
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan umum dan keliling	37,000	49,000	743	61,000	743	73,000	817	85,000	871	97,000	930	97,000	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
	Jumlah koleksi buku	44,320	47,620		50,920		54,220		57,520		60,820		60,820	
	jumlah perpustakaan masyarakat	10	11		12		13		14		15		15	
	Jumlah perpustakaan kelurahan	56	57		58		59		60		61		61	
	Jumlah perpustakaan sekolah yang dibina	52	20		20		20		20		20		152	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Perpustakaan bertaraf internasional	0	DED	420	Pembangunan gedung	12.600	Penyediaan sarana prasarana	1.000	1	2.000		1.210	1	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
	Kendaraan perpustakaan keliling	3 unit							3 unit				6 unit	
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	SKPD yang menyediakan informasi publik sesuai Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (%)	10	20	-	40	-	60		80		100		100	Sekretariat Daerah (Bag. Humas)
	Jumlah regulasi tentang implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Perwali)	1	5	17.585	5	19.015	5	23.265		25.240		21.640	16	
Kerjasama Informasi dengan Media Massa				-		-		1,515		1,561		1,608		Sekretariat Daerah (Bag. Humas)
	Pembinaan radio komunitas (kali)	0	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	100%	Kantor Komunikasi dan Informatika
Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah SDM dilatih TIK (orang)	102	100	225	100	225	100	225	100	225	100	225	602	Kantor Komunikasi dan Informatika
	Jumlah jabatan fungsional SDM TIK	0	2	-	2	-	2		2		2		10	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR (2019)	OPD PJ(*)
			2015		2016		2017		2018		2019			
			TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)		
URUSAN PILIHAN														
PERTANIAN														
Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan	Produktivitas Padi (Ton/Ha)	6,2	6,5	3.870	6,6	4.257	6,7	4.683	6,8	5.151	6,9	5.666	6,9	Dinas Pertanian
	Produksi Buah - Buahan (Kw)	122.000	126.000		130.000		134.000		138.000		142.000		142.000	
	Produksi Tanaman Hias (Pot/Tangkai)	556.000	564.000		573.000		581.000		589.000		597.000		597.000	
	Produksi Sayuran (Kw)	369.000	387.000		405.000		424.000		442.000		460.000		460.000	
	Jumlah varietas bibit hasil kultur jaringan	2	4		6		8		10		12		12	
	Jumlah hewan yang dipotong di RPH	174.526	460.080		550.800		623.520		732.240		822.960		822.960	
	Produksi susu (Liter)	1.280.000	1.342.000		1.405.000		1.469.000		1.533.000		1.597.000		1.597.000	
	Jumlah LKMA gapoktan PUAP	0	4		8		12		16		20		20	
	Jumlah Kelompok yang menyusun RDKK Pupuk Bersubsidi	27	30		35		40		45		50		50	
	Jumlah Kelembagaan Sarana dan Prasarana Pertanian	0	5		10		15		20		25		25	
	Produksi Ikan Konsumsi (Ton)	4.238	4.897		5.266		5.647		6.061		6.522		6.522	
	Produksi Benih BBI (Ekor)	150.000	250.000		350.000		550.000		775.000		900.000		900.000	
	Produksi Ikan Hias (Ekor)	14.768.300	16.000.000		17.000.000		18.000.000		19.000.000		20.000.000		20.000.000	
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan serta Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal	Jumlah Hewan Yang Divaksin (Ekor)	202.800	103.000	900	78.200	990	53.400	1.089	28.600	1.198	18.800	1.318	18.800	Dinas Pertanian
	Jumlah obat untuk biosecurity (Liter)	136	544		680		816		952		1.088		1.088	
	Luas Pengendalian Hama/Penyakit Tanaman (Ha)	235	70		45		45		40		35		0	
	Jumlah Sampel Pemeriksaan Produk Pangan hewani	100	160		170		180		190		200		200	
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian,	Jumlah Produk Olahan Hasil Pertanian yang dibina Dinas	10	15	1.982	20	2.180	25	2.398	30	2.638	35	2.902	35	Dinas Pertanian

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR (2019)	OPD PJ(*)
			2015		2016		2017		2018		2019			
			TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)		
Peternakan dan Perikanan	Jumlah Produk Olahan Hasil Peternakan yang dibina Dinas	5	7		10		13		16		19		19	
	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan yang dibina Dinas	9	10		15		20		25		30		30	
	Jumlah komoditas yang dipasarkan di STA	4	6		8		10		12		14		14	
	Jumlah Produk yang dipasarkan di Pasar Tani	10	15		20		25		30		35		35	
	Jumlah komoditas Perikanan yang dipasarkan di depo ikan hias	20	22		24		26		28		30		30	
	Jumlah komoditas Perikanan yang dipasarkan di Depo Pemasaran Hasil Perikanan (Fishmart)	0	20		25		30		35		40		40	
Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pembinaan	60	25	244	25	251	26	259	26	267	26	275	128	Kantor Ketahanan Pangan
PARIWISATA				-		-								
Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	16	16	2.652	17	2.731	17	2.813	18	2.898	18	2.985	18	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	3.769.787	4.146.766		4.561.442		5.017.586		5.519.345		6.071.280		6.071.280	
	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	183.807	202.187		222.406		244.647		269.111		296.023		296.023	
	Persentase peningkatan sarana dan prasarana pendukung pariwisata	0.5	0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		1	
	Jumlah Hotel berfasilitas MICE	6 hotel	1		2		2		2		2		14	
Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah event/pameran yang diikuti (kali per tahun)	6	7	1.469	7	1.513	8	1.558	8	1.605	8	1.653	8	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Badan promosi pariwisata daerah yang terbentuk	Belum ada	Ada	-	ada	-	ada		ada		ada		1	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR (2019)	OPD PJ(*)
			2015		2016		2017		2018		2019			
			TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)		
Pengembangan Kemitraan	Jumlah Kompepar	1	1	-	1	-	1		1		1		6	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Jumlah Koordinasi yang dilakukan (per tahun)	2	3	-	3	-	3		3		3		3	
	Jumlah kerjasama yang dilakukan	1	1	-	1	-	1		1		1		1	
PERDAGANGAN				-		-								
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah kasus yang diselesaikan	115	15	2.343	20	2.413	25	2.486	30	2.560	35	2.637	240	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Jumlah pengawasan barang beredar dan jasa yang dilakukan di pasaran (kali)	32	11		11		11		11		11		87	
	Jumlah Ukur Timbang Takar (UTT)	577	677		777		877		977		1077		1.077	
	Sosialisai perlindungan konsumen	4	2		2		2		2		3		15	
	Haki	200	50		50		50		50		50		450	
	Halal	590	100		100		100		100		100		1.090	
	Tingkat pemantauan dan pengendalian inflasi daerah	100	100		100		100		100		100		100	
Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah kerjasama dengan jaringan			472		486		500		515		531		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Jumlah kegiatan survey pasar	12	12	-	12	-	12		12		12		12	
Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Meningkatnya jumlah produk berkualitas ekspor (komoditi)	19	21	1.650	23	1.699	25	1.750	27	1.802	29	1.857	29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
INDUSTRI				-		-								
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang produktif	700	775	663	850	682	925	703	1.000	724	1.075	746	1.075	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Jumlah industri kreatif	172	192		217		252		292		342		342	
	Jumlah insan kreatif yang menerima penghargaan	1	1		1		2		2		3		3	
	Bogor Creative Forum	0	0		1		1		1		1		1	
	Jumlah komunitas kreatif	10	10		10		10		10		10		60	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR (2019)	OPD PJ ^(*)
			2015		2016		2017		2018		2019			
			TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)		
	Jumlah kelompok pelaku industri yang mendapatkan bantuan permodalan													
Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah IKM yang menerapkan Teknologi	12	5	-	5		5		5		5		37	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah pelatihan kewirausahaan industri kreatif	4	1	716	1	737	1	759	1	782	1	805	9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Jumlah produk berkualitas ekspor	19	2		2		2		2		2		29	
KETRANSMIGRASIAN				-		-								
Pembinaan dan Penempatan Transmigrasi	Jumlah KK calon transmigrasi yang mengikuti transmigrasi	34	3	106	2	109	2	113	2	116	2	119	2	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi

Keterangan:

- OPD yang tercantum sebagai penanggungjawab program (OPD PJ) dapat disesuaikan kembali jika dalam perjalanan periode RPJM terjadi perubahan organisasi. Hal ini dilakukan tanpa harus mengubah dokumen RPJMD ini.

BAB IX
INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja daerah dapat disusun berdasarkan indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*). Indikator kinerja daerah dibagi dalam 3 (tiga) aspek meliputi (i) aspek kesejahteraan masyarakat, (ii) aspek pelayanan umum dan (iii) aspek daya saing daerah. Gambaran lengkap kondisi dan rencana capaian kinerja selama lima tahun Pemerintah Kota Bogor dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IX. 1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bogor

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			THN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	
A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
I. KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI								
I.1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,15	6,26	6,36	6,46	6,56	6,66	6,66
2.	Laju Inflasi	4,06	4,05	4,05	4,05	4,04	4,04	4,04
3.	PDRB per kapita ADHB	20,4	21,7	23,0	24,3	25,5	26,7	26,7
4.	PDRB ADHK	6.063.388,37	6.419.936,37	6.791.108,38	7.176.903,24	7.577.321,36	7.992.362,71	7.992.362,71
5.	Miskin (%)	8,97	8,30	8,19	8,08	7,97	7,86	7,75
6.	IPM	76,70	77,77	78,27	78,77	79,27	79,77	79,77
7.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	9,33	8,44	7,64	6,91	6,26	5,66	5,66
8.	Indeks Gini	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,31	0,31
9.	Indeks Daya Beli (Rp)	67,86	68,89	69,15	69,41	69,67	69,93	69,93
II. FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
II.1 Pendidikan								
1.	Angka Melek Huruf	99,03	99,09	99,15	99,20	99,26	99,32	99,32
II.2 Kesehatan								
1.	Angka Usia Harapan Hidup	69,30	69,41	69,51	69,62	69,73	69,83	69,83

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
			THN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4		TAHUN 5
			B. ASPEK PELAYANAN UMUM						
I. PELAYANAN URUSAN WAJIB									
I.1 Pendidikan									
1.	Angka rata-rata lama sekolah	9,93	9,97	10,02	10,06	10,11	10,15	10,15	
2.	Angka Partisipasi Kasar SD/Paket A	113,33	113,5	113,7	113,8	113,9	114	114	
3.	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	104,66	104,7	104,75	104,8	104,9	105	105	
4.	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/ MA/Paket C	129,00	129,5	130	130,5	131	131,5	131,5	
5.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	97,18	98	98,5	99	99,5	100	100	
6.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	89,60	90	90,5	91	91,5	92	92	
7.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	99,94	99,95	99,96	99,97	99,98	100	100	
8.	Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Sederajat (%)	100	100	100	100	100	100	100	
9.	Angka pendidikan yang ditamatkan SLTP/MTs/Sederajat (%)	100	100	100	100	100	100	100	
10.	Angka pendidikan yang ditamatkan SLTA/MA/SMK/Sederajat (%)	100	100	100	100	100	100	100	
11.	Kualifikasi tenaga pendidik sekurang-kurangnya S1/DIV (orang)	(72,14)	72,15	72,16	72,17	72,18	72,19	72,19	
12.	Rasio rombel dengan ruang kelas SD	1 : 1,64	1 : 1,51	1 : 1,38	1 : 1,26	1 : 1,13	1 : 1	1 : 1	
13.	Rasio rombel dengan ruang kelas SMP	1:1,05	1:1,04	1 : 1,03	1 : 1,02	1 : 1,01	1 : 1	1 : 1	
14.	Rasio rombel dengan ruang kelas SMA/SMK	1 : 1,12	1 : 1,10	1 : 1,08	1 : 1,06	1 : 1,04	1 : 1	1 : 1	
15.	Sekolah kondisi bangunan baik	91,6	91,7	91,8	91,9	92	92,1	92,1	

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			THN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	
16.	Persentase sekolah yang memiliki Lab IPA (SMP, SMA) dengan sarana prasarana yang baik	54,03%	55%	56%	57%	58%	59%	59%
17.	APK PAUD usia 4-6 tahun	65,19%	70%	73%	77%	79%	80%	80%
18.	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan anak Usia Dini	22,7%	23%	24	25%	26%	27%	27%
I.2 Kesehatan								
1.	Prevalensi HIV/AIDS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
2.	Persentase balita gizi buruk	0,47	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
3.	Jumlah Balita Gizi Buruk	378	350	340	330	320	300	300
4.	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	13	12	11	10	10	10	10
5.	Angka Kematian Bayi (AKB)	62	58	55	53	51	49	49
6.	Angka kematian balita	62	61,5	61	60,5	60	59	59
7.	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100	100
8.	Persentase Pasien Gakin yang terlayani di pelayanan dasar dan rujukan	100	100	100	100	100	100	100
9.	Rasio Puskesmas per satuan penduduk (per 30.000 penduduk)	0,72	0,72	0,71	0,71	0,7	0,7	0,7
10.	Rasio klinik yang memenuhi persyaratan per 25.000 penduduk	3,38	3,44	3,57	3,70	3,82	3,92	3,92
11.	Rasio Pustu per satuan penduduk	0,87	0,96	0,96	1,02	1,07	1,11	1,11
12.	Rasio dokter per 100.000 penduduk	7,96	8,52	9,04	9,53	11,23	11,88	11,88
13.	Rasio bidan per satuan penduduk	11,15	11,42	11,68	11,82	11,95	12,06	12,06
14.	Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk	0,006	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
15.	Rasio perawat per satuan penduduk	10,85	11,71	12,53	13,29	14	14,65	14,65
16.	Akreditasi Rumah Sakit	0	1	1	1	1	1	1

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			THN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	
17.	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	95,97	96	96,5	97	97,5	98	98
18.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	75,61	76	77	78	79	80	80
19.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	91,99	92	92,5	93	93,5	94	94
20.	Cakupan pelayanan nifas	95,68	96	96,5	97	97,5	98	98
21.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	54,5	60	63	65	68	69	70
22.	Cakupan kunjungan bayi	94,96	95,5	96	96,5	97	97,5	97,5
23.	Cakupan peserta KB Aktif	60,07	68,16	75,64	82,62	89,11	95,22	95,11
24.	Cakupan pelayanan anak balita	86,6	91	92	93	94	95	94
25.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	14	30	50	70	80	100	100
26.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100	100
27.	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	96,86	100	100	100	100	100	100
28.	Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	100	100	100	100	100	100	100
29.	Persentase penemuan pnemonia balita	78,6	80	85	90	95	100	100
30.	Persentase penemuan pasien baru TB. BTA (positif)	91,4	81	82	83	84	85	85
31.	Persentase penderita DBD yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100
32.	Persentase penanganan penderita diare	70,4	75	80	85	90	95	95
33.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	100	100	100	100	100	100	100

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			THN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	
34.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100	100	100	100	100
35.	Cakupan desa/kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100	100	100	100	100	100
36.	Cakupan desa/kelurahan siaga aktif	68	68	68	68	68	68	68
37.	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	75	77	79	81	83	85	85
I.3. Pekerjaan Umum								
1.	Jumlah danau/situ dan kolam retensi berkondisi baik.	5	5	6	6	7	7	7
2.	Panjang saluran, sungai dan jaringan irigasi dengan kapasitas memadai dan berkondisi baik (km)	174,54	176,54	178,54	180,54	182,54	184,54	184,54
3.	Persentase panjang jalan berkondisi mantap (baik & sedang) dari seluruh panjang jalan (%)	86	86,5	87	87,5	88	88,5	88,5
4.	Jumlah rumah tangga berakses air minum bersih (non PDAM)	840	500	500	500	500	500	2500
5.	Cakupan rumah tangga yang dilayani Sanimas (SR)	4.700	6.200	7.700	9.200	10.700	12.200	12.200
6.	Jumlah TPU yang tertata dengan baik (lokasi)	8	8	8	8	8	8	8
9.	Jumlah PJU baru	12.000	13.000	14.000	14.500	15.000	15.500	15.500
10.	Persentase pemeliharaan PJU	100	100	100	100	100	100	100
11.	Penambahan jumlah sambungan IPAL ke rumah penduduk (SR)	381	50	70	100			601

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			THN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	
I.4. Perumahan Rakyat								
1.	Jumlah lingkungan pemukiman kumuh	43	3	3	3	3	3	28
2.	Rumah layak huni	-	272	340	408	476	544	544
I.5. Lingkungan Hidup								
1.	Persentase penanganan sampah (terangkut & 3R)	73,57	74,87	76,17	77,47	78,77	80,07	80,07
2.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
3.	Wilayah layanan persampahan	70,4%	71,4%	72,4%	73,4%	74,4%	75,4%	75,4%
4.	Jumlah Taman yang tertata dengan baik	200	12	12	12	12	12	260
5.	Persentase titik lokasi eks PKL yang difungsikan sebagai RTH	16	1	1	1	1	1	21
6.	Persentase usaha/kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan yang sudah melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan pengelolaan lingkungan	-	20	40	60	80	100	100
7.	Persentase penegakan hukum	-	50	60	70	80	100	100
8.	Jumlah sekolah yang dibina untuk menjadi sekolah berbudaya lingkungan	50	60	70	80	90	100	100
9.	Jumlah hutan kota yang terbangun (unit)	1	-	1	1	1	1	1
10.	Jumlah mata air yang dilindungi	34	8	8	8	8	8	74
11.	Jumlah bangunan konservasi air tanah (sumur resapan, sumur pantau, sumur imbuhan, sumur bioretensi) (unit)	1,306	100	100	100	100	100	1,806
12.	Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau penggunaan air tanah	180	200	200	200	200	200	200

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			THN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	
13.	Jumlah perusahaan yang memiliki IPLC	30	5	5	5	5	5	65
I.6. Kependudukan dan Catatan Sipil								
1.	Cakupan penerbitan KK	100	100	100	100	100	100	100
2.	Cakupan penerbitan KTP	82	83	84	85	86	87	87
3.	Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	57	63	72	79	86	92	92
4.	Cakupan penerbitan Kutipan akta kematian	5	7	10	12	15	17	17
I.7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	67	72	73	73	74	74	74
2.	Indeks Pembangunan Gender (IDG)	66	68	70	72	74	76	76
3.	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan (%)	110	130	150	170	190	210	210
4.	Tingkat pendidikan SLTP/MTs/Sederajat yang ditamatkan perempuan (%)	50	55	60	65	70	75	75
5.	Tingkat pendidikan SMU/MA/Sederajat yang ditamatkan perempuan (%)	48	52	56	60	64	68	68
I.8. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera								
1.	Jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I	68.837	67.837	66.837	65.837	64.837	63.837	63.837
2.	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	111.183	120.183	129.183	138.183	147.183	156.183	156.183
3.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	6.485	6.535	6.585	6.635	6.685	6.735	6.735
4.	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	223	243	263	283	303	323	323

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			THN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	
5.	Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan	68	68	68	68	68	68	68
6.	Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan	68	68	68	68	68	68	68
7.	Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
I.9. Sosial								
1.	Jumlah Lembaga Keagamaan yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	1.392	1.532	1.685	1.853	2.038	2.242	2.242
2.	Persentase panti jompo dan anak yang terkelola dengan baik	88	90	92	94	96	98	98
3.	Jumlah lanjut usia yang menerima bantuan	50	180	180	180	180	180	950
4.	Jumlah penyandang cacat yang menerima bantuan	110	100	100	100	100	100	610
5.	Persentase Korban bencana yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100
6.	Jumlah Anjal Gepeng, PSK yang ditangani:							
i.	Anjal	123	125	129	132	135	138	138
ii.	Gepeng	186	190	195	200	205	210	210
iii.	PSK	98	100	104	107	110	113	113
7.	Jumlah WKSBM di Kota Bogor yang terbentuk	16	10	10	10	10	12	68
8.	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	18.690	19.064	19.445	19.834	20.231	20.635	20.635
9.	PMKS yang ditangani	18.943	19.322	19.708	20.102	20.505	20.915	20.915
10.	PSM yang aktif	100	125	150	175	200	225	250

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			THN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	
11.	Karang Taruna yang aktif	20	10	10	10	10	10	70
12.	Persentase makam pahlawan yang dipelihara	100	100	100	100	100	100	100
13.	Persentase korban bencana yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100
I.10. Ketenagakerjaan								
1.	Jumlah penyerapan tenaga kerja	1.308	1.347	1.387	1.428	1.470	1.514	1.514
2.	Upah Minimum Kota sesuai Kriteria Hidup Layak (Rp)	2.002.000	2.493.941	2.634.632	2.775.773	2.916.914	3.058.055	3.058.055
I.11. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah								
1.	Jumlah UMKM yang produktif	11.297	12.427	13.669	15.036	16.540	18.194	18.194
2.	Jumlah Koperasi aktif	301	85	85	85	85	85	726
3.	Jumlah produk yang tersertifikasi yang dihasilkan UMKM:							
	a. Halal	590	100	100	100	100	100	1090
	b. Haki	200	50	50	50	50	50	450
I.12. Penanaman Modal								
1.	Nilai realisasi PMA dan PMDN (dalam Miliar Rupiah)	3.583	3.941	4.335	4.769	5.246	5.770	5.770
I.13. Kebudayaan								
1.	Jumlah grup seni budaya yang aktif	40	42	45	48	50	52	52
2.	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan Perda	0	0	0	0	0	1	1
3.	Jumlah gelar budaya	30	32	33	33	34	36	168
I.14. Kepemudaan dan Olahraga								
1.	Jumlah organisasi pemuda yang dibina	68	68	68	68	68	68	68
2.	Jumlah Atlet yang berprestasi:							
	a. POPDA	52	0	55	0	60	0	60
	b. POPWIL	17	20	0	22	0	22	22
3.	Jumlah sarana dan prasarana olahraga	379	381	383	385	387	389	389
4.	Persentase keikutsertaan pada cabang olahraga							

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			THN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	
	dalam event olahraga Tingkat Wilayah dan Provinsi (%):							
	a. POPDA	60	0	85	0	90	0	90
	b. POPWIL	100	100	0	100	0	100	100
I.15. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
1.	Jumlah LSM, ORMAS dan OKP yang dibina (kegiatan)	1	1	1	1	1	1	5
I.17. Kemasyarakatan								
1.	Jumlah qori/qorih	30	45	60	75	90	105	105
2.	Jumlah tempat ibadah yang mendapatkan bantuan	154	167	180	193	206	219	219
3.	Jumlah zakat terkumpul di BAZ (Rp milyar)	3.515.154.578	4.015.154.578	4.515.154.578	5.015.154.578	5.515.154.578	6.015.154.578	6.015.154.578
4.	Jumlah TPQ dan MDA	39	39	39	45	45	51	51
I.18. Statistik								
1.	<i>Database</i> yang valid, mudah diakses dan termutakhirkan secara rutin (OPD)	12	18	26	32	38	44	44
I.19. Perpustakaan								
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan umum dan keliling (orang)	37.000	49.000	61.000	73.000	85.000	97.000	97.000
I.20. Komunikasi dan Informatika								
1.	Jumlah Pengembangan Infrastruktur Jaringan telekomunikasi (titik)	10	20	45	45	46	46	212
2.	Jumlah pembangunan dan pengembangan Control Room (paket)	1	-	1	-	-	1	1
3.	Pengembangan aplikasi sistem informasi manajemen (SIM)	23	5	5	5	5	5	48

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			THN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	
II.	PELAYANAN URUSAN PILIHAN							
II.1.	Pertanian							
1.	Produksi Tanaman Hias (Tangkai/Pot)	556.000	564.000	573.000	581.00	589.000	597.000	597.000
2.	Produksi Ikan Hias (Ekor)	14.768.300	16.000.000	17.000.000	18.000.000	19.000.000	20.000.000	20.000.000
3.	Jumlah hewan yang dipotong di RPH (Ekor)	174.526	460.080	550.800	623.520	732.240	822.960	822.960
4.	Jumlah produk olahan pertanian binaan	24	32	45	58	71	84	84
5.	Produk hasil pertanian binaan yang dipasarkan	34	63	77	91	105	119	119
II.2.	Pariwisata							
1.	Jumlah Kunjungan Wiasatawan Nusantara	3.769.787	4.146.766	4.561.442	5.017.586	5.519.345	6.071.280	6.071.280
2.	Jumlah junjungan Wiasatawan Mancanegara	183.807	202.188	222.406	244.647	269.112	296.023	296.023
3.	Jumlah Kompepar	1	1	1	1	1	1	6
II.3.	Industri							
1.	Jumlah sentra IKM	0	1	1	1	1	1	5
2.	Jumlah Industri kreatif	172	192	217	252	292	342	342
3.	Jumlah IKM yang produktif	700	775	850	925	1,000	1,075	1,075
II.4.	Perdagangan							
1.	Peningkatan nilai ekspor	19	21	23	25	27	29	20
C. DAYA SAING DAERAH								
I.	KEMAMPUAN EKONOMI							
1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	658,45	660,95	663,45	665,96	668,96	670,96	670,96
3.	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	395.070	396.570	398.070	399.576	401.076	402.576	402.576
II.	FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR							
II.1.	Perhubungan							
1.	Jumlah Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana	4	12	14	17	14	11	72

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			THN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	
	dan Sarana Perhubungan							
2.	Persentase Lulus Uji Kendaraan Bermotor Wajib Uji	97,50	97,80	98,10	98,40	98,70	99,00	99,00
3.	Rata-rata waktu tempuh di lokasi rawan kemacetan (menit/km)	2,99	2,91	2,83	2,75	2,68	2,61	2,61
4.	Operasional Koridor Angkutan Massal (koridor Trans Pakuan)	3	4	5	6	7	7	7
II.2. Penataan Ruang								
1.	Kesesuaian antara IMB dengan bangunan dilapangan (%)	90	90	92	94	96	98	98
2.	Tindak lanjut atas pengaduan pelanggaran tata ruang	100	100	100	100	100	100	100
3.	Tingkat konsistensi pemanfaatan ruang (%)	0	90	90	90	90	90	90
II.3. Sumberdaya Manusia								
1.	Rasio lulusan S1/S2/S3	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21	0,23	0,23

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN

X.1. PEDOMAN TRANSISI

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD ini berakhir, maka RPJMD Kota Bogor 2015-2019 menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan walikota dan wakil walikota terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD walikota dan wakil walikota terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya yaitu pada tahun 2019-2020.

Melalui pedoman transisi ini, maka diharapkan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD ini dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru dapat terselesaikan.

X.2. KAJIDAH PELAKSANAAN

Guna mendukung efektifitas dan efisiensi implementasi RPJMD, maka diperlukan:

1. Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD, yang mana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bogor berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Bogor tahun 2015-2019 yang nantinya akan menjadi pedoman di dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor;
2. Walikota dan Wakil Walikota Kota Bogor berkewajiban mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kota Bogor tahun 2015-2019 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
3. Walikota dan Wakil Walikota Kota Bogor berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Bogor tahun 2015-2019 kepada masyarakat;
4. Pengendalian dan evaluasi kinerja pencapaian program RPJMD Kota Bogor tahun 2015-2019 dilakukan oleh Bappeda secara berkala;
5. Penyusunan RKPD Kota Bogor pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 berpedoman pada RPJMD Kota Bogor tahun 2015-2019;
6. Penguatan kemampuan dan kapasitas DPRD untuk memantau dan mengevaluasi RPJMD;
7. Penguatan kemampuan dan kapasitas pihak non pemerintah (*non government stakeholders*) untuk memantau dan mengevaluasi implementasi RPJMD.

Sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD ini dapat dicapai selama ada sinergitas usaha antara SKPD dan seluruh komponen masyarakat termasuk dunia usaha. Oleh karena itulah SKPD serta para pemangku kepentingan wajib melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya dan Bappeda wajib melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD dalam Renstra SKPD.

Dalam proses pelaksanaannya, dimungkinkan dilakukan perubahan RPJMD sepanjang terjadi perubahan-perubahan yang mendasar mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan. Termasuk perubahan kebijakan ini adalah kebijakan nasional dan kebijakan daerah seperti Rencana Tata Ruang Wilayah yang menjadi acuan penyusunan RPJMD. Perubahan RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah, kecuali perubahan pada capaian sasaran tahunan yang tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

WALIKOTA BOGOR,
ttd.
BIMA ARYA